



**TRANSFORMASI
KINERJA
PERUSAHAAN UNTUK
KEBERLANJUTAN**
*Transforming Company
Performance for
Sustainability*

AKHLAK

LAPORAN TAHUNAN **2023**
Annual Report

www.pelniservices.com



Transformasi Kinerja Perusahaan untuk Keberlanjutan *Transforming Company Performance for Sustainability*

Mengelola transformasi merupakan bagian penting dalam mempertahankan kinerja terbaik. Membuatnya terus bertahan, dan meningkat, adalah upaya mendukung terciptanya kepuasan pelanggan dan komitmen yang lebih tinggi.

Managing transformation is an important part of sustaining top performance. Making it last, and improve, is about supporting higher customer satisfaction and commitment.

Perencanaan strategis menjadi pondasi meluluskan target dan kinerja yang unggul. Pijakan yang stabil membuat kenaikan menjadi pasti.

Strategic planning is the foundation for passing targets and superior performance. A stable footing makes ascension certain.

PID memastikan komitmen untuk maju bertahap, konsisten, dan menguat tanpa batas. Dari semua aspek, peningkatan kinerja turut andil membuat kokoh tiang pancang PID maju dan tumbuh bersama menjadi titik yang terus dituju untuk melekatkan pelanggan.

PID ensures the commitment to progress gradually, consistently, and infinitely stronger. From all aspects, performance improvement contributes to making PID's sturdy pillars advance and grow together to become the point to which customers continue to attach.

► **Kesinambungan Tema / Theme Continuity**



2019

Optimalisasi Sumberdaya untuk Keberlanjutan /
Resource Optimization for Sustainability



2020

Survival PT PID di Tengah Situasi Pandemi /
PT PID's Survival in the Midst of Pandemic Situation



2021

Memperkokoh Kinerja dan Pelayanan untuk Keberlanjutan /
Strengthening Performance and Service for Sustainability



2022

Solid dan Fokus Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan /
Solid and Focused on Maintaining Sustainable Growth

2023



Transformasi Kinerja Perusahaan untuk Keberlanjutan *Transforming Company Performance for Sustainability*

| | |
|--|----|
| • Tema / <i>Theme</i> | 1 |
| • Kesenambungan Tema / <i>Theme Continuity</i> | 2 |
| • Daftar Isi / <i>Table of Contents</i> | 4 |
| • Tentang Laporan Tahunan 2023 / <i>About the 2023 Annual Report</i> | 6 |
| • Kinerja Tahun 2023 / <i>Performance in 2023</i> | 8 |
| • Ikhtisar Kinerja Tahun 2023 / <i>2023 Performance Overview</i> | 10 |

12-61

BAB 1

**PROFIL PERUSAHAAN /
COMPANY PROFILE**

| | | | |
|--|----|--|----|
| • Kilas Kinerja / <i>Performance Flashback</i> | 14 | • Identitas Perusahaan / <i>Company Identity</i> | 38 |
| • Sambutan Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Greetings</i> | 16 | • Sekilas Perusahaan / <i>Company Overview</i> | 40 |
| • Dewan Komisaris / <i>Board of Comimssioners</i> | 20 | • Jejak Langkah / <i>Milestone</i> | 44 |
| • Profil Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Profile</i> | 22 | • Visi dan Misi / <i>Vision and Mission</i> | 46 |
| • Sambutan Direksi / <i>Board of Directors Greetings</i> | 24 | • Budaya Perusahaan / <i>Corporate Culture</i> | 47 |
| • Profil Direksi / <i>Board of Directors Profile</i> | 30 | • Kegiatan Perusahaan / <i>Company Activities</i> | 48 |
| • Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 / <i>Statement of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Regarding Responsibility for the 2023 Annual Report</i> | 36 | • Kegiatan Usaha / <i>Business Activities</i> | 49 |
| | | • Struktur Organisasi / <i>Organization Structure</i> | 60 |
| | | • Sertifikasi Perusahaan / <i>Company Certifications</i> | 61 |

62-81

BAB 2

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN / MANAGEMENT
DISCUSSION AND ANALYSIS**

| | | | |
|--|----|---|----|
| • Realisasi Pendapatan Usaha / <i>Realization of Business Revenue</i> | 68 | • Prospek Usaha / <i>Business Outlook</i> | 79 |
| • Biaya Usaha / <i>Business Expenses</i> | 70 | • Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) / <i>Employee and/or Management Share Ownership Program implemented by the Company (ESOP/MSOP)</i> | 80 |
| • Laba Usaha / <i>Operating Profit</i> | 71 | | |
| • Capaian Posisi Keuangan / <i>Financial Position Outcome</i> | 72 | • Informasi Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi / <i>Information on Material Transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties</i> | 80 |
| • Capaian Penerimaan dan Pengeluaran Kas (<i>Cash Flow</i>) / <i>Achievement of Cash Receipt and Expenditure (Cash Flow)</i> | 74 | | |
| • Capaian Investasi / <i>Investment Achievement</i> | 75 | | |
| • Kinerja Entitas / <i>Entity Performance</i> | 76 | | |
| • Kelangsungan Usaha / <i>Business Continuity</i> | 78 | | |

82-99

BAB 3

**SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) / HUMAN RESOUCERS
(HR)**

| | |
|--|----|
| • Profil Sumber Daya Kami / <i>Our Resource Profile</i> | 85 |
| • Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia / <i>HR Development Roadmap</i> | 87 |
| • Pelatihan / <i>Training</i> | 92 |
| • Sistem Manajemen Kerja / <i>Performance Management System</i> | 94 |

100-113

BAB 4

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY REPORT

- Tata Kelola Teknologi Informasi PT PID - *IT Governance / PT PID Information Technology Governance - IT Governance* 104
- Website Corporate / *Corporate Website* 106
- Aplikasi Sistem Keuangan SAP / *SAP Financial System Application* 108
- Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (E-Mail) / *Technical Management of Electronic Mail (E-Mail)* 110

114-183

BAB 5

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK / GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Dasar dan Penerapan GCG / *Basis and Implementation of GCG* 117
- Pelaksanaan GCG / *GCG Implementation* 118
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / *General Meeting of Shareholders (GMS)* 123
- Dewan Komisaris / *Board of Commissioners* 131
- Komite Audit / *Audit Committee* 139
- Komite Kebijakan Risiko / *Risk Policy Committee* 144
- Direksi / *Board of Directors* 148
- Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary* 154
- Profil SPI / *SPI Profile* 161
- Manajemen Risiko / *Risk Management* 168
- Perkara Penting / *Important Matters* 177
- Whistleblowing System / *Whistleblowing System* 179
- Kebijakan Anti Korupsi / *Anti-Corruption Policy* 181
- Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan / *Management and Employee Share Ownership Program* 182

184-205

BAB 6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial / *Commitment to Social Responsibility* 186
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia / *Corporate Social Responsibility Related to Human Rights* 189
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil / *Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations* 193
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Lingkungan Hidup / *Corporate Social Responsibility Related to the Environment* 197
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pelanggan / *Corporate Social Responsibility towards Customers* 201
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Sosial Kemasyarakatan / *Corporate Social Responsibility Related to Social Community* 203

206

BAB 7

LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL REPORT

Selamat Datang di Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (selanjutnya disingkat PID) tahun 2023. Laporan ini merupakan komitmen kami untuk terus berupaya menyajikan informasi kinerja. Kami berharap Laporan Tahunan ini dapat memberikan kemudahan membaca informasi tentang Kinerja PID tahun 2023 dan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Isi Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan ini berdasarkan aspek-aspek yang materialitas dan penting sebagai isi laporan, yang mencakup Profil Perusahaan, Laporan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Keuangan berstandarisasi PSAK, serta informasi lain yang dapat mempengaruhi Pengambilan Keputusan pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai pernyataan prospektif dalam laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan.

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan Tahunan PID menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup Nasional.

Periode Laporan

Laporan Tahunan ini merupakan dokumentasi kinerja PID selama satu tahun pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023.





Welcome to the 2023 Annual Report of PT Pelita Indonesia Djaya (hereinafter abbreviated as PID). This report is our commitment to continuously strive to present performance information. We hope that this Annual Report can provide ease of reading information about PID's performance in 2023 and can provide added value to stakeholders.

Report Content

The preparation of this Annual Report is based on aspects that are material and important as the content of the report, which includes the Company Profile, Management Report, Corporate Governance, Management Discussion and Analysis, PSAK standardized Financial Statements, as well as other information that can affect stakeholder decision making.

This Annual Report contains statements regarding the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in accordance with applicable laws. Various prospective statements in this Annual report are based on assumptions about current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment.

The references and standards used in the preparation of PID's Annual report utilize standard parameters and criteria applicable in Indonesia, where the Company conducts its business activities.

In order to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), the submission of this report also refers to the guidelines for governance practices that apply in the National scope.

Report Period

This Annual Report is a documentation of PID's performance for one year in the period January 1 to December 31, 2023.

Kinerja Tahun 2023 / Performance in 2023

Pada tahun 2023 Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Standar Akuntansi serta Interpretasi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan penerapan yang relevan dan efektif. Pada kondisi pertumbuhan ekonomi 5,04% dengan inflasi 2,61% perseroan tetap mampu mencatat realisasi Pendapatan Usaha Bersih sebesar Rp565.986 juta atau naik 23,70% dari Pendapatan Usaha Bersih tahun 2022 Rp457.259 juta.

In 2023 the Company and its subsidiaries have implemented Accounting Standards and Interpretations in accordance with the rules issued by Indonesian Institute of Accountants (IAI) with relevant and effective implementation. In the condition of economic growth of 5.04% with inflation of 2.61%, the company was still able to record the realization of Net Operating Income of Rp565,986 million or an increase of 23.70% from Net Operating Income in 2022 of Rp457,259 million.

**PENDAPATAN USAHA /
BUSINESS INCOME**

Rp565.986 juta

Pendapatan usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 565.986 juta atau 87,70% dari anggaran. / *Operating income in 2023 was realized at Rp 565,986 million or 87.70% of the budget.*

**LABA USAHA TAHUN BERJALAN /
OPERATING PROFIT FOR THE YEAR**

Rp91.831 juta

Laba usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp91.831 juta atau 89,97% dari anggaran. / *Operating profit in 2023 was realized at Rp91,831 million or 89.97% of the budget.*

**TOTAL ASET /
TOTAL ASSETS**

Rp328.319 juta

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp328.319 juta atau 98,40% dari anggaran. / *Total Assets as of December 31, 2023 amounted to Rp328,319 million or 98.40% of the budget.*

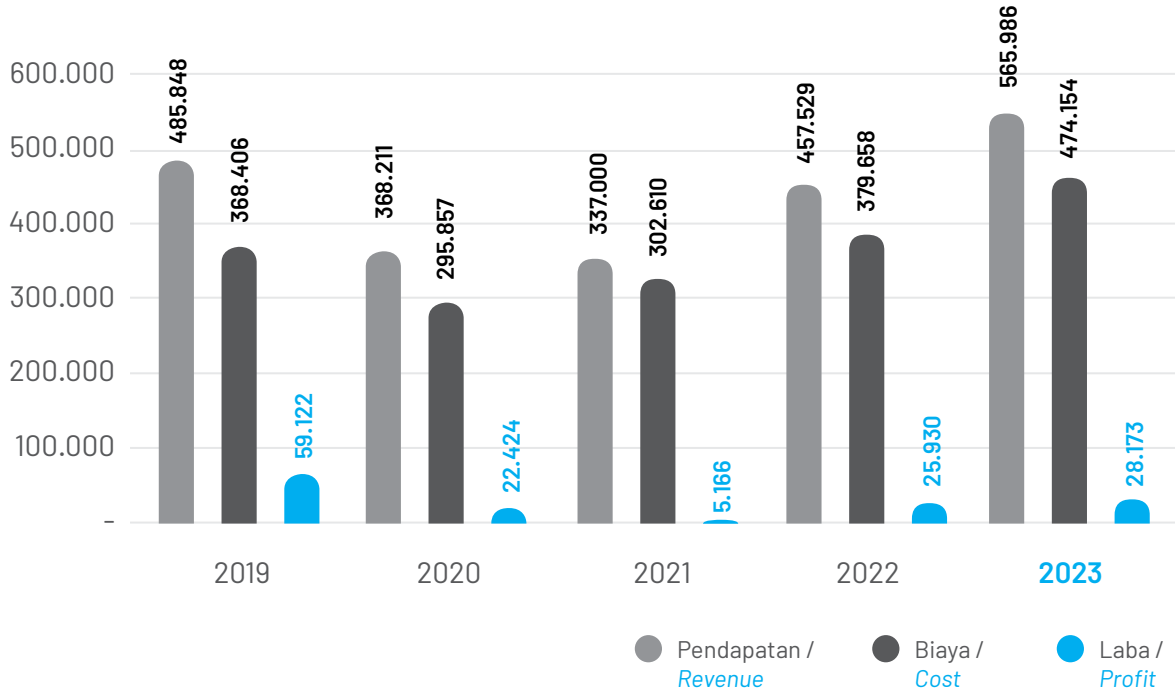
Ikhtisar Kinerja Tahun 2023 / Year 2023 Performance Overview

(dalam satuan Juta Rupiah / in Million Rupiah)

| URAIAN / DESCRIPTION | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT (LOSS) | | | | | |
| Pendapatan Usaha / Business Income | 485.848 | 368.211 | 337.000 | 457.529 | 565.986 |
| Biaya Usaha / Operating Expenses | (368.406) | (295.857) | (302.610) | (379.658) | (474.954) |
| Laba Kotor / Gross Profit | 117.441 | 72.354 | 34.390 | 77.871 | 91.831 |
| Beban Administrasi dan Umum/ Administrative and General Expenses | (36.413) | (41.527) | (45.759) | (51.143) | 61.030 |
| Laba Usaha / Operating Profit | 81.028 | 30.827 | (11.370) | 26.728 | 30.802 |
| Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih / Net Non-Operating Income (Expense) | (1.686) | (733) | 15.666 | 6.898 | 7.879 |
| Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax | 79.343 | 30.093 | 4.297 | 33.626 | 38.681 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN / INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) | | | | | |
| Pajak Kini / Current Tax | (20.487) | (7.754) | 869 | (8.092) | (10.928) |
| Pajak Tangguhan / Deferred Tax | 266 | 85 | - | 397 | 420 |
| Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year | 59.122 | 22.424 | 5.166 | 25.930 | 25.173 |
| Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income | 769 | (29) | - | - | 300 |
| Jumlah Laba Komprehensif / Total Comprehensive Income | 58.353 | 22.454 | 5.166 | 25.930 | 28.172 |
| Hak Minoritas / Minority Rights | (14) | 44 | (6) | (5) | (8) |
| Laba Rugi Konsolidasian / Consolidated Profit or Loss | 59.108 | 22.468 | 5.160 | 25.925 | 28.164 |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION | | | | | |
| Aset Lancar / Current Assets | 229.825 | 227.267 | 220.401 | 256.231 | 254.966 |
| Aset Tidak lancar / Non-current Assets | 40.757 | 43.314 | 47.395 | 77.421 | 73.253 |
| Total Aset / Total Assets | 270.581* | 271.142* | 284.838 | 333.651 | 328.319 |
| Liabilitas Jangka Pendek / Short-term Liabilities | 54.409 | 97.133 | 114.358 | 134.697 | 103.206 |
| Liabilitas Jangka Panjang / Long-term Liabilities | 11.347 | 33.594 | 11.621 | 12.160 | 8.215 |
| Total Liabilitas / Total Liabilities | 65.755 | 130.726 | 125.978 | 146.857 | 111.421 |
| Modal Kerja / Working Capital | 181.133 | 139.586 | 158.733 | 186.663 | 215.322 |
| Kepentingan Non Pengendali / Non-controlling Interest | 105 | 269 | 127 | 132 | 95 |
| Total Ekuitas / Total Equity | 118.238 | 139.855 | 158.860 | 186.794 | 215.517 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity | 270.581 | 271.142 | 284.838 | 333.651 | 328.319 |
| LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS | | | | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flow from Operating Activities | 35.371 | (5.026) | 31.008 | 7.226 | (5.896) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities | (17.518) | (18.955) | (14.669) | (8.458) | 3.477 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities | (1.435) | (2.627) | (4.671) | (5.477) | 22.055 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas / Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents | 5.442 | 13.789 | (24.367) | (11.1520) | 19.637 |
| Saldo Awal Kas dan Setara Kas / Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents | 21.779 | 27.221 | 41.067 | 33.950 | 22.793 |
| Saldo Akhir Kas dan Setara Kas / Ending Balance of Cash and Cash Equivalents | 41.009 | 16.700 | 33.950 | 22.793 | 42.429 |
| RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIOS | | | | | |
| Gross Profit Margin | 20,84% | 23,68% | 19,62% | 16,68% | 15,95% |
| Operating Profit Margin | 14,09% | 16,40% | 1,53% | 5,67% | 16,23% |
| Net Profit Margin | 10,48% | 12,17% | 6,09% | 5,67% | 4,98% |
| EBITDA Margin | 13,27% | 16,83% | 8,83% | 7,10% | 5,74% |
| Net Return on Investment | 21,92% | 31,90% | 12,25% | 9,75% | 15,62% |
| Net Return on Equity | 34,11% | 67,16% | 17,94% | 20,74% | 15,05% |
| Dept to Equity Ratio | 55,61% | 83,54% | 76,84% | 78,46% | 52,48% |
| Dept to Total Asset | 35,74% | 45,52% | 43,45% | 43,96% | 34,42% |
| Current Ratio | 271,37% | 266,77% | 228,02% | 192,51% | 247,05% |
| Total Asset Turn Over | 209,06% | 179,99% | 139,04% | 140,10% | 175,41% |

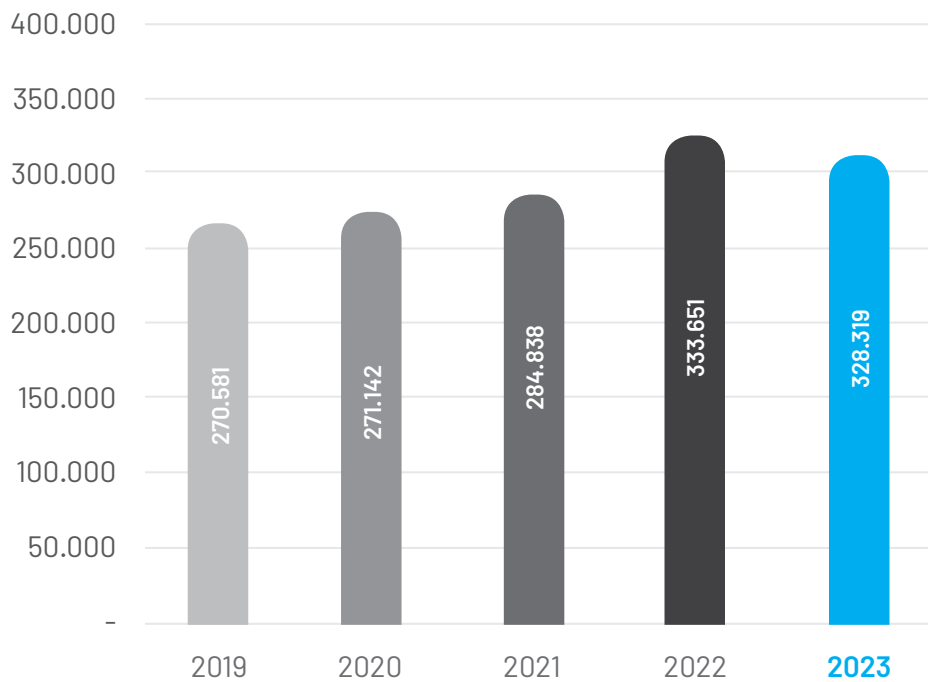
Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba Konsolidasi Perusahaan
Development of the Company's Consolidated Revenue, Cost and Profit

(dalam satuan Juta Rupiah / *in Million Rupiah*)



Perkembangan Aset Perusahaan / Company Asset Development

(dalam satuan Juta Rupiah / *in Million Rupiah*)







1

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

PELNI Services bergerak di bidang jasa penunjang operasional kapal atau *ship chandler* yang meliputi supply bahan makan, perbekalan dan perlengkapan, serta jasa outsourcing, jasa pemeliharaan kapal dan alat keselamatan, penyewaan kendaraan, sewa kapal phinisi, dan teknologi informasi.

PELNI Services is engaged in ship operational support services or ship chandler which includes the supply of food, supplies and equipment, as well as outsourcing services, ship maintenance services and safety equipment, vehicle rental, phinisi boat rental, and information technology.

Kilas Kinerja / *Performance Flashback*

Keunggulan PT PID: / *Advantages of PT PID:*

- Revitalisasi layanan jasa untuk menaikkan *customer value* (kecepatan, ketepatan, efisiensi, keandalan); / *Revitalization of services to increase customer value (speed, accuracy, efficiency, reliability);*
- Percepatan akuisisi pasar melalui keunggulan kompetitif; / *Acceleration of market acquisition through competitive advantage;*
- Optimalisasi jaringan bisnis untuk meningkatkan *coverage area* pelayanan dan sekaligus mengimbangi ekspansi pesaing; / *Optimization of business networks to increase service area coverage and at the same time offset competitor expansion;*
- *Equal treatment* dalam menyusun *service level* dengan para mitra bisnis; / *Equal treatment in developing service levels with business partners;*

- Membangun sistem operasi berbasis proses bisnis yang efisien; / *Building an efficient business process-based operating system;*

- *Brand building dan repositioning ke layanan jasa pelayanan; / Brand building and repositioning to services;*

- Layanan Terintegrasi: Menawarkan berbagai layanan, mulai dari *supply* bahan makanan hingga pemeliharaan kapal, untuk memudahkan klien memenuhi kebutuhan operasional
Integrated Services; / Offering various services, from food supply to ship maintenance, to help clients meet their operational needs

- Memiliki *customer based* dilingkup industrinya. / *Having customer based in the industry.*

**Sambutan Dewan
Komisaris /
Board of Comimssioners
Greetings**



Mardiyanto
Komisaris Utama /
President Commissioner

“

Prestasi yang membanggakan ini sekaligus menunjukkan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik dari Direksi sehingga seluruh peluang bisnis yang ada dapat dioptimalkan untuk menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi.

This proud achievement also shows the better risk management capabilities of the Board of Directors so that all existing business opportunities can be optimized to generate high levels of profitability.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham yang Terhormat,

Perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen Direksi dalam membawa PID mencapai momentum penting dalam perjalanan bisnisnya. Prestasi yang membanggakan ini menunjukkan kemampuan manajemen risiko yang semakin baik dari Direksi, sehingga seluruh peluang bisnis dapat dioptimalkan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi.

Sepanjang tahun ini, kami mencatat sejumlah pencapaian penting, baik di sisi operasional maupun finansial. Prestasi ini semakin berarti mengingat PID tengah menghadapi masa-masa sulit.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris terhadap kepengurusan Perseroan tahun ini, pencapaian ini tidak terlepas dari strategi yang sangat tepat dan terarah, yang didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek bisnis. Ini juga menunjukkan peningkatan kemampuan manajemen risiko Direksi dalam mengoptimalkan peluang bisnis.

Dear Shareholders,

Allow me, on behalf of the Board of Commissioners and other stakeholders, to express my highest appreciation for the Board of Directors' commitment in bringing PID to achieve an important momentum in its business journey. This proud achievement demonstrates the Board of Directors' improved risk management capabilities, so that all business opportunities can be optimized to achieve a high level of profitability.

Throughout the year, we recorded a number of important achievements, both on the operational and financial sides. These achievements are all the more meaningful given that PID is facing difficult times.

Based on the results of the Board of Commissioners' supervision and monitoring of the Company's management this year, these achievements are inseparable from a very precise and targeted strategy, which is based on a thorough analysis of various business aspects. It also demonstrates the Board of Directors' improved risk management capabilities in optimizing business opportunities.

Dalam hal operasional, kami melihat pembenahan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan dan proses bisnis berbasis teknologi sudah sangat tepat. Selain itu, strategi pemasaran yang diterapkan berhasil memperluas basis konsumen PID. Tahun 2023 menghadapi berbagai guncangan ekonomi global, termasuk volatilitas harga komoditas yang tinggi akibat gangguan pada rantai pasokan global dan peningkatan permintaan.

Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan terus membebani rantai pasokan, membuat kondisi ekonomi global semakin tidak menentu. Kenaikan inflasi, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga Elpiji non-subsidi, berdampak pada harga bahan pokok dan biaya transportasi. Dengan penghasilan yang relatif stagnan, masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, lebih mengutamakan belanja kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan lainnya.

Pendapatan usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp565.957 juta, atau 87,70% dari anggaran sebesar Rp645.397 juta, dan meningkat 123,70% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp457.529 juta. Laba kotor tahun 2023 tercatat sebesar Rp91.831 juta, atau 89,97% dari anggaran Rp102.066 juta, dan meningkat 117,93% dibandingkan laba kotor tahun 2022 sebesar Rp77.871 juta.

Kami melihat bahwa upaya Direksi dalam meningkatkan tata kelola perusahaan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kinerja PID. Direksi telah berusaha memperbaiki manajemen SDM dengan memperkuat kerja sama tim, meningkatkan kapabilitas, serta profesionalitas mereka untuk mendukung praktik korporasi yang sehat. Perseroan juga telah membentuk kode etik perusahaan yang kami nilai sangat penting untuk memberikan panduan bagi seluruh jajaran manajemen dan staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Kami meyakini bahwa dengan terbentuknya internal organisasi yang lebih solid dan proses bisnis yang lebih baik, PID akan memiliki daya saing yang tinggi. Kami percaya, dengan komposisi Direksi yang baru, setiap Direksi akan dapat bekerja lebih fokus dan produktif untuk kemajuan perusahaan serta pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

In terms of operations, we see that the improvements made to improve service quality and technology-based business processes are very appropriate. In addition, the marketing strategy implemented has successfully expanded PID's customer base. The year 2023 saw various global economic shocks, including high commodity price volatility due to disruptions in the global supply chain and increased demand.

The prolonged Russia-Ukraine conflict continued to strain supply chains, making global economic conditions increasingly uncertain. Rising inflation, mainly influenced by the adjustment of fuel oil (BBM) prices and non-subsidized LPG prices, impacted the prices of basic commodities and transportation costs. With a relatively stagnant income, people, especially the lower middle class, prioritize spending on basic needs and postpone other needs.

Operating revenue in 2023 was realized at Rp565,957 million, or 87.70% of the budget of Rp645,397 million, and increased 123.70% compared to 2022 which amounted to Rp457,529 million. Gross profit in 2023 was recorded at Rp91,831 million, or 89.97% of the budget of Rp102,066 million, and increased 117.93% compared to gross profit in 2022 of Rp77,871 million.

We see that the Board of Directors' efforts in improving corporate governance contributed significantly to PID's performance growth. The Board of Directors has endeavored to improve HR management by strengthening teamwork, enhancing their capabilities and professionalism to support sound corporate practices. The Company has also established a corporate code of ethics which we consider very important to provide guidance for all levels of management and staff in carrying out their daily duties. We believe that with the establishment of a more solid internal organization and better business processes, PID will have high competitiveness. We believe that with the new composition of the Board of Directors, each Director will be able to work more focused and productive for the progress of the company and the achievement of the vision and mission that has been set.

Prospek Bisnis

Perseroan memiliki prospek bisnis yang cerah di masa depan. Kami juga melihat peluang pertumbuhan dalam bisnis logistik, sehingga Direksi perlu menyusun strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan bisnis ini lebih pesat. Selain itu, Direksi perlu menjajaki sumber-sumber bisnis baru yang dapat mengakselerasi pertumbuhan usaha Perseroan di masa mendatang.

Saya mewakili Dewan Komisaris merasa bangga atas kemajuan yang dicapai pada tahun 2023 ini, dan kami berharap kerja sama solid antara Direksi dan karyawan dapat terus diperkuat di masa depan. Perjalanan perusahaan ini masih panjang, dan hanya dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, visi, misi, serta sasaran bisnis dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dapat direalisasikan.

Business Prospects

The Company has bright business prospects in the future. We also see growth opportunities in the logistics business, so the Board of Directors needs to devise the right strategy to encourage the growth of this business more rapidly. In addition, the Board of Directors needs to explore new business sources that can accelerate the Company's business growth in the future.

On behalf of the Board of Commissioners, I am proud of the progress made in 2023, and we hope that the solid cooperation between the Board of Directors and employees can continue to be strengthened in the future. The Company still has a long way to go, and only with strong support and commitment from all parties involved, can the vision, mission and business objectives in the Company's Long-Term Plan (RJPP) be realized.

Jakarta, 3 Agustus 2023 /
Jakarta, August 3, 2023

Hormat Kami /
Sincerely



Mardiyanto

Komisaris Utama /
President Commissioner

Dewan Komisaris /
Board of Comimssioners



1

2



1. Mardiyanto

Komisaris Utama /
President Commissioner

2. Anton Mart Irianto

Komisaris /
Commissioner

Profil Dewan Komisaris / Board of Commissioners Profile



Mardiyanto

Komisaris Utama / *President Commissioner*

Tempat, Tanggal lahir:

Jakarta, 4 September 1968

Place, Date of Birth:

Jakarta, September 4, 1968

Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pendidikan pada 1993 dari Universitas Negeri Jakarta. Dan gelar Magister manajemen dari Universitas Jayabaya pada 2011.

Education:

Obtained a Bachelor's degree in Educational Technology in 1993 from Jakarta State University. And a Master's degree in management from Jayabaya University in 2011.

Riwayat Pekerjaan:

- 2014
Manager Strategic Palnning
- 2015:
Manager Strategic Planing PT Pelni (Persero) ;
- 2019:
 - *Manager Pengembangan SDM PT PELNI (Persero).*
 - *Manager Pengembangan SDM*
- 2023
Ketua Dewan Komisaris PID - Sekarang

Work History:

- 2014:
Manager Strategic Palnning;
- 2015:
Manager Strategic Planning PT PELNI (Persero);
- 2019:
 - *HR Development Manager PT PELNI (Persero).*
 - *HR Development Manager*
- 2023:
Chairman of the Board of Commissioners of PID - Now



Anton Mart Irianto

Komisaris / *Commissioner*

Tempat, Tanggal lahir:

Jember, 23 Maret 1958

Place, Date of Birth:

Jember, March 23, 1958

Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UGM pada 1983 dan Magister Sekolah Tinggi Manajemen Bandung bekerjasama dengan AIM, Manila.

Education:

Obtained Bachelor's degree in Economics from UGM in 1983 and Master's degree from Bandung Management College in collaboration with AIM, Manila.

Riwayat Pekerjaan:

- **Juni 2022 – Agustus 2023:**
Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia;
- **Desember 2017 – Maret 2021:**
Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- **November 2015 – Desember 2017:**
Direktur PT Mitra Bisnis Madan.

Work History:

- **June 2022 – August 2023:**
Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia;
- **December 2017 – March 2021:**
Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
- **November 2015 – December 2017:**
Director of PT Mitra Bisnis Madan.

Penghargaan / *Awards*

| NO. | JENIS PENGHARGAAN / TYPE OF AWARD | TAHUN / YEAR | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|---|-----------------|---|
| 1. | Kinerja Terbaik Penerima Reward Wisata 2012 / <i>Best Performance Tourism Reward Recipients 2012</i> | 2012 | Permodalan Nasional Madani dan Unit Layanan Modal Mikro / <i>Permodalan Nasional Madani and Micro Capital Service Unit</i> |
| 2. | Penghargaan Tujuh Belas Tahun Pengabdian Danareksa / <i>Danareksa Seventeen Years of Service Award</i> | 2007 | PT Danareksa |
| 3. | Penghargaan Sepuluh Tahun Pengabdian / <i>Ten Years of Service Award</i> | 2000 | PT Danareksa |

**Sambutan Direksi /
Board of Directors
Greetings**



Sukendra
Direktur Utama /
President Director

“

Kami juga membangun *teamwork* yang baik guna menciptakan organisasi yang unggul berbasis SDM yang kompeten dan profesional agar Perseroan dapat menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi *stakeholders*.

We also build good teamwork to create a superior organization based on competent and professional human resources so that the Company can create sustainable value for stakeholders.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemegang saham yang terhormat,

Perkenankan saya mengawali Laporan Tahunan ini dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada tahun ini PID berhasil bertahan di tengah kondisi keuangan global dan situasi geopolitik yang terjadi di tanah air. Pada tahun 2023, perekonomian global menghadapi berbagai guncangan. Salah satu yang paling mencolok adalah tingginya volatilitas harga komoditas, yang didorong oleh gangguan pada rantai pasokan global dan peningkatan permintaan. Konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak awal tahun lalu terus membebani rantai pasokan, menyebabkan ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat.

Dear shareholders,

Let me begin this Annual Report by extending my gratitude to God Almighty, because this year PID managed to survive amidst the global financial conditions and geopolitical situation in the country. In 2023, the global economy faced various shocks. One of the most notable was the high volatility of commodity prices, driven by disruptions to global supply chains and increased demand. The ongoing Russia-Ukraine conflict since the beginning of last year continues to strain supply chains, causing global economic uncertainty to increase.

Seiring dengan percepatan inflasi global, kami juga menghadapi kebijakan moneter yang agresif, baik antara Rusia dan Ukraina, maupun antara China dan Taiwan. Risiko stagflasi, yaitu kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang tinggi, menjadi ancaman besar. Kenaikan suku bunga acuan global diperkenalkan untuk mengatasi inflasi tinggi, yang juga dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga Elpiji non-subsidi. Kenaikan ini berdampak pada harga bahan pokok dan biaya transportasi, sementara tingkat penghasilan masyarakat relatif stagnan, menyebabkan mereka lebih mengutamakan belanja kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan lainnya yang tidak mendesak. Situasi ekonomi yang kurang kondusif di tanah air tentu saja berpengaruh pada PID.

Prospek Bisnis dan Tinjauan Keuangan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap logistik dan kepercayaan pelanggan, kami melakukan sejumlah pembenahan di internal perusahaan untuk meningkatkan kelancaran proses bisnis. Di antaranya adalah memperkuat pengelolaan bisnis perusahaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti mengembangkan otomatisasi prosedur, mempercepat penyelesaian proses bisnis, dan mengembangkan website korporasi.

Pendapatan usaha tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta, sedangkan biaya usaha terealisasi sebesar Rp474.154 juta atau 87,27% dari anggaran sebesar Rp543.331 juta, dan meningkat 124,89% dibandingkan biaya usaha tahun 2022 yang sebesar Rp379.658 juta. Laba usaha tahun 2023 tercatat sebesar Rp91.831 juta, atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp102.066 juta, dan meningkat 117,93% dibandingkan laba usaha tahun 2022 sebesar Rp77.871 juta. Laba Bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2023 adalah Rp28.173 juta atau 81,41% dari anggaran sebesar Rp34.973 juta, dan meningkat 9,82% dibandingkan labar bersih konsolidasi tahun 2022 yang sebesar Rp. 25.925 juta.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 menjadi Rp328.319 juta atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp440.867 juta, dan meningkat 74,47% dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.651 juta. Realisasi investasi sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp3.896 juta, atau 12,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.233 juta.

Along with accelerating global inflation, we also face aggressive monetary policies, both between Russia and Ukraine, and between China and Taiwan. The risk of stagflation, a combination of slow economic growth and high inflation, posed a major threat. The global benchmark interest rate hike was introduced to address high inflation, which was also affected by the adjustment of fuel oil (BBM) prices and non-subsidized LPG prices. These increases impacted the prices of basic commodities and transportation costs, while people's income levels remained relatively stagnant, causing them to prioritize spending on basic necessities and postpone other non-urgent needs. The unfavorable economic situation in the country has certainly affected the PID.

Business Outlook and Financial Review

Along with the increasing need for logistics and customer trust, we made a number of internal improvements to improve the smooth running of business processes. Among these are strengthening the management of the company's business by utilizing advances in information technology, such as developing procedure automation, accelerating the completion of business processes, and developing a corporate website.

Operating revenues in 2023 amounted to Rp565,986 million, while operating expenses were realized at Rp474,154 million or 87.27% of the budget of Rp543,331 million, and increased 124.89% compared to operating expenses in 2022 which amounted to Rp379,658 million. Operating profit for 2023 was recorded at Rp91,831 million, or 89.97% of the budget of Rp102,066 million, and increased 117.93% compared to operating profit in 2022 of Rp77,871 million. Consolidated Net Profit after tax in 2023 is Rp28,473 million or 81.41% of the budget of Rp34,973 million, and an increase of 9.82% compared to the consolidated net profit in 2022 which amounted to Rp. 25,925 million.

Total Assets as of December 31, 2023 amounted to Rp328,319 million or 98.40% of the budget of Rp440,867 million, and increased 74.47% compared to total assets as of December 31, 2022 of Rp333,651 million. Investment realization until the end of 2023 was Rp3,896 million, or 12.47% of the budget set at Rp31,233 million.

Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik. Berbagai indikator, baik dari sektor riil maupun eksternal, menunjukkan prospek ekonomi yang positif. Ini tercermin dari nilai IKK yang optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang menunjukkan surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman. Karena itu, kami merasa optimis bahwa di tahun 2024 dan seterusnya, bisnis Perusahaan akan membaik dan tumbuh pesat, sebagaimana sebelum pandemi.

Kami juga fokus pada pembangunan *teamwork* yang solid untuk menciptakan organisasi unggul berbasis SDM yang kompeten dan profesional. Penguatan *teamwork* ini antara lain dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di semua lini operasional.

Kode etik perusahaan juga telah dikembangkan untuk membimbing setiap insan PID dalam bertindak dan bertingkah laku sehari-hari. Kode etik ini terus disosialisasikan agar menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Dukungan dan kepercayaan dari para *stakeholder* dan *shareholder* sangat penting bagi PID dalam memperkuat eksistensinya di pasar domestik dan melanjutkan momentum penting dalam perjalanan bisnis di masa depan.

In 2024, Indonesia's economic growth is expected to improve further. Various indicators, both from the real and external sectors, show a positive economic outlook. This is reflected in an optimistic CCI, a consistently expansionary Manufacturing PMI, a trade balance that has shown a surplus for 33 consecutive months, and a foreign debt to GDP ratio that is still at a safe level. Therefore, we feel optimistic that in 2024 and beyond, the Company's business will improve and grow rapidly, as it did before the pandemic.

We also focus on building solid teamwork to create a superior organization based on competent and professional human resources. The strengthening of teamwork is partly done by applying the principles of good corporate governance in all operational lines.

The company's code of ethics has also been developed to guide every PID employee in their daily actions and behaviors. This code of ethics continues to be socialized so that it becomes part of the company's work culture.


The support and trust from stakeholders and shareholders are very important for PID in strengthening its presence in the domestic market and continuing its important momentum in the future business journey.

Jakarta, 3 Agustus 2023 /

Jakarta, August 3, 2023

Hormat Kami /

Sincerely



Sukendra
Direktur Utama /
President Director

Direksi / Directors





1. Sukendra

Direktur Utama / *President Director*

2. Suparno

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko /
*Director of Finance, Human Resources and Risk
Management*

3. Didik Martono

Direktur Komersial dan Operasional /
Commercial and Operations Director

Profil Direksi / Board of Directors Profile



Sukendra

Direktur Utama
President Director

Tempat, Tanggal lahir:
Cilacap, 16 Maret 1967

Pendidikan:

- S1 - STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) Th 1989 Jurusan Nautika
- S2 - STM Labora Jakarta Th 2001

Riwayat Pekerjaan:

- **Sejak 1990:**
Bergabung di PT PELNI (Persero) sebagai Muallim kapal PELNI.
- **2009:**
GM Balikpapan PT Pelni
- **2012:**
VP SDM PT Pelni
- **2014:**
 - Menempati posisi Senior Manager Aset PT PELNI (Persero).
 - GM Tanjung Priok PT Pelni
- **2015:**
Direktur Operasi SBL
- **2017:**
Diangkat menjadi VP Pemasaran Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero)
- **2022:**
Dipercaya menjadi Direktur Utama PT PID.

Place, Date of Birth:
Cilacap, March 16, 1967

Education:

- *Bachelor's Degree Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Maritime Academy), majoring in Nautical Science, graduated in 1989.*
- *Master's Degree STM Labora Jakarta, graduated in 2001.*

Work History:

- **Since 1990:**
Joined PT PELNI (Persero) as a Chief of Staff of PELNI ship
- **2009:**
GM Balikpapan PT Pelni
- **2012:**
VP HR PT Pelni
- **2014:**
 - *Occupied the position of Senior Asset Manager of PT PELNI (Persero).*
 - *GM Tanjung Priok PT Pelni*
- **2015:**
SBL Operations Director
- **2017:**
Appointed as VP of Passenger Transportation Marketing of PT PELNI (Persero).
- **2022:**
Trusted to become President Director of PT PID.



Suparno

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Resources and Risk Management

Tempat, Tanggal lahir:
Sragen, 4 Desember 1974

Place, Date of Birth:
Sragen, December 4, 1974

Pendidikan:

- S1 - UPN Veteran Jurusan Akuntansi Tahun 2009
- S2 - ST-PPM Jakarta 2014

Education:

- *Bachelor's Degree UPN Veteran, majoring in Accounting, graduated in 2009.*
- *Master's Degree ST-PPM Jakarta, graduated in 2014.*

Riwayat Pekerjaan:

- **2001:**
Internal Audit PT Pelni (Persero).
- **2018:**
Setelah menempati berbagai posisi jabatan pada tahun 2018 beliau dipercaya menjabat sebagai *Vice President Treasury* PT PELNI (Persero).
- **2022:**
Semenjak tahun 2022 diangkat menjadi Direktur Keuangan PT PID.

Work History:

- **2001:**
Internal Audit of PT Pelni (Persero).
- **2018:**
After occupying various positions in 2018 he was trusted to serve as Vice President of Treasury of PT PELNI (Persero).
- **2022:**
Since 2022 he has been appointed as Finance Director of PT PID.

Profil Direksi / Board of Directors Profile



Didik Martono

Direktur Komersial dan Operasional
Commercial and Operations Director

Tempat, Tanggal lahir:

Klaten, 12 Maret 1971

Pendidikan:

- S1 - Universitas Darul Lum Jombang Jurusan Teknik Tahun 2013.
- Ahli Teknik Tingkat I - BP3IP Sunter Jakarta Tahun 2010.
- Ahli Teknik Tingkat II - BPLP Semarang Tahun 2005.
- Ahli Teknik Tingkat III- BPLP Semarang Tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan:

- Mei 2017- Februari 2021:
Vice President Teknik di PT PELNI (Persero).
- Februari 2021-Juli 2022:
Vice President Pengadaan & Modifikasi Kapal di PT PELNI (Persero).
- Juli 2022- November 2023:
Vice President Operasi Angkutan Penumpang di PT PELNI (Persero).
- November 2023 - saat ini:
Direktur Operasi dan Komersial PID

Place, Date of Birth:

Klaten, March 12, 1971

Education:

- Bachelor's Degree Universitas Darul Lum Jombang, majoring in Engineering, graduated in 2013.
- Chief Engineer Level I BP3IP Sunter Jakarta, completed in 2010.
- Chief Engineer Level II BPLP Semarang, completed in 2005.
- Chief Engineer Level III BPLP Semarang, completed in 1995.

Work History:

- May 2017- February 2021:
Vice President of Engineering at PT PELNI (Persero).
- February 2021-July 2022:
Vice President of Ship Procurement & Modification at PT PELNI (Persero).
- July 2022- November 2023:
Vice President of Passenger Transportation Operations at PT PELNI (Persero).
- November 2023 - present:
Director of Operations and Commercial at PID.







Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

Statement of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Regarding Responsibility for the 2023 Annual Report PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) for the year 2023 has been contained in full and are fully responsible for the correctness of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, September 2023

Jakarta, September 2023

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Mardiyanto

Komisaris Utama /
President Commissioner

Dewan Direksi
Board of Director



Sukendra

Direktur Utama /
President Director

Anton Mart Irianto

Komisaris /
Commissioner

Didik Martono

Direktur Operasi dan Komersial /
Director of Operations and Commercial

Suparno

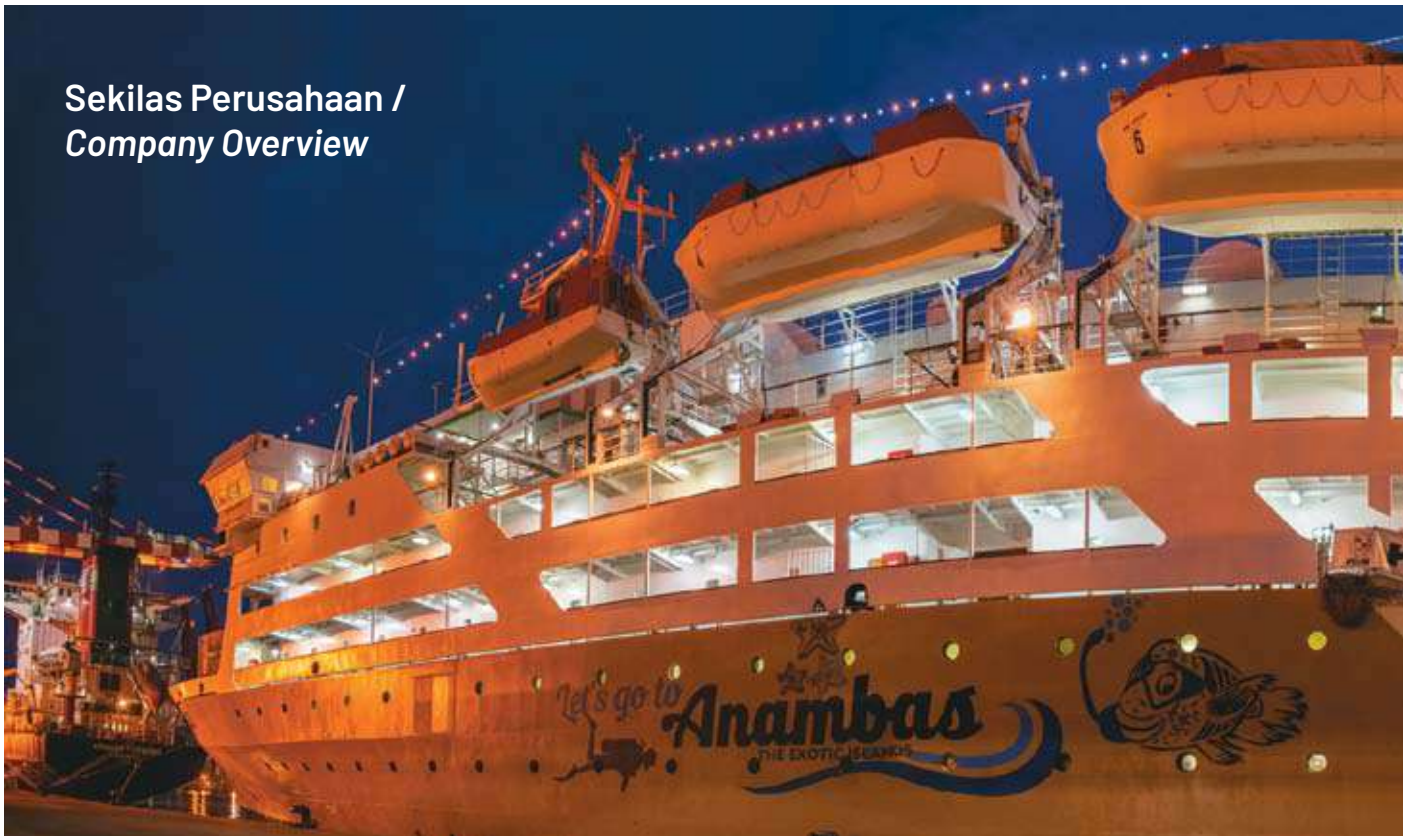
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko /
Director of Finance, HR and Risk Management



Identitas Perusahaan
Company Identity

| | |
|--|---|
| Nama Perusahaan <i>Company Name</i> | : PT PELITA INDONESIA DJAYA |
| Nama Sebutan <i>Name Designation</i> | : Pelni Services |
| Kantor Pusat <i>Head Office</i> | : Jl. Letjend Soeprapto Komplek Ruko Cempaka Mas Blok Q No. 5, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 |
| Telepon <i>Telp.</i> | : 021 42883740 |
| Surat Elektronik <i>Electronic Mail</i> | : www.pidc.co.id |
| E-mail <i>E-mail</i> | : corporate@pidc.co.id |
| Tanggal Berdiri <i>Date of Establishment</i> | : 29 September 1969 |
| Tanggal Beroperasi <i>Date of Operation</i> | : 29 September 1969 |
| Dasar Hukum <i>Legal Basis</i> | : Akta Notaris No. 53 tanggal 29 September 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Pebruari 1970 dirubah Akta Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019 Notaris Ida Adiningsih, SH. Di Jakarta dan surat pengesahan dari KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-000242605.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, menjadi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero). <i>Notarial Deed No. 53 dated September 29, 1969 Notary Djojo Muljadi, SH. which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia number 12 dated February 10, 1970 amended Notarial Deed No. 05 dated December 13, 2019 Notary Ida Adiningsih, SH. In Jakarta and approval letter from KEMENKUMHAM RI Number: AHU-000242605.AH.01.11. 2019 dated December 16, 2019 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 1984 dated July 9, 1984, became a subsidiary of PT PELNI (Persero).</i> |
| Modal Dasar / <i>Authorized Capital</i> | : Rp2.010.000.000,- |
| Modal Disetor / <i>Paid-up Capital</i> | : Rp2.010.000.000,- |
| Pemegang Saham / <i>Shareholders</i> | : 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero): 99,50% 2. Yayasan Kesehatan Pesiunan PT PELNI (YKPP): 0,50% |
| NPWP | : 01.307.708.6-093.000 |
| NIB | : 9120503743305 diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 30 Juli 2019 / <i>9120503743305 published by Minister of Investment/ Head of Investment Coordinating Board on July 30, 2019</i> |
| Jumlah Pegawai / <i>Number of Employees</i> | : 1.771 orang per 31 Desember 2023 <i>1,771 people as of December 31, 2023</i> |
| Kegiatan Usaha / <i>Business Activities</i> | : a. Usaha Alih Daya: Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>), Jasa Pengawasan dan Pengamanan, <i>House Keeping</i> , Jasa Hiburan Band, Jasa Pengelolaan Janitor, <i>Janitor</i> , <i>Manage Services</i> . / <i>Man-Power Services: Cleaning Services, Escort and Security Services, House Keeping, Band Entertainment Services, Janitorial Management Services, Manage Services.</i> b. Usaha Komersial: <i>Supply Bahan Makanan, Supplement food, Air mineral & Mealbox. / Provides groceries, supplements, mineral water & mealboxes.</i> c. Usaha Jasa Maintenance & IT: <i>BTS Multioperator, Pengadaan Perangkat IT, Maintenance AHU, AC & Chiler Kapal, Renovasi dan Running Repair Kamar mandi, Vending Machine. / Maintenance & IT Services Business: BTS Multioperator, IT Device Procurement, Maintenance of AHU, AC & Ship Chiler, Bathroom Renovation and Running Repair, Vending Machine.</i> d. Usaha Jasa Lainnya: <i>Wisma Tretes, Komersialisasi Gudang, Kendaraan disewakan & Pinisi / Other Service Business: Wisma Tretes, Warehouse Commercialization, Vehicles for Rent & Pinisi.</i> |

Sekilas Perusahaan / Company Overview



Dalam rangka menyetatkan Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI), atas persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 4 April 1969 Nomor: M.8/4/25 Phb, didirikanlah "Usaha Sampingan" dengan akta pendirian tertanggal 29 September 1969 nomor: 53 yang diperbaiki dengan akta tanggal 24 Nopember 1969 nomor 46 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Februari 1970 yang bernama "PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION" (disingkat PT PIDC) dengan kegiatan usahanya:

- Perdagangan Impor dan Ekspor, antar pulau/daerah dan lokal;
- Usaha-usaha dibidang perindustrian, Pertambangan, pengangkutan, pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, perwismaan;
- Usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (*cold storage*);
- Pengusahaan galangan pembuatan dan reparasi kapal.

Pendirian Perusahaan PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION yang modal dasarnya dipisahkan dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. PELNI, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT. PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi Perusahaan Negara.

In order to nourish the Indonesian National Shipping State Company (PT PELNI), with the approval of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia dated April 4, 1969 Number: M.8/4/25 Phb, a "Side Business" was established with a deed of establishment dated September 29, 1969 number: 53 which was corrected by deed dated November 24, 1969 number 46 by Notary Djojo Muljadi, S.H. which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia number 12 dated February 10, 1970 called "PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION" (abbreviated as PT PIDC) with its business activities:

- *Import and Export Trade, inter-island/regional and local;*
- *Businesses in the fields of industry, mining, transportation, agriculture, plantation, forestry, animal husbandry, land / sea fisheries, tourism;*
- *Businesses related to cold storage;*
- *Shipbuilding and ship repair business.*

Establishment of PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION whose authorized capital is separated from the State assets embedded in P.N. PELNI, in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1969 concerning Company Companies (Persero), PT. PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION became a State Company.



Sebagai tindak lanjut dari pendirian PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi perusahaan milik Negara, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1970 tertanggal 23 September 1970 dimana ditetapkan pemisahan sebagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN.PELNI) untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC).

Berdasarkan penelitian ternyata Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dikehendaki, untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984 dimana ditetapkan pengalihan pemilikan dan penguasaan modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, sehingga seluruh modal Negara Republik Indonesia dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dialihkan kepemilikan dan penguasaannya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan selanjutnya PT. PID dijadikan anak perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

As a follow-up to the establishment of PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION into a State-owned company, Government Regulation of the Republic of Indonesia number 37 of 1970 dated September 23, 1970 was issued which stipulated the separation of part of the assets of the Republic of Indonesia embedded in the Indonesian National Shipping Company (PN. PELNI) to be used as the participation of the Republic of Indonesia in the share capital of the Limited Liability Company PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC).

Based on research it turns out that the Limited Liability Company of Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) cannot carry out its duties in accordance with the desired economic principles, to ensure the continuity of its business, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 16 of 1984 dated July 9, 1984 which stipulates the transfer of ownership and control of the capital of the Republic of Indonesia in the Limited Liability Company Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) to the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, so that all capital of the Republic of Indonesia in the form of shares in the Limited Liability Company Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) is transferred ownership and control to the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia and then PT. PID is made a subsidiary of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, dimana ditetapkan Kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PIDC) sesuai Surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 88/ MK.013/1991 tertanggal 23 Januari 1991 sebesar:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Modal Dasar/Disetor | : Rp2.000.000.000,00 |
| Cadangan | : Rp233.930.877,46 |
| Jumlah | : Rp2.233.930.877,46 |

Perubahan kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PID) dengan Akta Notaris nomor 23 tertanggal 14 Juni 1996 Notaris F.J. Mawati yaitu:

- 10.000 lembar saham istimewa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,-
- 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,- atau seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa dan 100.000 (seratus ribu) saham biasa atau sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan masuknya pemegang saham baru yaitu YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PERSEROAN TERBATAS PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelolaan BUMN tertanggal 12 Mei 1998 Nomor: S-65/M/PBUMN/1998, mengambil sebanyak 10 (sepuluh) saham, maka PT. Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT. PIDC) merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 10 April 2001 Notaris SP. Henny Singgih, SH sehingga Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaja Corporation PT. PIDC) menjadi:

- PT PELNI (Persero) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PT PELNI sebanyak 10 (sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah 2010 (dua ribu sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) dengan kegiatan usahanya yaitu:
 - Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang Jasa Pengurusan Transportasi, ekonomi dan perdagangan, tehnik dan industri serta pembangunan kecuali pelayanan/jasa dalam bidang hukum.

As a follow-up to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 1984 dated July 9, 1984, which stipulates the State Assets embedded in PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) to be separated and used as capital participation of PT PELNI in PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PIDC) in accordance with the approval letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: S- 88 / MK.013 / 1991 dated January 23, 1991 by:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Authorized/Paid-up Capital:</i> | <i>Rp2,000,000,000.00</i> |
| <i>Reserves</i> | <i>: Rp233,930,877.46</i> |
| Total | : Rp2,233,930,877.46 |

Changes in State assets embedded in PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) to be separated and used as capital participation of PT PELNI in PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PID) with Notarial Deed number 23 dated June 14, 1996 Notary F.J. Mawati, namely:

- *10,000 shares of special shares with a nominal value of Rp1,000,000,000,*
- *100,000 ordinary shares with a nominal value of Rp1,000,000,000,- or a total of 10,000 (ten thousand) special shares and 100,000 (one hundred thousand) ordinary shares or amounting to Rp2,000,000,000,- (two billion rupiah).*

With the entry of new shareholders, namely YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PERSEROAN TERBATAS PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, based on the Letter of the Minister of State for the Empowerment of BUMN / Head of BUMN Management Agency dated May 12, 1998 Number: S-65 / M / PBUMN / 1998, taking as many as 10 (ten) shares, PT. Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT. PIDC) amended its Articles of Association by Notarial Deed Number 21 dated April 10, 2001 Notary SP. Henny Singgih, SH so that the Authorized Capital of the Limited Liability Company Pelita Indonesia Djaja Corporation PT. PIDC) became:

- *PT PELNI(Persero)as many as 2,000(two thousand) shares or nominal value of Rp2,000,000,000 (two billion rupiah).*
- *YAYASAN KESEH PENSIUNAN PT PELNI as many as 10 (ten) shares or nominal value of Rp10,000,000, - (ten million rupiah) or a total of 2010 (two thousand ten) shares or nominal value of Rp2,010,000,000, - (two billion ten million rupiah) with business activities namely:*
 - *Business in the field of services in general, especially those related to the fields of Transportation Management Services, economics and trade, engineering and industry and development except services / services in the field of law.*

- Berusaha dalam bidang jasa/pelayanan kebersihan (*cleaning service*) perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, dan lainnya, bidang angkutan umum di darat, pengepakan, ekspedisi perbengkelan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan terbatas maka PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC) merubah nama menjadi PT PELITA INDONESIA DJAYA berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris nomor 22 tertanggal 10 September 2001.

Terakhir PT PID merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris nomor: 11 tertanggal 10 Juni 2015 Notaris Yul Khaizar Panuh, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0938906.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015.

Agar tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dari Perusahaan Induk yaitu PT PELNI sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang transportasi laut maka PT. Pelita Indonesia Djaya (PT PID) ikut berkiprah membantu Induk Perusahaan PT PELNI (Persero) dalam meningkatkan pelayanannya kepada pengguna jasa PT. PELNI (Persero) sehingga PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) merubah *brand image* pada tanggal 29 September 2014 menjadi PELNI SERVICES dengan kegiatan usahanya yaitu:

- Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Services*) baik layanan diatas kapal maupun di gedung;
- Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan baik diatas kapal maupun di gedung kantor;
- Usaha Jasa Jasa Pengelolaan Kasur Penumpang Kapal;
- Usaha Jasa Pengelolaan Hiburan Band;
- Usaha Pengadaan Bahan Makanan Awak Kapal dan Penumpang;
- Usaha Sewa Kendaraan Dinas;
- Usaha Pengelolaan Kapal Phinisi;
- Usaha Perwismaan;
- Usaha Jasa *Manage Service/DCS & Admin Employ*;
- Usaha perawatan dan perbaikan kapal penumpang;
- Usaha Sistem Komunikasi Kapal;
- Dan usaha lainnya.

- *Business in the field of services / cleaning services (cleaning service) maintenance, maintenance and repair of buildings, houses, and others, the field of public transportation on land, packing, expedition workshop.*

Based on Government Regulation Number 26 of 1998 concerning the use of the name of a limited liability company, PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC) changed its name to PT PELITA INDONESIA DJAYA domiciled in Jakarta with Notarial Deed number 22 dated September 10, 2001.

Finally, PT PID amended its Articles of Association with Notarial Deed number: 11 dated June 10, 2015 Notary Yul Khaizar Panuh, SH and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Number AHU-0938906. AH.01.02 of 2015 dated July 07, 2015.

In order to grow consistently and sustainably by utilizing the strength of the Parent Company, namely PT PELNI as a service to the public in the field of sea transportation, PT. Pelita Indonesia Djaya (PT PID) took part in assisting the Parent Company PT PELNI (Persero) in improving its services to service users of PT. PELNI (Persero) so that PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) changed its brand image on September 29, 2014 to PELNI SERVICES with its business activities, namely:

- *Cleaning Services business both on board and in the building*
- *Escort and Security Services business both on board and in the office building;*
- *Ship Passenger Mattress Management Service Business;*
- *Band Entertainment Management Services Business;*
- *Ship Crew and Passenger Food Procurement Business;*
- *Service Vehicle Rental Business;*
- *Phinisi Ship Management Business;*
- *Tourism Business;*
- *Manage Service/DCS & Admin Employ Business;*
- *Passenger ship maintenance and repair business;*
- *Ship Communication System Business;*
- *And other businesses.*

Jejak Langkah / Milestone

Perusahaan ini didirikan oleh Pelni pada tanggal 29 September 1969 dengan nama PT Pelita Indonesia Djaya Corporation. / *The company was established by Pelni on September 29, 1969 under the name PT Pelita Indonesia Djaya Corporation.*

Tahun 1984, pemerintah resmi menyerahkan seluruh saham perusahaan ini ke Pelni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. / *In 1984, the government officially handed over all shares of this company to Pelni based on Government Regulation Number 16 of 1984 concerning the Transfer of Ownership and Control of State Capital of the Republic of Indonesia in the Limited Liability Company Pelita Indonesia Djaya Corporation to the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.*

1969

1970

1984

1989

Tahun 1970, pemerintah Indonesia menetapkan perusahaan ini sebagai sebuah persero, karena perusahaan ini didirikan dengan menggunakan modal milik negara yang ditanam di Pelni. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation. / *In 1970, the Indonesian government established this company as a limited liability company, because this company was established using state-owned capital invested in Pelni. This is stated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 1970 concerning State Capital Participation in Limited Liability Company Pelita Indonesia Djaya Corporation.*

Tahun 1989, perusahaan ini mendirikan Pelita Bandar Nasional untuk berbisnis di bidang bongkar muat. / *In 1989, the company established Pelita Bandar Nasional to do business in loading and unloading.*

Pada Bulan September 2001, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang dari PT Pelita Indonesia Djaya Corporation menjadi PT Pelita Indonesia Djaya. / *In September 2001, the company changed its name from PT Pelita Indonesia Djaya Corporation to PT Pelita Indonesia Djaya.*

Agustus 2018 Pelni Services menempati gedung baru yang beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok Q5, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. / *August 2018 Pelni Services occupies a new building located at Ruko Cempaka Mas Blok Q5, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Central Jakarta.*

2001

2014

2018

2023

Pada bulan September 2014, perusahaan ini mulai menggunakan nama dagang "Pelni Services" untuk menegaskan statusnya sebagai anak usaha dari Pelni sebagai supporting kegiatan dari PT Pelni. / *In September 2014, the company started using the trade name "Pelni Services" to emphasize its status as a subsidiary of Pelni as a supporting activity of PT Pelni.*

PELNI Services menyediakan jasa penunjang operasional kapal (*ship chandler*), termasuk:

- *Supply* bahan makanan
- *Jasa outsourcing*
- *Pemeliharaan kapal*
- *Penyewaan kendaraan dan kapal Phinisi*
- *Teknologi informasi Layanan terintegrasi untuk kebutuhan kapal.* /

PELNI Services provides operational support services for ships, including:

- *Food supply*
- *Outsourcing services*
- *Ship maintenance*
- *Vehicle and Phinisi boat rentals*
- *Information technology Integrated services for all ship needs.*



Visi dan Misi

Visi:

Menjadi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa terkemuka di Indonesia.

Vision:

To be the leading Goods and Services Provider Company in Indonesia.

Misi:

1. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi untuk mendukung usaha pelayaran dan non pelayaran.
Makna: Senantiasa menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan seiring tingginya permintaan kebutuhan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.
Makna: Memiliki sistem manajemen unggul yang memberikan nilai tambah dan berfokus kepada kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
Makna: Menjalankan prinsip layanan prima dan perbaikan berkesinambungan demi nilai tambah bagi stakeholder.
4. Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik guna memberikan nilai tambah bagi karyawan, Perusahaan dan stakeholder.
Makna: Menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam menjalankan kegiatan usaha.

Mission:

1. *Providing high quality goods and services to support shipping and non-shipping businesses*
Meaning: Always provide goods and services to customers in line with the high demand.
2. *Improve service quality and customer satisfaction.*
Meaning: Having a superior management system that provides added value and focuses on customer satisfaction.
3. *Increase the value of the Company through the development of human resources and technology to achieve sustainable growth.*
Meaning: Implementing the principles of excellent service and continuous improvement for added value for stakeholders.
4. *Implementing good corporate governance to provide added value for employees, the Company and stakeholders.*
Meaning: Implementing the principles of GCG (Good Corporate Governance) in carrying out business activities.

Budaya Perusahaan / Corporate Culture

Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN dan entitasnya menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta, maka ditetapkan *Core Values* yang sama untuk seluruh BUMN. PID yang merupakan bagian dari PT PELNI (Persero) sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, juga turut menyelaraskan *core values* ini ke dalam budaya perusahaan PID yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Budaya perusahaan dikembangkan dari sebuah kumpulan norma-norma, nilai, keyakinan, harapan, asumsi, dan filsafat dari orang-orang yang berada di dalamnya, sejalan dengan visi, misi perusahaan. Budaya perusahaan harus dapat tumbuh menjadi identitas perusahaan yang mendasari keseluruhan sistem, termasuk mekanisme kontrol, atau mempengaruhi cara berinteraksi di dalam perusahaan maupun para pemangku kepentingan di luar organisasi. Sebuah organisasi akan memiliki arah perkembangan perusahaan yang jelas mengenai akan dibawa kemana sebuah perusahaan ini.

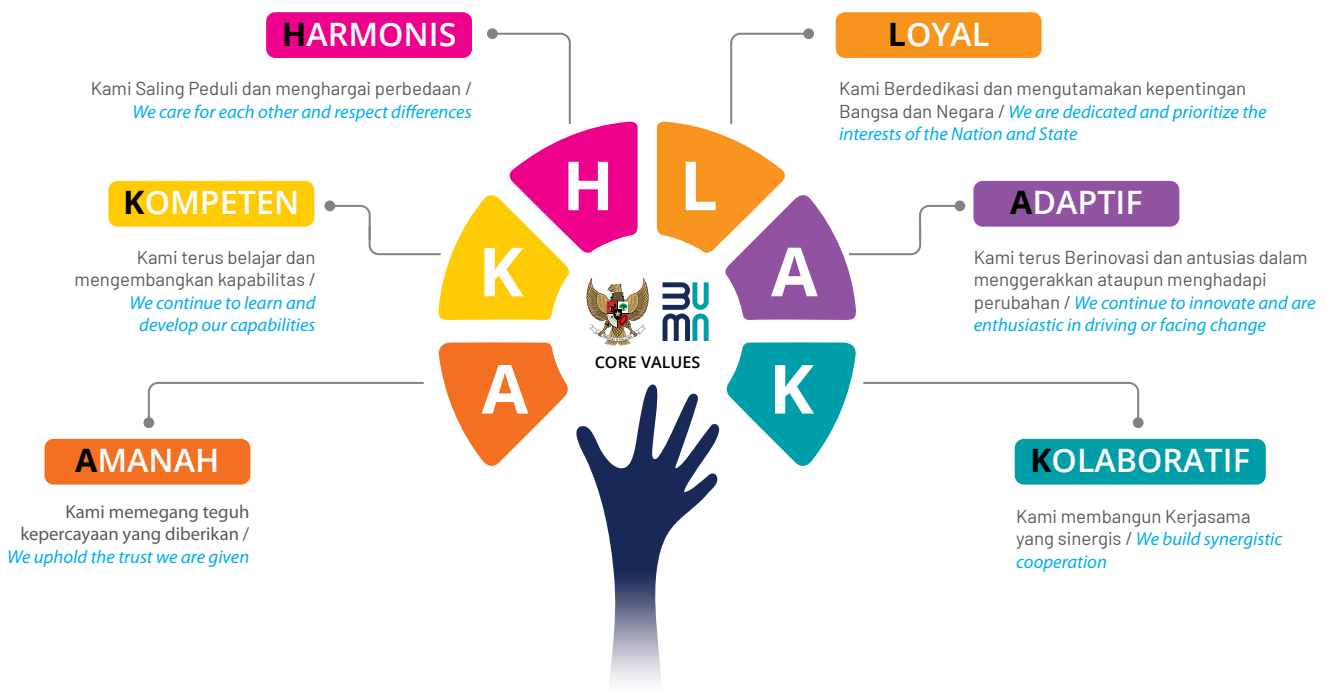
Perilaku dan nilai dari budaya organisasi (AKHLAK) ini diyakini dapat memberikan sebuah *added value* untuk dapat meningkatkan produktifitas kinerja dan profesionalisme perusahaan karena PID menjadi mampu untuk dapat bertingkah laku lebih profesional, handal, dan tentunya akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Adapun budaya perusahaan tersebut adalah:

In order to increase the competitiveness of SOEs and their entities to become global players and make SOEs a talent factory, the same Core Values are determined for all SOEs. PID, which is part of PT PELNI (Persero) as one of the leading SOEs in Indonesia, also harmonizes these core values into PID's corporate culture which supports sustainable performance improvement.

Corporate culture is developed from a collection of norms, values, beliefs, expectations, assumptions, and philosophies of the people within it, in line with the company's vision and mission.

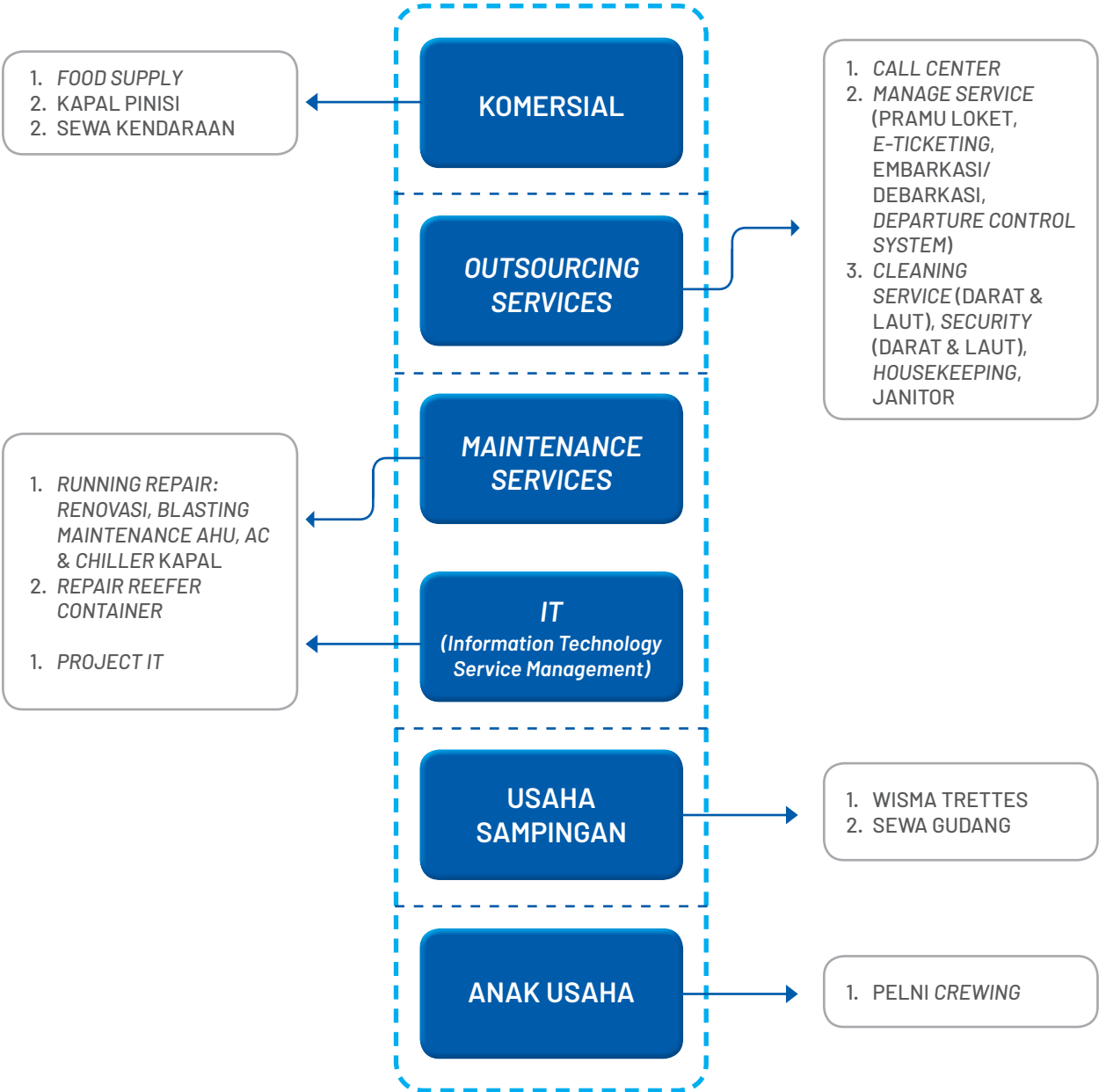
Corporate culture must be able to grow into a corporate identity that underlies the entire system, including control mechanisms, or influences the way of interacting within the company and stakeholders outside the organization. An organization will have a clear direction of the company's development regarding where the company will go.

The behavior and values of this organizational culture (AKHLAK) are believed to provide an added value to be able to increase the productivity of the company's performance and professionalism because PID is able to behave more professionally, reliably, and of course will have an impact on the company's performance. The corporate culture is:



Kegiatan Perusahaan Tahun 2023 / Company Activities in 2023

Dalam tahun 2023 Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: /
In 2023, the Company carried out the following business activities:



Anak Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya (PID) / Subsidiary of PT Pelita Indonesia Djaya (PID)

PT Pelita Bandar Nasional (PT. PBN) berdiri sejak 28 Juni 1989, beralamat di Jalan Ruko Cempaka Mas No. 5 Blok Q, Jakarta Pusat merupakan Anak Perusahaan dari PT. PID dengan presentase kepemilikan saham 98% dari PT PID dan 2% dari Koperasi Karyawan Manunggal.

PT Pelita Bandar Nasional (PT PBN), established on June 28, 1989, is located at Jalan Ruko Cempaka Mas No. 5 Block Q, Central Jakarta. It is a subsidiary of PT PID, with 98% of its shares owned by PT PID and 2% owned by the Koperasi Karyawan Manunggal (Manunggal Employee Cooperative).

Berawal dari bidang usaha logistik dan bongkar muat. Pada akhir tahun 2023, Kegiatan usaha PT PBN dialihkan menjadi penyedia layanan awak kapal (crew manning) dengan tenaga kerja profesional dan berpengalaman.

Initially engaged in the logistics and stevedoring business, by the end of 2023, PT PBN shifted its business activities to providing crew manning services with professional and experienced personnel.

Kegiatan Usaha / Business Activities

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan dan inisiatif terkait dengan usaha perusahaan adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, the Company has carried out various activities and initiatives related to the company's business as follows:

a. Usaha Jasa Permakanan

Usaha Permakanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan bahan makanan penumpang dan awak kapal. Dalam kegiatan usahanya dan melakukan kontrak sebagai berikut:

a. Food Service Business

The Food Business is a business engaged in the provision of food for passengers and crew. In its business activities and performs the following contracts:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | PT PELNI | TH.01.16-01/KP/2023 | 16 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 | Pengadaan Suplai Bahan Baku Makanan di Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Periode Januari s/d Maret 2023 / <i>Procurement of Food Supplies on Passenger Ships PT PELNI (Persero) January to March 2023 Period</i> |
| 2. | PT PELNI | TH.05.30-03/KP/2023 | 30 Mei 2023 | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | Pengadaan Suplai Bahan Baku Makanan Di Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Periode April s/d Desember 2023 / <i>Procurement of Food Raw Materials on Passenger Ships PT PELNI (Persero) April to December 2023 Period</i> |

b. Usaha Jasa Kapal Pinisi

Sebagai tindak lanjut program tahun 2020 mengenai pengembangan usaha dalam bidang usaha wisata, PT PID merealisasikan pengadaan kapal Pinisi untuk menunjang bisnis PT PID dibidang pariwisata, yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2019 di Tanjung Bira, Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Adapun Paket Wisata yang di tawarkan adalah sebagai berikut:

| NO. | PAKET | KETERANGAN | |
|-----|------------------|------------|--------------------|
| 1. | 1 Hari (Fullday) | 1 | Pulau Komodo |
| | | 2 | Pulau Padar |
| | | 3 | Pulau Pink |
| | | 4 | Snorkeling |
| 2. | 2 Hari 1 Malam | 1 | Pulau Bidadari |
| | | 2 | Pulau Komodo |
| | | 3 | Pulau Kalong Rinca |
| | | 4 | Snorkeling |
| 3. | 3 Hari 2 Malam | 1 | Pulau Kalong Rinca |
| | | 2 | Pulau Kelor |
| | | 3 | Pulau Rinca |
| | | 4 | Pulau Komodo |
| | | 5 | Pulau Padar |
| | | 6 | Pandai Pink |
| | | 7 | Gili Laba |
| | | 8 | Snorkeling |

b. Pinisi Ship Service Business

As a follow-up to the 2020 program regarding business development in the tourism business sector, PT PID realized the procurement of Pinisi ships to support PT PID's business in the tourism sector, which was inaugurated on July 23, 2019 in Tanjung Bira, Bulukumba and South Sulawesi. The tour packages offered are as follows:

| NO. | PAKET | KETERANGAN | |
|-----|----------------|------------|--------------------|
| 4. | 4 Hari 3 Malam | 1 | Pulau Kalong Rinca |
| | | 2 | Pulau Rinca |
| | | 3 | Pulau Komodo |
| | | 4 | Pulau Padar |
| | | 5 | Pandai Pink |
| | | 6 | Pulau Kelor |
| | | 7 | Snorkeling |
| | | 8 | Gili Laba |
| | | 9 | Pulau Sembilan |
| | | 10 | Main Point |

c. Usaha Jasa Sewa Kendaraan Dinas

Usaha Sewa Kendaraan Dinas adalah usaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil dinas atas menyediakan kendaraan dinas. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1. | PT PELNI | TH.08.28-01/SPK/2023 | 28 Agustus 2023 | 11 September 2023 s/d 10 September 2024 | Toyota Alphard 2.5 G A/T 1 unit |
| 2. | | TH.08.04-01/SPK/2022 | 04 Agustus 2022 24 | 11 September 2022 s/d 10 September 2023 | Toyota Alphard 2.5 G A/T 1 unit |
| 3. | | TH.01.24-01/SPK/2023 | Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 | Toyota CamryHybrid 2.5 A/T Tahun 2019 6 (enam) unit |
| 4. | | TH.01.09- 03 /SPK/2023 | 09 Januari 2023 | 12 Desember 2022 s/d 31 Desember 2023 | Truck Hino Louhan FG 235 JP Tahun 2017 1 Unit Truck Colt Diesel Ukuran 4 Ton Tahun 2020 1 Unit |

c. Service Vehicle Rental Business

Service Vehicle Rental Business is a business engaged in the rental of official cars for providing official vehicles. In its business activities, the Company enters into cooperation contracts, namely:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 5. | PT PELNI | TH.04.26-01/SS/2022 | 26 April 2022 | 11 April 2022 s/d 10 April 2023 | Toyota Innova G 2.0 M/T Tahun 2022 12 Unit Toyota Innova G 2.0 Q A/T Venturer Tahun 2020 6 Unit |
| 6. | | TH.04.12-02/KP/2023 | 12 April 2023 | 11 April 2023 s/d 10 April 2024 | Toyota Innova 2.0 G M/T 2022 : - Kantor Pusat 8 Unit - Kantor Cabang Jakarta 2 Unit - Kantor Cabang Sby 1 Unit - Kantor Cabang Mks 1 Unit |
| 7. | | TH.11.18- 06 /SS/2022 | 09 Februari 2023 | - | Toyota All New Veloz M/T Tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) Unit Toyota Avanza Veloz M/T Tahun 2021 |
| 8. | | | 18 November 2023 | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | |
| 9. | Alif Jaya | 11.03/PKS DIR/001/100/2022 | 03 November 2022 | 03 November 2022 s/d 3 April 2023 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 5 Unit |
| 10. | Adtrans Rentcar Indonesia | 05.19/PKS/ DIR/001/100/2022 | 19 Mei 2022 | 19 Mei 2022 s/d 19 Mei 2023 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 6 Unit |
| 11. | | 11.19/PKS/DIR- OPS/001/100/2022 | 19 November 2022 | 19 November 2022 s/d 19 April 2023 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 6 Unit |
| 12. | | 01.01/PKS/ DIR/001/100/2023 | 01 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 01 Januari 2024 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 2 Unit |
| 13. | Artdeco Sejahtera Abadi | 02.01/PKS/ DIR/001/100/2023 | 01 Februari 2023 | 01 Februari 2023 s/d 01 April 2023 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 4 Unit |
| 14. | Corry Ardiansyah | 04.27/PKS/DIR- OPS/001/100/2023 | 27 April 2023 | 27 April 2023 s/d 27 Maret 2024 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 1 Unit |
| 15. | Jamkrindo | 09/SPK/UMU/1/2023 | 11 Januari 2023 | 28 Januari 2023 s/d 28 Januari 2024 | Toyota Innova G 2.0 Q A/T Venturer Tahun 2020 1 Unit |
| 16. | Jaya Didarat Sentosa | 03.11/PKS/ DIR/001/100/2022 | 11 Maret 2022 | 11 Maret 2022 s/d 11 Maret 2023 | Toyota Alphard 2.5 A/T tahun 2018 1 Unit |
| 17. | | 03.11/PKS/ DIR/001/100/2023 | 11 Maret 2023 | 11 Maret 2023 s/d 11 Maret 2024 | Toyota Alphard 2.5 A/T tahun 2018 1 Unit |
| 18. | Jatiasih Transindo Mandiri | 06.01/PKS/DIR- OPS/001/200/2023 | 01 Juni 2023 | 01 Juni 2023 s/d 01 Juni 2025 | Toyota CamryHybrid 2.5 A/T Tahun 2019 1(enam) unit Toyota CamryHybrid 2.5 A/T Tahun 2020 1(enam) unit |
| 19. | | | | | |
| 20. | Nurtanio | 07.01/PKS/DIR- OPS/001/200/2023 | 01 Juli 2023 | 01 Juli 2023 s/d 01 Juli 2025 | Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 2022 1 Unit |
| 21. | RS PELNI | 05.01/PKS/DIR- OPS/001/200/2023 | 01 Mei 2023 | 01 Mei 2023 s/d 31 Juli 2024 | Expander 1.5 GLS Tahun 2020 1 Unit |
| | | 11.21/PKS/ DIR/001/100/2022 | 21 November 2023 | 21 November 2022 s/d 21 Mei 2023 | Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 2019 1 Unit |

d. Usaha Jasa Manage Service, DCS dll

Usaha Jasa Manage Service Embarkasi/Debarkasi dan Frontliner, DCS, Contact Center dan Laporan Perjalanan serta Jurnal Harian Kapal, di Cabang-Cabang PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

d. Manage Service Business, DCS etc.

Embarkation / Disembarkation Service Manage Service Business and Front-liners, DCS, and Contact Center and Travel Reports Ship Daily Journals, at PT PELNI (Persero) Branches, as follows:

Admin Bahan Bakar / Fuel Admin

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | PT PELNI | 12.16/01/SPL/095/2022 | 16 Desember 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Admin Bahan Bakar / Fuel Admin: - Kantor Pusat / Head Office - 1 Orang / People |

Contact Center

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | PT PELNI | TH.01.09-01/KP/2023 | 09 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Contact Center: - Agent Inbound 8 orang / people. - Agent Social Media 7 orang / people. - Trainer & Quality Assurance Agent 1 orang / people. - Team Leader 1 orang / people. |
| 2. | PT Sarana Bandar | SBN/AGR/01.16-01/2023 | 16 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Contact Center : - 2 Orang / people |

e. Kegiatan Usaha Jasa, terdiri dari:

• Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan

Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

e. Service Business Activities, consisting of:

• Escort and Security Services Business

Escort and Security Services Business is a business engaged in the provision of security personnel. In its business activities, the company conducts cooperation contracts, namely:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. | PT PELNI | TH.03.27-01/KP/2023 | 27 Maret 2023 <i>March 27, 2023</i> | 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 | 1. Kantor Pusat / Head Office: Security 28 Orang, Resepsionis 2 Orang, Data Center 3 orang / people 2. Satpam Laut / Marine Security: Security 185 Orang / people 3. Kantor cabang / Branch Office: Security 108 Orang / people |
| 2. | | TH.07.07-02/KP/2023 | 07 Juli 2023 <i>July 07, 2023</i> | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | 4. PELNI Kemayoran: Security 8 Orang / people 5. Gedung Persmat / Permast Buiding: Security 4 Orang / people 6. Galangan Surya / Shipyard Surya: Security 6 Orang / people |
| 3. | Hotel Bahtera PELNI | 11.01/002/SPK/047/2023 | 11 Januari 2023 <i>January 11, 2023</i> | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Tenaga Pengamanan Bahtera Tretes: Sebanyak 4 orang / Tretes Ark Security Force: 4 people |

f. Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan

Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*) adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kebersihan (*Cleaning Service*). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

f. Cleaning Service Business:

Cleaning Service Business is a business engaged in the provision of cleaning services. In its business activities the company contracts with PT PELNI (Persero) as follows:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | PT PELNI | TH.07.10-04/KP/2023 | 10 Juli 2023 | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | Cleaning Service Laut On Board: a. Kapal / <i>Ship</i> 3000 - 18 Orang / <i>People</i> , b. Kapal / <i>Ship</i> 2000 - 15 Orang / <i>People</i> , c. kapal / <i>Ship</i> 1000 - 9 Orang / <i>People</i> d. kapal / <i>Ship</i> 500 - 5 Orang / <i>People</i> |
| 2. | | TH.03.08- 04/KP/2023 | 08 Maret 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 | |
| 3. | | TH.09.18-05/SPK/2023 | 18 September 2023 | 01 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 | |
| 4. | | TH.02.01-01/KP/2023 | 02 Oktober 2023 | - | Cleaning Gedung: - Kantor Pusat - 31 Orang / <i>People</i> , - Tg Priok & Persmat - 4 Orang / <i>People</i> , - Kemayoran - 3 Orang / <i>People</i> - Surabaya - 8 Orang / <i>People</i> - Makassar - 3 Orang / <i>People</i> - Kupang - 1 Orang / <i>People</i> - Balikpapan - 1 Orang / <i>People</i> - Ambon - 2 Orang / <i>People</i> - Sampit - 1 Orang / <i>People</i> - Semarang - 2 Orang / <i>People</i> - Tual - 1 Orang / <i>People</i> - Pare-Pare - 1 Orang / <i>People</i> - Kendari - 1 Orang / <i>People</i> - Denpasar - 3 Orang / <i>People</i> - Batulicin - 1 Orang / <i>People</i> - Ternate - 1 Orang / <i>People</i> - Manokwari - 2 Orang / <i>People</i> - Jayapura - 2 Orang / <i>People</i> - Bitung - 2 Orang / <i>People</i> - Bau-bau - 1 Orang / <i>People</i> - Nabire - 1 Orang / <i>People</i> - Merauke - 1 Orang / <i>People</i> - Biak - 1 Orang / <i>People</i> - Namlea - 1 Orang / <i>People</i> - Luwuk - 1 Orang / <i>People</i> |
| 5. | | TH.02.01-01/KP/2023 | 01 Februari 2023 | 01 Januari s/d 31 Desember 2023 | |
| 6. | | TH.04.12-01/SPK/2022 | 07 Februari 2023 | - | Cleaning Service Laut: / Ocean Cleaning Service: |
| 7. | | TH.04.06-01/SPK/2023 | 06 Juli 2023 | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | a. Kapal 3000 - 18 Orang / <i>People</i> |

g. Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor

Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor adalah Usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga Janitor. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

g. Janitorial Management Services Business

Janitor Management Services Business is a business engaged in the provision of Janitor personnel. In its business activities the company contracts with PT PELNI (Persero) as follows:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | PT PELNI | TH.12.21-02/SS/2022 | 21 Desember 2022 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | 1. Janitor Kantor Pusat: Security 37 Orang / <i>People</i> 2. Janitor Kantor Cabang: / Branch Office Janitor - Balikpapan - 1 Orang - Ambon - 1 Orang / <i>People</i> - Medan - 1 Orang / <i>People</i> - Bima - 1 Orang / <i>People</i> - Tarakan - 1 Orang / <i>People</i> - Pare-Pare - 1 Orang - Kaimana - 1 Orang / <i>People</i> - Tg Pinang - 1 Orang / <i>People</i> - Palu - 1 Orang / <i>People</i> - Nunukan - 1 Orang / <i>People</i> - Surabaya - 1 Orang / <i>People</i> - Bitung - 1 Orang / <i>People</i> - Denpasar - 1 Orang / <i>People</i> - Biak - 1 Orang / <i>People</i> |
| 2. | | TH.12.21-02/SS/2022 | 01 Agustus 2023 | - | |
| 3. | | TH.12.27-05/SPK/2022 | 27 Desember 2022 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | |
| 4. | | TH.12.27-05/SPK/2022 | 03 Maret 2023 | - | |

h. Usaha Jasa Pelayanan Pengelolaan Kasur (Housekeeping)

Usaha Jasa Pengelolaan Kasur adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga untuk mengelola, merawat kasur di atas kapal penumpang PT PELNI (Persero). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

h. Mattress Management Service Business (Housekeeping)

Mattress Management Services Business is a business engaged in providing personnel to manage, maintain mattresses on board PT PELNI (Persero) passenger ships. In its business activities the company contracts with PT PELNI (Persero) as follows:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | PT PELNI | TH.07.10-02/KP/2023 | 07 Juli 2023 | 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023 | Cleaning Service Laut On Board: a. Kapal / <i>Ship</i> 3000 - 4 Orang / <i>People</i> , b. Kapal / <i>Ship</i> 2000 - 3 Orang / <i>People</i> , c. kapal / <i>Ship</i> 1000 - 3 Orang / <i>People</i> d. kapal / <i>Ship</i> 500 - 1 Orang / <i>People</i> |
| 2. | | TH.03.24- 01/KP/2023 | 24 Maret 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 | |
| 3. | | TH.09.15-01/SPK/2023 | 15 September 2023 | 01 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 | |

DCS

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | PT PELNI | TH.01.11-03/KP/2023 | 11 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas DCS / DCS Officer: - 117 Orang / People Petugas Admin Emplooi / Emplooi Admin Officer: - 18 Orang / People |

Sopir / Driver

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | PT PELNI | TH.12.26-02/SS/2022 | 26 Desember 2022 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Driver Direksi / Directors Driver: - 117 Orang / People Driver Operasional / Operational Driver: - 18 Orang / People |

Embarkasi Debarkasi / Embarkation Debarkation

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | PT PELNI | TH.01.04-02/KP/2023 | 04 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Embarkasi/Debarkasi: / Embarkation/Debarkation Officer: - 77 Orang / People Frontliner: - 6 Orang / People |

Pelayanan Tiket / Ticket Service

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | PT PELNI | TH.02.23-03/KP/2023 | 04 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Pelayanan Tiket / Ticket Service Officer: - 122 Orang yg tersebar di Kantor cabang PT PELNI / 122 people spread across PT PELNI branch offices |
| 2. | PT PELNI | TH.02.23-03/KP/2023 | 23 Februari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | |

Pengelolaan Layanan / Manage Service

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | HOTEL BAHTERA PELNI | 11.01/001/SPK/047/2023 | 11 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Administrasi / Administration Officer - 1 Orang / People Petugas Marketing dan Sales / Marketing and Sales Officers - 1 Orang / People Petugas Front Office / Front Office Clerk - 4 Orang / People Juru Masak/Koki / Cook - 2 Orang / People Teknisi / Technician - 2 Orang / People Pelayanan / Services - 9 Orang / People Petugas Kebun dan Taman / Garden and Park Attendant - 2 Orang / People |

Reservasi Tiket / *Ticket Reservation*

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | PT PELNI | TH.02.20-04/SPK/2023 | 20 Februari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Reservasi Tiket / <i>Ticket Reservation Officer</i> - 6 Orang / <i>People</i> |

Teknisi dan Driver RS Pelni / *Pelni Hospital Technician and Driver*

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | RS PELNI | SPK/23/01/037 | 27 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Teknisi dan Pemulasaraan / <i>Technician and Maintenance Officer</i> - 8 Orang / <i>People</i> Petugas Driver / <i>Driver Officer</i> - 3 Orang / <i>People</i> |

Teknisi / *Technician*

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | PT PELNI | 01.04/03/SPL/095/2023 | 04 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Teknisi Pontianak / <i>Pontianak Engineering Officer</i> - 1 Orang / <i>People</i> |
| 2. | RS PELNI | SPK/22/12/010A | 07 Desember 2023 | 09 Desember 2023 s/d 08 Juni 2023 | Petugas Teknisi Outsourcing RS PELNI / <i>PELNI Hospital Outsourcing Technician</i> - 1 Orang / <i>People Team Leader</i> - 9 Orang Anggota / <i>9 Members</i> |
| 3. | RS PELNI | SPK/23/06/012 | 10 Juni 2023 | 09 Juni 2023 s/d 08 September 2023 | |
| 4. | PT PELNI | 01.04/02/SPL/095/2023 | 04 Januari 2023 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Teknisi Surabaya / <i>Surabaya Engineering Officer</i> - 1 Orang / <i>People</i> |

TKBM

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | PBM Sarana Bandar Nasional | SBN/AGR/12.16- 01/2022 | 26 Desember 2022 | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Tenaga Kerja Bonkar Muat / <i>Labor Officer Loading and Unloading</i> - 4 Orang / <i>People</i> |
| 2. | PT PELNI | TH.02.07-01/SPK/2023 | 07 Februari 2023 | 01 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Petugas Tenaga Kerja Bonkar Muat / <i>Labor Officer Loading and Unloading</i> - 4 Orang / <i>People</i> |

i. Usaha Jasa Maintenance

Usaha *Maintenance* bergerak diusaha jasa perbaikan dan pemeliharaan Kapal, AHU, Pengadaan *Sparepart*, dan lainnya, dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

i. Maintenance Service Business

The Maintenance business is engaged in the business of repair and maintenance services for ships, AHU, spare parts procurement, and others, in its business activities, the Company conducts cooperation contracts, namely:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1. | PT PELNI | TH.08.22-03/SPK/2022 | 22 Agustus 2022 | 22 Agustus 2022 | Adendum Nomor 1 SPK Nomor TH.08.22-03/SPK/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Pengadaan Suku Cadang Battery Untuk Kapal-Kapal PT PELNI (Persero) / <i>Addendum Number 1 SPK Number TH.08.22-03/SPK/2022 Dated August 22, 2022 Regarding Procurement of Battery Parts for PT PELNI (Persero) Ships</i> |
| 2. | PT PELNI | TH.11.06-01/KP/2023 | 06 November 2023 | 17 Mei 2023 s/d 16 Desember 2023 | Pengadaan Barang Dan Jasa Pemasangan Vinyl Deck 2 S/D 7 KM. Sirimau / <i>Procurement of Goods and Services for Vinyl Deck 2 S/D 7 KM. Sirimau</i> |
| 3. | PT PELNI | TH.11.09-01/KP/2023 | 09 November 2023 | 17 Maret 2023 s/d 16 Desember 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemasangan Vinyl Ruang Ekonomi KM. Kelimutu / <i>Procurement of Goods and Services for Vinyl Installation of KM Economy Room. Kelimutu</i> |
| 4. | PT PELNI | TH.11.08-04/SPK/2023 | 08 November 2023 | 19 April 2023 s/d 18 Agustus 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Blower No. E7, 1, 6, 8, E9, & 9 dan Coil AHU No. 2, 3, 6, 8, 10, & 18 KM. Sinabung / <i>Procurement of Goods and Services for Repair of Blower No. E7, 1, 6, 8, E9, & 9 and Coil AHU No. 2, 3, 6, 8, 10, & 18 KM. Sinabung</i> |
| 5. | PT PELNI | TH.03.31-01/KP/2023 | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2023 s/d 23 Maret 2024 | Pengadaan Barang Diffuser AC Kapal Penumpang / <i>Procurement of Passenger Ship AC Diffuser Goods</i> |
| 6. | PT PELNI | TH.01.18-04/SPK/2023 | 18 Januari 2023 | 16 September 2022 s/d 20 November 2022 | Pengadaan Barang & Jasa Pemasangan V ynii Lantai serta Vynil Lantai Tempat Tidur KM. Pangrango, KM. Tatamailau, KM. Jetliner, KM. Kelud dan KM. Wilis / <i>Procurement of Goods & Services for the Installation of V ynii Floor and Vynil Floor Bed KM. Pangrango, KM. Tatamailau, KM. Jetliner, KM. Kelud and KM. Wilis</i> |
| 7. | PT PELNI | TH.01.25-01/SPK/2023 | 25 Januari 2023 | 29 September 2022 s/d 28 Maret 2023 | Pengadaan Barang & Jasa Pengadaan Supply Pemasangan Kayu Deck KM Dorolonda dan KM Bukit Siguntang / <i>Procurement of Goods & Services Procurement of Wood Deck Installation Supply KM Dorolonda and KM Bukit Siguntang</i> |
| 8. | PT PELNI | TH.03.13-04/SPK/2023 | 13 Maret 2023 | 10 Januari 2023 s/d 09 Desember 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Hydraulic Cylinder Crane KM. Sabuk Nusantara 100 / <i>Procurement of Goods and Services for the Repair of Hydraulic Cylinder Crane KM. Sabuk Nusantara 100</i> |

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 9. | PT PELNI | TH.02.23- 02 /SPK/2023 | 23 Februari 2023 | 08 Februari 2023 s/d 07 Desember 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi dan AHU & Blower KM Tatamailau / <i>Procurement of Goods and Services for Bathroom Repair and AHU & Blower KM Tatamailau</i> |
| 10. | PT PELNI | TH.02.23-02/SPK/2023 | 23 Februari 2023 | 08 Februari 2023 s/d 07 Desember 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi dan AHU & Blower KM. Tilongkabila / <i>Procurement of Goods and Services for Bathroom Repair and AHU & Blower KM. Tilongkabila</i> |
| 11. | PT PELNI | TH.11.09-03/SPK/2023 | 09 November 2023 | 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPK | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Blower AHU No. 2, 3, 4, 6 dan 7 KM. Gunung Dempo / <i>Procurement of Goods and Services for AHU Blower Repair No. 2, 3, 4, 6 and 7 KM. Gunung Dempo</i> |
| 12. | PT PELNI | TH.07.10-02/SPK/2023 | 10 Juli 2023 | 24 Januari 2023 s/d 23 Desember 2023 | Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Roller Bearing Crane KM. Sabuk Nusantara 68 / <i>Procurement of Goods and Services for Repair of Roller Bearing Crane KM. Belt Nusantara 68</i> |

j. Usaha Jasa TI

Usaha *Maintenance* bergerak diusaha jasa pengadaan perangkat IT dan lainnya, dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

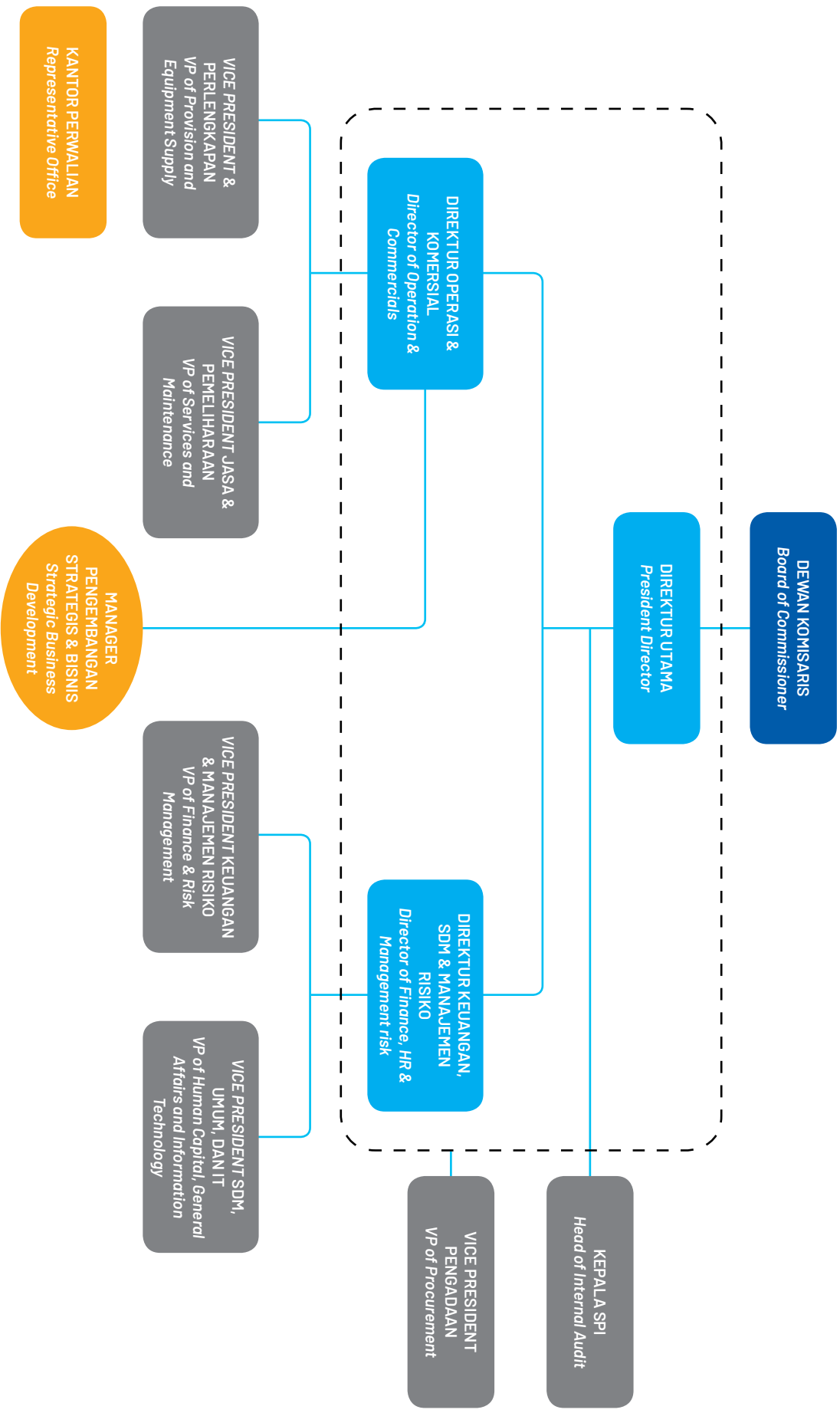
j. IT Service Business

The Maintenance business is engaged in the business of procurement services for IT equipment and others, in its business activities, the Company conducts cooperation contracts, namely:

| NO. | PELANGGAN / CUSTOMER | NOMOR KONTRAK / CONTRACT NUMBER | TANGGAL KONTRAK / DATE NUMBER | PERIODE KONTRAK / CONTRACT PERIOD | KETERANGAN / DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | PT PELNI | TH.05.16-01/SPK/2023 | 16 Mei 2023 | 16 Mei 2023 s/d 16 Juli 2023 | Pengadaan Perangkat Monitor Interactive Pada Ruang Rapat Lantai 1 dan Ruang Rapat Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) / <i>Procurement of Interactive Monitor Devices in the 1st Floor Meeting Room and Board of Commissioners Meeting Room of PT PELNI (Persero)</i> |
| 2. | PT PELNI | TH.02.21-01/SPK/2023 | | 21 Februari 2023 s/d 30 Juni 2023 | Pekerjaan Pengadaan Kertas Cetak/ Blangko Boarding Pass PT PELNI (Persero) Tahun 2023 Tahap 1 / <i>PT PELNI (Persero) Boarding Pass Printing Paper / Stamps Procurement Work Year 2023 Phase 1</i> |
| 3. | PT PELNI | TH.07.11-01/SPK/2023 | | 11 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023 | Pengadaan Kertas Cetak / Blangko Boarding Pass PT. PELNI (Persero) Tahun 2023 Tahap 2 / <i>Procurement of Printing Paper / Boarding Pass Stamps PT PELNI (Persero) Year 2023 Phase 2</i> |
| 4. | PT PELNI | TH.06.06-03/KP/2023 | | 6 minggu Sejak tanggal kontrak dibuat | Pengadaan Perangkat Pendukung Implementasi E-Ticket Kapal Penumpang Tahun 2023 / <i>Procurement of Supporting Devices for the Implementation of Passenger Ship E-Tickets in 2023</i> |
| 5. | PT PELNI | TH.01.20-01/KP/2023 | | 20 Januari 2023 s/d 20 April 2023 | Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi <i>Operation Room</i> PT PELNI (Persero) / <i>Procurement of Information Technology Devices Operation Room PT PELNI (Persero)</i> |
| 6. | PT PELNI | TH.10.18-06/SPK/2023 | | 18 Oktober 2023 s/d 18 Desember 2023 | Pengadaan Perangkat <i>Hospitality TV</i> di Hotel Bahtera / <i>Procurement of Hospitality TV Devices at Bahtera Hotel</i> |
| 7. | PT PELNI | TH.03.08-03/KP/2023 | | 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Pemeliharaan Perangkat Layanan Penumpang di Pelabuhan Tahun 2023 / <i>Procurement of Network Infrastructure and Maintenance of Passenger Service Devices at the Port of 2023</i> |

Struktur Organisasi / Organization Structure

Struktur organisasi tahun 2023 sebagai dasar Surat Direktur Utama PT Pelita Indonesia Djaya Nomor 10.27/DIR/SB/001/100/2022 tanggal 27 Oktober 2022. / The organizational structure for 2023 is based on PT Pelita Indonesia Djaya President Director Letter Number 10.27/DIR/SB/001/100/2022 dated 27 October 2022.



Sertifikasi Perusahaan / Company Certifications



SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
SNI ISO 9001:2015 Quality Management System

Penyelenggara: Amtivo Group Limited
Masa Berlaku: 07 September 2023 - 06 September 2026
Issuer: Amtivo Group Limited
Validity Period: 07 September 2023 - 06 September 2026

SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan
*SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management
System*

Penyelenggara: PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Masa Berlaku: 08 Maret 2021 - 07 Maret 2024
Issuer: PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Validity Period: 08 March 2021 - 07 March 2024





total annual profit of office branch

| Office | Profit | Office | Profit | Office | Profit | Office | Profit | Office | Profit |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001 | 123456 | 002 | 234567 | 003 | 345678 | 004 | 456789 | 005 | 567890 |
| 006 | 678901 | 007 | 789012 | 008 | 890123 | 009 | 901234 | 010 | 012345 |
| 011 | 123456 | 012 | 234567 | 013 | 345678 | 014 | 456789 | 015 | 567890 |
| 016 | 678901 | 017 | 789012 | 018 | 890123 | 019 | 901234 | 020 | 012345 |
| 021 | 123456 | 022 | 234567 | 023 | 345678 | 024 | 456789 | 025 | 567890 |
| 026 | 678901 | 027 | 789012 | 028 | 890123 | 029 | 901234 | 030 | 012345 |
| 031 | 123456 | 032 | 234567 | 033 | 345678 | 034 | 456789 | 035 | 567890 |
| 036 | 678901 | 037 | 789012 | 038 | 890123 | 039 | 901234 | 040 | 012345 |
| 041 | 123456 | 042 | 234567 | 043 | 345678 | 044 | 456789 | 045 | 567890 |
| 046 | 678901 | 047 | 789012 | 048 | 890123 | 049 | 901234 | 050 | 012345 |
| 051 | 123456 | 052 | 234567 | 053 | 345678 | 054 | 456789 | 055 | 567890 |
| 056 | 678901 | 057 | 789012 | 058 | 890123 | 059 | 901234 | 060 | 012345 |
| 061 | 123456 | 062 | 234567 | 063 | 345678 | 064 | 456789 | 065 | 567890 |
| 066 | 678901 | 067 | 789012 | 068 | 890123 | 069 | 901234 | 070 | 012345 |
| 071 | 123456 | 072 | 234567 | 073 | 345678 | 074 | 456789 | 075 | 567890 |
| 076 | 678901 | 077 | 789012 | 078 | 890123 | 079 | 901234 | 080 | 012345 |
| 081 | 123456 | 082 | 234567 | 083 | 345678 | 084 | 456789 | 085 | 567890 |
| 086 | 678901 | 087 | 789012 | 088 | 890123 | 089 | 901234 | 090 | 012345 |
| 091 | 123456 | 092 | 234567 | 093 | 345678 | 094 | 456789 | 095 | 567890 |
| 096 | 678901 | 097 | 789012 | 098 | 890123 | 099 | 901234 | 100 | 012345 |

2

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Hasil kinerja bisnis PT PID di tahun 2023 ini secara umum masih tergolong cukup baik dan relatif bisa mendekati dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. Bahkan jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya, beberapa rasio kinerja dari PID terbukti mampu meningkat secara signifikan.

The results of PT PID's business performance in 2023 are generally still quite good and can relatively approach the budget targets set in the RKAP. Even when compared to the achievements in the previous year, several performance ratios from PID proved to be able to increase significantly.

Di Tengah Situasi Sulit, PT PID Tetap Mampu Meraih Kinerja Cukup Baik / *In the Midst of Difficult Situations, PT PID Was Still Able to Achieve Good Performance*

Aktivitas ekonomi secara mengejutkan tahan banting melalui disinflasi global pada tahun 2022-2023. Ketika inflasi global turun dari puncaknya pada pertengahan tahun 2022, aktivitas ekonomi tumbuh dengan mantap di 2023, menentang peringatan stagflasi dan resesi global. Pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan tetap stabil, mencerminkan perkembangan permintaan yang mendukung termasuk pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang lebih besar perkiraan dan ekspansi dari sisi penawaran di tengah peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak terduga. Ketahanan ekonomi yang tak terduga, meskipun ada kenaikan suku bunga bank sentral yang signifikan yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas harga, juga mencerminkan kemampuan rumah tangga di negara-negara maju utama untuk memanfaatkan tabungan substansial yang terakumulasi selama pandemi.

Pertumbuhan global, yang diperkirakan mencapai 3,2% pada tahun 2023, diproyeksikan akan terus berlanjut dengan laju yang sama pada tahun 2024 dan 2025. Perkiraan untuk tahun 2024 direvisi naik 0,1 poin persentase dari Pembaruan *World Economy Outlook (WEO)* Januari 2024, dan 0,3 poin persentase dari WEO Oktober 2023. Laju ekspansi rendah menurut standar historis, karena faktor jangka pendek, seperti biaya pinjaman yang masih tinggi dan penarikan dukungan fiskal, dan efek jangka panjang dari pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina; pertumbuhan produktivitas yang lemah; dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi.

Inflasi umum global diperkirakan akan turun dari rata-rata tahunan 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,9% pada tahun 2024 dan 4,5% pada tahun 2025, dengan negara-negara maju kembali ke target inflasi mereka lebih cepat daripada negara berkembang dan pasar negara berkembang. Perkiraan terbaru untuk pertumbuhan global lima tahun dari sekarang sebesar 3,1% adalah yang terendah dalam beberapa dekade terakhir. Laju konvergensi menuju standar hidup yang lebih tinggi untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah telah melambat, menyiratkan masih adanya kesenjangan ekonomi global. Prospek jangka menengah yang relatif lemah mencerminkan pertumbuhan PDB per orang yang lebih rendah yang berasal dari friksi struktural yang terus-menerus yang menghalangi modal dan tenaga kerja untuk

Economic activity was surprisingly resilient through global disinflation in 2022-2023. As global inflation eased from its peak in mid-2022, economic activity grew steadily in 2023, defying warnings of global stagflation and recession. Employment and income growth remained steady, reflecting supportive demand developments - including larger-than-expected government spending and household consumption - and supply-side expansion amid an unexpected increase in labor force participation. The unexpected resilience of the economy, despite significant central bank interest rate hikes aimed at restoring price stability, also reflects the ability of households in major advanced economies to capitalize on substantial savings accumulated during the pandemic.

Global growth, which is expected to reach 3.2% in 2023, is projected to continue at the same pace in 2024 and 2025. The forecast for 2024 was revised up 0.1 percentage point from the January 2024 World Economy Outlook (WEO) Update, and 0.3 percentage point from the October 2023 WEO. The pace of expansion is low by historical standards, due to short-term factors, such as still-high borrowing costs and the withdrawal of fiscal support, and longer-term effects of the COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine; weak productivity growth; and increasing geo-economic fragmentation.

Global headline inflation is expected to fall from an annual average of 6.8% in 2023 to 5.9% in 2024 and 4.5% in 2025, with advanced economies returning to their inflation targets faster than emerging market and developing economies. The latest forecast for global growth five years from now - at 3.1% - is the lowest in decades. The pace of convergence towards higher living standards for middle- and low-income countries has slowed, implying the persistence of global economic disparities. The relatively weak medium-term outlook reflects lower GDP growth per person stemming from persistent structural frictions that prevent capital and labor from moving to productive

berpindah ke perusahaan-perusahaan yang produktif. Prospek yang lebih redup untuk pertumbuhan di RRT dan negara-negara berkembang besar lainnya, mengingat pangsa mereka yang semakin besar dalam perekonomian global, akan membebani prospek mitra dagang.

Risiko-risiko terhadap prospek global saat ini secara umum seimbang. Pada sisi negatifnya, lonjakan harga baru yang berasal dari ketegangan geopolitik, termasuk yang berasal dari perang di Ukraina dan konflik di Gaza dan Israel, dapat, bersama dengan inflasi inti yang terus-menerus di mana pasar tenaga kerja masih ketat, meningkatkan ekspektasi suku bunga dan menurunkan harga aset. Perbedaan dalam kecepatan disinflasi di antara negara-negara besar juga dapat menyebabkan pergerakan mata uang yang membuat sektor keuangan berada di bawah tekanan. Suku bunga yang tinggi dapat memiliki efek pendinginan yang lebih besar daripada yang dibayangkan karena hipotek dengan suku bunga tetap diatur ulang dan rumah tangga harus menanggung utang yang tinggi, menyebabkan tekanan keuangan.

Perbedaan-perbedaan antar negara memerlukan respons kebijakan yang disesuaikan. Mengintensifkan reformasi yang meningkatkan penawaran akan memfasilitasi inflasi dan pengurangan utang, memungkinkan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan menuju rata-rata era prapandemi yang lebih tinggi, dan mempercepat konvergensi menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kerja sama multilateral diperlukan untuk membatasi biaya dan risiko fragmentasi geoekonomi dan perubahan iklim, mempercepat transisi ke energi hijau, dan memfasilitasi restrukturisasi utang.

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh kuat dan stabil meski berada dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, perekonomian di tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan yang kuat di kisaran 5,05 persen. Namun tidak hanya kuat, pertumbuhan ekonomi juga berkualitas, ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tentu tidak lepas dari peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang terkendali.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah merespons tanda-tanda perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pelemahan global melalui paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

firms. A dimmer outlook for growth in China and other large emerging economies, given their growing share in the global economy, will weigh on trading partners' prospects.

The risks to the global outlook are now generally balanced. On the downside, new price spikes stemming from geopolitical tensions, including those from the war in Ukraine and the conflicts in Gaza and Israel, could, together with persistent core inflation where labor markets are still tight, raise interest rate expectations and lower asset prices. Differences in the speed of disinflation among major countries can also lead to currency movements that put the financial sector under pressure. High interest rates can have a greater cooling effect than imagined as fixed-rate mortgages reset and households have to take on high debt, causing financial stress.

Cross-country differences require customized policy responses. Intensifying supply-enhancing reforms will facilitate inflation and debt reduction, allow economies to boost growth towards higher pre-pandemic era averages, and accelerate convergence towards higher income levels. Multilateral cooperation is needed to limit the costs and risks of geo-economic fragmentation and climate change, accelerate the transition to green energy, and facilitate debt restructuring.

Indonesia's economy showed a positive performance with strong and stable growth despite the global economic slowdown and uncertainty. Overall, the economy in 2023 recorded strong growth at around 5.05 percent. But not only strong, economic growth is also of high quality, indicated by declining unemployment and poverty rates. This is certainly inseparable from the role of the State Budget as a shock absorber in maintaining people's purchasing power and a controlled inflation rate.

In this regard, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati said that the Government responded to signs of economic slowdown as a result of the global downturn through policy packages issued by the Government.

Sepanjang tahun 2023, konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian juga tumbuh sebesar 4,82 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 2,81 persen setelah sempat berkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi Pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95 persen.

Sementara, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 4,4 persen secara tahunan, atau menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, aktivitas belanja modal Pemerintah, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sektor swasta turut andil menjaga kinerja positif investasi. Selain itu, Kondisi infrastruktur yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik yang terjaga menjadi faktor utama menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi.

Sementara, peningkatan mobilitas masyarakat juga telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Sejalan dengan itu, sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 10,01 persen secara tahunan.

Secara spasial, meskipun seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan positif, namun wilayah berbasis hilirisasi masih terus mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional, seperti Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua tumbuh tinggi masing-masing sebesar 6,37 persen dan 6,94 persen, didorong oleh produk-produk hilirisasi mineral. Hal serupa juga terjadi di Wilayah Kalimantan, Jawa dan Sumatra.

Berdasarkan dinamika global dan potensi perekonomian domestik tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh kuat pada 2024, sebesar 5,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2024 berperan untuk meredam gejolak eksternal dan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Throughout 2023, public consumption as the main contributor to the economy also grew by 4.82 percent and Government Consumption expenditure (PKP) in the fourth quarter of 2023 grew positively by 2.81 percent after contracting in the previous quarter. Thus, government consumption throughout 2023 grew by 2.95 percent.

Meanwhile, the growth of Gross Fixed Capital Formation (PMTB) or investment was recorded at 4.4 percent on an annual basis, or stronger than the previous year. The acceleration of the completion of the National Strategic Project, Government capital expenditure activities, to the development of the Capital City of the Archipelago (IKN) and the private sector contributed to maintaining the positive performance of investment. In addition, improving infrastructure conditions, excellent macroeconomic performance, and maintained socio-political stability are the main factors maintaining business confidence to invest.

Meanwhile, increased community mobility has also driven the growth of the transportation sector throughout 2023. In line with that, the accommodation and eating and drinking sector also grew positively by 10.01 percent on an annual basis.

Spatially, although all regions recorded positive growth, downstream-based regions continued to record higher growth than national growth, such as Sulawesi, Maluku and Papua regions grew by 6.37 percent and 6.94 percent respectively, driven by downstream mineral products. The same thing also happened in Kalimantan, Java and Sumatra.

Based on these global dynamics and the potential of the domestic economy, the Indonesian economy is estimated to still grow strongly in 2024, at 5.2 percent. In line with this, the 2024 State Budget plays a role in reducing external turmoil and is directed at accelerating economic transformation in an inclusive and sustainable manner.



Realisasi Pendapatan Usaha Meningkatkan Signifikan dibanding Tahun 2022 / Business Income Realization Increased Significantly compared to 2022

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| NO. | URAIAN DESCRIPTION | TAHUN 2022 REALISASI AUDITED/ YEAR 2022 REALIZATION AUDITED | TAHUN / YEAR 2023 | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|----------------|---|--|--|----------------------|
| | | | RKAP | PROGNOSA | REALISASI AUDITED/ REALIZATION AUDITED | CAPAIAN/ ACHIEVEMENT (%) 7=(6/4) | DEVIASI/ DEVIATION (%) 8=(6-5)/5 | TREND (%) 9=(6/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PENDAPATAN USAHA / BUSINESS REVENUE | | | | | | | |
| A | PENDAPATAN USAHA SENDIRI / OWN BUSINESS INCOME | | | | | | | |
| 1 | Usaha Jasa / <i>Service Business</i> | 104.054 | 116.709 | 123.776 | 133.029 | 113,98 | 7,48 | 127,85 |
| 2 | Usaha Komersial / <i>Commercial Business</i> | 324.070 | 429.505 | 386.056 | 380.550 | 88,60 | (1,43) | 117,43 |
| 3 | Usaha JMI / <i>JMI Business</i> | 21.575 | 93.736 | 35.213 | 37.417 | 39,92 | 6,26 | 173,43 |
| 4 | Usaha Penunjang / <i>Supporting Business</i> | 4.075 | 1.229 | 7.186 | 10.446 | 850,10 | 45,37 | 256,34 |
| | Jumlah Pendapatan Usaha Sendiri / Total Own Business Revenue | 453.774 | 641.178 | 552.231 | 561.443 | 87,56 | 1,67 | 123,73 |
| B | PENDAPATAN USAHA ANAK / SUBSIDIARIES' OPERATING INCOME | | | | | | | |
| 1 | PT PBN | 3.755 | 4.218 | 4.555 | 4.543 | 107,69 | (0,27) | 120,98 |
| | Jumlah Pendapatan Usaha Anak/ Total Revenue of subsidiaries | 3.755 | 4.218 | 4.555 | 4.543 | 107,69 | (0,27) | 120,98 |
| | JUMLAH PENDAPATAN USAHA/ TOTAL BUSINESS REVENUE | 457.529 | 645.397 | 556.786 | 565.986 | 87,70 | 1,65 | 123,70 |
| II | BIAYA USAHA / OPERATING COSTS | | | | | | | |
| A | BIAYA USAHA SENDIRI / OWN BUSINESS EXPENSES | | | | | | | |
| 1 | Usaha Jasa / <i>Service Business</i> | 98.228 | 91.459 | 104.978 | 117.144 | 128,08 | 11,59 | 119,26 |
| 2 | Usaha Komersial / <i>Commercial Business</i> | 262.806 | 374.828 | 328.532 | 324.909 | 86,68 | (1,10) | 123,63 |
| 3 | Usaha JMI / <i>JMI Business</i> | 14.520 | 74.249 | 31.817 | 23.349 | 31,45 | (26,61) | 160,80 |
| 4 | Usaha Penunjang / <i>Supporting Business</i> | 2.535 | 959 | 5.477 | 6.467 | 674,21 | 18,08 | 255,06 |
| | Jumlah Biaya Usaha Sendiri / Total cost of own business | 378.090 | 541.496 | 470.804 | 471.869 | 87,14 | 0,23 | 124,80 |
| B | BIAYA USAHA ANAK / COST OF SUBSIDIARY'S BUSINESS | | | | | | | |
| 1 | PT PBN | 1.569 | 1.835 | 2.125 | 2.286 | 124,55 | 7,57 | 145,72 |
| | Jumlah Biaya Usaha Anak / Total Cost of Subsidiary Business | 1.569 | 1.835 | 2.125 | 2.286 | 124,55 | 7,57 | 145,72 |
| | JUMLAH BIAYA USAHA / TOTAL BUSINESS | 379.658 | 543.331 | 472.929 | 474.154 | 87,27 | 0,26 | 124,89 |

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| NO. | URAIAN DESCRIPTION | TAHUN 2022 REALISASI AUDITED / YEAR 2022 REALIZATION AUDITED | TAHUN / YEAR 2023 | | | | | |
|------|---|--|-------------------|----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | RKAP | PROGNOSA | REALISASI AUDITED / REALIZATION AUDITED | CAPAIAN / ACHIEVEMENT (%) 7=(6/4) | DEVIASI / DEVIATION (%) 8=(6-5)/5 | TREND (%) 9=(6/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III | LABA (RUGI) KOTOR USAHA / LABA (RUGI) KOTOR USAHA | 77.871 | 102.066 | 83.857 | 91.831 | 89,97 | 9,51 | 117,93 |
| IV | BIAYA OVERHEAD / OVERHEAD COST | 52.191 | 61.027 | 55.097 | 61.014 | 99,98 | 8,96 | 116,90 |
| V | LABA (RUGI) BERSIH USAHA / NET PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS | 25.680 | 41.039 | 27.860 | 30.817 | 75,09 | 10,62 | 120,01 |
| VI | LABA (RUGI) DILUAR USAHA / PROFIT (LOSS) EXCLUDING BUSINESS | 7.946 | 1.228 | 1.585 | 7.873 | 641,09 | 396,73 | 99,08 |
| VII | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK / PROFIT (LOSS) BEFORE TAX | 33.626 | 42.267 | 29.444 | 38.690 | 91,54 | 31,40 | 115,06 |
| | Bagian Kepemilikan Minoritas / Share of Minority Ownership | 5 | 467 | 468 | 8 | 1,80 | (98,20) | 167,87 |
| | Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan & Pajak Kini / Deferred & Current Tax Income (Expense) | (7.695) | (6.827) | (6.478) | (10.517) | 154,06 | 62,36 | 136,67 |
| VIII | LABA (RUGI) KONSOLIDASI / CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) | 25.925 | 34.973 | 22.499 | 28.164 | 80,53 | 25,18 | 108,64 |

Pendapatan Usaha

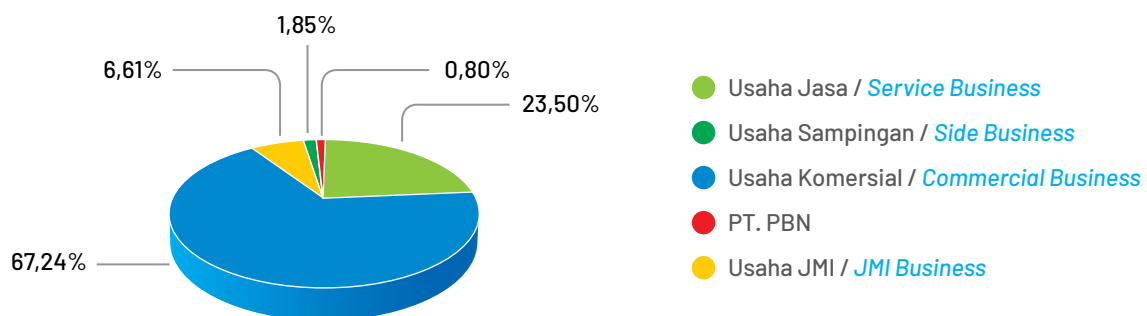
Pendapatan usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp565.986 juta atau 87,70% dari anggaran sebesar Rp645.397 juta, dan meningkat 123,70% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2022 sebesar Rp457.529 juta.

Kontribusi Pendapatan usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:

Business Income

Business income in 2023 was realized at Rp 565,957 million or 87.70% of the budget of Rp645,397 million, and increased by 123.70% compared to Business Income in 2022 of Rp457,529 million.

The contribution of business income is illustrated in the graph below:



Pendapatan usaha tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta terkonstribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 23,50%
2. Usaha Komersial 67,24%
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 6,61%
4. Usaha Penunjang 1185%
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,80%

Operating income in 2023 of IDR565,986 million was contributed from:

1. Service business by 23.50%
2. Commercial Business 67.24%
3. JMI business (Maintenance & IT Services) 6.61%
4. Supporting Business 1185%
5. Subsidiary business (PT PBN) of 0.80%

Biaya Usaha Mendekati Target Anggaran

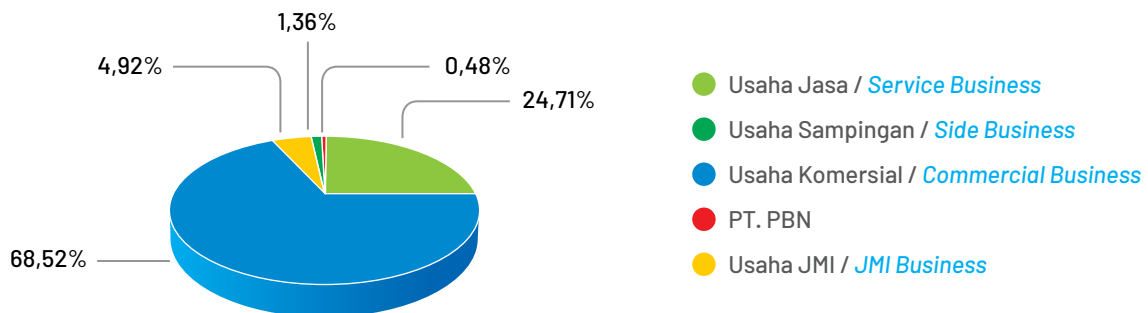
Biaya usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp474.154 juta atau 87,27% dari anggaran sebesar Rp543.331 juta, dan tercapai 124,89% dibandingkan dengan Biaya Usaha tahun 2022 sebesar Rp379.658 juta.

Kontribusi Biaya usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:

Operating Expenses Close to Budget Target

Business expenses in 2023 were realized at Rp474,154 million or 87.27% of the budget of Rp543,331 million, and achieved 124.89% compared to Business Expenses in 2022 of Rp379,658 million.

The contribution of business costs is illustrated in the graph below:



Biaya usaha tahun 2023 sebesar Rp474.154 juta tersebut terkonstribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 24,71%
2. Usaha Komersial 68,52%
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 4,92%
4. Usaha Penunjang 1,36%
5. Usaha Entitas Anak (PBN) sebesar 0,48%

The 2023 operating costs of IDR474,154 million are contributed by:

1. Service business by 24.71%
2. Commercial Business 68.52%
3. JMI Business (Maintenance & IT Services) 4.92%
4. Supporting Business 1.36%
5. Subsidiary Business (PBN) of 0.48%

Lab a Usaha Meningkatkan Tinggi Dibanding 2022

Lab a usaha tahun 2023 terealisasi sebesar Rp91.831 juta atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp102.066 juta, dan tercapai 117,93% dibandingkan dengan lab a usaha tahun 2022 sebesar Rp77.871 juta.

Lab a usaha tahun 2023 sebesar Rp91.831 juta berkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 6%
2. Usaha Komersial sebesar 71%
3. Usaha Jasa Maintenance & IT sebesar 14%
4. Usaha Penunjang sebesar 3%
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 6%

Lab a Usaha terdiri dari:

1. Penghasilan Usaha Jasa *Outsourcing* Tahun 2023 sebesar Rp133.029 Juta atau 113,98% dari anggaran RKAP Tahun 2023 sebesar Rp116.709 juta dan 127,85% dari penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp104.054 juta. Usaha Jasa *Outsourcing* memberikan kontribusi penghasilan sebesar 23,50% dari total penghasilan Tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta. Pendapatan Usaha Jasa *Outsourcing* mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan UMP di tahun 2023.
2. Penghasilan Usaha Komersial Tahun 2023 sebesar Rp380.550 Juta atau 88,60% dari anggaran RKAP Tahun 2023 sebesar Rp429.505 juta dan 117,43% dari penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp324.070 juta. Usaha Komersial memberikan kontribusi penghasilan sebesar 67,24% dari total penghasilan Tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta.
3. Penghasilan Usaha Jasa *Maintenance* dan IT Tahun 2023 sebesar Rp37.417 Juta atau 39,92% dari anggaran RKAP Tahun 2023 sebesar Rp93.736 juta dan 173,43% dari penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp21.575 juta. Usaha Jasa *Maintenance* dan IT memberikan kontribusi penghasilan sebesar 6,61% dari total penghasilan Tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta.

Pendapatan Usaha *Maintenance* dan IT di tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- Kinerja usaha pemeliharaan *maintenance* dan IT secara produksi tercapai dari target produksi di tahun 2023. Namun secara keuangan tidak mencapai target anggaran penghasilan karena pekerjaan pemeliharaan kapal yang di laksanakan PT PID, rata-rata nilai project nya relatif kecil;
- Usaha pemeliharaan, *maintenance* masih dalam tahap pengembangan serta penguatan sumber daya (infrastruktur, sdm dan modal kerja).

Operating Profit Increases Higher than 2022

Operating Profit Increased Higher than 2022
Operating profit in 2023 was realized at Rp91,831 million or 89.97% of the budget of Rp102,066 million, and achieved 117.93% compared to operating profit in 2022 of Rp77,871 million.

Operating profit in 2023 of Rp91,831 million was contributed from:

1. Service business by 6%
2. Commercial Business by 71%
3. Maintenance & IT Services business by 14%
4. Supporting Business by 3%
5. Subsidiary business (PT PBN) 6%

Operating Profit consists of:

1. *Outsourcing Services Business Income* in 2023 amounted to Rp133,029 million or 113.98% of the 2023 RKAP budget of Rp116,709 million and 127.85% of the 2022 income of Rp104,054 million. *Outsourcing Services business* contributed 23.50% of total income in 2023 amounting to Rp565,986 million. *Outsourcing Services Business revenue* has increased in line with the increase in UMP in 2023.
2. *Commercial Business Income* in 2023 amounted to Rp380,550 million or 88.60% of the 2023 RKAP budget of Rp429,505 million and 117.43% of the 2022 income of Rp324,070 million. *Commercial Business* contributed 67.24% of total income in 2023 amounting to Rp565,986 million.
3. *Maintenance and IT Services business income* in 2023 amounted to Rp37,417 million or 39.92% of the 2023 RKAP budget of Rp93,736 million and 173.43% of the 2022 income of Rp21,575 million. The *Maintenance and IT Services business* contributed 6.61% of total income in 2023 of Rp565,986 million.

Maintenance and IT business revenue in 2023 did not reach the target due to several things, namely:

- *The performance of the maintenance and IT business in terms of production was achieved from the production target in 2023. However, financially it did not reach the income budget target because the ship maintenance work carried out by PT PID, the average project value was relatively small;*
- *Maintenance efforts are still in the development stage and strengthening of resources (infrastructure, human resources and working capital).*

4. Penghasilan Usaha Sampingan Tahun 2023 sebesar Rp10.446 Juta atau 850,10% dari anggaran RKAP Tahun 2023 sebesar Rp1.229 juta dan 256,34% dari penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp4.075 juta. Usaha Jasa Sampingan memberikan kontribusi penghasilan sebesar 1,85% dari total penghasilan Tahun 2023 sebesar Rp565.986 juta. Pendapatan usaha sampingan mengalami kenaikan dikarenakan adanya event mudik gratis Hari Raya, pengadaan *amenities/add on* dan pengadaan *cover Kasur*.
5. Laba usaha Entitas anak (PT PBN) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.543 juta atau 107,69% dari anggaran sebesar Rp4.218 juta, dan naik 23,70% dibandingkan dengan laba usaha Entitas anak (PT PBN) tahun 2022 sebesar Rp457.529 juta. Tahun 2023 Entitas anak (PT PBN) memberikan kontribusi laba usaha sebesar 0,80% dari total laba usaha.

4. *Income from Side Business in 2023 amounted to Rp10,446 million or 850.10% of the 2023 RKAP budget of Rp1,229 million and 256.34% of the 2022 income of Rp4,075 million. The side service business contributed 1.85% of total income in 2023 amounting to Rp565,986 million. Side business income increased due to the free Hari Raya homecoming event, procurement of amenities / add ons, and procurement of mattress covers.*
5. *Operating profit of the subsidiary (PT PBN) in 2023 was realized at Rp4,543 million or 107.69% of the budget of Rp4,218 million, and increased by 23.70% compared to the operating profit of the subsidiary (PT PBN) in 2022 of Rp457,529 million. In 2023, the subsidiary (PT PBN) contributed 0.80% of total operating profit.*

Labas Bersih Konsolidasian Meningkat Hingga 108,64%

Labas Bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2023 terealisasi sebesar Rp28.164 juta atau sebesar 80,53% dari anggaran sebesar Rp34.973 juta. Dan jika dibandingkan realisasi labas bersih konsolidasi di tahun 2022 yang masih sebesar Rp25.925 juta, maka kenaikannya mencapai 108,64%.

Consolidated Net Income Increased to 108.64%

Consolidated Net Profit after tax in 2023 was realized at Rp28,164 million or 80.53% of the budget of Rp34,973 million. And when compared to the realization of consolidated net profit in 2022 which still amounted to Rp25,925 million, the increase reached 108.64%.

Capaian Posisi Keuangan

Total Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp328.319 juta atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp440.867 juta dan apabila dibandingkan dengan Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.651 juta, maka trendnya turun sebesar 1,60%.

Financial Position Outcomes

Total Assets

Total Assets as of December 31, 2023 amounted to Rp328,319 million or 98.40% of the budget of Rp440,867 million and when compared to Total Assets as of December 31, 2022 of Rp333,651 million, it represents a decrease of 1.60%..

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| PERKIRAAN/ ESTIMATE | AUDITED 31/12/2022 | PROYEKSI/ PROJECTIONS 31/12/2023 | AUDITED 31/12/2023 | PROSENTASE / PERCENTAGE | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 4 : 3 | 4 : 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ASSET / ASSET | | | | | |
| Asset Lancar / <i>Current Assets</i> | 256.288 | 309.524 | 254.966 | 99,48 | 82,37 |
| Asset Tetap / <i>Fixed Assets</i> | 26.526 | 61.489 | 25.280 | 95,30 | 41,11 |
| Properti Investasi / <i>Investment Property</i> | 19.942 | 20.644 | 23.217 | 116,43 | 112,247 |
| Asset Sewa Guna Usaha / <i>Leasehold Assets</i> | 26.001 | 39.013 | 20.115 | 77,36 | 51,56 |
| Asset Tak Berwujud / <i>Intangible Assets</i> | 2.006 | 5.599 | 1.503 | 74,95 | 26,85 |
| Asset Dalam Penyelesaian / <i>Construction in Progress</i> | 124 | - | 149 | 120,13 | - |
| Asset Hak Guna Usaha / <i>Land Use Rights Asset</i> | - | 504 | (0) | - | (0,00) |
| Asset Pajak Tangguhan / <i>Deferred Tax Asset</i> | 2.765 | 4.095 | 3.090 | 111,75 | 75,44 |
| JUMLAH ASET LIABILITAS MODAL / TOTAL ASSETS LIABILITIES CAPITAL | 333.651 | 440.867 | 328.319 | 98,40 | 74,47 |
| Liabilitas Lancar / <i>Current Liabilities</i> | 134.697 | 185.671 | 103.206 | 76,62 | 55,59 |
| Liabilitas Jangka Panjang / <i>Long-term Liabilities</i> | 10.483 | 8.111 | 8.215 | 78,37 | 101,28 |
| Liabilitas Sewa Jangka Panjang / <i>Long-term Lease Liabilities</i> | - | 5.204 | - | - | - |
| Hak Minoritas / <i>Minority Rights</i> | 132 | 468 | 195 | 148,19 | 41,65 |
| Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / <i>Post-employment Benefit Liabilities</i> | 1.678 | 5.501 | 1.576 | 93,94 | 28,65 |
| Modal dan Cadangan / <i>Capital and Reserves</i> | 144.305 | 173.030 | 190.995 | 137,26 | 110,38 |
| Saldo Laba (Rugi) / <i>Retained Earnings (Loss)</i> | 41.291 | 62.882 | 22.765 | 49,01 | 36,20 |
| Komponen Ekuitas Lainnya / <i>Other Components of Equity</i> | 1.067 | 973 | 1.367 | 128,09 | 140,50 |
| Ekuitas / <i>Equities</i> | 186.794 | 236.380 | 215.322 | 115,27 | 91,09 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL / TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL | 333.651 | 440.867 | 328.319 | 98,40 | 74,47 |

Capaian Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Flow) / Achievement of Cash Receipt and Expenditure (Cash Flow)

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| URAIAN / DESCRIPTION | TAHUN / YEAR 2022 | TAHUN / YEAR 2023 | | PROSENTASE / PERCENTAGE | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | | RKAP | REALISASI / REALIZATION | 4 : 3 | 4 : 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | | | | |
| Penerimaan Kas dari Pelanggan / <i>Cash Receipts from Customers</i> | 465.343 | 486.309 | 489.972 | 100,75 | 105,29 |
| Pembayaran Kepada Pemasok / <i>Payment to Suppliers</i> | (402.583) | (376.000) | (447.227) | 118,96 | 111,10 |
| Pembayaran Biaya Operasional / <i>Payment of Operating Expenses</i> | (31.004) | (59.295) | (37.101) | 62,57 | 19,67 |
| Pengeluaran Lain-lain / <i>Other Expenses</i> | (2.356) | 245,96 | (6.721) | (2.733) | 285,26 |
| Pembayaran Pajak / <i>Tax Payment</i> | (13.449) | (16.579) | (5.996) | 35,98 | 44,36 |
| Penerimaan Lain-lain / <i>Other Receipts</i> | 223 | - | 1.198 | - | 537,73 |
| Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi / Total Net Cash Flow from Operating Activities | 16.175 | 34.680 | (5.896) | (17,0) | (36,4) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | | | | | |
| Penambahan Deposito / <i>Addition of Deposits</i> | - | - | - | - | - |
| Penambahan Aset Tetap / <i>Addition of Fixed Assets</i> | (16.043) | (11.649) | (899) | 7,72 | 5,61 |
| Pemasangan IT / <i>IT Installation</i> | | (3.148) | - | - | - |
| Penambahan Aset Tak Berwujud / <i>Addition of Intangible Assets</i> | 2.028 | - | 4.377 | - | 215,81 |
| Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Total Net Cash Flow from Investing Activities | (14.015) | (14.797) | 3.477 | (23,5) | (24,8) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Bank / <i>Bank Loan Receipt</i> | | - | 126.500 | - | - |
| Penerimaan/Pembayaran Hutang Bank/Pihak III / <i>Receipt/Payment of Bank/Party III Debt</i> | (13.317) | (8.221) | (104.500) | 1.271,12 | 784,74 |
| Penerimaan Dari Dinvestasi / <i>Receipt from Investments</i> | - | - | 55 | - | - |
| Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Total Net Cash Flow from Financing Activities | (13.317) | (8.221) | 22.055 | (268,3) | (165,6) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS / INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | (11.157) | 11.662 | 19.637 | 168,38 | (176,0) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN / <i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</i> | 33.950 | 27.312 | 22.793 | 83,45 | 67,14 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN / <i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</i> | 22.793 | 38.974 | 42.429 | 108,87 | 186,15 |

Realisasi kas bersih sampai dengan akhir tahun 2023 yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar -Rp5.896 juta atau sebesar -17% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp34.680 juta. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp16.175 juta, maka realisasi tahun 2022 hanya -36,4%-nya. Sepanjang tahun 2023 dalam penggunaan dana, Entitas sangat selektif agar tepat sasaran sehingga saldo akhir kas dan setara kas menjadi Rp42.429 juta atau 108,87% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp38.974 juta. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.793 juta, maka trendnya 186,15%. Penggunaan dana sampai dengan akhir tahun 2023 dipergunakan untuk pembiayaan operasional dan investasi baik alat produksi dan alat penunjang.

Capaian Investasi

Realisasi investasi sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp3.896 juta, atau 12,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.233 juta. Adapun rincian investasi sebagai berikut:

Net cash realization until the end of 2023 obtained from operating activities amounted to -Rp5,896 million or -17% of the 2023 RKAP of Rp34,680 million. And when compared to the realization in 2022 which amounted to Rp16,175 million, the realization in 2022 was only -36.4%. Throughout 2023 in the use of funds, the Entity was very selective to be right on target so that the final balance of cash and cash equivalents was Rp42,429 million or 108.87% of the 2023 RKAP of Rp38,974 million. And when compared to the realization in 2022 of Rp22,793 million, the trend is 186.15%. The use of funds until the end of 2023 is used for operational and investment financing both production equipment and supporting equipment.

Investment Achievement

The total investment realized by the end of 2023 amounted to Rp3,896 million, or 12.47% of the allocated budget of Rp31,233 million. The details of the investment are as follows:

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| NO. | URAIAN DESCRIPTION | REALISASI AUDITED / REALIZATION AUDITED 2022 | RKAP TAHUN / SUMMARY OF 2023 | REALISASI AUDITED / REALIZATION AUDITED 2023 | CAPAIAN / ACHIEVEMENTS 5 : 4 | TREND / TREND 5 : 3 |
|-----------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | OPERASIONAL / OPERATIONAL | | | | | |
| 1 | Toyota Veloz | 6.463 | - | 802 | - | 12,40 |
| 2 | Innova | 5.777 | 4.679 | - | - | - |
| 3 | Hyundai Palisade | - | 5.200 | - | - | - |
| 4 | Mobil Listrik | - | - | 307 | - | - |
| 5 | Pajero | 1.858 | - | - | - | - |
| 6 | Alphard | 1.354 | 2.700 | - | - | - |
| 7 | Forklift/Reach truck | - | 350 | 2.340 | 6678,70 | - |
| | Total Kendaraan Disewakan / Total Vehicles Leased | 15.452 | 12.929 | 3.449 | 26,68 | 22,32 |
| 1 | Polisher | 18 | 270 | - | - | - |
| 2 | Renovasi Tretes / Tretes Renovation | - | 500 | - | - | - |
| 3 | Reefer container | 185 | - | - | - | - |
| | Total Alat untuk Pelayanan / Total Tools for Service | 203 | 770 | - | - | - |
| | Jumlah Operasional / Total Operations | 15.655 | 13.699 | 3.449 | 25,18 | 22,03 |
| II | PENUNJANG / SUPPORT | | | | | |
| 1 | Tanah dan bangunan / Land and building | - | 5000 | - | - | - |
| 2 | Renovasi Kantor & Gedung / Office & Building Renovation | - | 5.175 | - | - | - |
| | Total Tanah dan Bangunan / Total Land and Building | 10.175 | | | | |
| 1 | Mobil Honda CRV 1.5 Prestige | 2.093 | - | - | - | - |
| 2 | Avanza VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | - | 288 | - | - | - |
| 3 | Innova | - | 390 | 146 | 37,45 | - |
| 4 | Motor | - | 50 | 45 | 90,28 | - |

(dalam Jutaan Rupiah / in Millions Rupiah)

| NO. | URAIAN DESCRIPTION | REALISASI AUDITED / REALIZATION AUDITED 2022 | RKAP TAHUN / SUMMARY OF 2023 | REALISASI AUDITED / REALIZATION AUDITED 2023 | CAPAIAN / ACHIEVEMENTS 5 : 4 | TREND / TREND 5 : 3 |
|-----|---|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Total Kendaraan Penunjang / Total Support Vehicle | 2.093 | 727 | 191 | 26,28 | 9,13 |
| 1 | Rak / <i>Shelves</i> | - | 700 | - | - | - |
| 2 | Stacker Semi Elektrik / <i>Semi Electric Stacker</i> | - | 60 | - | - | - |
| 3 | Laptop | 29 | 217 | 104 | 47,88 | 358,25 |
| 4 | Lemari atau Peralatan Lainnya / <i>Cabinets or Other Equipment</i> | 575 | | | | |
| 5 | Infocus Lengkap / <i>Infocus Complete</i> | | | | | |
| 6 | CCTV | - | 165 | - | - | - |
| 7 | Tempat Arsip Software arsip <i>zip Software</i> | - | 100 | - | - | - |
| | Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Office Supplies and Equipment | 604 | 1.257 | 111 | 8,82 | 18,35 |
| 1 | Mobil Box Double Engkel Long Oasis / <i>Long Oasis Double Engkel Box Car</i> | - | 600 | - | - | - |
| 2 | Granmax | - | 1.200 | 145 | 12,08 | - |
| | Alat Operasioanal / Operational Tools | - | 1.800 | 145 | 8,08 | - |
| 1 | ERP Project | - | 675 | - | - | - |
| 2 | Infra Jaringan / <i>Network Infra</i> | - | 500 | - | - | - |
| 3 | Lisensi / <i>License</i> | - | 400 | - | - | - |
| 4 | Hcsi | - | 2.000 | - | - | - |
| | Total Aplikasi / Total Applications | - | 3.575 | - | - | - |
| | Jumlah Penunjang / Total Support | 2.698 | 17.534 | 447 | 2,55 | 16,57 |
| | TOTAL INVESTASI / TOTAL INVESTMENT | 18.352 | 31.233 | 3.896 | 12,47 | 21,23 |

Investasi terdiri dari antara lain kendaraan disewakan dan alat untuk pelayanan operasional, sehingga jumlah operasional nilainya sebesar Rp3.896 juta.

Investments consist of leased vehicles and equipment for operational services, resulting in an operational amount of Rp3,896 million.

Kinerja Entitas

Kinerja perusahaan tahun 2023 masih dipengaruhi oleh kondisi baik eksternal maupun internal antara lain:

External Conditions

The company's performance in 2023 is still influenced by both external and internal conditions, among others:

1. Kondisi Eksternal:

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,04%. Dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp15.415,-/USD, inflasi rata-rata selama tahun 2023 ±2,61% dan suku bunga 6,00%.

1. External Conditions:

Economic growth in 2023 shows the continuation of the economic improvement process. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) released Indonesia's economic growth rate in 2023 which experienced a contraction in growth of 5.04%. And the exchange rate of the rupiah against the US Dollar (USD) on December 31, 2023 with Bank Indonesia's middle rate of IDR 15,415/USD, average inflation during 2023 ± 2.61% and interest rates of 6.00%.

2. Kondisi Internal:

Dari sisi SDM & Umum: Sistem tata kelola manajemen kepegawaian belum sepenuhnya terlaksana, penilaian kinerja individu belum berbasis KPI, implementasi budaya kerja belum berjalan optimal, Proses digitalisasi pengelolaan SDM belum optimal, terdapat *property* berupa tanah dan bangunan yang bermasalah pada Jl Urip Sumoharjo, Surabaya dan manajemen kearsipan belum diterapkan sesuai prosedur.

Dari sisi Operasional: Sebagian besar pekerjaan masih *Captive*, pembuatan tagihan ke pihak Debitur PT PELNI (Persero) terutama bidang *Outsourcing* dan bidang *Maintenance* belum tepat waktu terkendala proses perpanjangan kontrak yang membutuhkan waktu, pengawasan bidang operasional belum sepenuhnya didukung dengan aplikasi IT, Pengoperasian Kapal Pinisi dan wisma tretes belum maksimal

Dari sisi Keuangan: *Cash flow* belum stabil, *collection* periode masih tinggi, sehingga posisi modal sering terganggu dan Pendapatan usaha mengandalkan usaha *captive*.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 Kinerja Entitas adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Entitas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" sesuai dengan laporannya Nomor: LAI: 00041/2.0999/AU.1/05/0139-3/1/II/2024, 29 Februari 2024 dengan Pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
 - a. Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2023 sebesar Rp28.164 juta atau 80,53% dari anggaran sebesar Rp34.973 juta dan tercapai 108,64% dibanding tahun 2022 sebesar Rp25.925 juta.
 - b. *Total Asset* per 31 Desember 2023 sebesar Rp328.319 juta atau turun 1,60% dari total *Asset* per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.651 juta.
2. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. PT Fitch Ratings Indonesia yang beralamat di DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Indonesia
T + 62 21 2988 6800 | F + 62 21 2988 6822
Memberikan rating kepada PID pada tahun 2023 sebagai berikut:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AA+(idn); Outlook Stabil
 - Peringkat Nasional Jangka Pendek di 'F1+(idn)

2. Internal Conditions:

In terms of HR & General: The personnel management governance system has not been fully implemented, individual performance appraisals have not been KPI-based, the implementation of work culture has not been running optimally, the HR management digitization process has not been optimal, there is property in the form of problematic land and buildings on Jl Urip Sumoharjo, Surabaya and archive management has not been implemented according to procedures.

From the Operational side: Most of the work is still Captive, making bills to PT PELNI (Persero) Debtors, especially in the Outsourcing and Maintenance fields, is not on time due to the contract extension process which takes time, supervision of the operational field has not been fully supported by IT applications, the operation of the Pinisi Ship and the Tretes guesthouse has not been maximized
From the Financial side: Cash flow has not been stable, the collection period is still high, so that the capital position is often disrupted and business income relies on captive business.

With the efforts made throughout 2022 the Entity's performance is as follows:

1. *The Entity's Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm "Djoko Sidik & Indra" in accordance with its report Number: LAI: 00041/2.0999/AU.1/05/0139-3/1/II/2024, February 29, 2024 with the Opinion "Reasonable in all material respects".*
 - a. *Consolidated net profit after tax in 2023 amounted to Rp28,164 million or 80.53% of the budget of Rp34,973 million and achieved 108.64% compared to 2022 of Rp25,925 million.*
 - b. *Total assets as of December 31, 2023 amounted to Rp328,319 million or decreased by 1.60% from total assets as of December 31, 2022 of Rp333,651 million.*
2. *Entity Health Level Assessment is conducted based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002, which includes Financial Aspects, Operational Aspects, and Administrative Aspects: KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002, which includes Financial Aspects, Operational Aspects, and Administrative Aspects. PT Fitch Ratings Indonesia, located at: DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia
T: +62 21 2988 6800 | F: +62 21 2988 6822
Provided the following ratings for PID in 2023:*
 - *Long-Term National Rating: 'AA+(idn); Stable Outlook*
 - *Short-Term National Rating: 'F1+(idn)*

3. Penyusunan Kontrak Manajemen *Key Performance Indicators (KPI)* PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) mengacu pada Pedoman Penentuan KPI pada Badan Usaha Milik Negara sesuai Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor Per-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020, tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Adapun *Key Performance Indicators (KPI)* PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) di tahun mendapatkan skor KPI sebesar 86,07.
4. Market Share Growth realisasi tahun 2023 sebesar 121,48%.
5. Rasio Entitas sebagai berikut:
 - a. Rasio Likuiditas:
 - *Current Ratio* tahun 2023 sebesar 247,05% dan ditahun 2022 sebesar 190,23%.
 - *Cash Ratio* tahun 2023 sebesar 41,11% dan ditahun 2022 sebesar 16,92%.
 - b. Rasio Aktivitas:
 - *Collection Period* tahun 2023 39 hari dan ditahun 2022 *Collection Periode* 47 hari.
 - *Total Asset Turn Over* tahun 2023 sebesar 175,41% dan ditahun 2022 139,88%.
 - c. Rasio Rentabilitas:
 - *Gross Profit Margin* tahun 2023 sebesar 15,95% dan ditahun 2022 sebesar 16,64%.
 - *EBITDA Margin* tahun 2023 sebesar 5,74% dan tahun 2022 sebesar 10,82%.
 - d. Rasio Solvabilitas:
 - *Debt Equity Ratio* tahun 2023 sebesar 52,48% dan ditahun 2022 sebesar 78,62%.
 - *Total Debt to Total Asset* tahun 2023 sebesar 34,42% dan ditahun 2022 sebesar 44,01%.
6. Realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp3.896 juta atau 12,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.233 juta.

Kelangsungan Usaha

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya *extreme weather*, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.

Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Kondisi global yang tidak kondusif tersebut tentu saja berpotensi berdampak terhadap situasi ekonomi di tanah air.

Business Continuity

Global economic growth is expected to slow down in 2023. This is due to various risks such as the uncertainty of geopolitical tensions, the potential for extreme weather, high interest rates, and relatively narrow fiscal policy.

Thus, the IMF projects global economic growth to slow from 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023. These unfavorable global conditions certainly have the potential to impact the economic situation in the country.

Namun demikian, Manajemen Perusahaan merasa optimis, kondisi global tidak berpengaruh signifikan pada fundamental perusahaan dan tidak mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Karena berdasarkan Analisa Perusahaan, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan meyakini hal ini berdasarkan:

1. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") Nomor: No: 74/DIR/RATLTR/V/2024, tanggal 3 Mei 2024 mencatat dengan kriteria:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AA+(idn); Outlook Stabil
 - Peringkat Nasional Jangka Pendek di 'F1+(idn)
2. Perusahaan tetap berhasil membukukan pendapatan usaha yang cukup baik di tahun 2023 yaitu sebesar Rp565.957 juta atau 87,70% dari anggaran sebesar Rp645.397 juta. Bahkan pendapatan usaha sebesar Rp565.957 juta tersebut meningkat 123,70% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2022 yang masih sebesar Rp457.529 juta.
3. Rasio-rasio keuangan sebagaimana disajikan dalam ikhtisar kinerja keuangan menunjukkan, bahwa Perusahaan tetap dalam kondisi likuid, *solvable*, dan *profitable*. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan.

Prospek Usaha

Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan *the bright spot in the dark* di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom. Di tahun 2024 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik.

However, the Company's Management is optimistic that global conditions will not significantly affect the company's fundamentals and will not affect the company's business continuity in the long term.

Because based on the Company's analysis, there are no matters that have the potential to significantly affect the Company's business continuity.

The Company believes this is based on:

1. Entity Health Level Assessment is based on the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-100/MBU/2002 (4 June 2002), covering Financial, Operational, and Administrative Aspects. According to PT Fitch Ratings Indonesia's letter No. 74/DIR/RATLTR/V/2024 (3 May 2024), the entity was rated as follows:
 - Long-Term National Rating at 'AA+(idn); Stable Outlook
 - Short-Term National Rating at 'F1+(idn)
2. The company still managed to book a fairly good operating income in 2023, which amounted to Rp565,957 million or 87.70% of the budget of Rp645,397 million. Even the operating income of Rp565,957 million increased by 123.70% compared to the operating income in 2022 which still amounted to Rp457,529 million.
3. The financial ratios as presented in the overview of financial performance show that the Company remains in a liquid, solvable, and profitable condition. There are no lawsuits claiming bankruptcy against the Company.

Business Outlook

In the midst of global challenges and slowing economic growth of major economies, Indonesia and ASEAN have become the highest growing region and a source of world economic growth, even Indonesia is called the bright spot in the dark amid global uncertainty.

In 2023, Indonesia's economic growth could grow solidly by 5.3% (yoy). On the expenditure side, consumption is still the biggest contributor and export performance is able to grow at double digits. On the business sector side, the main sectors are still growing strongly such as manufacturing, trade, transportation, and infocomm. In 2024, Indonesia's economic growth is expected to improve further.

Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Karena itu, Perusahaan merasa optimis bahwa di tahun 2023 dan di tahun-tahun selanjutnya, bisnis Perusahaan akan kembali membaik dan akan kembali bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sebagaimana pada tahun-tahun sebelum pandemi.

Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2023, Saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar 99,50% dan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Pelni sebesar 0,50%.

Oleh karena itu tidak terdapat program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Informasi Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dalam kegiatan usahanya:

Various leading indicators from both the real and external sectors, show that the future economic outlook is at a good level, reflected in the optimistic IKK value, the consistently expansionary Manufacturing PMI, the trade balance which is still showing a surplus trend for 33 consecutive months, and the ratio of foreign debt to GDP which is still at a safe level.

Therefore, the Company is optimistic that in 2023 and in the years to come, the Company's business will recover and will return to rapid growth and development, as in the years before the pandemic.

Employee and/or Management Share Ownership Program implemented by the Company (ESOP/MSOP)

Until 2023, the Company's shares are owned by PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) by 99.50% and Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Pelni by 0.50%.

Therefore, there is no share ownership program by employees and/or management implemented by the company (ESOP/MSOP).

Information on Material Transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties

The Company conducts transactions with parties that have ownership relationships in its business activities:

| NO. | PIHAK-PIHAK BERELASI / RELATED PARTIES | SIFAT HUBUNGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / NATURE OF RELATED PARTY RELATIONSHIPS | TRANSAKSI / TRANSACTIONS |
|-----|---|---|--|
| 1 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Entitas induk / Parent entity | Hutang piutang / Accounts receivable |
| 2 | PT Pelita Bandar Nasional | Entitas anak / Subsidiary entity | Penyertaan, hutang-piutang / Participation, accounts payable |





3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / HUMAN RESOURCES (HR)

PID menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

PID realizes that HR is the most valuable strategic asset to achieve sustainable growth of the Company's business.

PID menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan / *PID realizes that HR is the most valuable strategic asset to achieve sustainable growth of the Company's business.*

Kami senantiasa berkomitmen memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

Kami memperlakukan SDM sebagai *partner* usaha strategis dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kehadiran pegawai yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuannya.

Pimpinan dan sumber daya manusia PID, telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola bisnis perusahaan konvensional. Sejalan dengan tantangan bisnis kedepan, terutama dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi, PID merespon secara tepat, baik dari aspek bisnis, operasional, maupun dari aspek pengelolaan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, PID telah menyusun perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia PID, yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan, guna menjamin keberlangsungan usaha PID kedepan.

Peseroan memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur *gender* maupun ras. Peseroan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

We are always committed to having quality Human Resources (HR) that are productive, professional and capable of creating added value and responding to new challenges. We continue to develop special and periodic training programs aimed at improving quality, capability and professionalism.

We treat HR as a strategic business partner in running the company's business. The presence of employees who are professional, competent, dedicated and have integrity will make the company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve its goals.

PID's leadership and human resources have the competence and experience in managing a conventional corporate business. In line with future business challenges, especially in facing competition in the digitalization era, PID responds appropriately, both from the business, operational, and human resource management aspects. Therefore, PID has developed a strategic plan for the management of PID's human resources, which is in line with the needs of the company, to ensure the sustainability of PID's business in the future.

The Company treats human resources as its most valuable asset in a fair manner and values every contribution made regardless of gender or race. The Company guarantees the rights and obligations of each Employee by complying with the provisions of Law No.13 of 2003 concerning labor.

Profil Sumber Daya Kami / Our Resource Profile

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan / Employee Composition Based on Position Level

| JENJANG JABATAN / POSITION LEVEL | JUMLAH / TOTAL |
|--|-----------------------------|
| Direksi / <i>Board of Directors</i> | 3 Orang / <i>People</i> |
| Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i> | 4 Orang / <i>People</i> |
| Kepala SPI / <i>Head of SPI</i> | 1 Orang / <i>People</i> |
| Senior Manager & Plt. Senior Manager / <i>Senior Manager & Plt. Senior Manager</i> | 4 Orang / <i>People</i> |
| Manager & Plt. Manager / <i>Manager & Plt. Manager</i> | 13 Orang / <i>People</i> |
| Asisten Manager / <i>Assistant Manager</i> | 8 Orang / <i>People</i> |
| Staf (Kantor Pusat) / <i>Staff (Head Office)</i> | 115 Orang / <i>People</i> |
| Karyawan Produksi / <i>Production Employees</i> | 1,618 Orang / <i>People</i> |
| Anak Perusahaan / <i>Subsidiary Company</i> | 5 Orang / <i>People</i> |
| JUMLAH / TOTAL | 1,771 Orang / People |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian / Employee Composition Based on Employment Status

| STATUS KEPEGAWAIAN / EMPLOYMENT STATUS LEVEL | JUMLAH / TOTAL |
|--|--------------------------------|
| Kontrak / <i>Contract</i> | 1,694.00 Orang / <i>People</i> |
| Tetap / <i>Fixed</i> | 77.00 Orang / <i>People</i> |
| JUMLAH / TOTAL | 1,771.00 Orang / People |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia / Employee Composition by Age

| NO. | RANGE UMUM / GENERAL RANGE | KANTOR / OFFICE | PRODUKSI / PRODUCTION | JUMLAH / TOTAL |
|-----|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 16-20 tahun | 1 | 22 | 23 |
| 2 | 21-25 tahun | 19 | 242 | 261 |
| 3 | 6-30 tahun | 39 | 418 | 457 |
| 4 | 31-35 tahun | 26 | 332 | 358 |
| 5 | 36-40 tahun | 15 | 219 | 234 |
| 6 | 41-45 tahun | 17 | 177 | 194 |
| 7 | 46-50 tahun | 7 | 121 | 128 |
| 8 | 51-55 tahun | 13 | 50 | 63 |
| 9 | 56=< | 16 | 37 | 53 |
| | JUMLAH / TOTAL | 153 | 153 | 1771 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Unit Kerja / *Employee Composition Based on Work Unit*

| UNIT KERJA / WORKING UNIT | JUMLAH / TOTAL |
|--|------------------------------------|
| Kantor Pusat & Cabang / <i>Head Office & Branches</i> | 147 Orang / <i>People</i> |
| Security Gedung & Kapal / <i>Building & Ship Security</i> | 392 Orang / <i>People</i> |
| Cleaning Service Gedung & Kapal / <i>Building & Ship Cleaning Service</i> | 450 Orang / <i>People</i> |
| Janitor/TKBM/Teknisi/ <i>Janitor / Maintenance / Technician</i> | 66 Orang / <i>People</i> |
| Departure Control System / <i>Departure Control System</i> | 117 Orang / <i>People</i> |
| Manage Service / <i>Manage Service</i> | 21 Orang / <i>People</i> |
| Frontliner / <i>Frontliner</i> | 6 Orang / <i>People</i> |
| Crew Kapal Pinisi / <i>Pinisi Ship Crew</i> | 4 Orang / <i>People</i> |
| Driver / <i>Driver</i> | 18 Orang / <i>People</i> |
| Call Center/Operating room/Entry Data / <i>Call Center/Operating room/Entry Data</i> | 19 Orang / <i>People</i> |
| E-Ticketing/Loket / <i>E-Ticketing / Counter</i> | 131 Orang / <i>People</i> |
| Embarkasi Debarkasi / <i>Embarkation/Debarcation</i> | 78 Orang / <i>People</i> |
| ABK/Admin/Crew/Admin/Admin Emplai | 19 Orang / <i>People</i> |
| Rumah Sakit PT PELNI / <i>PT PELNI Hospital</i> | 11 Orang / <i>People</i> |
| Koki / <i>Chef</i> | - |
| Petugas Kasur/Petugas Taman / <i>Mattress Officers/Garden Officers</i> | 90 Orang / <i>People</i> |
| Petugas Band / <i>Band Officer</i> | 196 Orang / <i>People</i> |
| Anak Perusahaan / <i>Company Children</i> | 6 Orang / <i>People</i> |
| JUMLAH / TOTAL | 1,771 Orang / <i>People</i> |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan / *Employee Composition Based on Education*

| NO. | PENDIDIKAN / EDUCATION | PUSAT / CENTER | PRODUKSI / PRODUCTION | JUMLAH / TOTAL |
|-----|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | S2 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | S1 | 74 | 171 | 245 |
| 3 | D4 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | D3 | 7 | 40 | 47 |
| 5 | D2 | | 3 | 3 |
| 6 | D1 | | 1 | 1 |
| 7 | SMA | 55 | 1,361 | 1416 |
| 8 | SMP | 4 | 38 | 42 |
| | JUMLAH / TOTAL | 153 | 1618 | 1771 |

Kegiatan Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Perkembangan Perusahaan.

Roadmap Pengembangan SDM

Sistem pengembangan sumber daya manusia di PID dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. PID menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

PID menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar.

Perencanaan SDM PID dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan pegawai, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

PID memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang memiliki peran kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan serta sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha. Oleh karenanya, PID senantiasa berupaya mengelola dan meningkatkan kompetensi serta menciptakan lingkungan kerja kondusif untuk memastikan kinerja SDM yang optimal, efisien dan produktif.

Strategi pengelolaan SDM yang diterapkan PID merupakan alignment terhadap visi dan misi, strategi serta budaya perusahaan. Untuk itu, PID melakukan serangkaian upaya yang berkesinambungan dan terarah dalam melakukan program pengembangan SDM. Untuk mempertahankan kesinambungan dalam pengembangan organisasi, PID menerapkan pengelolaan SDM melalui strategi-strategi peningkatan kualitas SDM PID sebagai berikut,

Human Resources Activities

Throughout 2023, the Company has carried out various activities related to improving the Organizational Structure and Work Procedures in accordance with the Company's development.

HR Development Roadmap

The human resource development system at PID is developed in accordance and in line with the company's business strategy towards the best business performance in the digital era. PID makes HR as the main supporting force for every operational activity. HR planning is made by taking into account several factors, namely workload estimates, employee retirement plans, and budget plans that are reviewed periodically.

PID prepares long-term HR planning to support business development plans in line with regional development demands and market demands.

PID's HR planning is made prior to the current year as one of the work programs of the Human Resources Division. HR planning includes planning the number and qualifications of employees needed in the current year, analysis of employee availability, and analysis of the fulfillment of HR needs.

Human Resources Management Strategy

PID views Human Resources (HR) as one of the Stakeholders that has a key role for the success and sustainability of the company as well as a strategic partner in running the business. Therefore, PID always strives to manage and improve competence and create a conducive work environment to ensure optimal, efficient and productive HR performance.

The HR management strategy implemented by PID is an alignment with the vision and mission, strategy and corporate culture. For this reason, PID makes a series of continuous and directed efforts in conducting HR development programs. To maintain continuity in organizational development, PID implements HR management through strategies to improve the quality of PID's human resources as follows,

1. Proses rekrutmen yang selektif baik yang bersifat *replacement* maupun pengisian posisi-posisi *vacant* sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pengembangan pegawai melalui berbagai program baik *in-house* maupun *public training* seiring dengan perkembangan bisnis dan *volume* usaha Perusahaan.
3. Proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi Perusahaan sekaligus sebagai jenjang karir pegawai.
4. Pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan pegawai secara terus menerus seiring dengan pencapaian dan perkembangan bisnis dan usaha Perusahaan.
5. Penerapan peraturan internal sebagai panduan Perusahaan dan pegawai agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan dinamis.

Dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha serta produktivitas, PID secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memberikan kesempatan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen dilaksanakan untuk memenuhi sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan sehingga menjamin terpenuhinya upaya peningkatan Bisnis Perusahaan. PID memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perusahaan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan fair, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Proses Rekrutmen:

1. Perencanaan;
2. Rekrutment;
3. Seleksi;
4. *Offering Letter*;
5. Orientasi Karyawan;
6. Penempatan.

Kebijakan rekrutmen bertujuan untuk:

1. Merancang proses rekrutmen yang handal, sehingga calon pegawai yang akan menjalani seleksi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;

1. *Selective recruitment process, both replacement and filling vacant positions as needed.*
2. *Employee development program through various programs both in-house and public training in line with the Company's business development and business volume.*
3. *Employee rotation, mutation and promotion process in accordance with the needs and development of the Company's organization as well as employee career path.*
4. *Continuous maintenance of employee health and welfare in line with the achievement and development of the Company's business and business.*
5. *Implementation of internal regulations as a guide for the Company and employees to establish a good, harmonious and dynamic relationship.*

In the context of business and business development and productivity, PID continuously and continuously strives to create a conducive working atmosphere and provide opportunities for employees to improve their knowledge, insight, skills and abilities.

Recruitment Policy and Implementation

The recruitment policy is implemented to fulfill responsible human resources and meet the quality standards that have been applied so as to ensure the fulfillment of the Company's business improvement efforts. PID provides equal and equal opportunities to every best of the nation's children to work and work in the Company, regardless of gender, religion, race, or other discriminatory elements. This recruitment system is carried out in a transparent and fair manner, based on employee needs planning to support the achievement of the Company's goals and objectives in the short and long term.

Recording process:

1. *Planning;*
2. *Recruitment;*
3. *Selection;*
4. *Offering Letter;*
5. *Employee Orientation;*
6. *Placement.*

The recruitment policy aims to:

1. *Designing a reliable recruitment process, so that prospective employees who will undergo selection are in accordance with the objectives to be achieved;*

2. Mencapai visi dan misi perusahaan secara optimal melalui ketersediaan sumber daya manusia yang bekerja secara profesional;
3. Memperoleh pegawai yang berkualitas berdasarkan syarat dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

PID menyadari SDM memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PID senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik yang dilakukan oleh pihak internal melalui Lembaga Pendidikan, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.

Perencanaan pengembangan sumber daya manusia disusun setiap tahun, yang meliputi antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengembangan karir dapat dipahami sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan atau perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan pegawai agar dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan, dengan demikian perencanaan dan pengembangan karir yang jelas akan membantu pegawai dan organisasi dalam meraih keberhasilan.

Pengembangan karir harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi promosi tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas, perluasan kewenangan, pengembangan individu dan peningkatan remunerasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia PID melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan tahun 2023 untuk meningkatkan pertumbuhan dan

2. *Achieve the company's vision and mission optimally through the availability of human resources who work professionally;*
3. *Obtaining qualified employees based on the requirements and job specifications required by the Company.*

Policy and Implementation of Competency Development

PID realizes that human resources have an important role in supporting the sustainability of the Company's business activities and operations. The involvement of qualified human resources will have a positive influence and become a key factor for the sustainability of the Company's business. Therefore, PID is always committed to developing the potential of its human resources consistently and continuously, among others, by organizing various education, training and workshops, both conducted by internal parties through Educational Institutions, as well as in collaboration with various external parties.

Human resource development planning is prepared annually, which includes, among others, plans for HR education and training needs, including education and training budget plans for employees, Directors, and Commissioners, as well as plans for implementing risk management certification for management and certain officials.

Career Development Policy and Implementation

Career development can be understood as a formal approach in an effort to increase or improve, growth, job satisfaction, knowledge and abilities of employees in order to ensure that people with the right qualifications and experience are available when needed, thus clear career planning and development will help employees and organizations achieve success.

Career development should be viewed holistically, not only in terms of promotion but also in terms of increased capability, expanded authority, individual development and increased remuneration.

Human Resources Development

Improving PID's human resources through education and training held in 2023 to increase business growth and development which is increasing every

perkembangan bisnis yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, PID mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop* baik secara internal maupun secara eksternal bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas.

Dalam tahun 2023 hingga tahun 2024, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan – pengetahuan dan kemampuan khusus.

year. Human resource development is carried out thoroughly in the selection process, performance appraisal, and training and education.

To achieve the targeted performance improvement, PID is committed to continuously developing the potential of employees consistently and continuously through a learning process, including organizing various education, training and workshops both internally and externally in collaboration with educational institutions. This education and training is expected to increase employee knowledge and skills in improving work productivity, risk management, corporate culture and professionalism.

In 2023 to 2024, the company seeks to improve employee competence through education and training, workshops, and coaching organized by external parties in order to gain specific knowledge and abilities.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Di tahun buku 2023 pengembangan kompetensi karyawan hanya dilakukan secara internal dan tidak mengeluarkan biaya dalam pengadaan pelatihan.

Employee Competency Development Costs

In fiscal year 2023, employee competency development was only carried out internally and did not incur costs in providing training.

Rincian Anggaran Pelatihan / Training Budget Details

| NO. | NAMA ACCOUNT / ACCOUNT NAME | JENIS PELATIHAN / TYPE OF TRAINING |
|-----|---|--|
| 1 | PPH Badan Rekonsiliasi Fiskal & Penyusunan SPT Tahunan PPH Badan / <i>Corporate Income Tax Fiscal Reconciliation & Preparation of Annual Corporate Income Tax Return</i> | |
| 2 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -Level 1 / <i>Government Procurement of Goods and Services -Level 1</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 3 | Penerapan dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Permen BUMN Nomor 05-MBU-09-2022 / <i>Implementation and Reporting of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries based on Permen of SOEs No. 05-MBU-09-2022</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |
| 4 | K3 Umum / <i>General OHS</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 5 | <i>Inventory Management / Inventory Management</i> | |
| 6 | <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE) / Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 7 | Pelatihan Brevet AB / <i>Brevet AB Training</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 8 | <i>Online Training Digital Employee Selection: Metode Seleksi / Online Training Digital Employee Selection: Selection Methods</i> | Seminar / <i>Seminar</i> |
| 9 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -Level 1 / <i>Government Goods and Services Procurement -Level 1</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 10 | Dasar - Dasar Audit / <i>Audit Basics</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 11 | Pelatihan Coaching dan Mentoring / <i>Coaching and Mentoring Training</i> | In-house Training / <i>In-house Training</i> |
| 12 | <i>Workshop Good Corporate Governance Tahun 2023 / Workshop on Good Corporate Governance Year 2023</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |
| 13 | <i>Training Strategi Tax Management PMK-66 & Tax Audit / PMK-66 Tax Management Strategy Training & Tax Audit</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |
| 14 | <i>ISO Series 31000: ERM Fundamental Public & Ujian Sertifikasi ERMA / ISO Series 31000: ERM Fundamental Public & ERMA Certification Exam</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> |
| 15 | Program Diklat Manajerial Tingkat Madya Angkatan XV / <i>Intermediate Level Managerial Training Program Batch XV</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |
| 16 | Seminar Nasional Dua Hari ICPW / <i>ICPW Two-Day National Seminar</i> | Seminar / <i>Seminar</i> |
| 17 | Program Diklat Manajerial Tingkat Utama Angkatan IX / <i>Senior Managerial Training Program Batch IX</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |
| 18 | <i>Transfer Pricing / Transfer Pricing</i> | Workshop / <i>Workshop</i> |

Adapun biaya pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp344.390.017,00,- /
The cost of developing employee competencies amounted to IDR344.390.017,00.

Pelatihan 2023 / Training 2023

| NO. | NAMA PELATIHAN / TRAINING NAME | JENIS PELATIHAN / TYPE OF TRAINING | DIVISI / DIVISION | TAHUN PELATIHAN / YEAR OF TRAINING | STATUS KARYAWAN / EMPLOYEE STATUS |
|-----|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE) / Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> | SPI | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 2 | Dasar - Dasar Audit / <i>Audit Basics</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> | SPI | 2023 | PKWT |
| 3 | ISO Series 31000: ERM Fundamental Public & Ujian Sertifikasi ERMA / <i>ISO Series 31000: ERM Fundamental Public & ERMA Certification Exam</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 4 | Online Training Digital Employee Selection: Metode Seleksi / <i>Online Training Digital Employee Selection: Selection Methods</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | SDM / <i>Human Resources</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 5 | Pelatihan Brevet AB / <i>Brevet AB Training</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 6 | Pelatihan Coaching dan Mentoring / <i>Coaching and Mentoring Training</i> | Inhouse Training / <i>Inhouse Training</i> | Jasa & Pemeliharaan / <i>Services & Maintenance</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 7 | Pelatihan Tim Counterpart Budaya Organisasi/ <i>Organizational Culture Counterpart Team Training</i> | Inhouse Training / <i>Inhouse Training</i> | Pengadaan / <i>Procurement</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 8 | Penerapan dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Permen BUMN Nomor 05-MBU-09-2022 / <i>Implementation and Reporting of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries based on Permen BUMN Number 05-MBU-09-2022</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 9 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah-Level 1 / <i>Government Procurement of Goods and Services -Level 1</i> | Sertifikasi / <i>Certification</i> | Pengadaan / <i>Procurement</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 10 | PPH Badan Rekonsiliasi Fiskal & Penyusunan SPT Tahunan PPH Badan / <i>Corporate Income Tax Fiscal Reconciliation & Preparation of Annual Corporate Income Tax Return</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 11 | Program Diklat Manajerial Tingkat Madya Angkatan XV / <i>Intermediate Level Managerial Training Program Batch XV</i> | Inhouse Training / <i>Inhouse Training</i> | Jasa & Pemeliharaan / <i>Services & Maintenance</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 12 | Program Diklat Manajerial Tingkat Utama Angkatan IX / <i>Managerial Training Program for Primary Level Batch IX</i> | Inhouse Training / <i>Inhouse Training</i> | Pengadaan / <i>Procurement</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 13 | Seminar Nasional Dua Hari ICPW / <i>ICPW Two-Day National Seminar</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Jasa & Pemeliharaan / <i>Services & Maintenance</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 14 | Training Strategi Tax Management PMK-66 & Tax Audit / <i>PMK-66 Tax Management Strategy Training & Tax Audit</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | ORGANIK / <i>ORGANIC</i> |
| 15 | Transfer Pricing / <i>Transfer Pricing</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Finance & Risk Management</i> | 2023 | PKWT |
| 16 | Workshop Good Corporate Governance Tahun 2023 / <i>Workshop on Good Corporate Governance Year 2023</i> | Workshop / <i>Workshop</i> | Pengadaan / <i>Procurement</i> | 2023 | PKWT |

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perseroan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan berdasarkan pencapaian kinerja secara adil dan obyektif. Prestasi kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan demikian sebaliknya bagi Karyawan yang tidak berprestasi maupun melakukan pelanggaran memperoleh sanksi.

SK Jasa Produksi 2023 Penghargaan diberikan setiap tahun atas masa kerja dan kategori Karyawan Terbaik.

Remunerasi Pegawai

Penentuan dan pemberian remunerasi pegawai tunduk pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan terkait lainnya.

- Tunjangan Hari Raya Gaji Ke-13 SK Direksi No.: 04.05/DIR/SK/003/100/2023.
- Pemberian Jasa Produksi Tahun 2023 1 (satu) bulan gaji ke-16 SK Direksi No.: 07.12/DIR/SK/001/100/2023.
- Pemberian Tunjangan Pendidikan gaji ke-14 SK Direksi No.: 07.11/DIR/SK/002/100/2023.
- Pemberian gaji ke-15 akhir tahun 2023 SK Direksi No.: 12.19/DIR/SK/001/100/2023.

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perseroan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta mempertahankan Karyawan,

Performance Management and Assessment

Performance Management and Appraisal is an evaluation tool for the achievement of targets and goals that must be achieved by all Employees and work units that are prepared based on the Company's vision, mission and long-term goals and KPIs. Performance Appraisal of each individual Employee is carried out objectively, tiered, periodically, and transparently.

Implementation of Rewards and Sanctions

The Company always strives to improve Employee welfare based on fair and objective performance achievement. The best performance achievements will receive awards and vice versa for Employees who do not perform or commit violations receive sanctions.

Production Services Decree 2023 Awarded annually for length of service and Best Employee category.

Employee Remuneration

The determination and provision of employee remuneration is subject to applicable laws and regulations, including the Provincial Minimum Wage (UMR) limit, Minister of Labor Regulations and other related regulations.

- *Holiday Allowance 13th Salary Board of Directors Decree No.: 04.05/DIR/SK/003/100/2023.*
- *Provision of Production Services in 2023 1 (one) month of 16th salary SK Direksi No.: 07.12/DIR/SK/001/100/2023.*
- *Provision of Education Allowance 14th salary Board of Directors Decree No.: 07.11/dir/sk/003/100/2023: 07.11/DIR/SK/002/100/2023.*
- *Provision of 15th salary at the end of 2023 Board of Directors Decree No.: 12.19/DIR/SK/001/100/2023.*

Performance Management and Appraisal is an evaluation tool for the achievement of targets and goals that must be achieved by all Employees and work units that are prepared based on the Company's vision, mission and long-term goals and KPIs. Performance Appraisal of each individual Employee is carried out objectively, tiered, periodically, and transparently.

Welfare and Social Security

In order to carry out the mandate of the labor law and maintain employees, the Company always strives to

Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi;
- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan; dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.
- Dan lain-lain.

continue to improve employee welfare through various aspects, among others:

- *Provision and improvement of remuneration and benefits, BPJS Health social security membership, participation in BPJS Employment, health facilities and insurance;*
- *Employee development programs such as education level improvement programs; support for the needs of employees to carry out worship according to religion and belief by providing facilities and infrastructure and budget for implementing religious activities;*
- *Support for the needs of employees to carry out sports activities by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing sports activities;*
- *Assistance for employees who experience bereavement.*
- *And others.*

Turnover

| TAHUN / YEAR | PENSIUN / PENSION | MENGUNDURKAN DIRI / RESIGN | PHK / LAYOFFS | MENINGGAL / DEAD | HABIS KONTRAK / END OF CONTRACT | JUMLAH / TOTAL |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 |

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada pegawai, perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun. Terkait pemenuhan normatif kewajiban paska kerja/ pemberian pesangon, kepada pegawai organik perusahaan telah memprogramkan Jaminan Hari Tua.

Implementation of the National Social Security System (SJSN)

Providing health insurance to employees, the company includes the National Health Insurance (JKN) program at BPJS Health, and for participation in BPJS Employment in addition to the programs that have been followed, namely JK, JKK and JHT for employees have also been included in a new program, namely the Pension Insurance Program. Regarding the fulfillment of normative post-employment obligations / provision of severance pay, to organic employees the company has programmed Old Age Insurance.

Sistem Manajemen Kinerja

PID memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja

Performance Management System

PID has an employee performance assessment system that is related to the assessment system of each work unit, namely in the form of Key Performance Indicator (KPI) to assess the performance of the office unit which is assessed every quarter/year and Individual

Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha PID serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Internalisasi Budaya

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama PID. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana PID juga telah menetapkan budaya perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi PID untuk memastikan setiap pegawai mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *Good Corporate Governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas pegawai dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha PID.

Tim Internalisasi Budaya

Dalam menjalankan internalisasi budaya perusahaan, PID melibatkan seluruh pegawai mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja.

Program Internalisasi Budaya

Selama tahun 2023 PID telah melaksanakan program internalisasi budaya, di antaranya sebagai berikut:

- Mengenalkan dan mensosialisasikan sejak awal tentang budaya perusahaan yang berlaku di PID yaitu sejak pegawai mengikat kontrak kerja dengan PID.
- Selalu mensosialisasikan kepada pegawai disetiap kesempatan misalnya pada saat briefing pagi atau pada pertemuan-pertemuan internal lainnya.
- Membuat dan memberikan buku saku yang berisi budaya perusahaan kepada pegawai.
- Membentuk tim counterpart untuk implementasi budaya kerja.
- Melaksanakan pembekalan kepada tim counterpart budaya kerja.
- Program tematik AKHLAK dalam acara2 Perusahaan.

Performance Objective (IPK) to measure employee performance once a year. The SKI assessment will actively guide employees within each work unit in achieving their unit goals within the framework of achieving PID's business goals and provide a more objective assessment of performance and potential.

Culture Internalization

Fully aware that Human Resources (HR) is an important asset in maintaining the sustainability of the company, HR management is one of PID's main focuses. The HR management policy improvement program is always carried out on an ongoing basis, where PID has also established a corporate culture that is instilled through a series of internalization programs of the company's vision, mission and cultural values. The implementation of work culture is important for PID to ensure that every employee is able to uphold the company's values, fully implement Good Corporate Governance and run in harmony with the Company's overall strategy and business activities.

This is done in order to create a comfortable and harmonious work environment so that employee loyalty can increase so that in the long run it will have a positive effect on the sustainability of PID's business.

Culture Internalization Team

In carrying out the internalization of corporate culture, PID involves all employees from the highest to the lowest level, assisted by a special team responsible for conducting cultural internalization in each Work Unit.

Culture Internalization Program

During 2023, PID has implemented culture internalization programs, including the following:

- Introducing and socializing from the beginning about the corporate culture that applies in PID, namely since the employee binds the employment contract with PID.*
- Always socialize to employees at every opportunity, for example during the morning briefing or at other internal meetings.*
- Create and provide a pocket book containing corporate culture to employees.*
- Form a counterpart team for work culture implementation.*
- Conduct debriefing for the work culture counterpart team.*
- AKHLAK thematic program in company events.*

Pengembangan Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia

PID memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, *workshop* dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Program Pengembangan Kualitas dan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi PID yang telah dirumuskan sebagai berikut:

| NO. | DOKUMEN / DOCUMENTS | JUMLAH / QUANTITY |
|-----|---|----------------------------------|
| | Kegiatan pengembangan SDM tahun 2023 / <i>HR development activities in 2023</i> | |
| | <i>Workshop & Seminar / Workshop & Seminar</i> | 8 |
| 1 | <i>In House Training / In House Training</i> | 1 |
| | <i>Pelatihan / Training</i> | 7 |
| | <i>Ujian / Exams</i> | 7 |
| 2 | <i>Turnover / Turnover</i> | 198 (termasuk <i>outsourse</i>) |

Kesempatan dan Keselamatan Kerja

PID merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kinerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun PID berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. PID berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Human Resource Management Competency Development

PID provides equal opportunities for employees to continue to develop along with the development of company performance. HR development programs are carried out through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, socialization, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of the Company.

Quality Development Program

Employee Quality and Competency Development Employee quality and competency development is carried out in accordance with the PID education blue print guidelines that have been formulated as follows:

Work Opportunity and Safety

PID is a company engaged in a performance environment that does not trigger many risks of work accidents, but PID strives to provide protection at work, so that all parties can carry out activities comfortably. PID strives to meet occupational health and safety standards and achieve zero accidents in each work unit. Risks that are minimized are fire hazards, theft hazards, and health facilities. A more complete explanation of occupational health and safety is in the Corporate Social Responsibility (CSR) section.

Cuti Melahirkan

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Kesetaraan Kesempatan Kerja

PID berkomitmen dalam menerapkan prinsip kesetaraan kepada pegawai dalam hal kesempatan bekerja, pendidikan dan pelatihan, kebebasan berserikat dan lainnya. Bank tidak membedakan gender dan sara dalam seluruh level pegawai maupun manajemen.

Lingkungan Bekerja Yang Layak dan Aman

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Gedung GFI dikelola oleh Manajemen Building Kirana Two Tower dimana PID sewa yang memiliki tanggung jawab atas berbagai praktek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen *Building* mempunyai visi yaitu: Nihil Kecelakaan (*Zero Accident*), Nihil pencemaran (*Zero Emission*), dan Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama.

Upaya yang dilakukan PID dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi pegawai yaitu dengan menyusun pedoman/panduan dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja PID. Prosedurnya terfokus pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

PID tidak mempekerjakan tenaga kerja anak maupun tenaga kerja paksa

Penilaian Kinerja Pegawai

PID menetapkan standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

Maternity Leave

The scope of the Company's social responsibility related to Human Rights, which is related to employment, includes treatment / acts of discrimination, recognition and guarantees for Employee Unions, the right to grant working time, annual leave, permission to rest if giving birth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship and permission to leave workers if there is something.

Equal Employment Opportunity

PID is committed to applying the principle of equality to employees in terms of employment opportunities, education and training, freedom of association and others. The Bank does not differentiate between gender and sara in all levels of employees and management.

A Decent and Safe Working Environment

The occupational safety and health management system at GFI Building is managed by Kirana Two Tower Building Management where the leasing PID has responsibility for various Occupational Safety and Health Management System practices. Building Management has a vision that is: Zero Accident, Zero Emission, and Occupational Safety and Health is the top priority.

The efforts made by PID in creating a proper and safe working environment for employees are by preparing guidelines/guidelines in maintaining the security and safety of the lives of all employees in the PID work environment. The procedure focuses on the readiness of building safety equipment and facilities, readiness for the implementation of human life saving, and training for employees.

Child Labor and Forced Labor

PID does not employ child labor or forced labor.

Employee Performance Assessment

PID standardizes employee performance assessment using dictionary and balance scorecard for each position called Key Performance Indicator (KPI). This assessment greatly influences the career path, promotion, and rotation of each employee. However, this assessment is in the process of improvement and change to provide more values of justice for all employees.

Penghargaan dan Sanksi

Sistem *reward and punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Perusahaan. Sistem *reward and punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem *reward and punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target perusahaan dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward and punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Rencana Pengembangan SDM di Tahun 2024

Penerimaan Sumber Daya Manusia baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan pegawai pada jaringan kantor baru, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti pegawai yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta pertimbangkan hasil *Work Load Analysis (WLA)*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksanakan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap pegawai.

Rewards and Sanctions

The reward and punishment system from management is important to be implemented by the Company. The reward and punishment system helps management in realizing the company's vision, mission, strategy and goals. In addition, the reward and punishment system from management is a management tool to be able to influence employees to act positively to achieve company goals. Employees will be cooperative if management can develop and manage employees appropriately, so that company targets can run according to management expectations.

The reward and punishment system from management is also designed to motivate employees so that company goals are achieved. Reward is one of the important control tools used by companies to motivate personnel to achieve company goals with behavior as expected by the company. Meanwhile, punishment is something that is disliked / disliked by employees to produce a deterrent effect so that they will not commit the same actions and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a raise, being removed from the list of employees to be promoted, failure to get a reward, threat of dismissal, and so on.

HR Development Plan in 2024

The recruitment of new Human Resources will be carried out to support the fulfillment of employees in the new office network, filling new formations or types of work, replacing employees who quit either for retirement or other reasons and considering the results of Work Load Analysis (WLA).

The development of communication and information technology offers many conveniences, one of which is making it easier for information to spread without being limited by time and space. Simultaneous learning processes can be carried out for small or large target scopes, anywhere and anytime and can be followed by every employee.







PELNI

SERVICES

PT Pelita Indonesia Djaya

4

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY REPORT

Teknologi Informasi sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Oleh karenanya, PID senantiasa berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi.

Information Technology plays an important role in supporting the Company's operations and business growth. Therefore, PID always strives to improve and optimize Information Technology facilities and infrastructure.



00010101000111
0010111010101101
110101110011010
01010110010100111
1101100011101
11010



1010001011
0110101011001
1011001010
0110010100111
00011101



010 CONNECTION

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Oleh karenanya, PID senantiasa berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi. Melalui layanan berbasis Teknologi Informasi, PID berharap mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan senantiasa melaksanakan perbaikan proses bisnis.

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Teknologi Informasi dan penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang baik serta pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kami telah melakukan penyusunan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, yang tertuang dalam bentuk Keputusan Direksi. Didalam Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi tersebut berisi Kebijakan, Standar dan Prosedur mengenai:

1. Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
2. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi
3. Operasional Teknologi Informasi
4. Jaringan Komunikasi
5. Pengamanan Informasi
6. Rencana Pemulihan Bencana
7. Komputasi Pengguna Akhir
8. Layanan Elektronik
9. Penggunaan Penyedia Jasa Teknologi Informasi
10. Penyediaan Jasa Teknologi Informasi

Information Technology

Information Technology plays an important role in supporting the Company's operations and business growth. Therefore, PID always strives to improve and optimize Information Technology facilities and infrastructure. Through Information Technology-based services, PID hopes to improve the quality of service to customers and continuously implement business process improvements.

Policy and Governance Information Technology

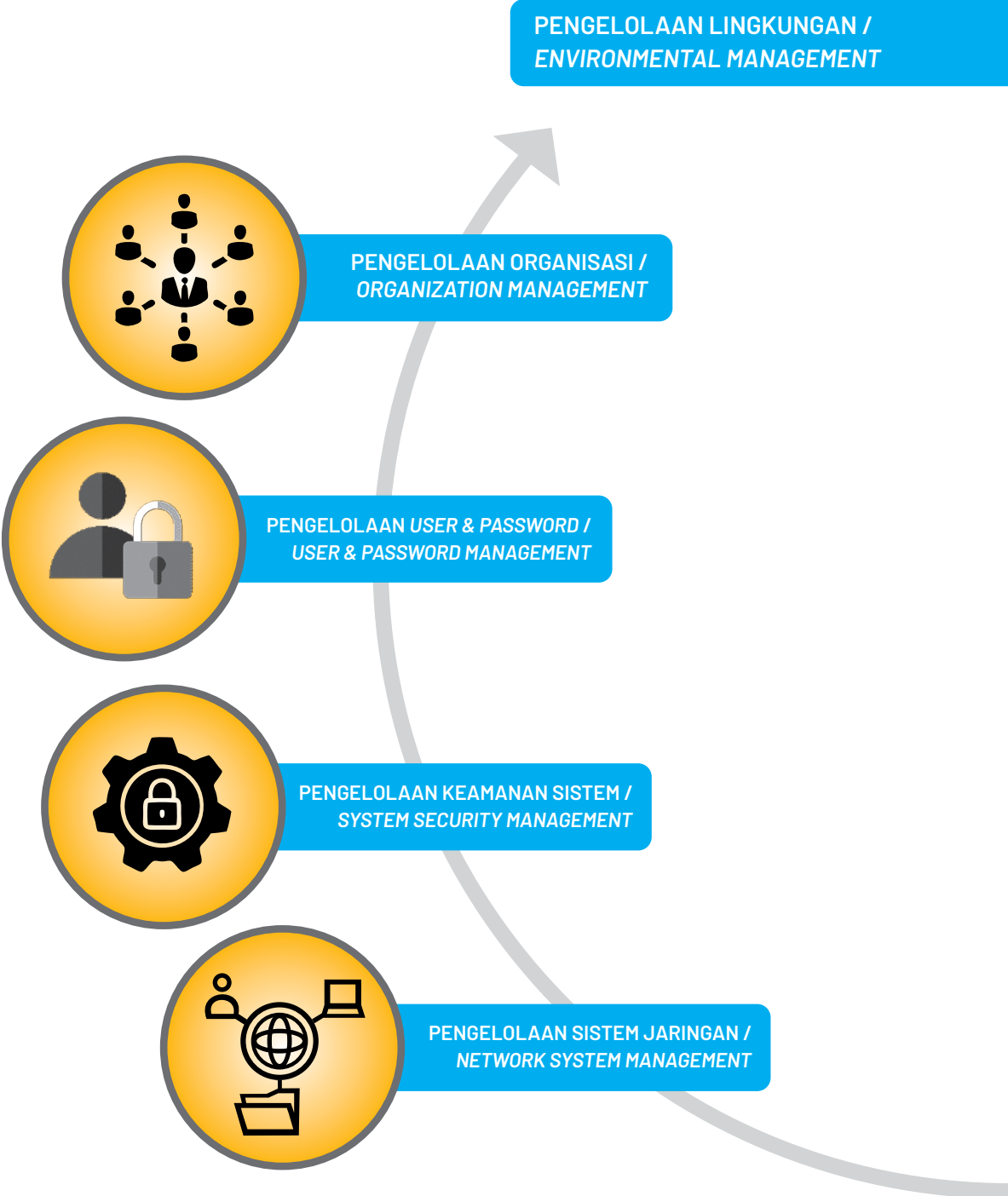
In order to improve the management of Information Technology and the implementation of good Information Technology Risk Management and fulfillment of the Financial Services Authority Regulation, we have prepared the Guidelines for Governance and Management of Information Technology, which are contained in the form of a Board of Directors Decree. The Information Technology Governance and Management Guidelines contain policies, standards and procedures regarding:

1. *Information Technology Governance and Management*
2. *Development and Procurement of Information Technology*
3. *Information Technology Operations*
4. *Communication Network*
5. *Information Security*
6. *Disaster Recovery Plan*
7. *End User Computing*
8. *Electronic Services*
9. *Use of Information Technology Service Providers*
10. *Provision of Information Technology Service*

Struktur Teknologi Informasi / Information Technology Structure

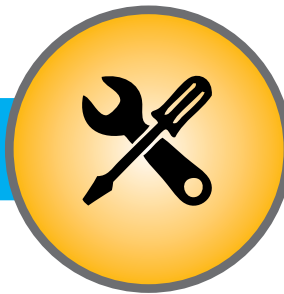
Pengelolaan Teknologi Informasi di PID dilaksanakan oleh Unit Bisnis TI dibawah Divisi SDM Umum dan TI sesuai dengan bagan di bawah ini: / *Information Technology Management in PID is carried out by the Information Technology Division in accordance with the chart below:*

Tata Kelola Teknologi Informasi PT PID – IT Governance /
PT PID Information Technology Governance – IT Governance





PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS /
HARDWARE MANAGEMENT



PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK /
SOFTWARE MANAGEMENT



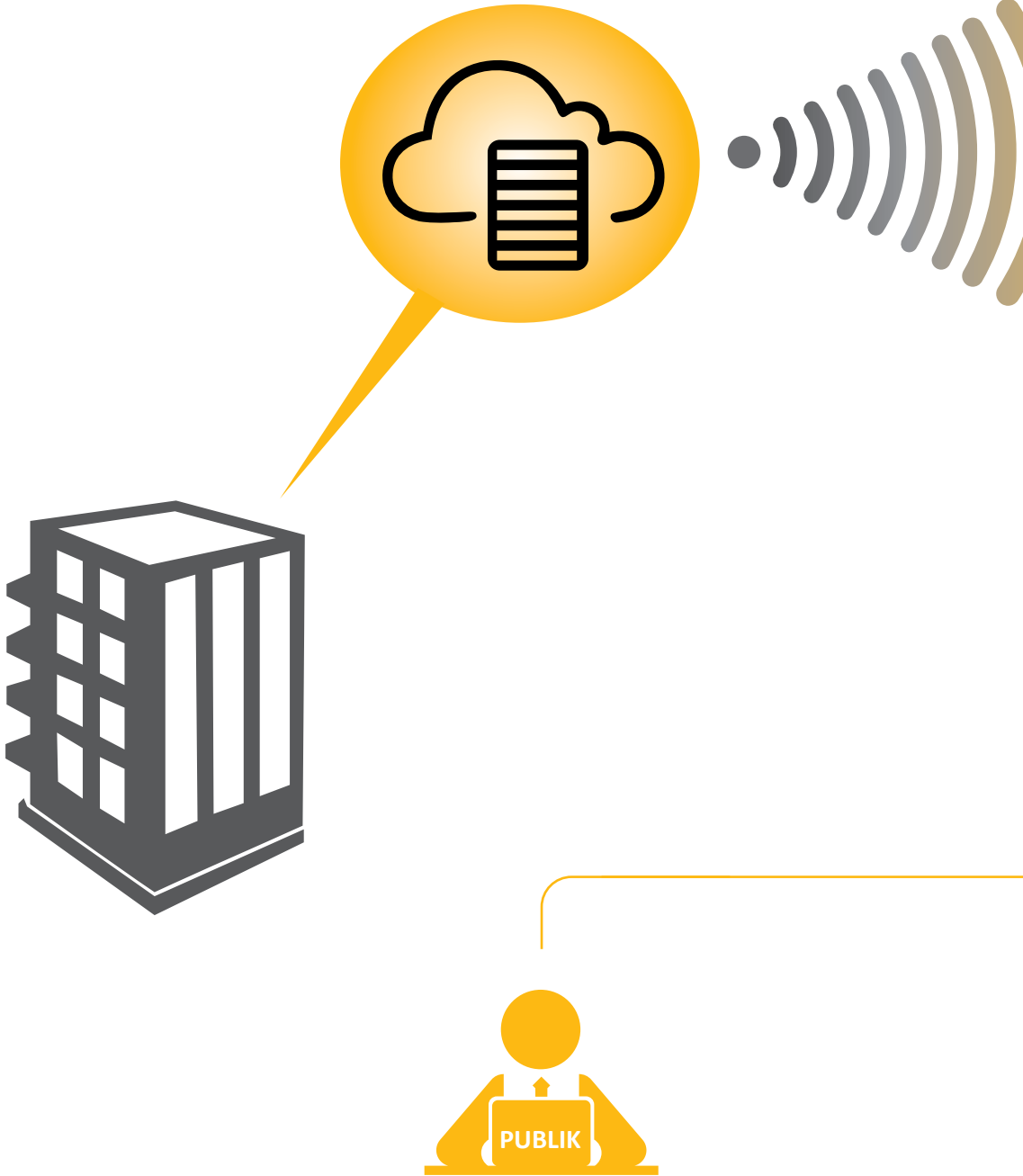
PENGELOLAAN FILE /
FILE MANAGEMENT



PENGELOLAAN BACKUP / RESTORE /
BACKUP MANAGEMENT RESTORE

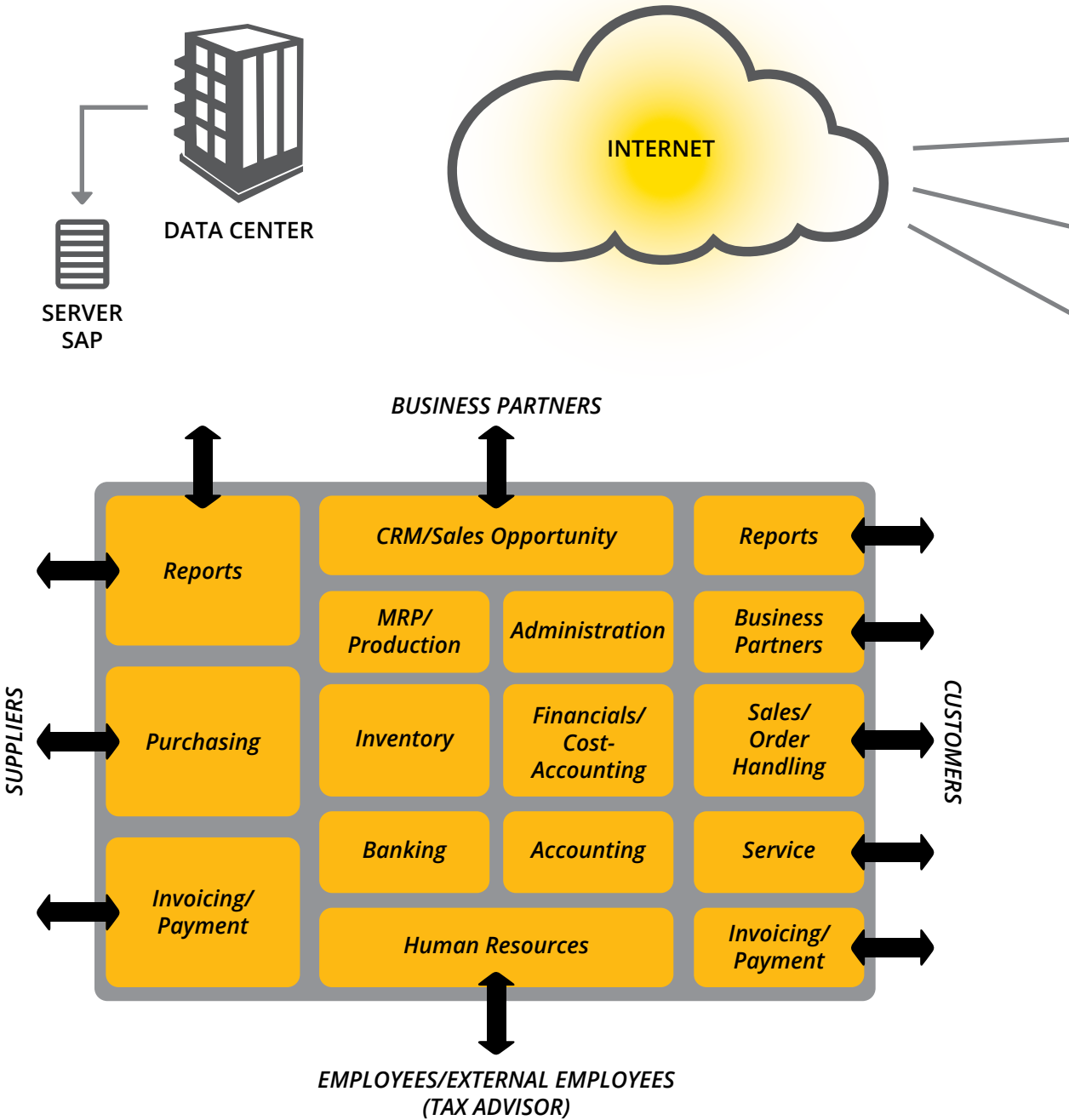


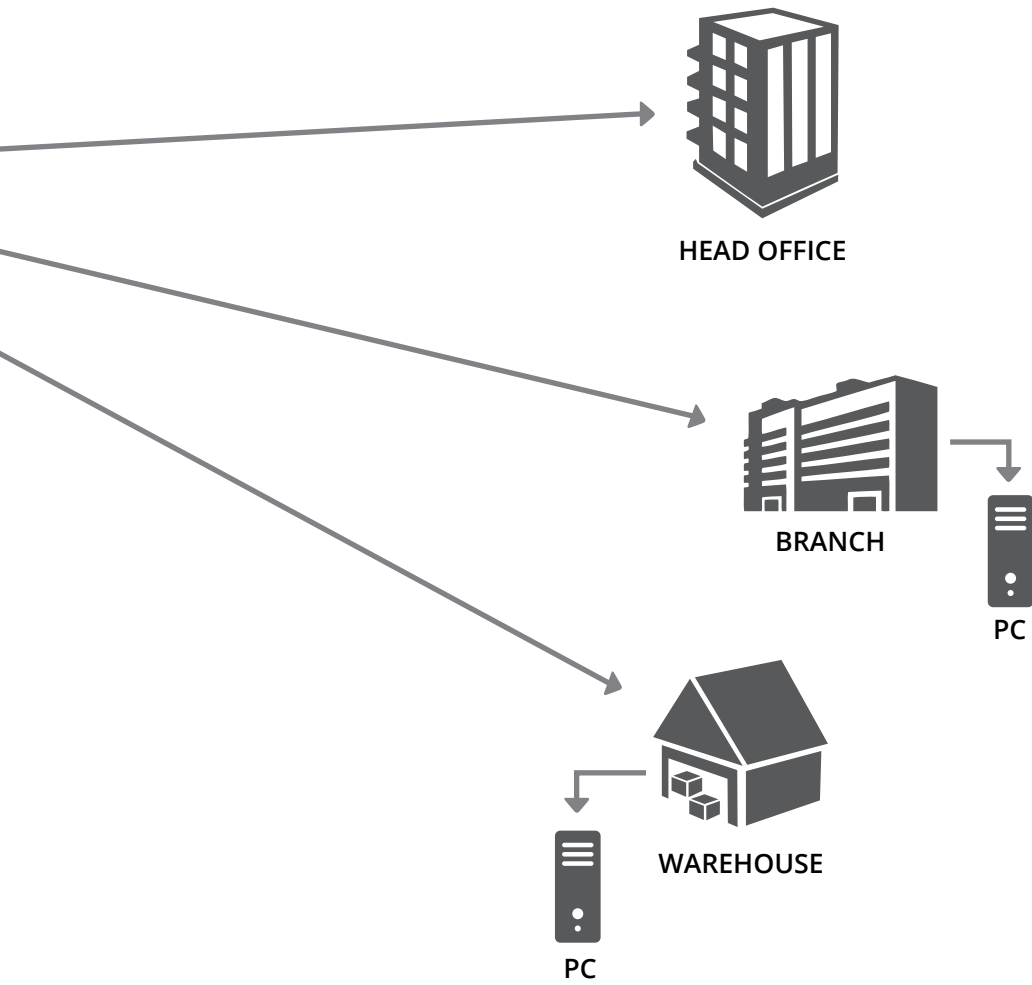
**Website Corporate dan Sosial Media:
Instagram @pelniservices**





**Aplikasi System Keuangan SAP /
SAP Financial System Application**



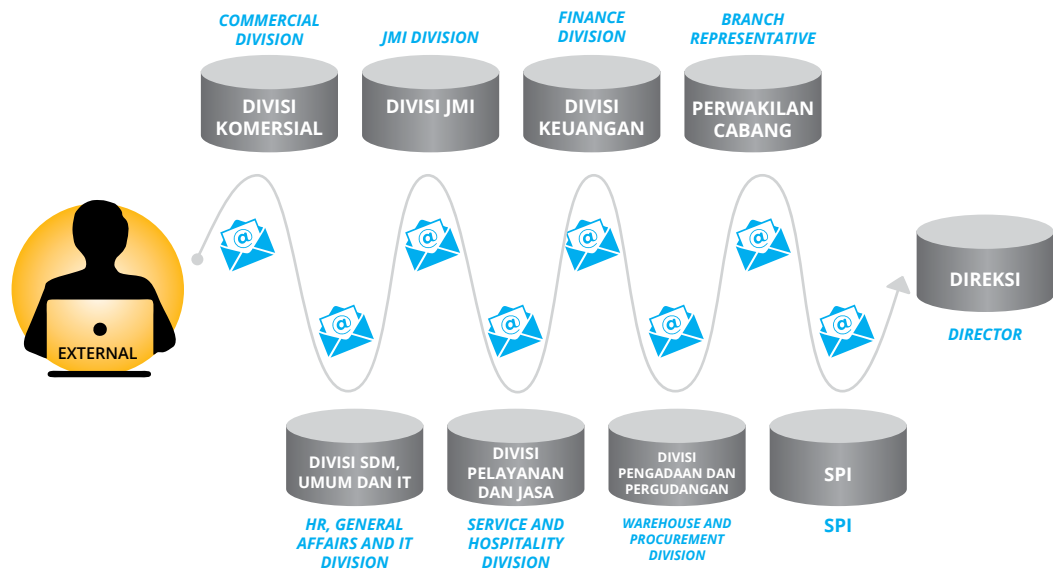


Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (E-Mail) / Technical Management of E-Mail

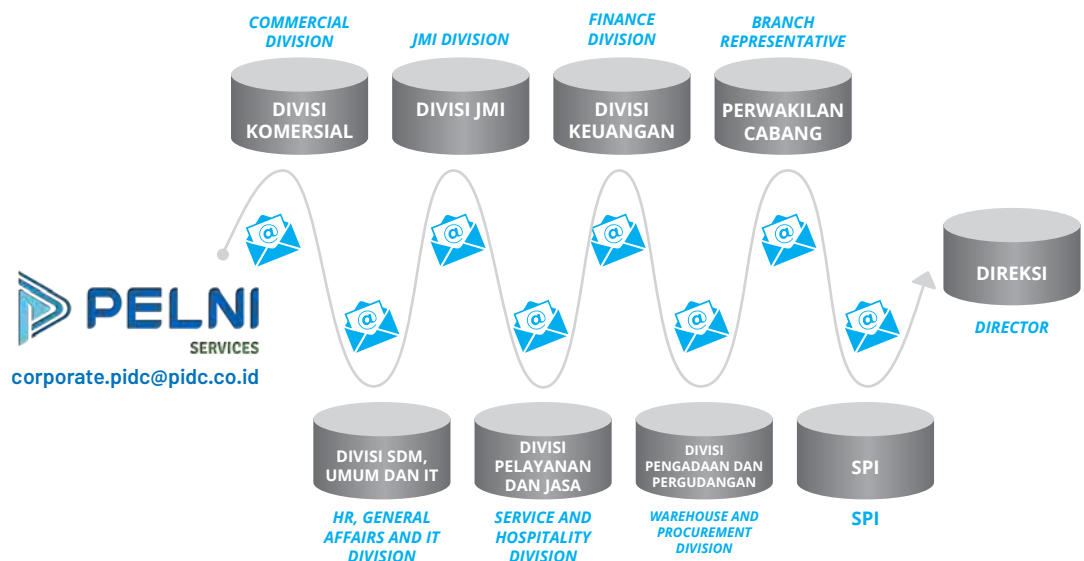
1. User external kirim email ke alamat corporate.pidc@pidc.co.id sebagai main email PT PID /
External users send email to corporate.pidc@pidc.co.id as PT PID's main email address.



- Atau User external kirim email langsung ke account email divisi unit kerja/account email Direksi. /
Or external users send email directly to the work unit division email account / Board of Directors email account.



2. PIC email corporate.pidc@pidc.co.id share email ke masing-masing email divisi unit kerja dan email Direksi. / *PIC corporate.pidc@pidc.co.id share email to each work unit division email and Board of Directors email.*

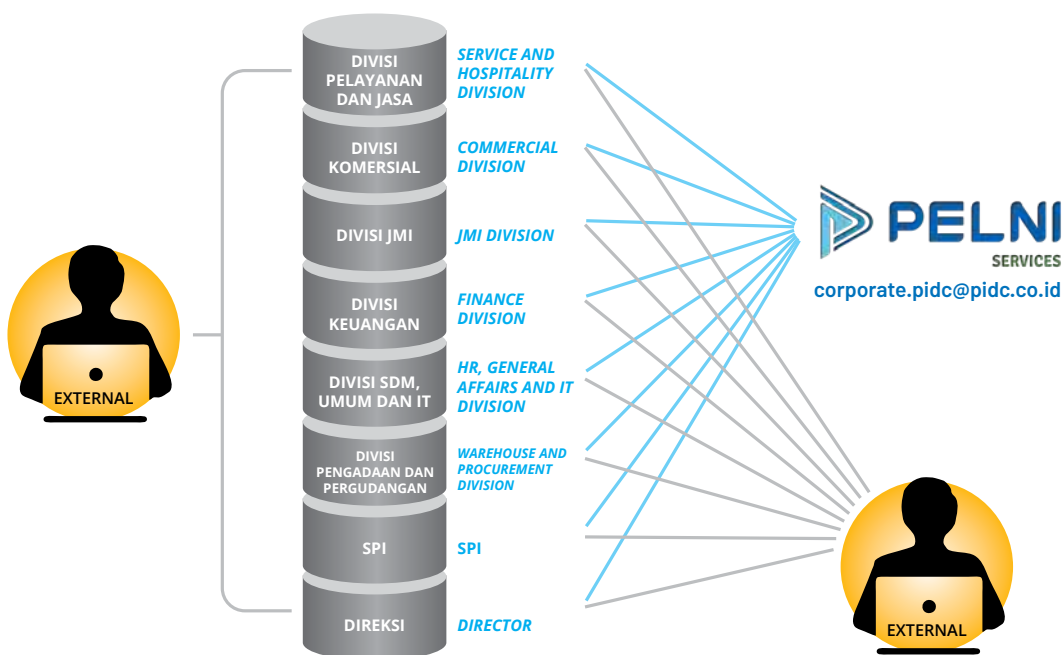


Catatan / *Note*:

PIC back Up berkala attachment email masuk (24 hours x 1), dan di kelola rapih sebagai database/ dokumentasi dengan media external HDD (hardisk). PIC diberikan hak acces pada account email direksi (direktur Utama dan Direktur Operasi). / PIC periodically backs up incoming email attachments (24 hours x 1), and is neatly organized as a database / documentation with external HDD (hard disk) media. PIC is given access rights to the directors' email accounts (President Director and Operations Director).

System Response

3. Pada saat merespon email pihak user external tersebut tiap Divisi unit kerja atau Direksi diperkenankan merespon langsung melalui account email Divisi / Direksi masing-masing di cc: ke email **corporate.pidc@pidc.co.id** (main email). / *When responding to emails from external users, each Division of the work unit or the Board of Directors is allowed to respond directly through their respective Division / Board of Directors email account at cc: to email corporate.pidc@pidc.co.id (main email).*



Dari account Gmail **ptpidc@gmail.com** ke account email **corporate.pidc@pidc.co.id** /
*From Gmail account **ptpidc@gmail.com** to email account **corporate.pidc@pidc.co.id***

1. Jika pihak user external kirim email ke account Gmail pada saat merespon harus via email **corporate.pidc@pidc.co.id**. /
*If the external user sends an email to the Gmail account when responding, it must be via email **corporate.pidc@pidc.co.id**.*
2. Tidak diperkenankan merespon email pihak ke-3 melalui account Gmail. /
Do not respond to 3rd party emails through your Gmail account.
3. Selama masa peralihan tersebut, account Gmail hanya untuk menerima email pihak ke-3. /
During the transition period, the Gmail account is only for receiving 3rd party emails.
4. Account Gmail dapat digunakan untuk merespon apabila terjadi kendala, dan proses maintenance pada account corporate. / *Gmail accounts can be used to respond to problems, and maintenance processes on corporate accounts.*
5. Account Gmail tetap dapat di acces oleh masing-masing divisi unit kerja. /
Gmail accounts can still be accessed by each division of the work unit.
6. Account personal domain **@pidc.co.id** digunakan untuk pekerjaan yang bersifat teknis operasional. /
*The personal domain account **@pidc.co.id** is used for technical operational work.*
7. Hubungi dan laporkan bila ada kendala pada saat pelaksanaannya ke Staff IT. /
Contact and report any problems during implementation to the IT Staff.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Divisi Teknologi Informasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan bisnis PID yang telah ditetapkan oleh manajemen. Guna mengembangkan dan menyiapkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar dapat menunjang pekerjaan di bidang Teknologi Informasi, pegawai pada Divisi Teknologi Informasi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan *workshop*. Pada tahun 2023 PID berencana mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan TI di tahun 2023.

Rencana Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan kebutuhan utama PID untuk berkompetisi dengan Perusahaan. Berikut ini adalah *Masterplan* dari Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2023 – 2025 Penguatan *Platform* Teknologi Informasi untuk mendukung Aplikasi.

Kegiatan penguatan *Platform* Teknologi Informasi meliputi:

- a. Audit Teknologi Informasi System ERP Microsoft Dynamic Business Central dan Gap Analysis;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Upgrade System ERP Microsoft Dynamic Business Central;
- c. Proses pengadaan Optimalisasi Microsoft Dynamic Business Central;
- d. Persiapan Optimalisasi Microsoft Dynamic Business Central;
- e. Terimplementasinya Microsoft Dynamic Business Central;
- f. Pengembangan Gateway transaksi dan Gateway antara Microsoft Dynamic Business Central dengan *surrounding application* (Open API) pihak lain;
- g. Pengembangan Website PID ;
- h. Analisa kondisi Role Firewall, Network serta analisa risiko;
- i. Pengembangan system Data Warehouse dan *delivery tracking* untuk menunjang aplikasi MIS, Pelaporan Perusahaan dan sebagai sumber Data Audit
- j. Pengembangan MIS berbasis Web.

Information Technology Human Resources Development

The development of Human Resources in the Information Technology Division is required to meet the demands of technology development and PID business that have been determined by management. In order to develop and prepare the capabilities of Human Resources to support work in the field of Information Technology, employees in the Information Technology Division have attended various trainings, seminars and workshops. In 2023 PID plans to include employees in IT training in 2023.

Information Technology Development Strategy Plan

Information Technology is the main requirement of PID to compete with other companies. The following is the Masterplan of the Information Technology Strategic Plan for 2023 – 2025 Strengthening the Information Technology Platform to support Applications.

Information Technology Platform strengthening activities include:

- a. Information Technology Audit of Microsoft Dynamic Business Central ERP System and Gap Analysis;
- b. Preparation of Microsoft Dynamic Business Central ERP System Upgrade Work Plan;
- c. Microsoft Dynamic Business Central Optimization procurement process;
- d. Preparation of Microsoft Dynamic Business Central Optimization;
- e. Implementation of Microsoft Dynamic Business Central;
- f. Development of transaction Gateway and Gateway between Microsoft Dynamic Business Central and *surrounding application* (Open API) of other parties;
- g. Development of PID Website;
- h. Condition analysis of Role Firewall, Network and risk analysis;
- i. Development of Data Warehouse system and *delivery tracking* to support MIS applications, Company Reporting and as a source of Audit Data.
- j. Development of Web-based MIS.

1. Penguatan produk berbasis *Mobile Device (Electronic Channel)*
Kegiatan penguatan produk berbasis *Mobile Device (Electronic Channel)* meliputi:
2. Penguatan fungsi *Internal Control*
Kegiatan penguatan Penguatan fungsi *Internal Control* yaitu Pengembangan sistem *Anti Fraud* berbasis TI (Pengembangan *Website Whistle Blowing System* secara mandiri).

1. *Strengthening Mobile Device-based products (Electronic Channel)*
Mobile Device (Electronic Channel) based product strengthening activities include:
2. *Strengthening Internal Control function*
Activities to strengthen the strengthening of the Internal Control function, namely the development of an IT-based Anti-Fraud system (independent development of the Whistle Blowing System website).



5

**TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK /
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE**

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

The Company has implemented GCG principles and practices in the management and management of its business, so as to effectively protect the Capital Owners. GCG principles include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance /GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi PID untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* yang merupakan komitmen kuat PID, demi kepentingan Pemilik Saham (Oleh karenanya PID selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinuitas terkait produk dan jasa yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan).

Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perusahaan melakukan sosialisasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

Dasar dan Penerapan GCG

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PID adalah niat dan tekad manajemen PID untuk menjadikan PID sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki *Code of Conduct*, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan GCG di PID adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi .
2. Mendorong dan mendukung pengembangan PID.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PID.
7. Memperbaiki budaya kerja PID.
8. Meningkatkan citra PID (*image*) menjadi semakin baik.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become a strong foundation for PID to face the changing business environment in the future. All strategic decisions made by the Board of Commissioners and the Board of Directors always consider the principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness which is a strong commitment of PID, for the benefit of Shareholders (Therefore PID always maintains trust, credibility and continuity efforts related to products and services which are very decisive factors for the development and continuity of the Company's business).

In implementing GCG, the Company conducts continuous socialization aimed at providing an understanding of the importance of GCG, communicating and internalizing various policies, programs and implementation of activities related to GCG.

The Company has implemented GCG principles and practices in the management and management of its business, so as to effectively protect the Capital Owners. GCG principles include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

Basis and Implementation of GCG

The spirit contained in the implementation of GCG in PID is the intention and determination of PID management to make PID a company that continues to grow and develop with good quality products and work processes, and has a Code of Conduct, including responsibility for the environment.

The objectives of GCG Implementation in PID are as follows:

1. *To control and direct the relationship between Company Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors), employees, customers, business partners, as well as the community and the environment to run well and the interests of all parties are fulfilled.*
2. *Encourage and support the development of PID.*
3. *Managing resources in a more trustworthy manner.*
4. *Manage risk better.*
5. *Improve accountability to stakeholders.*
6. *Prevent irregularities in PID management.*
7. *Improve the work culture of PID.*
8. *Improving PID's image for the better.*

Untuk mewujudkan hal tersebut, PID memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi PID dalam penerapan GCG yaitu:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2021;
8. Akta Pendirian PT PID, Akta Anggaran Dasar, dan Akta Perubahan terakhir di tahun 2023.
9. Pedoman GCG : Surat keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya dengan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya No:05.31/DIR/SK/001/100/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Lingkungan PT Pelita Djaya Indonesia Djaya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*

Selama tahun 2003, manajemen memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan telah memiliki *code of conduct* yang dijadikan sebagai dasar rujukan bagi setiap personil dalam bertindak di dalam relasinya dengan pelaksanaan tugas. Seluruh personil berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi serta tidak melaksanakan praktik-praktik KKN melalui penandatanganan pakta integritas. Dalam rangka menilai komitmen perusahaan dalam melaksanakan praktik GCG, sesuai dengan ketentuan regulator yang ada di wilayah NKRI. Perusahaan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ditandai dengan melakukan kegiatan dengan pihak ketiga (Diklat ISO).

To realize this, PID has a full commitment and consistently enforces the implementation of GCG by referring to several formal rules that form the basis for PID in implementing GCG, namely:

1. *Good Corporate Governance Guidelines issued by the National Governance Policy Committee (KNKG);*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;*
3. *Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;*
4. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
5. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;*
6. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;*
7. *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 issued by the National Committee for Governance Policy in 2021;*
8. *Deed of Establishment of PT PID, Deed of Articles of Association, and Deed of Last Amendment in 2023.*
9. *GCG Guidelines: Joint Decree between the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya and the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya No: 05.31/DIR/SK/001/100/2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines within PT Pelita Djaya Indonesia Djaya.*

Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

During 2003, management ensured that the company was managed based on the principles of good corporate governance. The company has a code of conduct that serves as the basis of reference for each personnel in acting in relation to the implementation of duties. All personnel are committed not to accept gratuities and not to carry out corrupt practices through the signing of an integrity pact. In order to assess the company's commitment in implementing GCG practices, in accordance with the provisions of regulators in the territory of the Republic of Indonesia. The company implements the ISO 9001 Quality Management system characterized by conducting activities with third parties (ISO Training).

Perusahaan telah melakukan assesmen kriteria penilaian kinerja unggul berbasis *Malcolm Baldrige*. Perusahaan mengevaluasi Standard Operasional Perusahaan (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan membuat SOP Pengadaan Barang dan Jasa bidang Permakanan dan Jasa Maintenance secara swakelola Perusahaan menerbitkan kebijakan akuntansi dan keuangan tentang mekanisme perlakuan dan pencatatan uang muka dan pertanggungjawaban kegiatan swakelola.

Komitmen Implementasi GCG

Bagi PID, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance - GCG*) merupakan prinsip yang senantiasa mengarahkan Perusahaan dalam mengendalikan seluruh kegiatan usaha, mulai dari operasional, keuangan hingga sumber daya manusia untuk memastikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan. Implementasi GCG senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapannya dibuat sejalan dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Transparency**

Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat melalui jalur komunikasi yang memadai secara terbuka sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. **Accountability**

Perusahaan memiliki sistem manajemen yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan.

3. **Responsibility**

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip korporasi yang sehat.

4. **Independency**

Perusahaan memastikan diri bebas atau tidak terikat dengan benturan kepentingan yang berpotensi untuk menempatkan Perusahaan dalam tekanan dari pihak manapun.

5. **Fairness**

Perusahaan memberikan perhatian yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dengan membuka diri terhadap segala masukan dan saran yang ingin

The company has conducted an assessment of superior performance assessment criteria based on Malcolm Baldrige. The Company evaluates the Company's Operational Standard (SOP) for Procurement of Goods and Services. The Company makes SOP for Procurement of Goods and Services in the field of Food and Maintenance Services in a self-managed manner. The Company issues accounting and financial policies regarding the mechanism for treatment and recording of advances and accountability for self-managed activities.

Commitment to GCG Implementation

For PID, Good Corporate Governance (GCG) is a principle that always directs the Company in controlling all business activities, ranging from operations, finance to human resources to ensure that the power and authority given to the Company can be accounted for to shareholders and stakeholders. GCG implementation is always carried out in accordance with the provisions of applicable laws. Its implementation is made in line with the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness with the following explanation:

1. **Transparency**

The Company discloses information in a timely, adequate, clear, and accurate manner through adequate communication channels in an open manner so that it can be easily accessed by every stakeholder in accordance with their rights.

2. **Accountability**

The Company has a management system that supports the creation of clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs.

3. **Responsibility**

The Company always complies with applicable laws and regulations by applying sound corporate principles.

4. **Independency**

The Company ensures that it is free or not bound by conflicts of interest that have the potential to put the Company under pressure from any party.

5. **Fairness**

The Company gives equal attention to all stakeholders based on the principle of fairness by opening itself to all input and suggestions

disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin hubungan imbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebijakan GCG

Kebijakan tata kelola Perusahaan yang baik antara lain meliputi pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara Direksi dan Dewan Komisaris, *check and balances*, strategi Perusahaan yang jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan operasional.

Beberapa pedoman-pedoman dan kebijakan Perusahaan dalam pelaksanaan penerapan GCG meliputi:

- a. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*),
- b. Pedoman Kebijakan Perusahaan (*Code of Corporate Governance*),
- c. *Board Manual*,
- d. Piagam Komite Audit,
- e. Piagam Satuan Pengawasan Intern,
- f. Kebijakan Pengelolaan Risiko,
- g. Peraturan Perusahaan,
- h. Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan *stakeholders* yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, pelanggan, dan pemasok.

Tujuan Penerapan GCG

PID mengimplementasikan GCG sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan *turnaround*, yang diharapkan dapat menciptakan PID sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Untuk itu dengan menerapkan GCG, PID memiliki tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk membangun daya saing yang kuat, dalam menjaga etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perusahaan;
3. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja antara organ PID;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan SDM yang profesional;
6. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan serta peningkatan kemanfaatan bagi *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PID;

to be submitted by all stakeholders to ensure a reciprocal relationship in accordance with the rights and obligations of each party.

GCG Policy

Good corporate governance policies include a clear separation of duties and responsibilities between the Board of Directors and the Board of Commissioners, checks and balances, a clear corporate strategy, business ethics, harmonious relationships with all stakeholders, and operational supervision.

Some guidelines and policies

The Company's guidelines and policies in implementing GCG include:

- a. *Code of Conduct,*
- b. *Code of Corporate Governance,*
- c. *Board Manual,*
- d. *Audit Committee Charter,*
- e. *Internal Audit Unit Charter,*
- f. *Risk Management Policy,*
- g. *Company Regulations,*
- h. *Other policies related to stakeholders that regulate the rights and obligations of employees, customers, and suppliers.*

Purpose of GCG Implementation

PID implements GCG as a fundamental strategy in carrying out transformation and turnaround, which is expected to create PID as a sustainable company. Therefore, by implementing GCG, PID aims to:

1. *Optimizing the value of the Company to build strong competitiveness, in maintaining ethics and integrity in order to maintain existence and sustainable growth;*
2. *Encourage the management of the Company in a professional, efficient and effective manner while also empowering the functions and increasing the independence of the organs within the Company;*
3. *Directing and controlling the working relationship between PID organs;*
4. *Encourage that every decision making and implementation must be based on high moral values and in accordance with applicable laws and regulations as well as high social responsibility;*
5. *Creating professional human resources;*
6. *Improving the welfare of all personnel and increasing benefits for Stakeholders;*
7. *Preventing irregularities in the management of PID;*

8. Memperbaiki Budaya Kerja PID.

Pengukuran Implementasi GCG

PID secara berkala melakukan pengukuran atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, PID memiliki tujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi PID, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan PID yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PID.

Mekanisme dan Struktur GCG

Mekanisme GCG merupakan mekanisme atas implementasi tata kelola perusahaan yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme GCG dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PID Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambar pada Organ PID yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ PID yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah Organ PID yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

8. Improving the work culture of PID.

GCG Implementation Measurement

PID periodically measures the implementation of corporate governance. Through this measurement process, PID aims to:

- *Test and assess GCG implementation through elaboration of GCG implementation conditions and comparison with predetermined indicators and testing parameters.*
- *Provide an overview of the measurement results through the scoring of GCG implementation, along with proposed improvement recommendations, in order to reduce the gap between the practical level and the test indicators and parameter*
- *To monitor the consistency of GCG implementation within the PID organization, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.*
- *To encourage more professional, transparent, and efficient management of PID, as well as to empower the functions and increase the independence of PID organs.*

GCG Mechanism and Structure

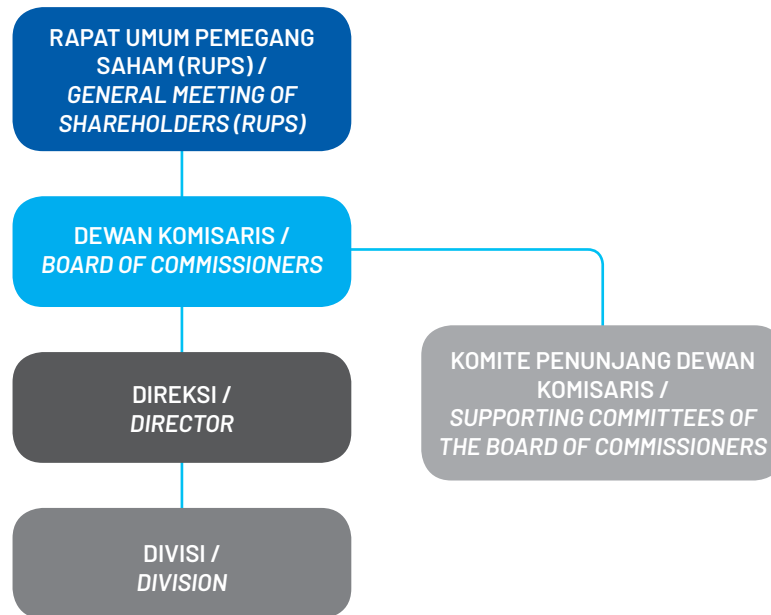
GCG mechanism is a mechanism for the implementation of corporate governance that is reflected in a strong system. This is important, because the implementation of corporate governance is not enough to rely on the governance structure pillar, but requires clear rules of the game in the form of mechanisms. The GCG mechanism can be interpreted as the rules of the game, procedures and clear relationships between those who make decisions and those who control (supervise) these decisions.

In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the corporate governance structure is described in the PID Organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.

- *The General Meeting of Shareholders (GMS) is a PID organ that has authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set forth in the Law and/or the Articles of Association.*
- *The Board of Commissioners is the PID Organ in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.*

- Direksi adalah Organ PID yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PID untuk kepentingan PID, sesuai dengan maksud dan tujuan PID serta mewakili PID, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- *The Board of Directors is the PID Organ which is authorized and fully responsible for the management of PID for the interests of PID, in accordance with the purposes and objectives of PID and represents PID, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*

Struktur GCG / GCG Structure



Assessment GCG

| NO. | ASPEK GOVERNANCE / GOVERNANCE ASPECT | BOBOT / BOBOT | CAPAIAN PERUSAHAAN / COMPANY ACHIEVEMENTS | PROSENSE / PERCENTAGE |
|------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|
| 1 | Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / <i>Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i> | 7,00 | 6,632 | 94,74 |
| 2 | Pemegang Saham dan RUPS / <i>Shareholders and GMS</i> | 9,00 | 7,179 | 79,77 |
| 3 | Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i> | 35,00 | 27,310 | 78,03 |
| 4 | Direksi / <i>Directors</i> | 35,00 | 26,290 | 75,11 |
| 5 | Pengungkapan Informasi dan Transparansi / <i>Information Disclosure and Transparency</i> | 9,00 | 4,653 | 51,70 |
| Sub Total / Sub Total | | 95,00 | 72,065 | |
| 6 | Aspek Lainnya / <i>Other Aspects</i> | 5,00 | 0,00 | |
| JUMLAH / TOTAL | | 100 | 72,065 | Cukup Baik |

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tingkat kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diberikan kepada Direksi atau Komisaris dan pihak lain dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang PID dan/atau Anggaran Dasar PID.

RUPS dalam Perseroan dibagi dalam dua jenis:

- RUPS Tahunan (RUPST) diselenggarakan setiap tahun buku paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam RUPST, Direksi memiliki kewajiban untuk mengemukakan berbagai hal, di antaranya mengenai laporan tahunan, usulan terkait penggunaan laba bersih Perusahaan, usulan penetapan akuntan publik untuk tahun buku yang sedang berjalan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, dan hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.

Saat pelaksanaan RUPS, pemungutan suara dilakukan secara lisan namun dapat ditentukan dengan cara lain sesuai dengan keputusan pimpinan rapat. Ada beberapa peraturan mengenai prosedur pengambilan keputusan di dalam RUPS. Peserta rapat yang kehadirannya sudah dihitung di dalam kuorum, namun tidak berada di dalam ruang rapat saat pemungutan suara berjalan, dengan demikian yang bersangkutan dianggap setuju dengan segala keputusan rapat. Dalam memvalidasi suara dan mencatat risalah rapat RUPS, Perusahaan telah menunjuk Notaris sebagai pihak independen yang bertanggung jawab.

General Meeting of Shareholders (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) has the highest level of power that cannot be given to the Board of Directors or Commissioners and other parties within the limits specified in the PID law and/or the PID Articles of Association.

The GMS in the Company is divided into two types:

- *Annual GMS (AGMS) is held every fiscal year at the latest 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.*
- *Extraordinary GMS (EGMS) can be held at any time in accordance with urgent needs.*

In the AGM, the Board of Directors has the obligation to present various matters, including the annual report, proposals related to the use of the Company's net profit, proposals for the appointment of a public accountant for the current fiscal year in accordance with the direction of the Board of Commissioners, and other matters that require GMS approval.

During the GMS, voting is conducted verbally but can be determined by other means in accordance with the decision of the chairman of the meeting. There are several regulations regarding the decision-making procedure in the GMS. Meeting participants whose attendance has been counted in the quorum, but are not in the meeting room when voting takes place, are thus considered to agree with all decisions of the meeting. In validating the votes and recording the minutes of the GMS meeting, the Company has appointed Notary as the independent party responsible.

Pelaksanaan RUPS 2023 / Implementation of GMS 2023

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|-------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| 1 | Akta No. 7 / Deed No. 7 | 31 Januari 2023 Pukul 17.30 WIB / January 31, 2023 5:30 p.m. | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2023) / Company Work Plan and Budget (RKAP 2023) | <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga); / Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2023 (two thousand twenty-three) including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners Year 2023 (two thousand twenty-three); Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023 {duaribu duapuluh tiga}; / Determination of the Annual Management Contract containing the Target Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors Collegially for the Year 2023 {february twenty-three}; Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris Tahun 2023 {dua ribu duapuluh tiga}; / Determination of the Annual Management Contract (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners in 2023 {two thousand twenty three}; Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga); / Determination of Operational Aspect Indicators for the measurement of the Company's Health Level in 2023 (two thousand twenty-three); Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 1.0 % {sepuluh persen} dari nilai masing masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi;/ Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 1.0% {ten percent} of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value; | Terlaksana / Implemented | <ul style="list-style-type: none"> Direksi PT Pelni (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas / Board of Directors of PT Pelni (Persero) as Majority Shareholder. Pengurus Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP) selaku Pemegang Saham Minoritas / Management of Pelni Pensioners Health Foundation (YKPP) as Minority Shareholder. Dewan Komisaris Perseroan / Board of Commissioners of the Company. Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company. |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | 6. Pengukuhan emberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang manajemen Risiko. / <i>Confirmation of the implementation of the Minister of SOE Regulation number PER-5/MBU/09/2022 on Risk management.</i> | | |
| 2 | Akta No. 6 / <i>Deed No. 6</i> | 31 Januari 2023 Pukul 15.20 WIB / <i>January 31, 2023 3:20 p.m.</i> | Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan / <i>Changes in the Nomenclature of the Company's Board of Directors</i> | <p>1. Perubahan Nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan; / <i>Perubahan Nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan;</i></p> <p>2. Mengalihkan Penugasan yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Operasi dan Komersial dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya; / <i>Mengalihkan Penugasan yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Operasi dan Komersial dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya;</i></p> <p>3. Mengalihkan Penugasan yang semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya. / <i>Mengalihkan Penugasan yang semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya.</i></p> | Terlaksana / <i>Implemented</i> | <ul style="list-style-type: none"> Direksi PT Pelni (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas. / <i>Board of Directors of PT Pelni (Persero) as Majority Shareholder.</i> Pengurus Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP) selaku Pemegang Saham Minoritas. / <i>Management of Pelni Pensioners Health Foundation (YKPP) as Minority Shareholder.</i> Dewan Komisaris Perseroan. / <i>Board of Commissioners of the Company.</i> Direksi Perseroan. / <i>Board of Directors of the Company.</i> |
| 3 | Akta No. 8 / <i>Deed No. 8</i> | 27 Juni 2023 Pukul 09.46 WIB / <i>June 27, 2023 9:46 a.m.</i> | Laporan Keuangan Tahun 2022 / <i>Financial Report 2022</i> | <p>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua); / <i>Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Oversight Report of the Financial Year 2022 (two thousand twenty two) and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2022 (two thousand twenty two);</i></p> <p>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua); / <i>Determination on the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2022 (two thousand twenty two);</i></p> | Terlaksana / <i>Implemented</i> | <ul style="list-style-type: none"> Direksi PT Pelni (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas. / <i>Board of Directors of PT Pelni (Persero) as Majority Shareholder.</i> Pengurus Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP) selaku Pemegang Saham Minoritas. / <i>Management of Pelni Pensioners Health Foundation (YKPP) as Minority Shareholder.</i> Dewan Komisaris Perseroan. / <i>Board of Commissioners of the Company.</i> Direksi Perseroan. / <i>Board of Directors of the Company.</i> |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | | | <p>3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua), Gaji Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga); / <i>Determination of Tantiem for the financial year 2022 (two thousand twenty two), Salary of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Facilities and Other Benefits for the financial year 2023 (two thousand twenty three);</i></p> <p>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). / <i>Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to Audit the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three).</i></p> | | |
| 4 | Akta No. 7 / <i>Deed No. 7</i> | 18 Oktober 2023 Pukul 13.30 WIB / <i>October 18, 2023 13.30 WIB</i> | Pengangkatan Dewan Komisaris / <i>Appointment of the Board of Commissioners</i> | <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya; / <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders approved and determined the dismissal and appointment of the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Liability Company;</i></p> <p>a. Memberhentikan dengan Hormat ROBERT MFT SINAGA sebagai Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelita Indonesia Djaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Pelita Indonesia Djaya 09.28/0#8A/09S/2S2? tanggal duapuluh. / <i>Honorably Dismiss ROBERT MFT SINAGA as the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya who was appointed based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pelita Indonesia Djaya concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya 09.28/0#8A/09S/2S2? dated twenty.</i></p> | Terlaksana / <i>Implemented</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Direksi PT Pelni (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas. / <i>Board of Directors of PT Pelni (Persero) as Majority Shareholder.</i> • Pengurus Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP) selaku Pemegang Saham Minoritas. / <i>Management of Pelni Pensioners Health Foundation (YKPP) as Minority Shareholder.</i> • Dewan Komisaris Perseroan. / <i>Board of Commissioners of the Company.</i> • Direksi Perseroan. / <i>Board of Directors of the Company.</i> |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | <p>b. delapan September dua ribu dua puluh dua [28-09'2022] / <i>eight September two thousand two</i> [28-09'2022].</p> <p>2. Bagi Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. / <i>For Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya who are appointed and still serving in other positions that are prohibited by the Laws and Regulations to be concurrent with the position of the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise Subsidiary, the person concerned must resign or be dismissed from the position.</i></p> <p>3. Memberikan Kuasa kepada Direksi PT Pelita Indonesia Djaya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. / <i>Granting Power of Attorney to the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya with the right of substitution to state the resolutions in this Decision in an authentic form before a Notary or authorized official.</i></p> | | |
| 5 | Akta No. 6 / <i>Deed No. 6</i> | 20 November 2024 Pukul 14.45 WIB / <i>November 20, 2024 2:45 p.m.</i> | Penetapan dan pengangkatan Penugasan Dewan Komisaris Perseroan PT PID / <i>Determination and appointment of the Assignment of the Board of Commissioners of the Company PT PID</i> | <p>1. Rapat Urmum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui dan menetapkan pengangkatan dan pengalihan penugasan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut: / <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders approved and determined the appointment and assignment of the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company by deciding the following matters:</i></p> <p>a. Mengangkat Sdr. MARDIYANTO sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Komisaris Utama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan kekuasaan, wewenang dan penghasilan Komisaris Utama sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.</p> | Terlaksana / <i>Implemented</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Direksi PT Pelni (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas. / <i>Board of Directors of PT Pelni (Persero) as Majority Shareholder.</i> • Pengurus Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP) selaku Pemegang Saham Minoritas. / <i>Management of Pelni Pensioners Health Foundation (YKPP) as Minority Shareholder.</i> • Dewan Komisaris Perseroan. / <i>Board of Commissioners of the Company.</i> • Direksi Perseroan. / <i>Board of Directors of the Company.</i> |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|------------|--------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>a. Mengangkat Sdr. MARDIYANTO sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Komisaris Utama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan kekuasaan, wewenang dan penghasilan Komisaris Utama sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif. / <i>Appointing Br. MARDIYANTO as Temporary Officer (Pjs) President Commissioner of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Liability Company with the powers, authority and income of the President Commissioner until the appointment of a definitive officer.</i></p> <p>b. Menetapkan penugasan Sdr. ANTON MART IRIANTO yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya tentang—Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya 10.03/01/BA/DU/2023 tanggal 03 (tiga) Oktober 2023 (duaribu duapuluh tiga), sebagai Komisaris, dengan masa jabatan meneruskan sisa rnsa jabatan sebagaimana Risalah RUPSLB tersebut. / <i>Determining the assignment of Br. ANTON MART IRIANTO who was appointed based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company concerning the Termination and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company 10.03/01/BA/DU/2023 dated October 03 (three), 2023 (two thousand twenty-three), as Commissioner, with a term of office to continue the remaining term of office as in the Minutes of the EGMS.</i></p> | | |
| | | | | <p>2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:</p> | | |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|------------|--------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p><i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders approved and determined the dismissal and appointment of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Liability Company by deciding the following matters:</i></p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat Sdri. ROOSHARDIANTY SURYANDARI sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 04.01/02/HKO.01/2021 tanggal 1 (satu) April 2021 (duaribu duapuluh satu) tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut; / <i>Honorably discharged Sdri. ROOSHARDIANTY SURYANDARI as Director of Operations of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company, who was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero) Limited Company as the General Meeting of Shareholders of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company Number: 04.01/02/HKO.01/2021 dated April 1 (one), 2021 (two thousand twenty one) concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Company, with gratitude for all contributions of energy and thought while holding the position;</i></p> <p>b. Mengangkat Sdr. DIDIK MARTONO sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Operasional Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan kekuasaan, wewenang dan penghasilan Direktur Operasional sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif. / <i>Appointing Br. DIDIK MARTONO as Acting Director of Operations of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Liability Company with the powers, authority and income of the Director of Operations until the appointment of a definitive official.</i></p> | | |

| NO. | AKTA / ACT | WAKTU / TIME | AGENDA / AGENDA | KEPUTUSAN RUPS / GMS DECISION | REALISASI / REALIZATION | DIHADIRI OLEH / ATTENDED BY |
|-----|------------|--------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | <p>3. Bagi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk merangkap dengan jabatan sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut; / <i>For the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya Limited Liability Company who are appointed and still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to concurrently serve as Members of the Board of Directors and / or Board of Commissioners of State-Owned Enterprise Subsidiaries, the person concerned must resign or be dismissed from their position;</i></p> | | |
| | | | | <p>4. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. / <i>Granting Power of Attorney to the Board of Directors of PT Pelita Indonesia Djaya Limited with the right of substitution to state the resolutions in this Resolution in an authentic form before a Notary or authorized official.</i></p> | | |

Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal, ada beberapa kriteria anggota Dewan Komisaris yang dibutuhkan Perusahaan. Kriteria tersebut adalah selama lima tahun sebelum dilantik, yang bersangkutan tidak pernah;

1. Dinyatakan pailit,
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan Perusahaan terkait bangkrut, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai fungsi dan tanggung jawab,
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas kemampuan dan kepemimpinan Dewan Komisaris di Perseroan, Perseroan menetapkan beberapa kriteria anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria anggota Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut:

1. Berakhlak, bermoral, dan berintegritas.
2. Mampu memikul seperangkat hak dan kewajiban terkait hukum.
3. Berkomitmen mematuhi peraturan undang-undang.
4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki rentang masa jabatan hingga 3 (tiga) tahun dan bisa diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu.

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Dalam memastikan proses perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris tetap menghasilkan kinerja yang stabil dan optimal, Perseroan menciptakan program pengenalan atau orientasi

Board of Commissioners

According to Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the Board of Commissioners is a corporate organ tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and advising the Board of Directors. The Board of Commissioners is appointed through the GMS for a certain period of time and may be reappointed.

In order for the Board of Commissioners to carry out its functions and responsibilities optimally, there are several criteria for members of the Board of Commissioners required by the Company. These criteria are that during the five years prior to being appointed, the person concerned has never been;

- 1. Be declared bankrupt,*
- 2. Been a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners that caused the related company to go bankrupt, or take actions that are not in accordance with the functions and responsibilities,*
- 3. Convicted of a criminal offense.*

Criteria for Members of the Board of Commissioners

To maintain and develop the quality of the ability and leadership of the Board of Commissioners in the Company, the Company sets several criteria for members of the Board of Commissioners based on the Financial Services Authority Regulation.

The criteria for members of the Board of Commissioners are described as follows:

- 1. Moral, moral, and integrity.*
- 2. Able to assume a set of rights and obligations related to the law.*
- 3. Committed to complying with laws and regulations.*
- 4. Have the ability and knowledge related to the field needed by the Company.*

Term of Office of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has a term of office of up to 3 (three) years and can be dismissed by the General Meeting of Shareholders at any time.

Introduction Program for the Board of Commissioners

To ensure that the process of changing the composition of the Board of Commissioners continues to produce stable and optimal performance, the Company created an introduction or orientation program for

bagi anggota Dewan Komisaris yang baru. Program pengenalan tersebut bertujuan untuk memberikan dasar-dasar mengenai aktivitas bisnis, rencana Perusahaan, pedoman kinerja, dan segala aspek yang berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Di dalam program tersebut juga disampaikan mengenai dokumen-dokumen pendukung seperti Laporan Tahunan, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Kode Etik, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Program Kerja Dewan Komisaris.

Program tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kinerja antara Dewan Komisaris dengan elemen-elemen Perseroan lainnya. Ada pun topik-topik yang dibahas dalam program pengenalan Dewan Komisaris di antaranya:

1. Pengimplementasian dan prinsip-prinsip GCG;
2. Gambaran besar Perusahaan kaitannya dengan kinerja keuangan, strategi, lingkup kegiatan, dan aspek-aspek penting dan relevan lainnya.
3. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab organ-organ pendukung Dewan Komisaris;
4. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Peraturan, kebijakan, dan ketentuan yang relevan dengan Perusahaan.

Etika Jabatan

Guna memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya kepada Perseroan, Dewan Komisaris perlu tunduk dan mematuhi kode etik yang telah disepakati. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan prinsip-prinsip GCG.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan risiko benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi selain penghasilan yang telah ditetapkan.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat menawarkan atau memberikan suatu objek yang memiliki nilai ekonomi kepada perorangan atau entitas sebagai imbalan.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga hubungan kerja yang baik dengan Direksi.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lain.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang membocorkan informasi rahasia Perusahaan.

new members of the Board of Commissioners. The introduction program aims to provide the basics of business activities, Company plans, performance guidelines, and all aspects related to the functions and responsibilities of the Board of Commissioners.

The program also covers supporting documents such as the Annual Report, the Board of Commissioners' Charter, the Company's Long-Term Plan, the Code of Ethics, the Company's Articles of Association, and the Board of Commissioners' Work Program.

The program is expected to align the performance between the Board of Commissioners and other elements of the Company. The topics discussed in the introduction program of the Board of Commissioners include:

1. *GCG implementation and principles;*
2. *The Company's big picture in relation to financial performance, strategy, scope of activities, and other important and relevant aspects.*
3. *Information on the duties and responsibilities of the supporting organs of the Board of Commissioners;*
4. *Information on the duties and responsibilities delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
5. *Regulations, policies and provisions relevant to the Company.*

Position Ethics

In order to fulfill its functions and responsibilities to the Company, the Board of Commissioners needs to comply with the agreed code of ethics. The principles include:

1. *Members of the BOC must comply with all applicable regulations, the Company's Articles of Association, and GCG principles.*
2. *Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions that may pose a risk of conflict of interest.*
3. *Members of the Board of Commissioners shall not utilize their position for personal gain other than the stipulated income.*
4. *Members of the BOC may not offer or provide an object of economic value to an individual or entity in return.*
5. *Members of the BOC shall maintain a good working relationship with the BOD.*
6. *Members of the BOC are prohibited from having a family relationship up to the third degree with other members of the BOC.*
7. *Members of the BOC are prohibited from leaking confidential information of the Company.*

8. Anggota Dewan Komisaris harus tetap menjaga informasi rahasia sesuai dengan ketentuan undang-undang, meski yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan.

8. *Members of the BOC must maintain confidential information in accordance with the provisions of the law, even though they no longer work for the Company.*

Komposisi Dewan Komisaris / Composition of the Board of Commissioners

| NAMA / NAME | JABATAN / POSITION | DASAR PENGANGKATAN / BASIS OF APPOINTMENT | TANGGAL PENGANGKATAN / DATE OF APPOINTMENT | AKHIR MASA JABATAN / END OF TERM |
|--------------------|---|--|---|---|
| MARDIYANTO | Komisaris Utama dan Komisaris Independen / <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i> | SK-11.10/01/BA/DU/2023 sesuai dengan Akta No. 6 Tanggal 20 November 2023. AHU-0240316.AH.01.11. TAHUN 2023. / <i>SK-11.10/01/BA/DU/2023 in accordance with Deed No. 6 dated November 20, 2023. AHU-0240316.AH.01.11. TAHUN 2023.</i> | 28 November 2023 / <i>November 28, 2023</i> | Masih menjabat / <i>Still in office</i> |
| ANTON MART IRIANTO | Komisaris / <i>Commissioner</i> | SK-10.03/01/BA/DU/2023 sesuai dengan Akta No.7 Tanggal 18 Oktober 2023. AHU-0207777.AH.01.11. TAHUN 2023. / <i>SK-10.03/01/BA/DU/2023 in accordance with Deed No.7 dated October 18, 2023. AHU-0207777.AH.01.11. TAHUN 2023.</i> | 18 Oktober 2023 / <i>October 18, 2023</i> | Masih menjabat / <i>Still in office</i> |

Independensi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bersifat independen, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Independence of the Board of Commissioners

In carrying out their duties, members of the Board of Commissioners are independent, not influencing or being influenced by any party.

| PERNYATAAN INDEPENDEN / INDEPENDENT STATEMENT | YA / YES | TIDAK / NO |
|---|----------|------------|
| Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. / <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in the following period.</i> | √ | - |
| Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. / <i>Has no direct or indirect shares in the Company.</i> | √ | - |
| Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan. / <i>Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.</i> | √ | - |
| Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. / <i>Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.</i> | √ | - |
| Memenuhi kriteria independensi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. / <i>Meet the independence criteria as stipulated in the applicable provisions.</i> | √ | - |

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 yang telah disahkan. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

1. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Perseroan serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi.
2. Memastikan terjadinya pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta independen.
3. Fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan tujuan menjaga keseimbangan antar organ di dalam Perseroan.
4. Memeriksa dan mengulas laporan yang dipaparkan oleh Direksi maupun komite.
5. Memastikan penerapan tata kelola Perusahaan terjadi secara efektif, salah satunya melalui penyusunan laporan kegiatan Dewan Komisaris.

Piagam (Charter) Dewan Komisaris

Perseroan memiliki piagam (*charter*) Dewan Komisaris sebagai pedoman yang berisi aturan-aturan kerja yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam Dewan Komisaris secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan peraturan dan perkembangan bisnis Perseroan.

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has performed its duties and authorities in accordance with the provisions stated in the Company's Articles of Association and the approved 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). The determination of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is based on the Company's Articles of Association. These points include:

- 1. The function of supervising and implementing the Company's management policies as well as providing advice and suggestions to the Board of Directors.*
- 2. Ensuring effective, appropriate and prompt decision-making as well as independence.*
- 3. The function of supervising the performance of the Board of Directors with the aim of maintaining a balance between organs within the Company.*
- 4. Examine and review reports presented by the Board of Directors and committees.*
- 5. Ensuring the implementation of corporate governance occurs effectively, one of which is through the preparation of the Board of Commissioners activity report.*

Charter of the Board of Commissioners

The Company has a charter of the Board of Commissioners as a guideline containing work rules relating to duties, authorities and responsibilities for the benefit of the Company, shareholders and stakeholders, in accordance with the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed and adjusted to changes in regulations and the Company's business development.

Untuk Dewan Komisaris

Sesuai dengan yang tercantum dalam piagam Dewan Komisaris, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang wajib bagi jajaran Dewan Komisaris. Pelatihan dan pendidikan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Perseroan berencana mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris. Namun demikian Dewan Komisaris beberapa kali telah menjadi pembicara dalam seminar dan pelatihan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Melalui serangkaian aturan dan kriteria terkait tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dan disiapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta disetujui Dewan Komisaris, diadakan penilaian sendiri (*self-assessment*) tahunan berdasarkan kinerja kolektif dan individu Dewan Komisaris dan Direksi.

Pemegang saham melalui RUPS menilai kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk tahun buku 2023. Sedangkan untuk menilai kinerja Direksi, kriteria penilaian yang ditetapkan ialah pencapaian target dan kompetensi dari masing-masing Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan saat RUPS. Lalu untuk penilaian kinerja Direksi dilakukan secara langsung oleh para pemegang saham dan Dewan Komisaris. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut:

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Pengimplementasian GCG.
2. Menyelaraskan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi.
3. Membandingkan target dan pencapaian kinerja secara aktual pada tahun buku.

For the Board of Commissioners

As stated in the Board of Commissioners Charter, competency improvement through education and training is mandatory for the Board of Commissioners. Training and education are also required to improve the quality of the Board of Commissioners' performance. During 2023, the Company plans to conduct training and education to improve the competence of the Board of Commissioners. However, the Board of Commissioners has been a speaker in seminars and trainings several times.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

Through a series of rules and criteria related to duties and responsibilities that have been determined and prepared by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Commissioners, an annual self-assessment is conducted based on the collective and individual performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Shareholders through the GMS assessed the performance of the Board of Commissioners in accordance with their duties and responsibilities for the 2023 financial year. Meanwhile, to assess the performance of the Board of Directors, the assessment criteria set are the achievement of targets and the competence of each Director.

Performance Appraisal Implementation Procedure

The implementation of the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out during the GMS. Then for the performance assessment of the Board of Directors is carried out directly by the shareholders and the Board of Commissioners. The procedure for the implementation of the performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners is described as follows:

Performance Appraisal Criteria

The performance assessment criteria for the Board of Commissioners and the Board of Directors are described below:

Board of Commissioners:

1. Implementation of GCG.
2. Aligning performance in accordance with vision and mission.
3. Comparing targets and actual performance achievements in the fiscal year.

Direksi:

1. Menilai seberapa jauh dan berkembang terkait pengimplementasian GCG.
2. Menilai perkembangan keberlanjutan Perusahaan yang diukur berdasarkan kombinasi kinerja keuangan, operasional, dan aspek-aspek yang mendukung.
3. Membandingkan antara target dengan capaian kinerja secara aktual pada tahun buku.
4. Menilai kesesuaian capaian kinerja dengan visi dan misi yang dipegang.
5. strategi dan inovasi.
6. Menilai perkembangan manajemen dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
7. Kinerja individu masing-masing Direktur.

Pihak Pelaksana Penilaian Kinerja

Pada tahun 2023, proses penilaian kinerja dilakukan secara sendiri (*self-assessment*) oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan tidak melibatkan pihak independen di luar Perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang diberikan kebebasan bertindak independen dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya kepada Perseroan. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen / Independence Statement of Independent Commissioner

| PERNYATAAN INDEPENDEN / INDEPENDENT STATEMENT | YA / YES | TIDAK / NO |
|---|----------|------------|
| Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain. / <i>Has no affiliation with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</i> | √ | - |
| Tidak menjabat sebagai Direksi yang terafiliasi dengan Perusahaan. / <i>Not serving as Directors affiliated with the Company.</i> | √ | - |
| Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan. / <i>Free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the scope of the Company.</i> | √ | - |
| Tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. / <i>Has no business relationship related to the Company's activities directly or indirectly.</i> | √ | - |

Board of Directors:

1. Assessing the extent and development of GCG implementation.
2. Assessing the development of the Company's sustainability as measured by a combination of financial performance, operations, and supporting aspects.
3. Comparing the target with the actual performance achievement in the fiscal year.
4. Assessing the suitability of performance achievements with the vision and mission held.
5. Strategy and innovation.
6. Assess the development of management in providing added value to shareholders.
7. Individual performance of each Director.

Performance Appraisal Implementing Party

In 2023, the performance appraisal process is conducted by self-assessment by members of the Board of Commissioners and Board of Directors and does not involve independent parties outside the Company in assessing the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Independent Commissioner

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are given the freedom to act independently in fulfilling their functions and responsibilities to the Company. The Independent Commissioner has no affiliation with the Company, the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling shareholder.

Laporan Tugas Pengawasan 2023

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS atas laporan tahunan tahun buku 2023 dan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2023;
2. Memberikan pendapat dan saran serta tanggapan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi atas hasil kinerja tahun buku 2023 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tahun 2023;
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan perusahaan dan memberikan saran dan pendapat dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan;
4. Memberikan saran terkait dengan hal-hal yang harus segera diselesaikan di tahun 2023;
5. Memperoleh akses informasi Perusahaan yang diberikan manajemen secara tepat waktu dan lengkap;
6. Tidak melakukan transaksi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan;
7. Menelaah *draft* Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2023 yang diajukan oleh Direksi dan menyampaikan pendapat/saran kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan;
8. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2023 untuk mendapat persetujuan oleh RUPS yang merupakan bagian dari pengesahan RKAP tahun 2023;
9. Memberikan arahan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan Perusahaan;
10. Kunjungan Kerja Direksi dan Organ Dewan Komisaris ke Gudang.

2023 Supervisory Task Report

1. *Supervise the implementation and follow-up of the resolutions of the GMS on the annual report for the fiscal year 2023 and the GMS on the Company's Work Plan and Budget for 2023;*
2. *Provide opinions and suggestions as well as responses to matters that need to be brought to the attention of the Board of Directors on the performance results for the fiscal year 2023 that have been authorized by the Shareholders in 2023;*
3. *Reviewing and evaluating the Company's monthly performance achievements and providing suggestions and opinions in order to achieve the Company's performance targets;*
4. *Provide advice related to matters that must be resolved immediately in 2023;*
5. *Obtaining access to Company information provided by management in a timely and complete manner;*
6. *Not conducting transactions that have the potential to create conflicts of interest and personal gain from the Company's activities;*
7. *Reviewing the draft of the Company's Work Plan and Budget for 2023 proposed by the Board of Directors and submitting opinions/suggestions to the Shareholders for ratification;*
8. *Prepare the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2023 for approval by the GMS which is part of the ratification of the RKAP for 2023;*
9. *Provide direction, advice and opinions related to the management of the Company;*
10. *Working Visit of the Board of Directors and Board of Commissioners Organs to the Warehouse.*

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris PID ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PID Nomor: SK / Akta RUPS Remun Dekom: SK No. 09.01/DIR/SK/001/100/2023 Tanggal 1 September 2023 Tentang Penetapan Penggunaan Laba Konsolidasi, Besar Gaji/Honorarium, Tunjangan & Fasilitas untuk Tahun 2023 serta tantiem direksi & dewan komisaris PT PID.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit Komite tersebut secara berkala ditinjau dan dinilai kualitas kerjanya dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas komite di bawah Dewan Komisaris lebih baik lagi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja bagi komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan untuk menciptakan proses penilaian yang efektif, terbuka, dan adil. Proses penilaian kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala minimal setahun sekali. Dalam prosesnya, Komite Audit akan melaksanakan prosedur penilaian secara mandiri (*self-assessment*) lalu akan dirangkum dan dipresentasikan di hadapan Dewan Komisaris. Melalui serangkaian kriteria dan pertimbangan, Dewan Komisaris akan menentukan kemampuan dan kapabilitas dari masing-masing anggota Komite untuk tahun buku tersebut.

Kriteria Penilaian Kinerja

Demi menciptakan *level* kerja yang maksimal dan selalu memenuhi ekspektasi, Dewan Komisaris telah menentukan kriteria penilaian kinerja komite di bawahnya melalui KPI (*Key Performance Indicator*) seperti pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota komite pada tahun buku, kinerja operasional Perseroan, serta pengimplementasian kebijakan-kebijakan masing-masing komite yang telah ditentukan, lalu diukur berdasarkan perbandingan target yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Remuneration of the Board of Commissioners

The remuneration of the PID Board of Commissioners is determined based on the PID General Meeting of Shareholders Number: SK / Deed of GMS Remun Dekom: SK No. 09.01/DIR/SK/001/100/2023 Dated September 1, 2023 Regarding the Determination of the Use of Consolidated Profit, Salary/Honorarium, Allowances & Facilities for the Year 2023 as well as tantiem for the board of directors & board of commissioners of PT PID.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

To assist the Board of Commissioners in carrying out its responsibilities and duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. The Committee is periodically reviewed and assessed for its performance quality with the aim of developing and improving the quality of committees under the Board of Commissioners.

Performance Appraisal Implementation Procedure

Performance appraisal procedures for committees under the Board of Commissioners are carried out to create an effective, open and fair appraisal process. The performance assessment process of the Audit Committee by the Board of Commissioners is carried out periodically at least once a year. In the process, the Audit Committee will carry out a self-assessment procedure and then will be summarized and presented to the Board of Commissioners. Through a series of criteria and considerations, the Board of Commissioners will determine the ability and capability of each Committee member for that fiscal year.

Performance Assessment Criteria

*In order to create a maximum level of work and always meet expectations, the Board of Commissioners has determined the criteria for evaluating the performance of the committees under it through KPI (*Key Performance Indicator*) such as the fulfillment of the duties and responsibilities of each committee member in the fiscal year, the Company's operational performance, and the implementation of each committee's policies that have been determined, then measured based on the comparison of targets that have been determined annually.*

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Piagam Komite Audit

Sebagai pedoman yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Perseroan menggunakan Piagam Komite Audit demi memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kami sedang menyusun Piagam Komite Audit yang nantinya Piagam Komite Audit secara berkala ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan kondisi bisnis terkini.

Profil Komite Audit

Komite Audit Perseroan diisi oleh susunan paling minimal yakni 3 (tiga) orang, terdiri dari satu orang Ketua yang menjabat sebagai Komisaris Independen, serta dua anggota lainnya sebagai pihak independen. Masa jabatan Komite Audit Perseroan ialah 5 tahun, dan dapat diangkat kembali.

Melalui surat keputusan Dewan Komisaris, komposisi anggota Komite Audit untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

The Audit Committee is a supporting committee of the Board of Commissioners whose task is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Audit Committee Charter

As a guideline governing the duties and responsibilities of the Audit Committee, the Company uses the Audit Committee Charter to fulfill its responsibilities to shareholders and stakeholders.

Audit Committee Profile

The Company's Audit Committee is composed of at least 3 (three) members, consisting of one Chairman who serves as an Independent Commissioner, and two other members as independent parties. The term of office of the Company's Audit Committee is 5 years, and may be reappointed.

Through the decision letter of the Board of Commissioners, the composition of the Audit Committee members for the fiscal year 2023 is as follows:



Beny Karjasa

Komite Audit
Audit Committee

Tempat, Tanggal lahir:

Jakarta, 18 September 1963

Pendidikan:

Memperoleh Gelar Master of Marketing pada 2008, Sarjana Ekonomi 2005 dan Sarjana Muda Akutansi pada 1985.

Riwayat Pekerjaan:

- **2020-Saat ini:**
Komite Audit PT. Pelita Indonesia Djaya.
- **2017 - 2020:**
Direktur PT. Green Ruber System (PMA Korea Selatan).
- **2016 - 2017:**
SM. Komersial, PT. Pelita Indonesia Djaya (PID).

Place, Date of Birth:

Jakarta, September 18, 1963

Education:

Obtained his Master of Marketing Degree in 2008, Bachelor of Economics in 2005 and Bachelor of Accountancy in 1985.

Work History:

- **2020-Current:**
Audit Committee of PT Pelita Indonesia Djaya.
- **2017-2020:**
Director of PT Green Ruber System (South Korean PMA).
- **2016-2017:**
SM. Commercial, PT Pelita Indonesia Djaya (PID).

Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan tugas untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan dalam rangka memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Komite Audit. Tugas-tugas tersebut di antaranya adalah menghelat pertemuan secara berkala dengan auditor independen, unit audit internal, dan manajemen. Pembahasan pertemuan tersebut di antaranya adalah:

1. Memberikan sebanyak 12 telaah atas kinerja perusahaan dan telah dilaorkan keada Dewan Komisaris
2. Pemantauan dan evaluasi independensi auditor independen terkait proses pelaporan informasi keuangan.
3. Memberikan saran bilamana terjadi perbedaan pendapat di antara manajemen dan auditor independen.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan auditor internal;
5. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
7. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas Dewan Komisaris lainnya;
9. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, laporan manajemen dan informasi lainnya;
10. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan ;
11. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor;
12. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris;

Implementation Of Audit Committee Duties 2023

Throughout 2023, the Audit Committee carried out tasks to assist the Board of Commissioners in carrying out its function as a supervisor and in order to fulfill the provisions contained in the Audit Committee Charter. These tasks included holding regular meetings with the independent auditor, internal audit unit, and management. The discussions of the meeting include:

1. *Provided a total of 12 reviews of the Company's performance which have been reported to the Board of Commissioners.*
2. *Monitoring and evaluating the independence of the independent auditor related to the financial information reporting process.*
3. *Provided advice in the event of a difference of opinion between management and the independent auditor.*
4. *Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and internal auditor;*
5. *Assessing the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and the External Auditor;*
6. *Provide recommendations on improving the management control system and its implementation;*
7. *Ensure that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company;*
8. *Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;*
9. *Reviewing information on the Company, as well as the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, management reports and other information;*
10. *Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;*
11. *Reviewing the adequacy of external audit implementation including audit planning and the number of auditors;*
12. *Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Audit Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other Company resources related to the implementation of its duties and report in writing the results of the assignment to the Board of Commissioners;*

13. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.

Pelatihan dan Pendidikan Komite Audit

Perseroan mengadakan serangkaian kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk tahun buku 2023, Komite Audit berencana menjalankan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi baik secara internal, maupun eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam membantu kinerja Dewan Komisaris, Komite Audit dibekali oleh tugas dan tanggung jawab sebagaimana dicantumkan dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Memastikan Perseroan taat kepada aturan, hukum, serta kebijakan yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan yang dirilis Perusahaan kepada publik, atau pihak otoritas, contohnya seperti laporan keuangan, laporan proyeksi, dan laporan lain yang terkait telah memenuhi kualitas dan akurasi yang ditentukan.
3. Memberikan saran untuk Dewan Komisaris terkait laporan atau informasi yang diberikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
4. Memastikan pemeriksaan internal audit berjalan dengan semestinya, kemudian memantau secara berkelanjutan mengenai tindak lanjut temuan tersebut.
5. Memastikan dokumen, data, dan informasi Perseroan terjaga kerahasiaannya.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit mengelat rapat baik yang di lakukan dengan dewan komisaris maupun bersama Direksi.

13. Prepare quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners signed by at least the Chairman of the Audit Committee and one member of the Audit Committee.

Audit Committee Training and Education

The Company holds a series of training and education activities to improve the competence of the Audit Committee in assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities. For the 2023 financial year, the Audit Committee plans to carry out training and education to improve competence both internally and externally.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In assisting the performance of the Board of Commissioners, the Audit Committee is equipped with duties and responsibilities as stated in the Audit Committee Charter as follows:

1. *Ensure that the Company complies with applicable rules, laws and policies.*
2. *Ensuring that financial reports released by the Company to the public or authorities, such as financial reports, projection reports and other related reports, meet the specified quality and accuracy.*
3. *Provide advice to the Board of Commissioners regarding reports or information provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners.*
4. *Ensure that internal audits are carried out properly, then continuously monitor the follow-up to these findings.*
5. *Ensure that the Company's documents, data and information are kept confidential.*

Audit Committee Meeting

Throughout 2023, the Audit Committee held meetings both with the Board of Commissioners and with the Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan tugas untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan dalam rangka memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Komite Audit. Tugas-tugas tersebut di antaranya adalah mengeliat pertemuan secara berkala dengan auditor independen, unit audit internal, dan manajemen. Pembahasan pertemuan tersebut di antaranya adalah:

1. Pemantauan dan evaluasi independensi auditor independen terkait proses pelaporan informasi keuangan.
2. Memberikan saran bilamana terjadi perbedaan pendapat di antara manajemen dan auditor independen.

Implementation of Audit Committee Duties 2023

Throughout 2023, the Audit Committee carried out duties to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and in order to fulfill the provisions contained in the Audit Committee Charter. These duties include holding regular meetings with independent auditors, internal audit units, and management. Discussions at these meetings include:

1. Monitoring and evaluation of the independence of independent auditors regarding the financial information reporting process.
2. Provide advice when there are differences of opinion between management and independent auditors.

| PERNYATAAN INDEPENDENSI / INDEPENDENCE STATEMENT | Beny Karjasa |
|---|--------------|
| Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. / <i>Not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties that provide insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.</i> | √ |
| Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. / <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners.</i> | √ |
| Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. / <i>Does not have direct or indirect shares in the Company.</i> | √ |
| Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. / <i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.</i> | √ |
| Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. / <i>Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.</i> | √ |

Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko merupakan komite pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Piagam Komite Kebijakan Risiko

Sebagai pedoman yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Risiko, Perseroan menggunakan Piagam Komite demi memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Saat ini kami berencana Menyusun komite tersebut yang nantinya akan ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan kondisi bisnis terkini.

Profil Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko Perseroan diisi oleh susunan paling minimal yakni 3 (tiga) orang, terdiri dari satu orang Ketua yang menjabat sebagai Komisaris Independen, serta dua anggota lainnya sebagai pihak independen. Masa jabatan Komite Kebijakan Risiko Perseroan ialah 5 tahun, dan dapat diangkat kembali.

Melalui surat keputusan Dewan Komisaris, komposisi anggota Komite Kebijakan Risiko untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Risk Policy Committee

The Risk Policy Committee is a supporting committee of the Board of Commissioners whose task is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Risk Policy Committee Charter

As a guideline that regulates the duties and responsibilities of the Risk Policy Committee, the Company uses the Committee Charter to fulfill its responsibilities to shareholders and stakeholders. We are currently planning to establish the committee which will later be reviewed and updated in accordance with current business conditions.

Risk Policy Committee Profile

The Company's Risk Policy Committee is filled by a minimum of 3 (three) people, consisting of one Chairperson who serves as an Independent Commissioner, and two other members as independent parties. The term of office of the Risk Policy Committee is 5 years, and can be reappointed.

Through the decision letter of the Board of Commissioners, the composition of the Risk Policy Committee members for the 2023 financial year is as follows:



Suriyanti Radeng

Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee

Tempat, Tanggal lahir:

Ujung Pandang, 12 Agustus 1981

Pendidikan:

Memperoleh gelar sarjana dari TIE Bajiminasa Makassar Jurusan Manajemen 2007 dan memperoleh gelar magister dari Magister Management Universitas TRISAKTI pada 2011 dan Magister Management Universitas MERCUBUANA pada 2019.

Riwayat Pekerjaan:

- 2016:
Kepala Divisi Manajemen Resiko PT. Media Fajar.
- 2019:
 - Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi V.
 - Komisaris PT. Meta Digital Teknologi.

Place, Date of Birth:

Ujung Pandang, August 12, 1981

Education:

Obtained a bachelor's degree from TIE Bajiminasa Makassar majoring in Management 2007 and obtained a master's degree from Master of Management of TRISAKTI University in 2011 and Master of Management of MERCUBUANA University in 2019.

Work History:

- 2016:
Head of Risk Management Division of PT Media Fajar.
- 2019:
 - Expert Member of the House of Representatives Commission V.
 - Commissioner of PT Meta Digital Teknologi.

Pernyataan Risiko Independensi Komite Kebijakan Risiko

Jajaran Komite Kebijakan Risiko Perseroan menyatakan sebagai pribadi profesional yang independen dengan tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan, baik secara keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham. Pernyataan independensi ini ditetapkan berdasarkan POJK No. 55.POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pasal 7 terkait Persyaratan dan Keanggotaan Masa Tugas Komite Audit serta Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Risiko

Dalam membantu Kinerja Dewan Komisaris, Komite Kebijakan Risiko diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko di semua bidang perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko apabila diperlukan.
- Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan - peraturan internal tentang kebijakan dan peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut.
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
- Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal - hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh komite.
- Melaksanakan tugas - tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Risk Policy Committee Independence Statement

The Company's Risk Policy Committee stated as independent professional person who has no relationship with the Company, either in terms of finance, management, or share ownership. This independence statement is stipulated based on POJK No. 55.POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, Article 7 concerning the Requirements and Membership of the Audit Committee's Term of Duty and the Audit Committee Charter.

Duties and Responsibilities of The Risk Policy Committee

In assisting the performance of the Board of Commissioners, the Risk Policy Committee is equipped with duties and responsibilities as follows:

- *Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation and improvement of risk management related to risk control in all areas of the company before obtaining Board of Commissioners approval.*
- *Conduct discussions with the Board of Directors or work units related to risk management if necessary.*
- *Studying, reviewing policies and internal regulations regarding policies and internal regulations regarding risk management policies made by the Board of Directors.*
- *Conduct periodic reviews of the risk management policy along with its implementation guidelines and all changes and adjustments to the risk management policy.*
- *Evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure risk.*
- *Provide input to the Board of Commissioners on matters that need attention and that need to be discussed with the Board of Directors so that the Board of Directors follows up on the results of the risk management evaluation by the committee.*
- *Carry out other supervisory duties as requested by the Board of Commissioners.*

Laporan Komite Kebijakan Risiko

Kami telah memberikan arahan terkait evaluasi manajemen risiko yang meliputi risiko keuangan, risiko *operasional-suplay* bahan makanan, risiko investasi, risiko TI, risiko SDM, Risiko penilaian GCG.

Kami juga memberikan saran serta rekomendasi. Atas evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) risiko utama yang menjadi bahasan dalam evaluasi manajemen risiko tahun 2023. Dari bahasan di atas maka Komite Kebijakan Risiko dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: Atas bahasan dan evaluasi di atas, maka Komite Kebijakan Risiko dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menjaga *cash flow* perusahaan diperlukan Team untuk mengawal penagihan piutang yang sudah jatuh tempo;
2. Menyiapkan dokument dan administrasi penagihan secara tepat waktu;
3. Membangun komunikasi aktif dengan pihak penyedia data penagihan serta keuangan terkait penagihan dan pembayaran;
4. Membuat target penyelesaian SOP Pengelolaan Manajemen *Cash Flow* dan SOP Kredit Jangka Pendek, Menengah dan Panjang;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kualitas usaha/jasa *Captive*;
6. Melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan *Team Legal* di setiap perencanaan dan pembuatan kajian bisnis baru PT. PID khususnya bisnis usaha *non captive*;
7. Membuat Target *Training* secara berkelanjutan bagi pegawai produksi bagi usaha *Outsourcing Services*;
8. Menciptakan budayasadarrisiko pada perusahaan melalui sosialisasi dan implementasi;

Risk Policy Committee Report

We have provided direction regarding the evaluation of risk management which includes financial risk, operational risk-food supply, investment risk, IT risk, HR risk, GCG assessment risk.

We also provide advice and recommendations on the evaluation above, it can be concluded that there are 5 (five) main risks that are discussed in the risk management evaluation in 2023. From the above discussion, the Risk Policy Committee can provide advice and recommendations as follows:

Based on the above discussion and evaluation, the Risk Policy Committee can provide advice and recommendations as follows:

1. *To maintain the company's cash flow, a team is needed to oversee the collection of overdue receivables;*
2. *Prepare documents and billing administration in a timely manner;*
3. *Build active communication with billing data providers and finance related to billing and payment;*
4. *Set targets for completion of Cash Flow Management SOP and Short, Medium and Long-Term Credit SOP;*
5. *Improve the supervisory function and maintain the quality of Captive business/services;*
6. *Involve the Risk Management Division and Legal Team in every planning and making of PT PID's new business studies, especially non-captive businesses;*
7. *Create a continuous training target for production employees for Outsourcing Services business;*
8. *Creating a risk-aware culture in the company through socialization and implementation;*

-
9. Agar selalu berpedoman kepada GCG dan manajemen Risiko dalam setiap pengambilan kebijakan;
 10. Membuat *reward* atas prestasi pegawai yang berhasil melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan *punishment* atas kelalaian/*fraud* yang disengaja yang dapat merugikan nama perusahaan;
 11. Membuat SOP Pergudangan (Kajian SPI);
 12. Menertibkan system Administrasi perusahaan (Kajian SPI);
 13. Mengontrol dokumen-dokumen SPK PKWT terkait masa berlakunya;
 14. Memperhatikan sistem pembayaran upah buruh angkut (Kajian SPI);
 15. Melakukan Perbaikan Gudang berdasarkan standar keamanan dan fasilitas yang mendukung dalam rangka meminimalisir risiko (Kajian SPI);
 16. Melakukan belanja barang dengan memperhatikan kadaluarsa suatu produk, dan;
 17. Merapikan database asset dan memperjuangkan hak legal atas setiap asset perusahaan yang bermasalah (Kajian SPI).
9. *To always be guided by GCG and Risk management in every policy making;*
 10. *To create rewards for the achievements of employees who successfully perform their duties and responsibilities well and punishments for deliberate negligence/fraud that can harm the company's name;*
 11. *Make Warehousing SOP (SPI Study);*
 12. *Bring order to the company's administration system (SPI review);*
 13. *Controlling SPK PKWT documents related to their validity period;*
 14. *Pay attention to the system of payment of wages for transport workers (SPI Study);*
 15. *Improving the warehouse based on security standards and supporting facilities in order to minimize risks (SPI Review);*
 16. *Shopping for goods by paying attention to the expiration date of a product, and;*
 17. *Tidying up the asset database and fighting for legal rights to any problematic company assets (SPI Study);*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji, mengembangkan kebijakan dan prosedur sehubungan dengan nominasi dan remunerasi Direksi dan manajemen. Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan alasan tugas dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan Dewan Komisaris.

Alasan Tidak Dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Pelaksana Fungsi Sekretaris Dewan komisaris sampai tahun ini belum ada dan masih melekat di fungsi dewan komisaris. Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah:

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- e. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya seperti berikut:

- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG

Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee The Nomination and Remuneration Committee is an organ that assists the Board of Commissioners in reviewing, developing policies and procedures related to the nomination and remuneration of the Board of Directors and management. The Company does not form a Nomination and Remuneration Committee on the grounds that its duties and responsibilities have been carried out by the Board of Commissioners.

Reasons for Not Establishing a Nomination and Remuneration Committee

The Company does not establish a Nomination and Remuneration Committee because this function is carried out directly by the Board of Commissioners.

Secretary of the Board of Commissioners

In supporting the implementation of the functions and effectiveness of the role of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. The Acting Secretary of the Board of Commissioners until this year has not existed and is still attached to the function of the board of commissioners. The Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are:

- a. *Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners*
- b. *Prepare minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the Company's Articles of Association.*
- c. *Administering Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, meeting minutes and other documents.*
- d. *Drafting the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners.*
- e. *Drafting of Board of Commissioners' reports*
- f. *Carrying out other duties of the Board of Commissioners.*

In addition to carrying out the above duties, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat, carries out other duties as follows:

- a. *Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements GCG principles.*

- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Kriteria Anggota Direksi

Untuk menjabat sebagai anggota Direksi, Perusahaan memaparkan beberapa kriteria penting yang dibutuhkan, misalnya dalam lima tahun sebelum dilantik, yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan bangkrut, tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan menyebabkan suatu perusahaan pailit atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Direksi atau Dewan Komisaris, dan tidak pernah dihukum tindak pidana.

Direksi juga memiliki kriteria ideal yang telah disesuaikan dengan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kriteria tersebut di antaranya:

1. Berakhlak, bermoral, dan berintegritas.
2. Mampu memikul seperangkat hak dan kewajiban terkait hukum.
3. Berkomitmen mematuhi peraturan undang-undang.
4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait bidang yang dibutuhkan Perseroan.

- b. *Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.*
- c. *Coordinate Committee members, if necessary, in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners.*
- d. *As a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.*

In order to maintain orderly administration and implement good corporate governance, the Secretary of the Board of Commissioners is required to ensure that documents on the implementation of activities are properly stored in the Company.

Board of Directors

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Board of Directors is a company organ that has the authority and is fully responsible for managing the Company for the benefit of the company, in accordance with the intent and purpose of the company, and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association. Members of the Board of Directors are appointed through a GMS for a certain period and can be reappointed.

Criteria for Board of Directors Members

To serve as a member of the Board of Directors, The company outlined several important criteria that are required, for example, in the five years before being appointed, the person concerned has never been declared bankrupt, has not been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners and caused a company to go bankrupt or carried out actions that are not in accordance with the functions and responsibilities of the Board of Directors or Board of Commissioners, and has never been convicted of a crime.

The Board of Directors also has ideal criteria that have been adjusted to the Implementation of Corporate Governance Guidelines. These criteria include:

1. *Have good morals, ethics and integrity.*
2. *Able to bear a set of rights and obligations related to law.*
3. *Committed to complying with statutory regulations.*
4. *Have the skills and knowledge related to the fields required by the Company.*

Komposisi Direksi / Composition of the Board of Directors

| NAMA / NAME | JABATAN / POSITION | DASAR PENGANGKATAN / BASIS OF APPOINTMENT | TANGGAL PENGANGKATAN / DATE OF APPOINTMENT | AKHIR MASA JABATAN / END OF TERM |
|---------------|---|--|---|---|
| Sukendra | Direktur Utama / <i>President Director</i> | SK-09.28/02/BA/090/2022 sesuai dengan Akte No.2 AHU-0198598.AHA.01.11 TAHUN 2022 Tanggal 5 Oktober 2022. / <i>SK-09.28/02/BA/090/2022 in accordance with Deed No.2 AHU-0198598.AHA.01.11 TAHUN 2022 dated October 5, 2022.</i> | 4 Oktober 2022 / <i>October 4, 2022</i> | Masih menjabat / <i>Still in office</i> |
| Suparno | Direktur Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Director of Finance & Risk Management</i> | SK-09.28/02/BA/090/2022 sesuai dengan Akte No.2 AHU-0198598.AHA.01.11 TAHUN 2022 Tanggal 5 Oktober 2022. / <i>SK-09.28/02/BA/090/2022 in accordance with Deed No.2 AHU-0198598.AHA.01.11 TAHUN 2022 dated October 5, 2022.</i> | 4 Oktober 2022 / <i>October 4, 2022</i> | Masih menjabat / <i>Still in office</i> |
| Didik Martono | Direktur Operasi & Komersial / <i>Director of Operations & Commercial</i> | SK-11.10/01/BA/DU/2023 sesuai dengan Akte No.6 AHU-0240316.AHA.01.11 TAHUN 2023 Tanggal 28 November 2023. / <i>SK-11.10/01/BA/DU/2023 in accordance with Deed No.6 AHU-0240316.AHA.01.11 TAHUN 2023 dated November 28, 2023.</i> | 20 November 2023 / <i>November 20, 2023</i> | Masih menjabat / <i>Still in office</i> |

Independensi Direksi

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota Direksi bertindak secara mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pihak mana pun.

Tanggung Jawab Direksi dan Pembagian Tugas Direksi

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Direksi secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab dalam kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;

Independence of the Board of Directors

Between the members of the Board of Directors and between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners there are no blood relations up to the third degree, either in a straight line or a lateral line or relations by marriage (son-in-law or brother-in-law).

In carrying out their functions and duties, members of the Board of Directors act independently, without being influenced or influencing any party.

Responsibilities of the Board of Directors and Division of Directors' Duties

Corporate Governance Guidelines The Board of Directors has broadly the following duties and responsibilities:

1. *Carrying out and being responsible for the management of the Company in accordance with the business intent and objectives set out in the Articles of Association, in good faith, with full responsibility and caution;*

2. Memelihara, mengendalikan, dan mengelola aset Perseroan;
3. Menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan sebagai perusahaan publik, salah satunya ialah menyelenggarakan RUPST;
4. Memastikan tata kelola perusahaan berjalan dan diterapkan dengan baik;
5. Memastikan Dewan Komisaris menerima informasi mengenai kondisi-kondisi terkini Perseroan secara tepat dan lengkap.

Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai kinerja perusahaan, namun tidak terbatas pada pengukuran kinerja Perusahaan menyangkut kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan juga dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat ini juga bertindak sebagai sebuah forum *sharing* (saling berbagi) antara anggota Direksi mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan

Tabel frekuensi rapat internal dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 dan tingkat kehadiran Direksi dalam kedua rapat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

| PESERA RAPAT / MEETING PARTY | JABATAN / POSITION | RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS / INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS | | | RAPAT GABUNGAN / JOINT MEETING | | |
|------------------------------|---|---|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | JUMLAH RAPAT / NUMBER OF MEETINGS | KEHADIRAN / ATTENDANCE | PRESENTASE TINGKAT KEHADIRAN / PERCENTAGE OF ATTENDANCE RATE | JUMLAH RAPAT / NUMBER OF MEETINGS | KEHADIRAN / ATTENDANCE | PRESENTASE TINGKAT KEHADIRAN / PERCENTAGE OF ATTENDANCE RATE |
| Robert MP. Sinaga* | Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| Mardiyanto | Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Anton Mart Irianto | Komisaris / <i>Commissioner</i> | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Sukendra | Direktur Utama / <i>President Director</i> | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| Rooshardianty * | Direktur Operasi & Komersial / <i>Director of Operations & Commercial</i> | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% |

2. *Maintain, control and manage the Company's assets;*
3. *Carrying out the duties and responsibilities of managing the Company as a public company, one of which is holding an AGM;*
4. *Ensure that corporate governance is running and implemented properly;*
5. *Ensure that the Board of Commissioners receives information regarding the Company's current conditions accurately and completely.*

Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting can be held at any time if deemed necessary. Discussions include, but are not limited to, measuring the Company's performance regarding operational activities, financial conditions, and also in order to meet the targets that have been set. In addition, this meeting also acts as a sharing forum between members of the Board of Directors regarding the problems and obstacles faced.

Frequency of Meetings and Attendance of the Board of Directors in Internal Meetings and Joint Meetings

The frequency table of internal meetings and joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners held throughout 2023 and the level of attendance of the Board of Directors in both meetings is described as follows:

| PESERA RAPAT / MEETING PARTY | JABATAN / POSITION | RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS / INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS | | | RAPAT GABUNGAN / JOINT MEETING | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| | | JUMLAH RAPAT / NUMBER OF MEETINGS | KEHADIRAN / ATTENDANCE | PRESENTASE TINGKAT KEHADIRAN / PERCENTAGE OF ATTENDANCE RATE | JUMLAH RAPAT / NUMBER OF MEETINGS | KEHADIRAN / ATTENDANCE | PRESENTASE TINGKAT KEHADIRAN / PERCENTAGE OF ATTENDANCE RATE |
| Didik Martono | Direktur Operasi & Komersial / <i>Director of Operations & Commercial</i> | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Suparno | Direktur Keuangan & Manajemen Risiko / <i>Director of Finance & Risk Management</i> | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| Beny Karjasa | Komite Audit / <i>Audit Committee</i> | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| Suryanti Radeng | Komite Kebijakan Risiko / <i>Risk policy Committee</i> | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |

Notes*

1. Pak Robert MP Sinaga diganti sama Pak Anton (sebagai komisaris) dan Kemudian Pak Mardiyanto masuk sebagai Komisaris Utama. / *Mr. Robert MP Sinaga was replaced by Mr. Anton (as commissioner) and then Mr. Mardiyanto entered as President Commissioner.*
2. Ibu Rooshardianty diganti sama Pak Didik Martono sebagai Direktur Operasi & Komersial. / *Mrs. Rooshardianty was replaced by Mr. Didik Martono as Operations & Commercial Director.*

Remunerasi

Remunerasi Direksi PID ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Remuneration

The remuneration of the PID Board of Directors is determined based on the President Director's Letter and the General Meeting of Shareholders.

Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2023

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2023, Anggota Direksi telah mengikuti seminar, *training* dan *workshop*.

Development of Board of Directors Competence in 2023

To improve the competence and knowledge of the Board of Directors in carrying out their duties and functions, during 2023, Members of the Board of Directors have attended seminars, training and workshops.

Laporan Pelaksanaan Direksi Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PID. Beberapa perubahan strategis dari sisi perencanaan maupun sistem manajemen perusahaan dilakukan di sepanjang tahun 2023 dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.

Board of Directors Implementation Report 2023

2023 is a challenging year for PID. Several strategic changes in terms of planning and company management systems were carried out throughout 2023 in order to achieve the set targets..

Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2023 dengan kinerja keuangan dan operasional yang sudah mencukupi.

1. Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan berkualitas.
2. Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.

Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masing-masing satuan kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan. Dalam tahun 2023 penyampaian keluhan pelanggan melalui SMS center, surat, buku keluhan, kotak saran, email dan langsung dengan petugas.

Peningkatan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui *training, coaching, dan benchmarking*. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh manajemen.

Manajemen telah membuat asersi (*assertion*) Pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan serta rangkaian deklarasi secara keseluruhan terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Direksi tidak memiliki komite di bawah Direksi, sehingga informasi mengenai penilaian kinerja untuk komite di bawah Direksi tidak dapat ditampilkan. Untuk memenuhi fungsi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus operasional Perseroan secara keseluruhan, Direksi dibantu oleh unit kerja yakni Sekretaris Perusahaan

With these challenges, management has taken various policies both in the operational and management fields in order to improve the efficiency and effectiveness of the organization. Thanks to these efforts and driven by the hard work of personnel in all lines, the Company managed to close 2023 with sufficient financial and operational performance.

1. Maintaining balance in achieving good and quality growth.
2. Improve the competence, motivation and productivity of human resources according to organizational needs.

The initiative was then passed down to strategic policies in each work unit. In the operational field, the company's commitment to always improve customer service. In 2023, customer complaints will be submitted via SMS center, letters, complaint books, suggestion boxes, emails and directly with officers.

Personnel competency improvement is carried out through education and training policies carried out through training, coaching, and benchmarking. On the other hand, comprehensive improvement of HR management has begun to be carried out by compiling a competency map of existing personnel as a basis for future HR planning and management. Fulfillment of employee post-employment obligations and employee participation in the National Social Security System (SJSN) program is carried out by management.

Management has made assertions (assertions) Management statements contained in the components of the financial statements and a series of declarations as a whole related to the presentation of the Financial Statements accurately, correctly and in accordance with applicable accounting principles. Management has established an effective internal control system to secure the Company's investments and assets.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

The Board of Directors does not have committees under the Board of Directors, so information regarding performance assessments for committees under the Board of Directors cannot be displayed. To fulfill the function of the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities in managing the Company's operations as a whole, the Board of Directors is assisted

dan Unit Audit Internal. Demi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas komite yang bekerja di bawah Direksi, kedua unit tersebut secara berkala menjalani proses peninjauan dan penilaian dari sisi internal.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kerja diperlukan guna menghasilkan penilaian yang memenuhi nilai independen, terbuka, dan terbaik. Prosedur-prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dimulai melalui proses penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal. Hasil penilaian tersebut kemudian akan dinilai oleh Direksi melalui serangkaian indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria Penilaian Kinerja

Dalam menentukan kriteria penilaian kinerja komite di bawah Direksi, Perseroan melalui Direksi telah menetapkan serangkaian indikator terstruktur yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas entitas atau unit yang bekerja di bawah Direksi. Kriteria tersebut dinilai melalui KPI (Key Performance Indicator) yang berisi pemenuhan tugas dan tanggung jawab dari unit kerja pada tahun buku, kinerja operasional Perseroan, pengimplementasian kebijakan masing-masing unit yang telah ditentukan.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kinerja operasional Perseroan, proses nominasi untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris dengan seperangkat kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Proses pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu Dokumen Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPS3) Penetapan Gaji_Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas PT. PID Tahun 2023 Serta Tantiem Direksi dan Dekom PT. PID Th 2022 tanggal 22 agustus 2023.

Prosedur nominasi untuk memilih anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan dan diputuskan melalui RUPS. Proses nominasi tersebut dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pemberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi, hingga membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

by work units, namely the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. In order to improve the capacity and capabilities of the committees working under the Board of Directors, both units periodically undergo a review and assessment process from the internal side.

Performance Assessment Implementation Procedure

The performance assessment procedure is needed to produce an assessment that meets independent, open, and best values. The performance assessment procedures of the committees under the Board of Directors begin through an independent assessment process carried out by the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. The results of the assessment will then be assessed by the Board of Directors through a series of predetermined indicators.

Performance Assessment Criteria

In determining the performance assessment criteria of the committees under the Board of Directors, the Company through the Board of Directors has established a series of structured indicators used to measure the capacity and capability of entities or units working under the Board of Directors. These criteria are assessed through KPI (Key Performance Indicator) which contains the fulfillment of tasks and responsibilities of the work unit in the fiscal year, the Company's operational performance, the implementation of policies of each unit that have been determined.

Nomination and Remuneration of Directors and Board of Commissioners

To improve the Company's operational performance, the nomination process to determine the Board of The Board of Commissioners has a set of abilities and competencies that are in accordance with the vision and mission of the Company. The appointment process of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Circular Shareholders' Resolution Document (KPS3) Determination of Salary_Honorarium, Allowances and Facilities of PT PID in 2023 as well as Tantiem of Directors and Decommissioners of PT PID in 2022 dated August 22, 2023.

The nomination procedure to select members of the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out and decided through the GMS. The nomination process is assisted by the Nomination and Remuneration Committee as a recommendation provider to the Board of Commissioners regarding policies and criteria in the nomination process, to assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam konteks Dewan Komisaris, Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjabarkan aturan jika remunerasi dapat ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPST dengan mempertimbangkan kinerja, daya saing, dan kemampuan keuangan Perseroan. Untuk Direksi, RUPST menjadi tempat di mana Dewan Komisaris merancang, menetapkan, dan melaksanakan proses remunerasi untuk Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PID mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai *liaison officer (public relation/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)* serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.

Remuneration of Directors and Board of Commissioners

Procedure for Determining the Remuneration of Directors and Board of Commissioners

The determination of the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). In the context of the Board of Commissioners, Article 113 of the Limited Liability Company Law lays out the rules if remuneration can be determined by shareholders in the AGMS by considering the performance, competitiveness and financial capability of the Company. For the Board of Directors, the AGMS is where the Board of Commissioners designs, determines and implements the remuneration process for the Board of Directors.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary of PID has a mission to support the creation of a good corporate image consistently and continuously through the management of effective communication programs to all stakeholders. The Corporate Secretary has a primary function in order to assist the Board of Directors' duties, namely as a liaison officer (public relations/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring the achievement of Key Performance Indicators (KPI), monitoring the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities and administration of policy documents and minutes of Board of Directors meetings.

Profil Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Profile



Tutuy Listiawati

VP SDM, Umum & TI
VP HR, General & IT

Tempat, Tanggal lahir:
Jakarta, 2 Januari 1972

Pendidikan:
Strata-1 atau Sederajat Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila.

Riwayat Pekerjaan:

- 2017:
Mengawali karir di PT PID Sebagai Senior Manager Keuangan.
- 2022-Sekarang:
Di tahun 2022 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Senior Manager SDM & Umum di PT PID.

Place, Date of Birth:
Jakarta, January 2, 1972

Education:
Strata-1 or equivalent in Management Economics from Pancasila University.

Work History:

- 2017:
Started his career at PT PID as Senior Manager of Finance.
- 2022-Present:
In 2022 until now he has served as Senior Manager of HR & General at PT PID.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan *Board Manual* tentang Sekretaris Perusahaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKAP) dan Rencana Kerja Operasional (RKO).
2. Menyusun kebijakan dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
3. Membina kerja sama yang baik dengan unit usaha lain dalam rangka kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Menjalin hubungan dengan instansi di luar Perseroan, seperti pemerintah, BUMN, Swasta, media massa, dan masyarakat terkait publikasi dan pengumpulan informasi.
5. Memelihara hubungan dengan investor dan mitra bisnis.
6. Menjaga citra Perseroan yang positif.
7. Mengelola dan menelaah informasi dan dampak hukumnya, lalu mengemas informasi tersebut agar dapat dikomunikasikan sebaik mungkin.
8. Menelaah kerja sama Perusahaan dengan pihak luar dalam konteks hukum dalam rangka pengembangan kinerja.
9. Membuat jadwal terkait agenda rapat.
10. Menghadiri rapat Direksi dan mencatat Berita Acara/Risalah rapat dan proses pengesahannya.

Laporan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal;
2. Melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi, dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja;
4. Menyelenggarakan RUPS, *corporate actions* dan *public expose*;
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of a Corporate Secretary

Based on the Board Manual on Corporate Secretary, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are:

The company is described as follows:

1. *Create a Work Budget Plan (RKAP) and Operational Work Plan (RKO).*
2. *Formulate policies and provide evaluations of these policies.*
3. *Foster good cooperation with other business units in order to ensure the Company's compliance with laws and regulations.*
4. *Establish relationships with agencies outside the Company, such as the government, state-owned enterprises, private sector, mass media and the public regarding publication and information collection.*
5. *Maintain relationships with investors and business partners.*
6. *Maintain a positive image of the Company.*
7. *Manage and review information and its legal impact, then package the information so that it can be communicated as well as possible.*
8. *Reviewing the Company's cooperation with external parties in a legal context in order to develop performance.*
9. *Make a schedule related to the meeting agenda.*
10. *Attend Board of Directors meetings and record minutes of meetings and their ratification process.*

Corporate Secretary Report

During 2023 the Corporate Secretary carried out the following activities:

1. *Manage and develop a positive corporate image through developing internal and external relationships;*
2. *Carrying out various corporate secretarial and protocol activities, correspondence, and household matters related to the Board of Directors and Board of Commissioners;*
3. *Establish good communication and working relationships with internal, external parties and partners;*
4. *Organizing GMS, corporate actions and public expose;*
5. *Coordinating with related internal work units and external parties/institutions in an effort to facilitate corporate activities and improve the effectiveness of work procedures related to the activities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Board of Commissioners Committee;*

6. Mengkoordinir/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
 7. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi korporasi;
 8. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada calon investor, pelanggan dan masyarakat;
 9. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholders*;
 10. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi;
 11. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal;
 12. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan perusahaan;
 13. Menyiapkan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 15. Memberikan keterangan pers (pers release) mengenai kebijakan Perusahaan;
 16. Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulanan Perusahaan;
 17. Laporan Manajemen, *Annual Report* serta RJPP
 18. Mengusulkan tindakan koreksi maupun tindakan preventif terhadap setiap kejadian operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian;
 19. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal, internal dan mitra kerja.
6. *Coordinating/monitoring activities related to the receipt and delivery of corporate information as well as the implementation of Board of Directors and Board of Commissioners meetings;*
 7. *Providing services to stakeholders for any information needed related to corporate conditions;*
 8. *Develop a communication strategy, especially to potential investors, customers and the public;*
 9. *Building a network of mutually beneficial cooperation with various stakeholders;*
 10. *Pursuing the smooth implementation of the Board of Directors' agenda;*
 11. *Communicating company and/or government policies to internal and external parties;*
 12. *Carry out company secretarial activities;*
 13. *Prepare company reports in accordance with applicable regulations;*
 14. *Coordinating report materials for the Meeting of Commissioners and General Meeting of Shareholders (GMS);*
 15. *Provide press releases regarding the Company's policies;*
 16. *Coordinating the preparation of the Company's quarterly report;*
 17. *Management Report, Annual Report and RJPP*
 18. *Proposing corrective and preventive actions for any operational events that have the potential to cause losses;*
 19. *Establish good communication and working relationships with external, internal and working partners.*

Akses Data dan Informasi Perusahaan

Untuk memperkuat upaya penerapan GCG, PID berupaya memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang kuat dan handal.

PID menyadari bahwa penyebaran informasi kepada *stakeholders* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui *media website*, Buletin Sejahtera, dan sebagainya.

Stakeholder Perusahaan juga dapat memperoleh informasi mengenai produk dan manfaatnya, tentang polis, pembayaran premi, klaim, perubahan polis, dan lain-lainnya ke alamat PID.

Access to Company Data and Information

To strengthen efforts to implement GCG, PID strives to provide easy access to information for stakeholders through the development of a strong and reliable information technology system.

PID realizes that information dissemination to stakeholders is an important part of implementing the principle of transparency. The information dissemination is done through website, Prosperous Bulletin, and so on.

The Company's stakeholders can also obtain information about products and their benefits, about policies, premium payments, claims, policy changes, etc. to the PID address.

Sistem Pengendalian Internal

Seiring dengan perkembangan usaha perusahaan yang terus tumbuh, PID memandang perlu dilakukannya pengendalian internal secara menyeluruh dan terintegrasi serta berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

Fungsi pelaksanaan pengendalian internal dilakukan oleh Direksi melalui Unit Internal Audit. Sedangkan fungsi pengawasan dan penasehatan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian

Pengendalian Keuangan Dan Operasional

Sistem pengendalian keuangan diperlukan untuk menunjang Perseroan dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengurus Perusahaan, pemilik saham, dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sistem pengendalian operasional diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan SOP yang diperlukan untuk memastikan kinerja operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran dan target usaha yang telah ditentukan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan

Dengan dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal yang melibatkan banyak elemen, Perseroan dapat memenuhi aspek-aspek operasional perusahaan dan memastikan sistem tersebut dijalankan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan secara berkala mengikuti perkembangan regulasi dan peraturan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan operasional Perseroan.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan secara berkala telah meninjau kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Internal. Pada tahun 2023 ini, evaluasi terkait Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Perseroan telah berjalan cukup baik dan efektif. Perseroan selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di masa yang akan datang.

Internal Control System

Along with the development of the company's business that continues to grow, PID considers it necessary to carry out internal control in a comprehensive and integrated manner and strives to improve the implementation of internal control through the development of systems and procedures that are applicable and prevent fraud.

The function of implementing internal control is carried out by the Board of Directors through the Internal Audit Unit. While the function of supervision and advisory has been carried out by the Board of Commissioners related to the process of adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management with due regard to the principles of prudence.

Financial and Operational Control

The financial control system is needed to support the Company in providing accurate financial information for the Company's management, shareholders, and stakeholders as a basis for decision making.

The operational control system is required to implement the policies and SOPs necessary to ensure the Company's operational performance runs well and achieve the business goals and targets that have been determined.

Compliance with Laws and Regulations

By implementing an Internal Control System that involves many elements, the Company can fulfill the operational aspects of the company and ensure that the system is carried out in compliance with applicable laws and regulations. The Company regularly follows the development of regulations and regulations regarding aspects related to the Company's operations.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company has periodically reviewed the adequacy and effectiveness of the Internal Control System. In 2023, the evaluation related to the Internal Control System carried out by the Company has been running quite well and effectively. The Company is always committed to maintaining the quality and improving the effectiveness of the Internal Control System in the future.

Pernyataan Direksi/Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Direksi menyatakan jika Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan telah mencapai level optimal, selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan organ yang dibentuk Direksi untuk memberikan saran terkait penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja Perusahaan. Unit ini juga berfungsi untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional bisnis Perseroan. Unit Audit Internal Perseroan telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Unit Audit Internal telah memenuhi ketentuan tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Syarat & Kompetensi Sumber Daya Unit Audit Internal

Untuk menjadi Auditor Internal, harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan;
- Secara kolektif memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundang-undangan terkait lainnya;
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh *International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*;
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan;

Statement of the Board of Directors / Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System in 2023

The Board of Directors states that the Internal Control System implemented by the Company has reached an optimal level, in line with the objectives and strategies set previously.

Internal Audit Report

The Internal Audit Unit is an organ established by the Board of Directors to provide advice regarding the implementation of risk management in all work units of the Company. This unit also serves to add value and improve the Company's business operations. The Company's Internal Audit Unit has been established based on the Decree of the Board of Directors on the Establishment of the Internal Audit Unit and has fulfilled the provisions on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

Requirements & Competencies of Internal Audit Unit Resources

To become an Internal Auditor, you must meet the following requirements and qualifications:

- *Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in carrying out their duties;*
- *Have knowledge and experience of technical auditing and other disciplines relevant to their field of work;*
- *Have sufficient knowledge to be able to recognize, examine and test for indications of fraud;*
- *Collectively have knowledge of important risks and controls in the field of information technology and information technology-based audit techniques;*
- *Have knowledge of the laws and regulations in the capital market and other related laws and regulations;*
- *Have the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively;*
- *Must comply with the professional standards and code of ethics issued by the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing;*
- *Must maintain the confidentiality of Company information and / or data related to the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by laws and regulations or court decisions;*

- Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

- *Understand the principles of good corporate governance and risk management;*
- *Willing to continuously improve their knowledge, skills and professionalism.*

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi Audit Internal

Internal Audit Professional Qualification and Certification

Seluruh anggota Unit Audit Internal Perusahaan secara bertahap akan mendapatkan kualifikasi dan sertifikasi yang disyaratkan.

All members of the Company's Internal Audit Unit will gradually obtain the required qualifications and certifications.

Pelatihan dan Pendidikan Unit Audit Internal

Training and Education of Internal Audit Unit

Untuk tahun buku 2023, Unit Audit Internal sedang merencanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi baik secara internal, maupun eksternal.

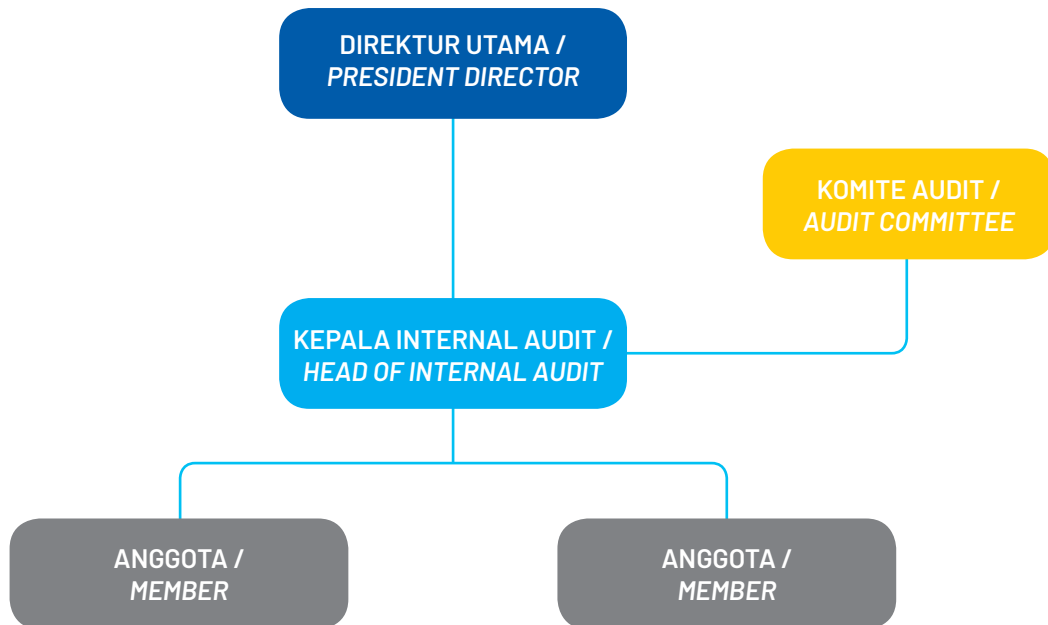
For the fiscal year 2023, the Internal Audit Unit is planning training and education activities to improve competence both internally and externally.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Structure and Position of Internal Audit Unit

Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh kepada Direktur Utama dengan struktur kedudukannya berada di bawah Direksi. Berikut gambaran lengkap mengenai struktur kedudukan Unit Audit Internal:

The Internal Audit Unit is fully responsible to the President Director with its position structure under the Board of Directors. The following is a complete description of the position structure of the Internal Audit Unit:



Profil SPI / SPI Profile



Sri Ernawati

Kepala SPI

Head of SPI (Internal Control System)

Tempat, Tanggal lahir:

Jakarta, 29 September 1967

Place, Date of Birth:

Jakarta, September 29, 1967

Pendidikan:

Memperoleh gelar sarjana manajemen transportasi laut pada 2006 universitas trisakti dan sarjana manajemen dari PPM Manajemen pada 2011.

Education:

Obtained a bachelor's degree in marine transportation management in 2006 from Trisakti University and a bachelor's degree in management from PPM Management in 2011.

Riwayat Pekerjaan:

1990- 2016 di PT PELNI

- *Main staff of the President Director*
- *Main staff of the President Director in Marketing Research*
- *General Manager of PT PELNI Semarang Branch*
- *General Manager of Agency Division Operational Manager of Agency Division*
- *Head of the Ship's Agencies Division*
- *Junior Staff of Agency Division*

2016 - 2023 bergabung di PID

- *Senior Manager of Procurement Division*
- *Senior Manager of General Affairs and Human Resources Division*
- *Senior Manager of Business Development Division*
- *Corporate Secretary PT PID*

Memperoleh sertifikat dan pelatihan diantaranya: Dasar dasar audit, pengadaan barang dan jasa, pengembangan eksekutif, *Corporate Balance Scorcord* dan lain lain.

Work History:

1990- 2016 at PT PELNI

- *Main staff of the President Director*
- *Main staff of the President Director in Marketing Research*
- *General Manager of PT PELNI Semarang Branch*
- *General Manager of Agency Division Operational Manager of Agency Division*
- *Head of the Ship's Agencies Division*
- *Junior Staff of Agency Division*

2016 - 2023 joined PID

- *Senior Manager of Procurement Division*
- *Senior Manager of General Affairs and Human Resources Division*
- *Senior Manager of Business Development Division*
- *Corporate Secretary of PT PID*

Obtained certificates and training including: Basic audit, procurement of goods and services, executive development, Corporate Balance Scorcord and others.

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Uraian tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal yang disesuaikan dengan Piagam Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. Menelaah dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas hal-hal terkait operasional, SDM, keuangan dan pemasaran.
4. Menyarankan Dewan Komisaris dan Direktur Utama mengenai perkembangan kegiatan manajemen menggunakan informasi-informasi yang objektif.
5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Melakukan sinergi dengan Komite Audit.

Piagam SPI / Audit Charter

Pembentukan dan Pedoman Piagam Audit Internal mengatur fungsi dan tanggung jawab Unit Audit Internal melalui Piagam Audit Internal. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan tersebut, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan tunduk kepada aturan-aturan yang menyertainya.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal 2023

Pada tahun 2023,, Unit Audit Internal telah melaksanakan serangkaian kegiatan audit sebagai bagian dari fungsi dan tanggung jawabnya. Kegiatan tersebut di antaranya adalah Membuat dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan, menelaah dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas hal-hal terkait operasional, SDM, keuangan dan pemasaran.

Pembinaan SDM dan Pengembangan Profesi Audit

Pengembangan kompetensi bagi auditor PID dilakukan melalui pelatihan pada institusi pelatihan dalam bentuk kursus atau seminar/ lokakarya terkait dengan masalah auditing baik yang dilaksanakan oleh internal Perusahaan maupun Lembaga Pendidikan Eksternal lainnya.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang

Description of Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

The description of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit as adjusted to the Internal Audit Unit Charter is outlined as follows:

1. *Create and implement an annual internal audit work program;*
2. *Review and evaluate internal control systems and risk management in accordance with Company policies.*
3. *Check and assess the efficiency and effectiveness of operational, HR, financial and marketing matters.*
4. *Advise the Board of Commissioners and the President Director regarding the development of management activities using objective information.*
5. *Submitting audit results reports to the President Director and Board of Commissioners.*
6. *Carry out synergy with the Audit Committee.*

SPI Charter / Audit Charter

The Establishment and Guidelines of the Internal Audit Charter regulate the functions and responsibilities of the Internal Audit Unit through the Internal Audit Charter. As a form of compliance with these regulations, the Company has an Internal Audit Charter and is subject to the accompanying rules.

Implementation of Internal Audit Unit Duties 2023

In 2023, the Internal Audit Unit has carried out a series of audit activities as part of its functions and responsibilities. These activities include: Creating and implementing an annual internal audit work program, reviewing and evaluating the internal control system and risk management in accordance with Company policies, Examining and assessing the efficiency and effectiveness of operational, HR, financial and marketing matters.

Human Resources Development and Audit Profession Development

Competency development for PID auditors is carried out through training at training institutions in the form of courses or seminars/workshops related to auditing issues, both those carried out internally by the Company and other external educational institutions.

Monitoring Follow-up Findings

In accordance with the provisions of the Internal Supervisory Unit Work Guidelines regarding Implementation Standards for Follow-up Monitoring,

Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tinjau yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2023 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada *auditee* secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga akan dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Rencana Program Pengembangan Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2023

Rencana Program pengembangan kompetensi yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern, yaitu berupa pelatihan dan audit kantor cabang.

Hasil Temuan Audit

Selama Tahun 2023, tidak ada temuan Audit Umum maupun Audit Khusus.

Rekomendasi SKAI atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Kami telah memberikan rekomendasi yang melibatkan keseluruhan unsur dalam internal perusahaan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern wajib dilaksanakan oleh seluruh lapisan dari tingkat manajemen tertinggi sampai kepada pegawai dasar sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang baik.
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan "payung" dari setiap aktifitas perusahaan yang dilakukan sehingga segala aktifitas operasional wajib mengacu pada Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang berlaku.
3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern Perusahaan akan selalu dipantau oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui kaji ulang dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan

one of the duties of the Head of SPI is to prepare and maintain a system to monitor the follow-up of assignment results that have been submitted to management.

Monitoring the follow-up of auditor findings is a series of activities carried out systematically by SPI to determine that the audit object (auditee) has implemented the recommendations of the audit results, both those originating from internal auditors and external auditors, within a previously agreed time frame.

Follow-up monitoring aims to objectively assess the extent to which the recommendations of the findings have been implemented and to check the accuracy of both written and physical data in the field regarding the review reports submitted by the auditee.

Monitoring activities for follow-up of auditor findings in 2023 are carried out throughout the year by requesting follow-up reports from the auditee periodically. Physical check activities in the field will also be carried out to see the physical realization of the implementation of follow-up at the Head Office and Branch Offices.

Internal Audit Work Unit Development Program Plan for 2023

The competency development program plan carried out by the Internal Audit Work Unit, namely in the form of training and branch office audits.

Audit Findings Results

During 2023, there were no General Audit or Special Audit findings.

SKAI Recommendations on the Implementation of the Company's Internal Control System

In order to improve the implementation of the Internal Control System, we have provided recommendations that involve all elements within the company, including:

1. *The Internal Control System must be implemented by all levels from the highest management level to basic employees so that a good control environment is created.*
2. *The Internal Control System is the "umbrella" for every company activity carried out so that all operational activities must refer to the applicable Internal Control System Guidelines.*
3. *The implementation of the Company's internal control system will always be monitored by the Board of Commissioners and Board of Directors through reviews and inspections carried out by*

Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkala dan berkesinambungan.

the Internal Audit Work Unit (SKAI) periodically and continuously.

Penyerahan Laporan SKAI Tahun 2023

Laporan Hasil Audit disampaikan oleh Ketua SKAI kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit.

Submission of 2023 SKAI Report

The Audit Result Report is submitted by the Head of SKAI to the Board of Directors and Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing system merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan, oleh pelapor pelanggaran. Kami telah melakukan penyusunan kebijakan terkait dengan Strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan dalam SK Direksi Nomor 05.31/DIR/SK/004/100/2023.

Whistleblowing System (WBS)

The whistleblowing system is the disclosure of violations or unlawful acts, unethical acts or other acts that can harm the company, by the whistleblower. We have prepared a policy related to the Anti-Fraud Strategy as stipulated in the Board of Directors Decree Number 05.31/DIR/SK/004/100/2023.

Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system)

1. Tersedianya sarana penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman, yaitu Unit Kerja *Anti Fraud* (UKAF).
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kejadian *fraud*.
3. Tersedianya kesempatan untuk memitigasi potensi kejadian *fraud* secara internal.
4. Meminimalisir potensi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari kejadian *fraud* baik dari segi keuangan, operasional, hukum dan reputasi.
5. Meningkatkan reputasi Perusahaandimata pemangku kepentingan.

Benefits of a Whistleblowing System

1. *The availability of means of conveying important and critical information for the company to the party that must immediately handle it safely, namely the Anti-Fraud Work Unit (UKAF).*
2. *Availability of early detection mechanisms for fraud incidents.*
3. *The availability of opportunities to mitigate potential fraud incidents internally.*
4. *Minimizing potential risks faced by the company due to fraud incidents in terms of finance, operations, law and reputation.*
5. *Improve the Company's reputation in the eyes of stakeholders.*

Jenis Tindakan Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan (Whistleblowing)

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, dll.
2. Melanggar pedoman etika Perusahaan, meliputi: benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
3. Melanggar prinsip akuntansi umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan.
5. Tindak kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian *finansial* ataupun *non-finansial*.
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Types of Violations That Can Be Reported (Whistleblowing)

1. *Violating laws and regulations, including forgery of signatures, corruption, embezzlement, mark-up, drug use, etc.*
2. *Violating the Company's ethical guidelines, including: conflict of interest, harassment, engaging in prohibited community activities.*
3. *Violating general accounting principles.*
4. *Violating Company operational policies and procedures.*
5. *Other fraudulent acts that can result in financial or non-financial losses.*
6. *Actions that endanger work safety.*

Mekanisme Penyampaian Laporan

1. Infrastruktur Pelaporan
 - a. Pihak internal, dapat melalui:
 - Aplikasi pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yakni, Aplikasi Sistem *Anti Fraud*;

Report Submission Mechanism

1. *Reporting Infrastructure*
 - a. *Internal parties can go through:*
 - *The application for reporting violations (Whistleblowing System), namely the Anti-Fraud System Application;*

- SMS;
 - Telepon;
 - Kotak saran;
 - Disampaikan secara langsung kepada Unit Kerja Terkait.
- b. Pihak eksternal, melalui mekanisme pelaporan pengaduan nasabah yang berlaku pada Perusahaan.
2. Mekanisme Pengungkapan Kejadian *Fraud*
Penyampaian laporan terkait adanya perbuatan fraud oleh *Whistleblower* harus dilengkapi dengan bukti informasi yang dapat dipercaya seperti tanggal terjadinya fraud dan pelaku yang melakukan fraud dan jika ada bukti fisik maka dapat disampaikan juga kepada Unit Kerja *Anti Fraud*. Setelah laporan diterima oleh Unit Kerja *Anti Fraud*, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku pada Unit Kerja *Anti Fraud* PID, yakni melakukan identifikasi awal dengan azas praduga tak bersalah, analisis dilakukan sampai pada keputusan status pelaporan apakah berpotensi *fraud*, telah terjadi *fraud* atau tidak berdampak *fraud*. Setiap hasil identifikasi awal disampaikan kepada Direktur Utama secara tertulis guna ditindaklanjuti.

Perlindungan Pelapor

Setiap pelapor pelanggaran mendapat jaminan perlindungan dari Perusahaan, dalam bentuk;

1. Perlindungan secara internal, antara lain:
 - a. Kerahasiaan identitas pelapor
 - b. Bantuan pendampingan hukum
 - c. Perlakuan yang merugikan secara internal, seperti:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan jabatan atau pangkat;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
 - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
2. Perlindungan eksternal
Perlindungan eksternal mengacu pada undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, antara lain:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan /atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga pelapor dari ancaman fisik atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
 - d. Kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor;
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

- SMS;
 - Telephone;
 - Suggestion Box;
 - Delivered directly to the relevant work unit.
- b. External parties, through the customer complaint reporting mechanism applicable to the Company.

2. Fraud Incident Disclosure Mechanism

Submission of reports related to fraud by Whistleblowers must be accompanied by reliable evidence such as the date of the fraud and the perpetrators who committed the fraud and if there is physical evidence, it can also be submitted to the Anti-Fraud Work Unit. After the report is received by the Anti-Fraud Work Unit, it will then be followed up according to the procedures applicable to the PID Anti-Fraud Work Unit, namely conducting initial identification with the principle of presumption of innocence, analysis is carried out until a decision on the status of the report is potentially fraud, fraud has occurred or has no impact on fraud. Each initial identification result is submitted to the President Director in writing for follow-up.

Whistleblower Protection

Every whistleblower receives a guarantee of protection from the Company, in the form of;

1. Internal protection, including:
 - a. Confidentiality of the reporter's identity
 - b. Legal assistance assistance
 - c. Internally detrimental treatment, such as:
 - Unfair dismissal;
 - Demotion of position or rank;
 - Harassment or discrimination in any form;
 - A detrimental note in his personal data file.
2. External protection
External protection refers to laws related to witness and victim protection, including:
 - a. Protection from criminal and/or civil prosecution;
 - b. Protection of the personal and family safety of the reporter from physical or mental threats;
 - c. Protection of the reporter's assets;
 - d. Confidentiality and anonymity of the reporter;
 - e. Providing information without meeting the reported party face to face, in every case examination if the violation is included in a court dispute.

Hasil Kebijakan Whistleblowing System

Selama Tahun 2023, tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran melalui Aplikasi Sistem Anti Fraud (SAF).

Sosialisasi

Selama tahun 2023 kami telah menyelenggarakan sosialisasi:

1. Pedoman Good Corporate Governance;
2. Pedoman Code Of Conduct;
3. Pedoman Board Manual;
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
5. Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi;
6. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS).

Whistleblowing System Policy Results

During 2023, there were no reports of complaints of violations through the Anti-Fraud System (SAF) Application.

Socialization

During 2023 we have held socialization:

1. Good Corporate Governance Guidelines;
2. Code of Conduct Guidelines;
3. Board Manual Guidelines;
4. Gratification Control Guidelines;
5. Gratification Control Unit Guidelines;
6. Violation Reporting System (WBS) Guidelines.



Workshop GCG 28-30 Agustus 2023 / GCG Workshop August 28-30, 2023



Workshop Gratifikasi 7 Juni 2023 / Gratification Workshop June 7, 2023

Audit Eksternal

1. Jumlah Periode Akuntan
 - a. Kantor Akuntan Djoko, Sidik dan Indra, periode pemeriksaan 30 Juni 2023 dengan periode kerja selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2023 - 29 Februari 2024.
2. Honorarium
 - a. Sesuai perjanjian kerjasama antara PID dengan Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra tentang Review Informasi Laporan Keuangan Interim untuk periode enam bulan dengan Nomor P1: 10.31/SPK/DIR/001/100/2023, ditetapkan sebesar RpRp122.500.000,-

External Audit

1. Number of Accountant Periods
 - a. Djoko, Sidik and Indra Accounting Firm, examination period June 30, 2023 with a work period of 4 (four) months starting from November 1, 2023 - February 29, 2024.
2. Honorarium
 - a. In accordance with the cooperation agreement between PID and the Public Accounting Firm Djoko, Sidik and Indra regarding the Review of Interim Financial Statement Information for a period of six months with Number P1: 10.31/SPK/DIR/001/100/2023, set at Rp122,500,000, -

| TAHUN BUKU / BOOK YEAR | AKUNTAN / ACCOUNTING | ALAMAT KANTOR / OFFICE ADDRESS | PEKERJAAN / JOB | BIAYA AUDIT / AUDIT COST (Rp) | OPINI / OPINION | JASA DILUAR AUDIT KEUANGAN / SERVICES OTHER THAN FINANCIAL AUDIT |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 2023 | Akuntan Publik KAP Djoko, Sidik & Indra / Public <i>Accountant KAP Djoko, Sidik & Indra</i> | Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.618, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 | Audit Laporan Keuangan / <i>Financial Statement Audit</i> | 122.500.000 | Wajar Tanpa Pengecualian / <i>Unqualified</i> | Tidak ada / <i>None</i> |
| 2022 | Akuntan Publik KAP Djoko, Sidik & Indra / Public <i>Accountant KAP Djoko, Sidik & Indra</i> | Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.618, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 | Audit Laporan Keuangan / <i>Financial Statement Audit</i> | 100.000.000 | Wajar Tanpa Pengecualian / <i>Unqualified</i> | Tidak ada / <i>None</i> |
| 2021 | Akuntan Publik KAP Djoko, Sidik & Indra / Public <i>Accountant KAP Djoko, Sidik & Indra</i> | Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.618, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 | Audit Laporan Keuangan / <i>Financial Statement Audit</i> | 105.000.000 | Wajar Tanpa Pengecualian / <i>Unqualified</i> | Tidak ada / <i>None</i> |

Manajemen Risiko

Pendekatan atau Prinsip Pencegahan

PID menyadari pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam aktivitas usaha, PID menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*). Risiko tersebut secara umum dapat timbul akibat dipengaruhi oleh manusia, aset, alam, pendanaan, lingkungan, dan reputasi. Sedangkan secara khusus, risiko yang dihadapi sesuai karakteristiknya dapat berbentuk risiko kegagalan operasional penerbangan, kegagalan operasi bandara, kegagalan layanan dan ketidakpatuhan pada regulasi. Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya *existing control*, mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko. Evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi karena risiko itu sendiri sifatnya dinamis.

PID secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar bandara internasional, manajemen PID akan menyusun profil risiko korporasi, untuk fungsi Operasional dan Teknik yang fokus pada proses bisnis perusahaan antara lain: *Safety, Security, Services through Compliance (3S+1C)* yang merupakan *compulsory* dalam pengelolaan risiko, serta di lingkungan Administrasi, Keuangan dan Komersial yang mengarah pada risiko tinggi.

Risk Management

Prevention Approach or Principle

PID realizes that the implementation of corporate risk management is increasingly becoming a demand, because its success is a key factor in achieving goals and winning competition at the global level.

The implementation of risk management can increase shareholder value, while providing a comprehensive picture to stakeholders and Company managers regarding potential opportunities and losses, thus decision makers and internal policy makers have the availability of data and information regarding Company performance, thus enabling more effective and efficient decision making.

In business activities, PID faces several inherent risks. These risks can generally arise due to the influence of humans, assets, nature, funding, environment, and reputation. While specifically, the risks faced according to their characteristics can be in the form of flight operational failure risks, airport operational failures, service failures and non-compliance with regulations. These risks are handled through existing control efforts, risk mitigation, or risk transfer. Evaluations are always carried out periodically according to changing conditions because the risk itself is dynamic.

PID continuously develops and improves the framework of an integrated and comprehensive risk management system and internal control structure, so that it can provide information on potential risks earlier and then adequate steps can be taken to minimize the impact of the risk. This risk management framework is outlined in policies, procedures, authorities and other provisions as well as various risk management tools that apply throughout the scope of business activities.

In order to develop risk management in accordance with international airport standards, PID management will compile a corporate risk profile, for Operational and Technical functions that focus on the company's business processes, including: Safety, Security, Services through Compliance (3S+1C) which are compulsory in risk management, as well as in the Administration, Finance and Commercial environments that lead to high risk.

Pendekatan Atau Prinsip Pencegahan

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di PID dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Perusahaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Perusahaan, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Perusahaan. Risiko adalah bagian dari bisnis Perusahaan, sehingga dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki *profil risk-return* yang optimal yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko.

Taksonomi Risiko Triwulan IV 2023

Pada tahun 2023 sesuai dengan arahan Kementerian BUMN terkait Peraturan Menteri Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yaitu setiap Badan Usaha Milik Negara diwajibkan membuat taksonomi risiko serta agregasinya. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) sesuai dengan profil risiko 2023 sudah melakukan kategori risiko dan deskripsi risiko selanjutnya dipetakan berdasarkan taksonomi risiko. Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi risiko dan alat ukur risiko dengan rincian T1 (Tema), T2 (Kategori), dan T3 (Peristiwa Risiko).

Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan dalam penyusunan risiko yang teragregasi dan terintegrasi menggunakan level risiko tertinggi pada setiap peristiwa risiko (T3), kemudian diagregasi dan diintegrasikan Kategori Risiko (T2), dan mendapatkan level risiko pada Tema Risiko (T1) yang sudah dianalisis. Hasil yang didapat, bahwa risiko ekstrim sebanyak 1 peristiwa risiko.

Divisi Keuangan & Manajemen Risiko memerlukan dukungan dari *Top Management* dan Divisi terkait untuk implementasi budaya sadar risiko di PT PID dengan cara melakukan mitigasi risiko sesuai rencana dan aturan, serta terlibat bersama dalam *risk assessment* secara periodik.

Prevention Approach Or Principle

The implementation of risk management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been set in the PID with the aim of providing a consistent risk management framework for risks in the Company's business processes to optimize business growth in achieving profits, maintaining the Company's capital, supporting the decision-making process, increasing the company's value and protecting the Company's reputation. Risk is part of the Company's business, so in implementing risk management, the Company uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities.

Risk management through capital is adjusted to long-term strategic and business plans, as well as efficient capital allocation policies in accordance with business segments that have an optimal risk-return profile that includes 8 (eight) types of risk.

Risk Taxonomy Quarter IV 2023

In 2023, in accordance with the direction of the Ministry of SOEs regarding Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, each State-Owned Enterprise is required to create a risk taxonomy and its aggregation. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) in accordance with the 2023 risk profile has carried out risk categories and risk descriptions which are then mapped based on the risk taxonomy. Risk Taxonomy is a structure that explains the classification and subclassification of risks and risk measurement tools with details of T1 (Theme), T2 (Category), and T3 (Risk Event).

The Risk Management & Compliance Department in compiling aggregated and integrated risks uses the highest risk level for each risk event (T3), then aggregates and integrates the Risk Category (T2), and obtains the risk level on the Risk Theme (T1) that has been analyzed. The results obtained are that the extreme risk is 1 risk event.

The Finance & Risk Management Division requires support from Top Management and related Divisions to implement a risk-aware culture at PT PID by mitigating risks according to plans and regulations, as well as being involved together in periodic risk assessments

| TEMA BESAR T1 / BIG THEME T1 | KATEGORI T2 / CATEGORY T2 | PERISTIWA RISIKO T3 / RISK EVENTS T3 | |
|--|---|---|---|
| Risiko Kinerja Portofolio / <i>Portfolio Performance Risk</i> | Perusahaan Keuangan / <i>Financial Corporate</i> | Terhambatnya pembayaran biaya operasional dan utang usaha / <i>Delays in payment of operating expenses and accounts payable</i> | Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID / <i>Risk of Not Achieving PT PID's Consolidated Profit Target</i> |
| Risiko Keberlanjutan / <i>Sustainability Risk</i> | Tawanan / <i>Captive</i> | Ketidakpuasan Pelanggan / <i>Customer dissatisfaction</i> | Piutang Tidak Tertagih / <i>Uncollectible Receivables</i> |
| | <i>New Captive</i> / Tawanan Baru | Tidak Tercapainya New Market Penjualan atas Jasa Layanan / <i>Non-achievement of New Market Sales of Services</i> | |
| Risiko Bisnis Umum / <i>General Business Risk</i> | Sumber Daya Manusia / <i>Human Resources</i> | Kegagalan Implementasi Budaya Perusahaan / <i>Failure to Implement Corporate Culture</i> | |
| | Audit Intera / <i>Audit Intera</i> | Pengendalian Internal yang Tidak Efektif / <i>Ineffective Internal Control</i> | |
| Risiko Operasi / <i>Operation Risk</i> | Risiko Kepatuhan / <i>Compliance Risk</i> | Risiko Skor Penilaian Good Corporate Governance Tidak Mencapai Target / <i>Risk of Good Corporate Governance Assessment Score Not Reaching Target</i> | Kegagalan Implementasi Talent Pool / <i>Talent Pool Implementation Failure</i> |
| | Makanan dan Minuman / <i>Food and Beverage</i> | Risiko Pemutusan Kontrak sebagai Penyedia Bahan Makanan oleh PT PELNI (Persero) / <i>Risk of Contract Termination as Food Provider by PT PELNI (Persero)</i> | |
| Risiko Strategis / <i>Strategic Risk</i> | Teknologi Informasi / <i>IT</i> | Kegagalan pengembangan ERP system payroll / <i>Failure to develop ERP payroll system</i> | Kegagalan dalam pengembangan sistem untuk reservasi layanan pariwisata / <i>Failure in system development for tourism service reservation</i> |
| | Investigasi / <i>Investation</i> | Kegagalan Investasi Pemenuhan Bisnis / <i>Failure of Business Fulfillment Investment</i> | Tidak selesainya kajian bisnis crew manning / <i>Non-completion of crew manning business study</i> |

Dari Taksonomi risiko utama perusahaan terdapat peristiwa risiko dengan level risiko ekstrim yang telah dianalisa pada *risk assessment* Triwulan IV Tahun 2023 di antaranya adalah:
Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID.

Tema *Portofolio Performance Risk* kategori *Financial Corporate* dengan peristiwa risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi memiliki nilai *current risk* dan realisasi *residual risk* Triwulan IV dengan level risiko ekstrim dan hasil monitoring ekstrim.

Komponen Pengelolaan Risiko

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen saling terkait yaitu:

1. Prinsip-prinsip manajemen risiko;
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko; dan
3. Proses pengelolaan risiko.

Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko. Sementara proses manajemen risiko adalah

From the company's main risk taxonomy, there are risk events with extreme risk levels that have been analyzed in the risk assessment for Quarter IV of 2023, including: Risk of Not Achieving PT PID's Consolidated Profit Target.

The Performance Risk Portfolio Theme in the Financial Corporate category with the risk event of Failure to Achieve Consolidated Profit Target has a current risk value and residual risk realization for Quarter IV with an extreme risk level and extreme monitoring results.

Risk Management Components

The risk management system consists of 3 interrelated components, namely:

1. *Principles of risk management;*
2. *Framework for managing risk; and*
3. *Risk management process.*

The principles of risk management are foundation (basic rules) for developing a risk management framework that is the pillar for implementing the risk management process. While the risk management process is an elaboration of the

penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

Dalam mengidentifikasi kejadian dan peristiwa yang berpotensi menjadi risiko dan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan Perseroan, maka Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Risiko komprehensif yang terhubung dengan proses perencanaan strategis dan kegiatan usaha Perseroan. Sistem Manajemen Risiko Perseroan memiliki kerangka dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko, yakni di antaranya:

1. Identifikasi risiko dalam bentuk penilaian, pemantauan, dan pengendalian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko;
2. Infrastruktur manajemen risiko dalam bentuk sistem tata kelola, struktur organisasi, pengumpulan data, metode penelitian, dan kebijakan serta prosedur pelaporan.
3. Budaya perusahaan yang mencakup kegiatan pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan aspek-aspek yang relevan, serta bentuk apresiasi.

Untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Risiko berjalan optimal, Perseroan membagi secara spesifik peran dan fungsi terkait penerapan manajemen risiko berdasarkan pihak-pihak yang melaksanakannya:

1. GCP (Group Corporate Policy)

Pihak yang mengidentifikasi risiko dan menuangkannya dalam bentuk keputusan dan kebijakan.

2. Internal Control

Pihak yang mengendalikan urusan internal terkait aspek manajemen risiko.

3. Internal Audit

Pihak yang mengevaluasi bagian sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan perangkat sistem informasi manajemen terkait.

4. IT Audit

Pihak yang memastikan sistem informasi Perseroan mendapat kontrol yang optimal.

5. CCSA (Compliance and Control Self-Assessment)

Pihak yang mengulas dan menilai penerapan-penerapan terkait manajemen risiko.

6. MARS (Management Awareness Reporting System)

Pihak yang menemukan, melaporkan, dan menuntaskan segala permasalahan yang dialami Perseroan.

Peta Risiko dan Cara Pengelolaannya

Perusahaan secara berkala selalu berupaya untuk mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi risiko yang muncul guna memastikan keberlanjutan

risk management framework in order to facilitate the implementation of risk management principles, both at the corporate level, at the work unit level, and at the individual level.

In identifying events and incidents that have the potential to become risks and have a significant impact on the sustainability of the Company, the Company implements a comprehensive Risk Management System that is connected to the strategic planning process and business activities of the Company. The Company's Risk Management System has a framework for identifying, monitoring, and managing risks, including:

- 1. Identify risks in the form of assessment, monitoring and control, and increase awareness of risks;*
- 2. Risk management infrastructure in the form of governance systems, organizational structures, data collection, research methods, and reporting policies and procedures.*
- 3. Corporate culture that includes training activities, performance assessments, development of relevant aspects, and forms of appreciation.*

To ensure that the implementation of the Risk Management System runs optimally, the Company specifically divides the roles and functions related to the implementation of risk management based on the parties implementing it:

1. GCP (Group Corporate Policy)

The party that identifies risks and expresses them in the form of decisions and policies.

2. Internal Control

The party that controls internal affairs related to risk management aspects.

3. Internal Audit

The party that evaluates the risk management system, internal control, and related management information system tools.

4. IT Audit

The party that ensures that the Company's information system receives optimal control.

5. CCSA (Compliance and Control Self-Assessment)

The party that reviews and assesses the implementation of risk management.

6. MARS (Management Awareness Reporting System)

The party that finds, reports, and resolves all problems experienced by the Company.

Risk Map and How to Manage It

The Company periodically always strives to identify, manage and mitigate risks that arise to ensure the sustainability of the Company. There are 4 main types

Perseroan. Ada 4 jenis kategori risiko utama yang telah diidentifikasi oleh Perseroan.

Berdasarkan peta risiko *current risk* pada Triwulan III ini dijelaskan sebagai berikut:

- Pada level risiko **Ekstrim** terdapat 2 peristiwa risiko, yaitu:
 - Risiko Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi PT PID dengan besaran 23
- Pada level risiko **Tinggi** terdapat 3 Deskripsi Risiko, yaitu:
 - Piutang Tidak Tertagih dengan besaran 16
 - Ketidakpuasan Pelanggan dengan besaran 13
- Pada level risiko **Moderat** terdapat 4 peristiwa risiko, yaitu:
 - Risiko Skor Penilaian *Good Corporate Governance* Tidak Mencapai Target dengan besaran 12
 - Pengendalian Internal Tidak Efektif dengan besaran 11
 - Terhambatnya Pembayaran Biaya Operasional dan Utang Usaha dengan besaran 9
 - Kegagalan Investasi Pemenuhan Bisnis dengan besaran 8
- Pada level risiko **Rendah** terdapat 5 peristiwa risiko, yaitu:
 - Tidak Tercapainya *New Market* Penjualan atas Jasa Layanan dengan besaran 5
 - Tidak Selesai Kajian Bisnis *Crew Manning* dengan besaran 3
 - Kegagalan Dalam Pengembangan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata dengan besaran 3
 - Kegagalan Implementasi *Talent Pool* dengan besaran 3
 - Kegagalan Implementasi Budaya Perusahaan dengan besaran 3
- Risiko Pemutusan Kontrak sebagai Penyedia Bahan Makanan oleh PT PELNI (Persero) dengan besaran 2
 - Kegagalan pengembangan *ERP system payroll* dengan besaran 1

Berdasarkan peta risiko realisasi *residual risk* pada Triwulan III ini dijelaskan sebagai berikut:

- Pada level risiko **Ekstrim** terdapat 1 peristiwa risiko, yaitu:
 - Tidak Tercapainya Target Laba Konsolidasi dengan besaran 20
- Pada level risiko **Tinggi** terdapat 1 Deskripsi Risiko, yaitu:
 - Piutang Tidak Tertagih Dengan besaran 16
- Pada level risiko **Moderat** terdapat 5 peristiwa risiko, yaitu:
 - Terhambatnya pembayaran biaya operasional dan utang usaha dengan besaran 9

of risk categories that have been identified by the Company.

Based on the current risk map in Quarter III, it is explained as follows:

- *At the Extreme risk level there are 2 risk events, namely:*
 - *Risk of Not Achieving PT PID's Consolidated Profit Target of 23*
- *At the High risk level there are 3 Risk Descriptions, namely:*
 - *Bad Debts with a value of 16*
 - *Customer Dissatisfaction with a magnitude of 13*
- *At the Moderate risk level there are 4 risk events, namely*
 - *Risk of Good Corporate Governance Assessment Score Not Reaching Target with a magnitude of 12*
 - *Ineffective Internal Control with a magnitude of 11*
 - *Delays in payment of operational costs and business debts amounting to*
 - *Business Fulfillment Investment Failure with a magnitude of 8*
- *At the Low risk level there are 5 risk events, namely:*
 - *Failure to achieve new market sales of services with a magnitude of 5*
 - *Crew Manning's Business Study Incomplete with a Magnitude of 3*
 - *Failure in Developing a System for Tourism Service Reservations with a magnitude of 3*
 - *Talent Pool Implementation Failure with a magnitude of 3*
 - *Corporate Culture Implementation Failure with a magnitude of 3*
- *Risk of Termination of Contract as a Food Materials Supplier by PT PELNI (Persero) with a magnitude of 2*
 - *Failure of ERP payroll system development with a magnitude of 1*

Based on the residual risk realization risk map in the third quarter, it is explained as follows:

- *At the Extreme risk level there is 1 risk event, namely:*
 - *Failure to achieve the Consolidated Profit Target of 20%*
- *At the High risk level there is 1 Risk Description, namely:*
 - *Bad Debts with a value of 16*
- *At the Moderate risk level there are 5 risk events, namely:*
 - *Delays in payment of operational costs and business debts amounting to 9*

- Risiko Skor Penilaian *Good Corporate Governance* Tidak Mencapai Target dengan besaran 8
- Pengendalian Internal yang Tidak Efektif dengan besaran 8
- Kegagalan Investasi Pemenuhan Bisnis dengan besaran 8
- Pada *level* risiko **Rendah** terdapat 5 peristiwa risiko, yaitu:
 - Tidak Mencapai Target dengan besaran 12
Tidak Tercapainya *New Market* Penjualan atas Jasa Layanan dengan besaran 5
 - Ketidakpuasan Pelanggan dengan besaran 3
 - Tidak Selesainya Kajian Bisnis *Crew Manning* dengan besaran 3
 - Kegagalan Implementasi *Talent Pool* dengan besaran 3
 - Tidak Tercapainya *New Market* Penjualan atas Jasa Layanan dengan besaran 1
 - Kegagalan Dalam Pengembangan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata dengan besaran 1
 - Risiko Pemutusan Kontrak sebagai Penyedia Bahan Makanan oleh PT PELNI (Persero) Kontrak dengan besaran 1
 - Kegagalan Pengembangan *ERP System Payroll* dengan besaran 1
 - Kegagalan Implementasi Budaya Perusahaan dengan besaran 1
- *Risk of Good Corporate Governance Assessment Score Not Reaching Target with a magnitude of 8*
- *Ineffective Internal Control with a magnitude of 8*
- *Business Fulfillment Investment Failure with a magnitude of 8*
- *At the Low risk level there are 5 risk events, namely:*
 - *Not Achieving Target with a magnitude of 12
Not Achieving New Market Sales for Services with a magnitude of 5*
 - *Customer Dissatisfaction with a magnitude of 3*
 - *Crew Manning's Business Study Incomplete with a Magnitude of 3*
 - *Talent Pool Implementation Failure with a magnitude of 3*
 - *Failure to achieve new market sales for services with a size of 1*
 - *Failure in Developing a System for Tourism Service Reservations with a magnitude of 1*
 - *Risk of Termination of Contract as a Food Materials Supplier by PT PELNI (Persero) Contract with a size of 1*
 - *Failure of ERP System Payroll Development with a magnitude of 1*
 - *Corporate Culture Implementation Failure with a magnitude of 1*

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan secara berkala selalu memantau efektivitas Sistem Manajemen Risiko melalui berbagai indikator dan aspek yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan menilai pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko yang dilakukan pada tahun 2023 telah berjalan baik dan cukup efektif untuk memitigasi risiko yang muncul yang relevan dengan Perusahaan.

Pernyataan Direksi Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2023

Direksi menyatakan jika Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Perseroan telah mencapai *level* optimal, selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tata Kelola Keberlanjutan

Pihak Penanggung Jawab Implementasi Kinerja Keberlanjutan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) senantiasa menjadi bagian komitmen Perseroan dalam menjalankan bisnisnya agar mampu

Review of the Effectiveness of Risk Management Systems

The Company regularly monitors the effectiveness of the Risk Management System through various indicators and aspects that have been approved and in accordance with laws and regulations. The Company assesses that the implementation of the Risk Management System carried out in 2023 has been running well and is quite effective in mitigating emerging risks that are relevant to the Company.

Board of Directors' Statement on the Adequacy of the Risk Management System in 2023

The Board of Directors stated that the Risk Management System implemented by the Company has reached an optimal level, in line with previously established goals and strategies.

Sustainability Governance

Responsible Party for Sustainability Performance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles has always been part of the Company's commitment in running its business in order to support the Company in presenting healthy and ideal business

mendukung Perseroan menghadirkan praktik usaha yang sehat dan ideal serta mengutamakan etika dan tanggung jawab.

Poin tersebut juga dinilai penting dalam upaya Perseroan menghadirkan kinerja yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Guna mencapai keberlangsungan usaha serta memberikan manfaat dan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan didukung oleh pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang efektif dari organ-organ utama tata kelola, antara lain Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Program Peningkatan Kompetensi

Upaya peningkatan implementasi kinerja berkelanjutan juga dilakukan salah satunya melalui program peningkatan kompetensi di bidang keberlanjutan. Pihak-pihak yang bertugas dan bertanggung jawab khusus untuk hal ini oleh Perseroan diberikan fasilitas untuk peningkatan kompetensi. Dengan begitu, diharapkan dapat mendukung seluruh pihak terkait tersebut dapat bekerja optimal dalam menghadirkan implementasi kinerja berkelanjutan yang sesuai harapan.

Manajemen Risiko Kinerja Berkelanjutan

Manajemen risiko yang tepat dan efektif menjadi bagian dari langkah Perseroan dalam meraih kinerja yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting agar mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mampu menghasilkan kinerja yang optimal dalam memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Pengelolaan risiko dilakukan Perseroan dengan mendirikan tim serta menyelenggarakan forum manajemen risiko sebagai sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen transparansi Perseroan terkait pengungkapan berbagai risiko yang berdampak signifikan bagi bisnis Perseroan.

Proses identifikasi kejadian dan peristiwa berpotensi risiko dilakukan dengan menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang memiliki kerangka dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko. Guna memastikan Sistem Manajemen Risiko tersebut dapat berjalan optimal, peran dan fungsi terkait penerapan manajemen risiko secara spesifik dibagi berdasarkan pihak-pihak yang melaksanakannya.

practices that prioritise ethics and responsibility.

This point is also considered important in the Company's efforts to deliver sustainable performance in the economic, social and environmental fields. In order to achieve business sustainability and provide benefits and added value to stakeholders, GCG principles are implemented supported by the effective fulfilment of duties and responsibilities of the main organs of governance, including the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Competency Improvement Programme

Efforts to improve the implementation of sustainable performance are also carried out one of them through a competency improvement programme in the field of sustainability. The parties in charge and specifically responsible for this matter are provided with facilities for competency improvement by the Company. That way, it is expected to support all related parties to work optimally in presenting the implementation of sustainable performance as expected.

Risk Management Sustainable Performance

Appropriate and effective risk management is part of the Company's steps in achieving sustainable performance in the economic, social and environmental fields. This is considered important in order to maintain business sustainability while being able to produce optimal performance in providing added value to stakeholders.

Risk management is carried out by the Company by establishing a team and organizing a risk management forum as a source of consideration in decision making. This step is a tangible manifestation of the Company's commitment to transparency regarding the disclosure of various risks that have a significant impact on the Company's business.

The process of identifying events and potential risk events is carried out by implementing a Risk Management System that has a framework for identifying, monitoring and managing risks. To ensure that the Risk Management System can run optimally, the roles and functions related to the implementation of risk management are specifically divided based on the parties that carry it out.

Tinjauan Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2023

Untuk memastikan risiko-risiko tersebut tidak menghambat keberlangsungan usaha dan upaya Perseroan pada menciptakan kinerja berkelanjutan yang optimal pada sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perseroan memantau efektivitas dari Sistem Manajemen Risiko secara berkala. Di tahun 2023, pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko menurut Perseroan telah berlangsung baik. Sistem tersebut dipandang cukup efektif dalam memitigasi risiko yang berkaitan dengan Perseroan.

Relasi Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan

Bagi Perseroan, peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk dukungan dan kepercayaan telah membantu bisnis usaha yang dijalankan Perseroan agar dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Dukungan dan kepercayaan tersebut dapat dibangun dan dijaga melalui adanya hubungan atau relasi yang baik antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hubungan atau relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan tersebut pada akhirnya menjadi salah satu poin penting yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja berkelanjutan Perseroan yang optimal dari berbagai sisi, baik dari profit, lingkungan, hingga sosial. Perseroan menyadari hal tersebut dan berupaya untuk berfokus pada upaya-upaya membangun dan menjaga hubungan harmonis ini dengan menggunakan metode pelibatan atau pendekatan yang dijalankan dengan frekuensi yang tepat. Dengan begitu, upaya Perseroan dalam memiliki relasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai sepenuhnya dan dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Risk Management Effectiveness Review 2023

To ensure that these risks do not hamper the Company's business continuity and efforts to create optimal sustainable performance on the economic, social, and environmental sides, the Company regularly monitors the effectiveness of the Risk Management System. In 2023, the implementation of the Risk Management System according to the Company has been going well. The system is considered effective in mitigating the risks associated with the Company.

Relationship with All Stakeholders

For the Company, the participation of all stakeholders in the form of support and trust has helped the business run by the Company to continue to run and provide benefits to many parties. Such support and trust can be built and maintained through good relationships between the Company and all stakeholders.

Good relationships with all stakeholders ultimately become one of the important points that support the successful achievement of the Company's optimal sustainable performance from various sides, from profit, environment, to social. The Company realizes this and endeavors to focus on efforts to build and maintain these harmonious relationships by using engagement methods or approaches that are carried out with the right frequency. By doing so, the Company's efforts in having a harmonious relationship with all stakeholders can be fully achieved and can provide added value for both parties.

Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses bisnis Perseroan serta metode pelibatan yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan frekuensinya terangkum dalam tabel sebagai berikut: / *The list of stakeholders involved in the Company's business processes as well as the methods of engagement that have been carried out by the Company with their frequency are summarized in the following table:*

| PEMANGKU KEPENTINGAN / STAKEHOLDERS | METODE PELIBATAN/PENDEKATAN / ENGAGEMENT METHOD/APPROACH | FREKUENSI PELIBATAN/PENDEKATAN / FREQUENCY OF ENGAGEMENT/APPROACH |
|--|---|--|
| Pemegang Saham / Shareholders | <ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan / <i>Annual GMS</i> RUPS Luar Biasa / <i>Extraordinary GMS</i> Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan / <i>Annual Report and Financial Statements</i> | <ul style="list-style-type: none"> Berkala / <i>Periodic</i> Sewaktu-waktu / <i>Occasionally</i> Berkala / <i>Periodic</i> |
| Pemerintah dan Regulator / Government and Regulators | <ul style="list-style-type: none"> Penyerahan laporan yang diwajibkan / <i>Submission of required reports</i> Sosialisasi peraturan terkini maupun perubahan peraturan yang telah ada / <i>Socialization of the latest regulations and changes to existing regulations</i> | <ul style="list-style-type: none"> Sesuai ketentuan yang berlaku / <i>In accordance with applicable</i> Sewaktu-waktu / <i>Regulations</i> |
| Mitra Kerja / Business Partners | <ul style="list-style-type: none"> Kontrak kerja / <i>Work contract</i> Vendor catering / <i>Vendor catering</i> | <ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan / <i>As needed</i> |
| Masyarakat / Society | <ul style="list-style-type: none"> Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) / <i>Corporate Social Responsibility Program</i> Sarana informasi Perseroan (website, nomor telepon, alamat kantor) / <i>Company information facilities (website, telephone number, office address)</i> Sarana untuk pertanyaan terkait layanan Perseroan / <i>Means for inquiries related to the Company's services</i> Press Release / <i>Press Release</i> | <ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan / <i>As needed</i> Berkala / <i>Periodic</i> |
| Konsumen / Consumers | <ul style="list-style-type: none"> Layanan pelanggan / <i>Customer service</i> Sarana informasi Perseroan (website, nomor telepon, alamat kantor) / <i>Company's information facilities (website, phone number, office address)</i> | <ul style="list-style-type: none"> Berkala / <i>Periodic</i> |

Tantangan dan Kendala Pada Proses Implementasi Kinerja Keberlanjutan

Komitmen dan upaya Perseroan dalam menghadirkan implementasi yang optimal dari kinerja berkelanjutan tidak terlepas dari tantangan dan kendala, terutama karena implementasi kinerja berkelanjutan menjadi bagian fokus Perseroan yang masih terus dilakukan secara bertahap oleh Perseroan. Kesadaran sekaligus pemahaman seluruh insan Perseroan untuk menghadirkan secara nyata kinerja berkelanjutan yang positif di dalam proses operasional bisnis masih terus diupayakan untuk ditingkatkan secara konsisten di seluruh lini.

Masih rendahnya kesadaran sekaligus pemahaman karena implementasi kinerja berkelanjutan yang masih dalam proses awal menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi Perseroan dalam mewujudkan kinerja berkelanjutan yang sesuai harapan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen tinggi untuk secara bertahap mewujudkan implementasinya secara menyeluruh dengan berfokus pada sosialisasi dan internalisasi konsep serta prinsip kinerja berkelanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan.

Challenges and Constraints in the Sustainability Performance Implementation Process

The Company's commitment and efforts in presenting optimal implementation of sustainable performance are inseparable from challenges and obstacles, especially since the implementation of sustainable performance is part of the Company's focus which is still being carried out gradually by the Company. The awareness as well as understanding of all the Company's people to bring real positive sustainable performance in the business operational process is still being pursued to be improved consistently in all lines.

The low awareness as well as understanding due to the implementation of sustainable performance which is still in the early process is one of the significant challenges for the Company in realizing sustainable performance as expected. For this reason, the Company is highly committed to gradually realizing its comprehensive implementation by focusing on the socialization and internalization of sustainable performance concepts and principles throughout the Company's business lines.

Di samping tantangan tersebut, Perseroan menemukan tantangan dan kendala lain dalam proses implementasi kinerja berkelanjutan yang dilakukan, antara lain:

1. Dewan Direksi memastikan bahwa Direktorat Sumber Daya Manusia memahami betul arah organisasi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Transparansi dalam setiap proses penilaian yang dilakukan.
3. Menggunakan ukuran kinerja yang digunakan tidak sesuai dengan strategi, proses, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan setiap *stakeholder*.

Perkara Penting

Sampai 2023 terdapat perkara hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Sengketa Pajak

Tidak terdapat Sengketa Pajak yang dihadapi PID sepanjang tahun 2023.

Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PID

Sepanjang tahun 2023 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PID.

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PID.

Etika Perusahaan (Code of Conduct)

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG di Perusahaan, PID bertekad untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan etika tertinggi dalam kejujuran dan keadilan. Komitmen ini dirancang bukan hanya sekadar untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan hal yang sangat substansial bagi keberhasilan usaha jangka panjang.

PID telah merumuskan berbagai kebijakan menyangkut etika Perusahaan dengan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis.

Di Perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, Kode Etik dapat digunakan untuk menetapkan standar sehingga setiap kebijakan

In addition to these challenges, the Company found other challenges and obstacles in the process of implementing sustainable performance, among others:

- 1. The Board of Directors ensures that the Human Resources Directorate fully understands the direction of the organization and the organizational goals that have been set.*
- 2. Transparency in every assessment process conducted.*
- 3. Using performance measures that are not in line with the company's strategy, processes, and ability to fulfil the wants and needs of each stakeholder.*

Important Matters

Until 2023 there were legal cases, with details as follows:

Tax Dispute

There were no tax disputes faced by PID throughout 2023.

Cases Involving the Board of Commissioners and Directors of PID

Throughout 2023 there were no legal cases involving the Board of Commissioners and Directors of PID.

Internal Deviations

During 2023 there were no irregularities in the nature of fraud committed by PID employees.

Corporate Ethics (Code of Conduct)

As a commitment to the implementation of GCG in the Company, PID is determined to conduct its business activities in accordance with the highest ethics of honesty and fairness. This commitment is designed not only to comply with applicable laws and regulations, but also to earn and maintain the trust of customers, shareholders, employees, and business partners. This is very substantial for long-term business success.

PID has formulated various policies concerning the Company's ethics by striving to apply the best ethical standards in carrying out all its business activities in accordance with its vision, mission and culture through the implementation of Business Ethics.

In a Company with a large number of employees, the Code of Ethics can be used to set standards so that every policy that emerges can be standardized so as

yang muncul dapat distandarisasi sehingga mampu meningkatkan kredibilitas Perseroan.

Penyebaran Etika Bisnis

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika Perusahaan. PID senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Etika Bisnis kepada seluruh pegawai PID, mulai dari *level* operasional sampai kepada top management. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan PID senantiasa patuh terhadap Etika Bisnis.

Penegakan Etika Bisnis

PID melakukan penegakan terhadap Etika Bisnis yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Etika Bisnis. Upaya penegakan Etika Bisnis dilakukan oleh PID melalui penyediaan media pengaduan pelanggaran, penerapan reward and punishment serta pernyataan komitmen.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Perseroan telah diresmikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Kode Etik berisi prinsip-prinsip dasar yang dijadikan panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, juga karyawan Perseroan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pokok-pokok di dalam Kode Etik tersebut adalah:

1. Etika Kerja dan Lingkungan Kerja Inklusif;
2. Profesionalisme dan Integritas;
3. (K3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Menghindari Benturan Kepentingan.

Kode Etik Perseroan dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh jajaran staf dan manajemen dengan tujuan menciptakan kestabilan melalui aktivitas operasional Perusahaan yang kredibel, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Sosialisasi, Sanksi, dan Upaya Penegakan Kode Etik di Perseroan

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak menerima laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan karyawan Perseroan dan jajaran manajemen, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya Perseroan dalam mensosialisasikan Kode Etik di lingkungan kerja melalui beragam pelatihan di berbagai *level* karyawan. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh *Departemen Human Resources Development*.

to increase the Company's credibility.

Dissemination of Business Ethics

Socialisation is an important stage of the implementation of the Company's Ethical Standards. PID always conducts socialisation in the implementation of Business Ethics to all PID employees, starting from the operational level to the top management. This socialisation is intended to ensure that PID personnel always comply with the Business Ethics.

Enforcement of Business Ethics

PID enforces the Business Ethics by conducting regular monitoring of the enforcement of Business Ethics. Efforts to enforce Business Ethics are carried out by PID through the provision of media for complaints of violations, implementation of rewards and punishments and statements of commitment.

Principles of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics has been formalized by the Board of Commissioners and the Board of Directors in The Code of Ethics contains basic principles that guide members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as employees of the Company in their daily work activities. The main points in the Code of Ethics are:

- 1. Work Ethics and Inclusive Work Environment;*
- 2. Professionalism and Integrity*
- 3. Occupational Safety and Health (K3);*
- 4. Avoiding Conflict of Interest.*

The Company's Code of Ethics is implemented and adhered to by all levels of staff and management with the aim of creating stability through the Company's operational activities that are credible, non-discriminatory and accountable.

Socialization, Sanctions, and Code of Ethics Enforcement Efforts in the Company

Throughout 2023, the Company did not receive any reports of violations of the Code of Ethics by the Company's employees and management, including members of the Board of Directors and Board of Commissioners. This achievement is the result of the Company's efforts in socializing the Code of Ethics in the work environment through various trainings at various employee levels. The training was organized by the Human Resources Development Department.

Dalam menegakkan dan menjalankan Kode Etik, Perseroan menetapkan beberapa jenis sanksi untuk setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. Sanksi tersebut ialah:

1. Sanksi yang dikenakan kepada setiap pelanggar harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab menetapkan sanksi bagi para pelanggar.
3. Sanksi yang diberikan Direksi dapat berupa tindakan pembinaan, disipliner, atau tindakan preventif yang dilaksanakan atasan langsung masing-masing pelanggar.
4. Direksi dan Dewan Komisaris yang melanggar dapat diberikan sanksi oleh pemegang saham.
5. Pelanggar yang merupakan mitra bisnis atau pemangku kepentingan dapat mengacu kepada sanksi yang tertera di dalam kontrak. Jika sanksi dalam bentuk tindak pidana, dapat dilimpahkan kepada pihak yang berwajib.

Whistleblowing System

Kebijakan pengaduan pelanggaran diperlukan untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholders. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan.

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas aturan atau persyaratan internal;
2. Pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku tidak termasuk fraud atau pencurian (termasuk *insider trading*);
3. Fraud atau pencurian;
4. Membahayakan kesehatan atau keselamatan;
5. Masalah-masalah sumber daya manusia yang telah gagal untuk diselesaikan melalui prosedur pengaduan SDM;
6. Memalsukan atau menyembunyikan catatan keuangan;
7. Memalsukan atau menyembunyikan informasi manajemen *non-finansial*;
8. Perilaku tidak etis;
9. Perlakuan terhadap pelanggan yang tidak pada tempatnya;
10. Kerusakan lingkungan.

In enforcing and implementing the Code of Ethics, the Company sets several types of sanctions for any violation of the Code of Ethics. The sanctions are:

1. *Sanctions imposed on each violator must be in accordance with applicable regulations and laws.*
2. *The Board of Directors is the party responsible for determining sanctions for violators.*
3. *Sanctions given by the Board of Directors can be in the form of coaching, disciplinary, or preventive actions carried out by the direct supervisor of each violator.*
4. *The Board of Directors and Board of Commissioners who violate may be sanctioned by the shareholders.*
5. *Violators who are business partners or stakeholders may refer to the sanctions stated in the contract. If the sanction is in the form of a criminal offence, it can be delegated to the authorities.*

Whistleblowing System

Whistleblowing policy is required to regulate the settlement of Whistleblowing Complaints for stakeholders. The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for whistleblowers to submit information about violations that are indicated to have occurred within a Company.

Types of Complaints

The types of complaints that can be submitted through the Whistleblowing System mechanism are as follows:

1. *Violation of internal rules or requirements;*
2. *Violation of applicable laws or regulations excluding fraud or theft (including insider trading);*
3. *Fraud or theft;*
4. *Harm to health or safety;*
5. *Human resource issues that have failed to be resolved through HR grievance procedures;*
6. *Falsifying or concealing financial records;*
7. *Falsifying or concealing non-financial management information;*
8. *Unethical behavior;*
9. *Inappropriate treatment of customers;*
10. *Damage to the environment.*

Mekanisme Sistem Pengaduan

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait dengan kerugian perusahaan secara finansial maupun reputasi perusahaan yang bersifat negatif. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui *email* maupun surat resmi.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan Perusahaan harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan GCG. Pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Demi memberikan kemudahan bagi seluruh karyawan dalam memproses laporan pelanggaran, Perusahaan menyediakan ragam fasilitas pelaporan berupa kotak saran, formulir isian, dan surel. Setiap laporan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara baik.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan berkewajiban untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan para pelapor dari ancaman baik verbal maupun non-verbal yang dapat mereka terima. Perlindungan tersebut juga diterima oleh para pengelola sistem pelaporan, tim investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi mengenai pengaduan tersebut.

Terkait dengan bentuk pelaporan, para pelapor bisa memilih bagaimana identitas mereka akan diungkap, yakni pengungkapan penuh: pelapor mengungkapkan identitasnya kepada Perseroan, pengungkapan sebagian: pelapor mengungkapkan identitasnya hanya kepada pihak independen, dan anonimitas: Perseroan tidak mengungkapkan identitasnya kepada pihak independen maupun kepada Perseroan.

Grievance System Mechanism

The Whistleblower Complaint Policy is intended to manage and minimize risks that may occur, among others, related to financial losses and negative company reputation. Complaints of violations can be submitted verbally or in writing, via email or official letter.

Complaints from third parties and/or from Company employees must be placed within the framework of improving GCG. Complaints must be submitted by the whistleblower with a sense of responsibility and are not slanderous in nature that can defame a person's good name or reputation.

How to Submit an Offence Report

Complaints submitted must fulfil the conditions that the complaint is submitted in writing, contains the identity of the reporter (the confidentiality of the reporter's identity will be maintained), contains information that provides clues about the problem as described in the section above, Information must be supported by sufficient and reliable evidence as initial data to conduct further examination.

In order to provide convenience for all employees in processing reports of violations, the Company provides a variety of reporting facilities in the form of suggestion boxes, forms, and emails. Every incoming report must be accountable and properly submitted.

Whistleblower Protection

The Company is obliged to create a sense of security for witnesses and whistleblowers from verbal and non-verbal threats that they may receive. Such protection is also received by the managers of the reporting system, the investigation team, as well as those who provide information about the complaint.

Regarding the form of reporting, whistleblowers can choose how their identity will be disclosed, namely full disclosure: the whistleblower discloses their identity to the Company, partial disclosure: the whistleblower discloses their identity only to independent parties, and anonymity: The Company does not disclose his/her identity to the independent party nor to the Company.

Pihak Pengelola dan Penanganan Pengaduan

Pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan memitigasi pengaduan yang masuk adalah Unit Audit Internal Perseroan. Pihak tersebut akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan rangkaian prosedur penanganan sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran yang khusus dilakukan anggota Direksi akan diverifikasi kebenarannya oleh Dewan Komisaris.
2. Jika karyawan terbukti melanggar, Direksi akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tersebut berdasarkan masukan dari tim investigasi. Jika pelanggar merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, pemegang saham akan menetapkan sanksi berdasarkan mekanisme RUPS.

Laporan Pengaduan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan menerima beberapa laporan pelanggaran di dalam lingkungan kerja Perseroan. Informasi mengenai hal tersebut dijabarkan melalui tabel berikut ini:

| JUMLAH ADUAN / NUMBER OF COMPLAINTS | SATUAN ADUAN / COMPLAINT UNIT | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | PROSES / PROCESS | SELESAI / FINISH |
| Tidak ada / None | Tidak ada / None | Tidak ada / None |

Kebijakan Anti Korupsi

Perseroan serius memenuhi aspek-aspek GCG yaitu membangun Perusahaan yang akuntabel dan bersih dari segala praktik korupsi yang dapat berdampak pada keberlanjutan Perseroan. Kebijakan Anti Korupsi Perseroan telah sesuai dengan Kode Etik Perseroan yang memaparkan larangan bagi jajaran manajemen, karyawan, dan mitra dalam menerima atau memberikan tip, suap, dan kickback.

Program Anti Korupsi

Perseroan memiliki beberapa program anti korupsi sebagai wujud keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan Perseroan. Program-program tersebut di antaranya melaksanakan program audit finansial secara internal yang dilakukan berkala untuk mencegah adanya tindakan korupsi. Selain itu, Perseroan juga mengaktifkan mekanisme pelaporan pelanggaran dalam bentuk *Whistleblowing System* untuk menciptakan fungsi pengawasan saling-silang terkait tindakan ilegal, khususnya korupsi di dalam Perseroan.

Complaint Management and Handling Party

The party appointed to manage and mitigate incoming complaints is the Company's Internal Audit Unit. The party will follow up on each incoming report with a series of handling procedures as follows:

1. *Reports of violations specifically committed by members of the Board of Directors will be verified by the Board of Commissioners.*
2. *If the employee is proven to be in violation, the Board of Directors will impose sanctions on the violator based on input from the investigation team. If the violator is a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, the shareholders will determine the sanction based on the GMS mechanism.*

Complaint Report in 2023

In 2023, the Company received several reports of violations within the Company's work environment. Information regarding this is described in the following table:

Anti-Corruption Policy

The Company is serious about fulfilling the GCG aspects of building a Company that is accountable and clean from any corrupt practices that may impact the sustainability of the Company. The Company's Anti-Corruption Policy is in accordance with the Company's Code of Conduct which outlines the prohibition for management, employees, and partners in accepting or giving tips, bribes, and kickbacks.

Anti-Corruption Programs

The Company has several anti-corruption programs as a form of seriousness in eradicating corruption within the Company. These programs include implementing an internal financial audit program that is conducted periodically to prevent acts of corruption. In addition, the Company also activates a violation reporting mechanism in the form of a Whistleblowing System to create a cross-supervision function related to illegal acts, especially corruption within the Company.

Sosialisasi Program Anti Korupsi

Demi memastikan informasi mengenai Kebijakan Anti Korupsi dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal oleh seluruh jajaran karyawan, manajemen, hingga level Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi program anti korupsi melalui berbagai cara, di antaranya melalui kegiatan penyuluhan mengenai tindakan anti korupsi, baik melibatkan pihak internal dan eksternal. Perseroan juga melaksanakan kegiatan penyebaran informasi terkait korupsi melalui newsletter, selebaran, dan poster.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

PID tidak terlibat didalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan politik. Sedangkan kepedulian terhadap masalah sosial merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab PID kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap terdapat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada laporan ini.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Selama tahun 2023 tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PID, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum mempunyai Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah saham yang dialokasikan, jangka waktu pelaksanaannya, hingga kriteria untuk menentukan karyawan yang berhak belum tersedia.

Socialization of Anti-Corruption Program

In order to ensure that information on the Anti-Corruption Policy can be received and implemented optimally by all levels of employees, management, up to the level of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Company continuously socializes the anti-corruption program through various means, including through counseling activities on anti-corruption actions, both involving internal and external parties. The Company also disseminates information related to corruption through newsletters, flyers, and posters.

Funding for Social and Political Activities

PID is not involved in political activities and does not provide donations or assistance for political purposes. Meanwhile, concern for social issues is an important part of the PID's duties and responsibilities to the community. A more complete description is contained in the Corporate Social Responsibility section of this report.

Conflict of Interest

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the Company's economic interests and the personal economic interests of the Directors, Board of Commissioners and Shareholders. During 2023 there were no transactions that had a conflict of interest in PID, each transaction was carried out in accordance with applicable regulations and always paid attention to GCG principles.

Management and Employee Share Ownership Program

Until the end of 2023, the Company does not have a Management and Employee Share Ownership Program. Thus, information on the number of shares allocated, the period of implementation, and the criteria for determining eligible employees is not yet available.

Praktik Bad Corporate Governance

Bad Corporate Governance Practices

PID memiliki komitmen kuat dalam penerapan GCG dan sedapat mungkin menghindari praktik-praktik Bad Corporate Governance. Terkait dengan praktik-praktik Bad Corporate Governance, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

PID has a strong commitment to the implementation of GCG and avoids bad corporate governance practices as much as possible. Regarding Bad Corporate Governance practices, it can be seen from the following table:

| NO. | PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE / BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES | PRAKTIK DI PID / PRACTICE IN PID |
|-----|--|--|
| 1 | Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan / <i>Reports of the company polluting the environment</i> | PID tidak pernah mendapatkan cap/predikat sebagai perusahaan pencemar lingkungan dari instansi manapun. / <i>PID has never received a stamp/predicate as an environmental polluting company from any agency.</i> |
| 2 | Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan / <i>Important cases that are being faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who are currently serving that are not disclosed in the Annual Report</i> | Seluruh perkara penting telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. / <i>All important cases have been disclosed in this Annual Report.</i> |
| 3 | Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan / <i>Non-compliance in fulfilling tax obligations</i> | PID telah memenuhi semua ketentuan terkait perpajakan. / <i>PID has complied with all provisions related to taxation.</i> |
| 4 | Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK / <i>Discrepancies in the presentation of financial statements with SAKs</i> | PID telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. / <i>PID has presented financial statements in accordance with the provisions of the applicable Financial Accounting Standards (SAK).</i> |

Rencana Pengembangan GCG Tahun 2023

GCG Development Plan for 2023

PID berkomitmen untuk terus melanjutkan implementasi GCG secara konsisten.

PID is committed to continuing the implementation of GCG consistently





6

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL / SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar dan juga mengajak karyawan untuk dapat secara aktif bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

One form of the Company's commitment to support sustainable development is by carrying out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities that aim to provide sustainable benefits to the surrounding community and also invite employees to be able to actively jointly create added value for the welfare of the community and its environment.

Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial / Commitment to Social Responsibility

Salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjalankan menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar dan juga mengajak karyawan untuk dapat secara aktif bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam menjalankan program CSR, Perusahaan mengacu pada konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu tentang keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Program tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan PID direalisasikan melalui dua kelompok kegiatan utama. Kebijakan pelaksanaan kegiatan dari sisi regulasi karena PID berbadan hukum Perusahaan Terbatas yang terikat dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan antara lain:

1. UU RI No. 40 Tahun 2007, Bab V, Pasal 74 ayat (1).
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk itu, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang antara lain berisikan:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bagian dari misi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju dan tumbuh bersama.
2. Perusahaan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan mengingat keberhasilan Perusahaan tidak dapat dilepaskan

One manifestation of the Company's commitment to support sustainable development is by carrying out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities that aim to provide sustainable benefits to the surrounding community and also invite employees to be able to actively jointly create added value for the welfare of the community and its environment.

In implementing CSR programs, the Company refers to the concept of Sustainable Development, which is about the balance between business actors, stakeholders, and regulators. This harmony can only be realized through a strong commitment from all parties, especially business entities that inevitably rely on profit orientation and tend to ignore the long-term impact of their activities.

Corporate social responsibility programs within PID are realized through two main groups of activities. Policy on the implementation of activities from a regulatory perspective because PID is a Limited Liability Company bound by Law No. 40 of 2007.

Policies in the implementation of the corporate social responsibility programmed include:

1. *Indonesian Law No. 40 Year 2007, Chapter V, Article 74 paragraph (1).*
2. *Indonesian Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*
3. *Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 on Labor.*
4. *Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

For this reason, the Company has developed a General Policy on Corporate Social Responsibility which contains, among others:

1. *Corporate Social Responsibility (CSR) is part of the Company's mission to provide added value to stakeholders in order to create good synergy, progress and grow together.*
2. *The Company has legal, social, moral and ethical obligations and responsibilities to respect the interests of the surrounding community and the environment considering that the success of the Company cannot be separated from harmonious,*

dari hubungan harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.

3. Perusahaan harus mewujudkan kepedulian sosial dan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan dan lingkungan terutama di sekitar pusat operasi dan penunjangnya.
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Metode dan Lingkup *Due Diligence* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Perusahaan sangat menyadari, aktivitas operasionalnya dapat memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, PID senantiasa menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, Perusahaan telah memiliki *due diligence* dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya antara lain:

Hak Asasi Manusia

Perusahaan memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perusahaan memiliki kebijakan dalam penegakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan karyawan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan memberikan kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia.

Terkait dengan ketenagakerjaan, PID melakukan survei opini karyawan dalam pemantauan efektivitas penerapan tanggung jawabnya kepada karyawan. Perusahaan juga melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan.

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*. Perusahaan memberikan suatu media untuk menangani keluhan pada *stakeholder* yaitu melalui surat elektronik atau berupa laporan *daring* melalui *platform* situs Perseroan.

Operasi Yang Adil

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur operasi yang adil diantaranya kebijakan *whistleblowing system* (WBS) serta kebijakan anti

dynamic and mutually beneficial relationships with the surrounding community.

3. *The Company must realize social and environmental awareness and be able to make a real contribution to the development and empowerment of the community around the Company and the environment, especially around its operational and support centers.*
4. *Social and environmental responsibility is an obligation of the Company that is budgeted and calculated as a cost of the Company whose implementation is carried out with due regard to propriety and fairness.*

Method and Scope of *Due Diligence* on Social, Economic and Environmental Impacts of the Company's Activities

The Company is well aware that its operational activities can have an impact, both directly and indirectly on society and the environment. For this reason, PID always reviews social, economic and environmental impacts. This aims to provide positive impacts and reduce negative impacts in its business activities. Therefore, the Company has due diligence of its corporate social responsibility activities, among others:

Human Rights

The Company pays great attention to the fulfillment of human rights. The Company has policies in upholding human rights relating to employees and other stakeholders. The Company provides equality and equal employment opportunities for all employees in corporate social responsibility related to human rights.

Related to employment, PID conducts employee opinion surveys in monitoring the effectiveness of the implementation of its responsibilities to employees. The Company also conducts customer satisfaction surveys to measure the level of customer satisfaction.

The Company always maintains good relations with stakeholders. The Company provides a medium to handle complaints to stakeholders, namely through electronic mail or in the form of online reports through the Company's website platform.

Fair Operation

The Company has policies that regulate fair operations, including a whistleblowing system (WBS) policy and anti-corruption and gratification policies.

korupsi dan gratifikasi. Dalam *whistleblowing system*, terdapat mekanisme perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor. Perusahaan giat melakukan gerakan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Lingkungan Hidup

PID memiliki kebijakan di bidang K3 dan Lingkungan Hidup. PID memberikan perhatian yang sangat besar terkait upaya-upaya pelestarian lingkungan yaitu dengan menerapkan praktik *zero accident* dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, PID memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. Pengelolaan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) di PID mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Mekanisme Pemantauan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, setiap tahunnya Perusahaan melakukan survei opini karyawan. Hasil survei ini dapat dijadikan acuan bagi Perusahaan untuk meningkatkan komitmen karyawan secara berkesinambungan.

Konsumen

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada pelanggan, PID memiliki kebijakan terkait produk yang dihasilkan. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan adalah pemangku kepentingan yang memegang peranan penting bagi keberlanjutan usaha. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen mutu terpadu yang merupakan hasil dari serangkaian kegiatan proses produksi yang sesuai dengan standar internasional yang dilakukan pada setiap kegiatan produksi maupun distribusi. Prosedur ini secara konsisten diimplementasikan untuk menjaga kualitas produk.

In the whistleblowing system, there is a mechanism to protect the confidentiality of the whistleblower's identity. The Company is active in the movement to eradicate Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices.

Environment

PID has policies on OHS and Environment. PID pays great attention to environmental conservation efforts by implementing zero accident practices and compliance with applicable rules and regulations.

Employment, Health, and Safety

In the implementation of social responsibility related to employment, PID gives high attention and commitment in terms of gender equality and employment opportunities, job training to improve employee professionalism, a commensurate reward system to occupational health and safety for all employees. The management of Human Resources (HR) aspects in PID refers to the applicable laws and regulations, namely Law No. 13 of 2013 concerning Manpower, Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Law No. 23 of 1992 concerning Health.

Monitoring Mechanism

In the implementation of social responsibility related to employment, every year the Company conducts an employee opinion survey. The results of this survey can be used as a reference for the Company to improve employee commitment on an ongoing basis.

Consumer

As a form of social responsibility to customers, PID has policies related to the products produced. The Company realizes that customers are stakeholders who play an important role in business sustainability. Therefore, the Company always pays attention to the quality of products produced in order to achieve customer satisfaction.

The Company implements an integrated quality management system which is the result of a series of production process activities in accordance with international standards carried out in every production and distribution activity. This procedure is consistently implemented to maintain product quality.

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terkait Hak
Asasi Manusia /
*Corporate Social
Responsibility Related to
Human Rights*

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar bagi setiap manusia. PID berkomitmen untuk memenuhi setiap ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam aktivitas operasionalnya. Komitmen pemenuhan terhadap HAM tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan karyawan Perseroan, tapi juga terhadap pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, PID menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar panduan.

PID meyakini, komitmen Perusahaan dalam memenuhi ketentuan terkait HAM juga akan menjadi daya tarik bagi calon pekerja dengan talenta terbaik untuk bergabung bersama PID untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan bisnisnya, PID menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dari seluruh karyawannya dijunjung dengan tinggi.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab PID di bidang HAM terbilang cukup luas, karena tidak hanya menyangkut pemenuhan HAM bagi *stakeholder internal*, dalam hal ini adalah karyawan Perseroan, tapi juga dengan masyarakat umum, khususnya yang berada di sekitar lokasi bisnis Perseroan.

Untuk itu, PID telah merumuskan berbagai ketentuan terkait tanggung jawab di bidang HAM, baik untuk karyawan maupun bagi masyarakat sekitar perusahaan. Ketentuan HAM terkait karyawan sebagian besar dituangkan dalam Peraturan Perusahaan, sedangkan ketentuan HAM terkait masyarakat umum dituangkan dalam bentuk Peraturan Perusahaan.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

PID berkomitmen untuk menjalankan aktivitas operasional di atas ketentuan HAM yang berlaku. Untuk itu, Perusahaan menyusun tata laksana hubungan industrial dan hubungan kemasyarakatan yang baik.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait HAM di PID dilaksanakan melalui:

Social Responsibility Commitment and Policy Company in the Field of Human Rights

Human Rights (HAM) is a basic right for every human being. PID is committed to fulfill every provision related to human rights in its operational activities. The commitment to fulfill human rights is not only related to the Company's employees, but also to other stakeholders. In this regard, PID takes the Law of the Republic of Indonesia No. 39 Year 1999 on Human Rights as the basis of guidance.

PID believes that the Company's commitment to fulfill the provisions related to human rights will also be an attraction for prospective workers with the best talents to join PID to achieve common goals. In conducting its business, PID ensures that the human rights of all its employees are upheld.

Scope of Corporate Social Responsibility in the Human Rights Sector

The scope of PID's responsibility in the field of human rights is quite broad, because it does not only concern the fulfillment of human rights for internal stakeholders, in this case the Company's employees, but also with the general public, especially those around the Company's business location.

For this reason, PID has formulated various provisions related to responsibilities in the field of human rights, both for employees and for the community around the company. Human rights provisions related to employees are mostly outlined in the Company Regulations, while human rights provisions related to the general public are outlined in the form of Company Regulations.

Social Responsibility Planning for Human Rights

PID is committed to carrying out operational activities above the applicable human rights provisions. To that end, the Company develops good industrial and community relations procedures.

Implementation of Social Responsibility Initiatives Related to Human Rights

The implementation of corporate social responsibility related to human rights in PID is carried out through:

Kebebasan Berserikat

PID menjamin hak pekerjaannya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Perusahaan juga mendukung kegiatan Pekerja dalam berserikat dengan RENCANA pembentukan Serikat Pekerja (SP). Kebebasan berserikat bagi karyawan merefleksikan kepatuhan Perusahaan atas Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan semua karyawan untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar pekerja dan Perusahaan guna menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak.

Tenaga Kerja Anak

PID memastikan bahwa Perusahaan terbebas dari praktik penggunaan tenaga kerja anak atau di bawah umur. Tidak hanya itu, PID juga memastikan bahwa mitra kerja Perusahaan juga menerapkan aturan yang sama.

Kerja Paksa

PID memastikan bahwa Perusahaan terbebas dari praktik kerja paksa. Perusahaan telah menetapkan waktu kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Ketentuan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Perusahaan dengan melaksanakan sistem kerja giliran (*shift work*). Salah satu prosedur penyeleksian mitra kerja adalah dengan penandatanganan Pakta Integritas bahwa usahanya tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku termasuk di dalamnya adalah anti kerja paksa.

Kesempatan Kerja Bagi Kaum Disabilitas

PID memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas untuk dapat bekerja dengan hak yang sama seperti karyawan lainnya.

Pelatihan HAM Bagi Satuan Pengamanan

PID membekali anggota Satuan Pengamanan dengan pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan ini menitikberatkan pada praktik pengamanan lapangan sesuai dengan koridor Hak Asasi Manusia. Selama periode pelaporan, tidak ada kasus pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan diskriminasi di lingkungan Perseroan.

Penghormatan Kepada Hak-Hak Adat Masyarakat Setempat

PID berkomitmen sejak dimulainya proses bisnis. Secara rutin kami melakukan komunikasi dengan masyarakat di wilayah operasional Perseroan.

Freedom of Association

PID guarantees its workers' rights to organize, assemble, and express opinions. The Company also supports Workers' activities in associating with the PLAN for the formation of Workers' Union (SP). Freedom of association for employees reflects the Company's compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and ILO Convention 87 which guarantees the freedom of all employees to join a professionally managed workers' organization as a means of liaison between workers and the Company in order to create a harmonious relationship that is mutually beneficial to all parties.

Child Labor

PID ensures that the Company is free from the practice of using child or underage labor. Not only that, PID also ensures that the Company's partners also apply the same rules.

Forced Labor

PID ensures that the Company is free from forced labor practices. The Company has set working hours in accordance with applicable labor laws and regulations so that employees have sufficient rest time. The provisions are also contained in the Company Regulations by implementing a shift work system. One of the procedures for selecting partners is by signing an Integrity Pact that the business does not conflict with applicable regulations, including anti-forced labor.

Employment Opportunities for People with Disabilities

PID provides opportunities for people with disabilities to work with the same rights as other employees.

Human Rights Training for Security Force

PID equips members of the Security Force with training and certification. This training focuses on field security practices in accordance with the corridors of Human Rights. During the reporting period, there were no cases of violation of human values and discrimination within the Company.

Respect for the Customary Rights of Local Communities

PID is committed since the start of our business process to regularly communicate with communities in the Company's operational areas. As a way for the

Sebagai cara Perusahaan mencari kesepahaman dan keharmonisan. Dengan berbagai pendekatan yang persuasif dan komunikatif, selama tahun 2023 tidak terjadi perselisihan antara Perusahaan dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat terkait kegiatan operasional, perlindungan atas budaya lokal serta aspek lainnya.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

PID telah mendukung, dan menghormati perlindungan atas Hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis Perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, namun saat ini belum ada penghargaan yang diterima Perusahaan terkait inisiatif tersebut.

Company to seek understanding and harmony. With various persuasive and communicative approaches, during 2023 there were no disputes between the Company and local communities and indigenous peoples related to operational activities, protection of local culture and other aspects.

Human Rights Social Responsibility Initiative Achievements and Awards

PID has supported and respected the protection of human rights as stipulated in the Company Regulations and ensured that all of the Company's business activities are not involved in human rights violations, but currently there are no awards received by the Company related to these initiatives.

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terkait
Operasi yang Adil /
*Corporate Social
Responsibility Related to
Fair Operations*

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

PID berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai landasan utama dalam pengembangan usaha. Perusahaan menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh dalam setiap aktivitas operasional Perseroan, salah satunya dengan mengembangkan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Hal tersebut dilandasi atas penerapan prinsip GCG yang telah berjalan dengan baik di Perusahaan dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, PID berkomitmen untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

Ruang Lingkup penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di PID meliputi penerapan *Code of Conduct*, kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.

Ruang Lingkup penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di PID meliputi penerapan *Code of Conduct*, kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

PID senantiasa menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Upaya Mempromosikan Rantai Nilai Operasi yang Adil

Dalam upaya implementasi praktik operasi yang adil, Perusahaan secara berkala melakukan sosialisasi terkait penerapan kode etik. Perusahaan melakukan sosialisasi baik secara langsung dalam pelatihan dan *sharing* internal maupun melalui *online* oleh karyawan.

Commitment and Corporate Social Responsibility Policy for Fair Operations

PID is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the main foundation in business development. The Company applies GCG principles thoroughly in every operational activity of the Company, one of which is by developing clean business practices and avoiding all forms of fraud. This is based on the implementation of GCG principles that have been running well in the Company and continue to improve its quality.

In carrying out its business processes, PID is committed to maintaining healthy business competition in accordance with applicable laws and regulations and upholding the principles of efficient, effective, competitive, transparent, fair and reasonable and accountable.

Scope of Social Responsibility for Fair Operations

The scope of implementation of social responsibility related to fair operations in PID includes the implementation of Code of Conduct, anti-corruption policies and gratification control, procurement of goods and services, as well as fair business competition and antitrust.

The scope of implementation of social responsibility related to fair operations in PID includes the implementation of the Code of Conduct, anti-corruption and gratification control policies, procurement of goods and services, and fair business competition and antitrust.

Social Responsibility Planning for Fair Operation

PID always ensures the implementation of all fair operation practice policies. Any violations that occur will be strictly sanctioned in accordance with Company policies and applicable regulations. Efforts to Promote Fair Operation Value Chain

Efforts to Promote Fair Operations Value Chain

In an effort to implement fair operating practices, the Company periodically conducts socialization related to the implementation of the code of ethics. The Company conducts socialization both directly in internal training and sharing and online by employees.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

Kode Etik

PID telah menetapkan norma dan asas yang diterima dan disepakati bersama sebagai landasan tingkah laku dalam menjalankan usaha, yang lazim disebut sebagai Kode Etik (*Code of Conduct*). Pembahasan lebih detail terkait Kode Etik dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan ini.

Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

PID selalu sejalan dengan program pemerintah yang tengah giat melakukan gerakan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perusahaan berkomitmen tinggi untuk mendukung gerakan tersebut melalui realisasi beragam program. Seperti misalnya pelatihan karyawan yang bertanggung jawab terhadap peran pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, perbaikan kebijakan operasional, maupun penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Diimplementasikan secara konsisten sesuai aturan berlaku.
- Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparansi, adil, dan wajar serta akuntabel.
- Senantiasa menghindari transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi oleh segenap karyawan Perusahaan dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Persaingan Usaha Sehat dan Anti Monopoli

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan panduan utama bagi PID dalam menjalankan usahanya. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan daya saing dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat agar dapat memenangkan persaingan.
- Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Perseroan, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Implementation of Social Responsibility Initiatives for Fair Operations

Code of Conduct

PID has established norms and principles that are accepted and agreed upon as the basis for behavior in conducting business, which is commonly referred to as the Code of Conduct. A more detailed discussion of the Code of Conduct can be found in the Corporate Governance section of this Report.

Anti-Corruption and Gratification Control

PID is always in line with the government's program to eradicate Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The Company is highly committed to supporting the movement through the realization of various programs. For example, training of employees responsible for supervisory roles, improvement of procurement systems and procedures, improvement of operational policies, and implementation of a whistleblowing system.

Transparent Procurement of Goods and Services

The Company has a policy on the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stipulated in the Decree of the Board of Directors. The goods and services procurement system developed by the Company is implemented by taking into account the following:

- *Implemented consistently in accordance with applicable regulations.*
- *Periodically reviewed regarding the adequacy of the existing procurement system in order to fulfill the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, and fairness and accountability.*
- *Always avoid conflict of interest transactions and affiliated transactions by all Company employees in the procurement system.*

Fair Competition and Antitrust

- *Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is the main guide for PID in running its business. The Company strives to continuously improve its competitiveness and implement appropriate business development strategies in order to win the competition.*
- *Throughout 2023, there were no reports of unfair business competition violations received by the Company, especially from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).*



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terkait dengan
Lingkungan Hidup /
*Corporate Social
Responsibility Related to
the Environment*

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

PID sangat meyakini bahwa sebuah perusahaan dan setiap bisnisnya tidak akan berkelanjutan jika tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, baik kondisi alam dan sosial.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

1. Melakukan program-program inovasi lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya dengan melibatkan *stakeholder* (*regulator* maupun masyarakat) melalui:
 1. Efisiensi energi;
 2. Pengurangan emisi konvensional dan emisi gas rumah kaca;
 3. 3R Limbah Non-B3/sampah, melalui pengembangan program Perusahaan Sampah dan pengelolaan lanjutan;
 4. Pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
 5. Efisiensi air dan pengurangan beban pencemar.
2. Melakukan inovasi moda transportasi dan teknologi yang lebih ramah lingkungan,
3. Meningkatkan indeks keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi flora dan fauna,
4. Partisipasi aktif Perusahaan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah operasi bisnis .

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, yakni Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. Beberapa program peduli lingkungan telah dilaksanakan Perusahaan PID. Inisiatif yang dilakukan Perusahaan PID terkait penghematan energi yaitu dengan melakukan pengelolaan dan penghematan energi listrik serta pengurangan emisi yang dilakukan pada seluruh wilayah operasional Perusahaan PID.

Sepanjang tahun 2023, PID mampu mengurangi penggunaan energi. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi, dinding gedung yang keseluruhan menggunakan kaca membuat sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien. Selanjutnya, Perusahaan PID juga

Commitment and Policy on Corporate Social Responsibility for the Environment

PID strongly believes that a company and every business will not be sustainable if it does not have responsibility for its environment, both natural and social conditions.

Target/Planned Activities of Corporate Social Responsibility for the Environment

1. Conduct environmental innovation programs in resource utilization with the involvement of stakeholders (*regulators* and the community) through:
 1. Energy efficiency;
 2. Reduction of conventional emissions and greenhouse gas emissions;
 3. 3R Non-B3 waste/waste, through the development of Waste Company program and advanced management;
 4. Reduction and utilization of hazardous waste;
 5. Water efficiency and pollutant load reduction.
2. Innovate more environmentally friendly modes of transportation and technology,
3. Increasing biodiversity index through flora and fauna conservation activities,
4. Active participation of the Company in the mitigation of environmental damage that occurs in the area of business operations.

Environmental Activities Related to the Company's Operational Activities

In accordance with Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) which is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. Several environmental care programs have been implemented by PID Company. Initiatives carried out by PID Company related to energy savings are by managing and saving electrical energy and reducing emissions carried out in all operational areas of PID Company.

Throughout 2023, PID was able to reduce energy use. This is done by using high-efficiency electrical equipment, building walls that all use glass to make lighting systems that consume about 20 percent of electricity in office buildings can be made efficient. Furthermore, PID Company also conducts air conditioning and activates elevators only when in

melakukan pengkondisian udara dan mengaktifkan lift hanya saat digunakan. Melalui implementasi hemat energi pada desain dan operasional bangunan Perusahaan PID, pengelola bangunan akan meraih keuntungan finansial besar, ikut membantu mengurangi emisi GRK. Dari aspek lingkungan hidup, menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil sehingga mengurangi emisi GRK penyebab pemanasan global.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan

Sebagai industri yang bergerak di bidang logistik, material utama yang digunakan Perusahaan adalah perlengkapan kantor. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya awal penerapan keberlanjutan Perusahaan PID menerapkan kebijakan *green office* yang mengaplikasikan gaya hidup ramah lingkungan. Sebagai wujud kebijakan tersebut, Perusahaan baru melakukan beberapa upaya seperti mengganti lampu penerangan kantor dengan lampu LED yang hemat energi, menggunakan pendingin kantor (AC) dengan *freon R-32* yang lebih ramah lingkungan, mengganti penggunaan botol minum kemasan sekali pakai pada saat *meeting* dengan penyajian minuman *self-service*, dan mendorong penggunaan *tumbler* di lingkungan kantor. Perusahaan juga melakukan optimalisasi penggunaan *email*, *internal website*, *e-statement*, *e-billing* dan sarana *multifunction printer* untuk *scanning* dan *faks*. Sementara untuk kebutuhan pencetakan, Perusahaan memanfaatkan kertas bekas untuk memo, *drafting*, dan *note* konsep.

use. Through the implementation of energy-saving measures in the design and operation of PID Company's buildings, building managers will gain substantial financial benefits, helping to reduce GHG emissions. From an environmental aspect, saving energy means reducing the burning of fossil fuels, thereby reducing GHG emissions that cause global warming.

Use of Environmentally Friendly Materials

As an industry engaged in logistics, the main material used by the Company is office supplies. Therefore, as an initial effort to implement sustainability, PID Company implements a green office policy that applies an environmentally friendly lifestyle. As a manifestation of the policy, the Company has just made several efforts such as replacing office lighting with energy-efficient LED lights, using office cooling (AC) with R-32 freon which is more environmentally friendly, replacing the use of disposable drinking bottles during meetings with self-service beverage serving, and encouraging the use of tumblers in the office environment. The Company also optimizes the use of email, internal website, e-statement, e-billing and multifunction printer facilities for scanning and faxing. As for printing needs, the Company utilizes used paper for memos, drafting, and concept notes.

Tabel Konsumsi Energi dan Air / Energy and Water Consumption Table

| SUMBER ENERGI / ENERGY SOURCE | PERUNTUKAN / USE | SATUAN / SOURCE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| KONSUMSI ENERGI DI DALAM PERUSAHAAN (302-1) / ENERGY CONSUMPTION WITHIN THE COMPANY (302-2) | | | | | | |
| Bahan Bakar / <i>Fuel</i> | Transportasi / <i>Transportation</i> | IDR | 104,415,031 | 1.846.096.864 | 1.750.174.739 | 1.852.963.405 |

Biaya Dan Program Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 biaya yang dikeluarkan Perusahaan PID terkait lingkungan hidup meningkat dari tahun sebelumnya.

Gedung Perusahaan PID Hemat Energi

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. Energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi signifikan. Dengan menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi, dinding gedung yang keseluruhan menggunakan kaca membuat sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien.

Begitu juga, sistem pengkondisi udara (AC) yang biasanya mendominasi konsumsi listrik di gedung perkantoran, disesuaikan dengan karakteristik gedung sehingga lebih hemat energi. Hal sama dapat diterapkan pada motor listrik (pada eskalator dan lift) yang hanya aktif ketika digunakan.

Saluran Pengaduan Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

PID menyediakan saluran bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi terkait masalah lingkungan secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Untuk menjaga standar kualitas terhadap produk yang dihasilkan, PID telah melengkapi dirinya dengan sertifikasi yang berlaku secara internasional, yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 diakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Manajemen SGS dan secara periodik dilakukan audit dan resertifikasi agar tetap sesuai dengan standar internasional.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen mutu di seluruh rantai proses bisnisnya. Manajemen mutu tersebut dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur agar dapat diimplementasikan secara konsisten guna menjaga kualitas produk. Selanjutnya Perusahaan terus mengembangkan system manajemen mutu ini agar tetap bisa menjawab kebutuhan dan dinamika pasar.

Environmental Costs and Programs

In 2023, the costs incurred by PID Company related to the environment increased from the previous year.

Energy Efficient PID Company Building

In the midst of this global energy crisis, where energy supplies are increasingly scarce and expensive, building a large building means increasing energy consumption in large quantities as well. The limited energy needs to be shared wisely by applying energy-efficient building principles.

An energy-efficient building is a building that uses less energy without reducing the quality of energy services. About 45% of primary energy in Indonesia is consumed by buildings, making the building sector responsible for a significant proportion of greenhouse gas (GHG) emissions. By using high-efficiency electrical equipment, the building's all-glass walls make the lighting system that consumes about 20 percent of electricity in office buildings efficient.

Likewise, the air conditioning (AC) system, which usually dominates electricity consumption in office buildings, is adapted to the characteristics of the building so that it is more energy efficient. The same can be applied to electric motors (on escalators and elevators) that are only active when used.

Environmental Social Responsibility Complaint Channel

PID provides a channel for stakeholders to submit information related to environmental issues verbally or in writing from any complainant to the responsible agency, regarding alleged environmental pollution and/or destruction. Complaints can be submitted orally and/or in writing.

To maintain the quality standards of the products produced, PID has equipped itself with an internationally applicable certification, namely the ISO 9001: 2008 Quality Management System accredited by the SGS Management Certification Institute and periodically audited and recertified to remain in accordance with international standards.

The Company implements a quality management system throughout its business process chain. The quality management is outlined in Standard Operations and Procedures so that it can be implemented consistently to maintain product quality. Furthermore, the Company continues to develop this quality management system so that it can still answer the needs and dynamics of the market.

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap
Pelanggan /
*Corporate Social
Responsibility towards
Customers*

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Perusahaan menyediakan informasi yang lengkap terkait produk yang dipasarkannya. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait produk yang dipasarkan PID melalui *website* Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan tenaga khusus yang dapat memberikan penjelasan terkait produk yang dipasarkan oleh Perseroan.

Layanan Terbaik Demi Kepuasan Pelanggan

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama, bahkan menjadi tulang punggung bagi PID. Keberadaan mereka akan sangat menentukan keberlanjutan Perseroan. Oleh karena posisi konsumen yang demikian penting, maka Perusahaan berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan terwujudnya kepuasan mereka.

Kepuasan pelanggan bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Selain kualitas produk, kepuasan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Oleh karena itu, PID selalu menekankan kepada setiap insan Perusahaan agar memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua konsumen, tanpa terkecuali. Dengan kualitas produk yang terjaga dan pelayanan yang maksimal, niscaya kepuasan pelanggan dapat direngkuh dan dipertahankan.

Menjaga Kerahasiaan Data Pelanggan

Selain menjaga kualitas produk dan layanan, PID juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan. Dalam hal ini, Perusahaan tidak akan menggunakan data tersebut di luar yang telah disepakati sehingga dijamin tidak ada pelanggaran privasi atau hilangnya data pelanggan. Setelah diterimanya data tersebut, setiap transaksi dan pencatatan disimpan dalam program SAP. Komitmen ini selalu dijaga dan hingga akhir periode pelaporan tidak terdapat keluhan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.

Dampak Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen

Pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada pelanggan yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan. PID telah memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan dengan memberikan kualitas dan konsistensi produk, kemasan barang, pengiriman tepat waktu, layanan purna jual, dan kualitas hubungan bisnis. Sepanjang tahun 2023 tidak ada insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.

Corporate Social Responsibility Activities Related to Consumers

The Company provides complete information regarding the products it markets. Customers can easily obtain information related to products marketed by PID through the Company's website. In addition, the Company also provides specialized personnel who can provide explanations related to the products marketed by the Company.

Best Service for Customer Satisfaction

Customers are one of the main stakeholders, even the backbone of PID. Their existence will determine the sustainability of the Company. Due to the importance of customers, the Company strives to optimize their satisfaction.

Customer satisfaction can be influenced by a number of factors. In addition to product quality, satisfaction is also strongly influenced by service quality. Therefore, PID always emphasizes to every employee of the Company to have a commitment to provide the best service to all consumers, without exception. With maintained product quality and maximum service, customer satisfaction can undoubtedly be embraced and maintained.

Keeping Customer Data Confidential

In addition to maintaining the quality of products and services, PID is also committed to maintaining the confidentiality of customer data. In this case, the Company will not use the data outside of what has been agreed so that it is guaranteed that there will be no violation of privacy or loss of customer data. After receiving the data, every transaction and record is stored in the SAP program. This commitment is always maintained and until the end of the reporting period there were no complaints or complaints related to violations of customer privacy and loss of customer data.

Impact of Social Responsibility Activities to Consumers

The implementation of social responsibility to customers has had a positive impact on the Company. PID has maximized services to customers by providing product quality and consistency, goods packaging, on-time delivery, after-sales service, and quality of business relationships. Throughout 2023 there were no non-compliance incidents related to marketing communications.

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terkait
Sosial Kemasyarakatan /
*Corporate Social
Responsibility Related to
Social Community*

Komitmen dan Kebijakan

Kontribusi Perusahaan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dilaksanakan melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pelaksanaan kegiatan CSR merupakan wujud imbal balik PID yang menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari masyarakat umum. Pertumbuhan usaha yang diraih Perusahaan selama ini juga tak lepas dari peran serta masyarakat umum, sehingga Perusahaan merasa perlu untuk memberikan perhatian dalam pengembangan sosial kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

PID telah menetapkan rencana kegiatan tanggung jawab sosialnya terkait pengembangan sosial masyarakat yaitu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program-program tersebut bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Perseroan.

Biaya Biaya CSR

Selama tahun 2023 PID telah mengeluarkan biaya CSR sebesar Rp218.625.000,- dengan rincian berikut:

| NO. | KEGIATAN / ACTIVITY | BIAYA / COST |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | Bantuan Yayasan Dana YKPP / <i>YKPP Fund Foundation Assistance</i> | 129.625.000,- |
| 2 | Bantuan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri 1444H / <i>Assistance for Ramadan and Eid al-Fitr 1444H Activities</i> | 5.000.000 |
| 3 | Bantuan Ramadhan Bersama Lembaga Zakat – Laz Telaga Bijak El-ZaWa / <i>Ramadan Assistance with Zakat Institution – Laz Telaga Bijak El-ZaWa</i> | 5.000.000 |
| 4 | Bantuan dana bencana di Serasan Natuna / <i>Disaster Relief Fund for Serasan Natuna</i> | 25.000.000 |
| 5 | Bantuan dana ikatan sarjana Nadhatul Ulama / <i>Funding Assistance for the Association of Scholars of Nadhatul Ulama</i> | 54.000.000 |
| JUMLAH / TOTAL | | 218.625.000 |

Commitment and Policy

The Company's contribution to the community as part of the stakeholders is implemented through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program. The implementation of CSR activities is a form of reciprocity from PID, which realizes that its existence is part of the general public. The business growth achieved by the Company so far is also inseparable from the participation of the general public, so the Company feels the need to pay attention to social development in various CSR activities related to the socio-cultural community.

Target/Plan of Corporate Social Responsibility Activities in the Field of Community Social Development

PID has established its social responsibility activity plan related to community social development, namely, the Partnership and Community Development Program (PKBL). These programs are empowering and provide benefits to communities in the Company's surrounding areas.

CSR Costs

During 2023, PID has spent CSR costs of Rp218,625,000,- with the following details:

Halaman ini sengaja dikosongkan /
This page is intentionally left blank

Revenue*

(in millions)

7,785

11%

\$(5,593)

(8)%

Global
Health &
Investment
Management

All Other**

Net Income

(in millions)

Finan

ncial Ref
First Quarter

7

LAPORAN KEUANGAN 2023 /
FINANCIAL REPORT 2023

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)

Nomor : 00041/2.0999/AU.1/05/0139-3/1/II/2024
Tanggal : 29 Februari 2024

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

i

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAK

- **Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian** 1 - 2
Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
- **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian** 3
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
- **Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian** 4
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
- **Laporan Arus Kas Konsolidasian** 5
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
- **Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian** 6 - 61
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

INFORMASI TAMBAHAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK PT PELITA INDONESIA DJAYA (Informasi Keuangan - Induk Saja sebagai Laporan Keuangan tersendiri)

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja
- Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja
- Laporan Arus Kas - Induk Saja

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT. PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|----------------------------|---|
| Nama | : Sukendra |
| Alamat Kantor | : Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Soeprpto Blok Q no. 05 – Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : Green Park, Jl. Cutoon Wood II No. 1 Jati Warna – Pondok Gede Bekasi |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| Nama | : Suparno |
| Alamat Kantor | : Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Soeprpto Blok Q no. 05 – Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : Villa Inti Persada Blok E3 No.10 RT 07/19 Pamulang - Tangerang |
| Jabatan | : Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Februari 2024
PT. Pelita Indonesia Djaya

Direktur Utama



Sukendra

Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko



Suparno

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Nomor : 00041/2.0999/AU.1/05/0139-3/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PELITA INDONESIA DJAYA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

HEAD OFFICE :

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA**



Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA., ASEAN CPA, CPI. SV
NRAP : AP. 0139

29 Februari 2024



LAPORAN KEUANGAN

PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 31 Des. 2023 | 31 Des. 2022 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan Setara Kas | 3f;3g;3j;5 | 42.429.217.673 | 22.792.560.464 |
| Piutang Usaha | 3f;3g;6 | 61.089.580.461 | 59.237.371.656 |
| Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp4.090.492.860 dan Rp4.372.876.211 | | | |
| Aset Keuangan Lancar Lainnya | 3g;7 | 6.356.750.197 | 3.459.008.397 |
| Persediaan | 3l;8 | 10.249.374.219 | 9.880.441.615 |
| Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka | 3m;9 | 28.838.355.956 | 22.233.375.758 |
| Aset Kontrak | 10 | 81.430.230.263 | 62.101.204.126 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 3w;18a | 24.515.344.815 | 76.526.745.184 |
| Jumlah Aset Lancar | | 254.908.853.584 | 256.230.707.200 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Properti Investasi | 3n;11 | 23.217.000.000 | 19.941.529.615 |
| Aset Tetap | 3o;12 | 45.543.236.422 | 52.651.354.781 |
| Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp31.023.811.390 dan Rp30.393.324.339 | | | |
| Aset Takberwujud, bersih | 3p;13 | 1.503.446.612 | 2.005.878.621 |
| Aset Hak Guna, bersih | 3s;14 | - | - |
| Aset Pajak Tangguhan | 3w;18e | 3.089.544.472 | 2.764.657.152 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya | 3k;15 | 57.300.000 | 57.300.000 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 73.410.527.506 | 77.420.720.169 |
| JUMLAH ASET | | 328.319.381.090 | 333.651.427.369 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 31 Des. 2023 | 31 Des. 2022 |
|--|----------|------------------------|------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | |
| Pinjaman Jangka Pendek | 3h;16 | 22.000.000.000 | - |
| Utang Usaha | 3h;17 | 22.769.284.633 | 41.107.066.944 |
| Utang Pajak | 3w;18b | 8.353.945.903 | 44.136.845.927 |
| Beban Akrua | 3h;19 | 36.154.026.988 | 29.329.215.523 |
| Bagian Lancar dari Liabilitas Jk. Panjang: | 3h;21 | | |
| - Sewa Pembiayaan | | 4.519.052.786 | 5.519.000.800 |
| Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya | 3h;3r;20 | 9.409.981.273 | 14.604.622.816 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | 103.206.291.583 | 134.696.752.010 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | |
| Utang Pihak Berelasi | 3f;3h;22 | 2.307.105.189 | 2.113.426.587 |
| Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi: | 3h;3s;21 | | |
| - Sewa Pembiayaan | | 5.908.040.372 | 8.369.131.000 |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 3t;23 | 1.576.178.097 | 1.677.810.068 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | 9.791.323.658 | 12.160.367.655 |
| JUMLAH LIABILITAS | | 112.997.615.241 | 146.857.119.665 |
| EKUITAS | | | |
| Modal Saham | 24 | 2.010.000.000 | 2.010.000.000 |
| Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2023 dan 2022 | | | |
| Saldo Laba : | | | |
| Ditentukan Penggunaannya | 3x;25a | 183.585.464.871 | 157.660.308.343 |
| Belum Ditentukan Penggunaannya | 3x;25b | 28.164.273.317 | 25.925.156.528 |
| Komponen Ekuitas Lainnya | 3t;26 | 1.367.038.257 | 1.067.260.689 |
| Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | | 215.126.776.445 | 186.662.725.560 |
| Kepentingan Non Pengendali | 3c;27 | 194.989.404 | 131.582.144 |
| JUMLAH EKUITAS | | 215.321.765.849 | 186.794.307.704 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 328.319.381.090 | 333.651.427.369 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | 2023 | 2022 |
|---|---------|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan Usaha | 3v;28 | 565.985.704.513 | 457.529.361.127 |
| Beban Usaha | 3v;29 | (474.154.254.859) | (379.658.232.730) |
| Laba Kotor | | 91.831.449.653 | 77.871.128.397 |
| Beban Umum dan Administrasi | 3v;30 | (61.029.696.273) | (46.558.944.295) |
| Laba Usaha | | 30.801.753.381 | 31.312.184.102 |
| Pendapatan (Beban) Non Usaha | 3v;31 | 7.878.891.605 | 2.313.433.975 |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | | 38.680.644.986 | 33.625.618.077 |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan: | | | |
| Kini | 3w;17c | (10.927.846.917) | (8.100.249.740) |
| Tangguhan | 3w;17e | 419.882.507 | 404.796.466 |
| | | (10.507.964.410) | (7.695.453.274) |
| Laba Tahun Berjalan | | 28.172.680.577 | 25.930.164.803 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| Pos-pos yang tidak akan reklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial | 3t;26 | 394.772.755 | 2.570.152.293 |
| Pajak Penghasilan Terkait | 3w;26 | (94.995.186) | (565.433.504) |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain | | 299.777.569 | 2.004.718.789 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | | 28.472.458.145 | 27.934.883.591 |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik Entitas Induk | | 28.164.273.317 | 25.925.156.527 |
| Kepentingan Non Pengendali | 3j;27 | 8.407.260 | 5.008.275 |
| Laba Tahun Berjalan | | 28.172.680.577 | 25.930.164.803 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik Entitas Induk | | 28.464.050.886 | 27.929.875.316 |
| Kepentingan Non Pengendali | 3j;27 | 8.407.260 | 5.008.275 |
| Laba Tahun Berjalan | | 28.472.458.145 | 27.934.883.591 |
| Laba Bersih per Saham Dasar | | 14.165.402,06 | 13.897.952,04 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Catatan | Saldo Laba | | | | Komponen Ekuitas Lainnya | Kepentingan Non Pengendali | Jumlah Ekuitas |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| | | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Ditentukan Penggunaannya | Belum Ditemukan Penggunaannya | | | | |
| Saldo per 31 Desember 2021 | | 2.010.000.000 | 154.442.902.454 | 3.217.405.889 | (937.458.100) | 126.573.869 | 158.859.424.112 | |
| Divestasi PT PANI | | - | 3.217.405.889 | (3.217.405.889) | - | - | - | |
| Laba Tahun Berjalan | 25b | - | - | 25.925.156.528 | - | 5.008.275 | 25.930.164.803 | |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial | 3t:26 | - | - | - | 2.004.718.789 | - | 2.004.718.789 | |
| Saldo per 31 Desember 2022 | | 2.010.000.000 | 157.660.308.343 | 25.925.156.528 | 1.067.260.689 | 131.582.144 | 186.794.307.704 | |
| Cadangan Umum | | - | 25.925.156.528 | (25.925.156.528) | - | 55.000.000 | 55.000.000 | |
| Laba Tahun Berjalan | | - | - | 28.164.273.317 | - | 8.407.260 | 28.172.680.577 | |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial | | - | - | - | 299.777.568 | - | 299.777.568 | |
| Saldo per 31 Desember 2023 | | 2.010.000.000 | 183.585.464.871 | 28.164.273.317 | 1.367.038.257 | 194.989.404 | 215.321.765.849 | |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan Kas dari Pelanggan | 489.971.633.757 | 465.343.481.935 |
| Pembayaran Kas kepada Pemasok | (447.276.910.012) | (402.582.500.325) |
| Pembayaran Operasional | (37.100.997.177) | (39.951.355.924) |
| Pengeluaran Lain-lain | (6.721.422.280) | (2.356.227.356) |
| Pembayaran Pajak | (5.966.048.936) | (13.449.259.266) |
| Penerimaan Lain-lain | 1.198.192.909 | 222.822.595 |
| Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | (5.895.551.739) | 7.226.961.660 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penambahan Aset Tetap | (899.336.398) | (16.043.332.143) |
| Penerimaan Dari Penjualan Aset Tetap | 4.376.545.346 | 2.028.000.000 |
| Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | 3.477.208.948 | (14.015.332.143) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan pinjaman Bank | 126.500.000.000 | 8.947.819.716 |
| Pembayaran utang Bank | (104.500.000.000) | (13.316.529.526) |
| Penambahan Modal Disetor | 55.000.000 | - |
| Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 22.055.000.000 | (4.368.709.811) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 19.636.657.209 | (11.157.080.294) |
| KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL | 22.792.560.464 | 33.949.640.758 |
| KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR | 42.429.217.673 | 22.792.560.464 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelita Indonesia Djaya didirikan di Jakarta pada Tanggal 29 September 1969 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 53 tanggal 29 September 1969 oleh Notaris Djojo Muljadi. S.H yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 10 Februari 1970.

Dalam perkembangannya PT Pelita Indonesia Djaya mengalami perubahan nama dikarenakan adanya keberatan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. maka diputuskan merubah nama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya Cooperation berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pelita Indonesia Djaya berkedudukan di Jakarta. Hal ini telah disahkan dengan Akta Notaris SP. Henny Singgih. S.H No : 22 Tanggal 10 September 2001.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 6, tanggal 31 Januari 2023, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., dan telah mendapat Persetujuan Menhumkam Nomor : AHU-AH.01.09-0190153, tanggal 9 Februari 2023.

Maksud dan tujuan Perusahaan didirikan sebagai berikut:

- a) Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal. Selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan - badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dan Perusahaan-Perusahaan dibidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, kepariwisataan, perhotelan, dan real estate serta percetakan.
- c) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (*coold storage*).
- d) Mengusahakan galangan-galangan pembuatan dan reparasi kapal-kapal (*shipdocking and shiprepairing*).
- e) Menjalankan segala sesuatu yang selaras atau yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalm arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara komisi atau tidak ataupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

Perusahaan berkedudukan Ruko Cempaka Mas Blok Q Nomor 5, di Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.771 orang yang terdiri dari karyawan tetap 77 orang, karyawan PKWT 153 orang dan karyawan *outsourcing* 1.618 orang. Sedangkan tahun 2022 Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.4334orang yang terdiri dari karyawan tetap 60 orang, karyawan PKWT 82 orang dan karyawan *outsourcing* 1.292 orang. Seluruh karyawan tersebut tidak diaudit.

b. Susunan Komisaris dan Direktur

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 6, tanggal 20 November 2023 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0198598.AH.01.09-0190153, tanggal 28 November 2023. Maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Komisaris : Mardiyanto
Direktur Utama : Sukendra
Direktur Keuangan : Suparno
Direktur Operasi : Didik Martono

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 2, tanggal 04 Oktober 2022 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0198598.AH.01.11, tanggal 05 Oktober 2022. Maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Komisaris : Robert MP Sinaga
Direktur Utama : Effendi
Direktur Keuangan : Suparno
Direktur Operasi : Dr. Rooshardianti

c. Entitas Anak

Entitas Anak yang dikonsolidasi dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| Entitas Anak | Domisili | Jenis Usaha | Presentasi Kepemilikan | Tahun Operasi Komersial | Jumlah Aset Sebelum Eliminasi | |
|---------------------------|----------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | 2023 | 2022 |
| PT Pelita Bandar Nasional | Surabaya | Bongkar Muat | 98% | 1989 | 328.141.772.235 | 333.778.007.904 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Pelita Bandar Nasional Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 28 Juni 1989, juncto Akta Perubahan No. 15, tanggal 15 Maret 1999, kedua-duanya dibuat dihadapan Notaris Admadji, SH., di Surabaya dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C- 13213 HT 01.01 tahun 2000, tanggal 6 Juli 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pelita Bandar Nasional No. 3, tanggal 19 September 2023, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0058038.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 25 September 2023.

Berdasarkan Akta No. 5, tanggal 19 September 2023, modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000.

Maksud dan Tujuan Perusahaan didirikan adalah :

- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101)
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102)

Perusahaan berkedudukan di Ruko Cempaka Mas Blok Q5 Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat 10640.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Bandar Nasional per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>Dewan Komisaris:</u> | | |
| Komisaris Utama : | Gatot Wibisono | Effendi |
| Anggota Komisaris : | - | - |
| <u>Direksi :</u> | | |
| Direktur Utama : | Indira Prijatna | Nur Hasanudin |
| Direktur Operasional : | - | Akhmad Syafran |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

a. **Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:**

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

b. **Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:**

Efektif 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan-perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan konsep harga perolehan dan basis akrual, kecuali disebutkan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.h

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnyadalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- 1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- 2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- 3) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- 4) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- 5) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- 6) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

d. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi yang dilakukan baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui akan berdampak pada aset atau liabilitas.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Jika, setelah penilaian kembali jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada). Selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
 - c) Personal manajemen kunci Entitas pelapor atau perusahaan induk Entitas pelapor.
- 2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk Entitas anak dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
 - b) Suatu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau venture bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- 2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas); dan
 - h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengukuran

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran (lanjutan)

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

• **Instrumen Utang**

Pengukuran instrumen utang selanjutnya tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan karakteristik arus kas aset tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam "penghasilan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan sebagai "lain-lain, bersih". Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

• **Instrumen Ekuitas**

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut, perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). *Expected Credit Loss (ECL)* didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ECL tersebut untuk piutang usaha dan piutang lain-lain.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan. dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan utang pihak berelasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

j. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*), dan
- 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

k. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya."

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out*. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Persediaan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Cadangan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Persediaan rusak atau persediaan yang alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

m. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi (ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Selanjutnya pada setiap tanggal laporan posisi keuangan atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun dengan pilihan model nilai wajar. Perseroan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding nilai wajar sebelumnya. merupakan keuntungan (kerugian) dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

o. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat (Tahun) | Tarif Penyusutan % |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Tanah | Tidak Ada Batasan | |
| Bangunan | 40 | 2,5 |
| Mesin Instalasi dan Peralatan Penunjang | 6-7 | 15 |
| Alat-alat Berat | 12 | 8,33 |
| Kendaraan | 5 | 20,00 |
| Inventaris dan Perabotan Rumah Tangga | 6-7 | 15,00 |

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Tetap Usul Hapus

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tetap usul hapus dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tetap usul hapus dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Usul Hapus (lanjutan)

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Aset tetap usul hapus dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini diakui pada kelompok pendapatan atau beban non usaha.

p. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terns mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditanggihkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan nilai langsung diakui dalam laba rugi konsolidasian, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali.

Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

r. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana perusahaan telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan sebelum kewajiban pelaksanaan direalisasikan.

s. Transaksi Sewa

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- 1) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- 2) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Transaksi Sewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah: (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Grup menggunakan suku bunga yang diterbitkan Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Transaksi Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap, sedangkan liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa satu tahun atau kurang dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hakguna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset dasarnya bernilairendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Grup memberikan program imbalan pasti berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk karyawan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Hak atas imbalan ini biasanya berdasarkan pencapaian masa kerja karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Estimasi biaya imbalan ini diakui selama masa kerja. Metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini adalah *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali imbalan pascakerja yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa kini, biaya bunga dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai 'Mengatribusikan manfaat untuk masa kerja (PSAK 24)' sebagai tanggapan terhadap *International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC")* yang diterbitkan di bulan Mei 2021. DSAK-IAI menilai bahwa skema manfaat pensiun yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja sepertinya memiliki karakteristik yang serupa dengan pola fakta yang dibahas dalam IFRIC.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Manajemen telah mengkaji dampak siaran pers DSAK-IAI ini dan menyimpulkan bahwa dampak perubahan pola fakta tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode lalu, dan oleh karena itu telah membukukan dampak perubahan tersebut pada laporan laba rugi periode berjalan.

u. Provisi

Provisi diakui apabila Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pendapatan atas jasa yang diberikan diakui pada saat jasa yang dijanjikan kepada pelanggan telah diselesaikan dan pelanggan telah mengendalikan atas jasa tersebut

Uang yang diterima sehubungan dengan pelayanan jasa yang belum dilaksanakan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan disajikan sebagai liabilitas kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

w. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut. maka kelebihanannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding sudah diputuskan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Grup menggunakan metode neraca (*balance sheet method*) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

y. Laba Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

z. Informasi Segmen

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

aa. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Grup membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Sewa (lanjutan)

Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

c. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Estimasi dan Asumsi

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun-tahun mendatang dipaparkan di bawah ini.

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lain-lain dengan menggunakan tingkat provisi yang berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang (lanjutan)

Grup menyesuaikan kerugian kredit historis masa lalu dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup menghitung pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

c. Pemulihan Dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

aset pajak tangguhan tersebut.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset dengan didukung rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap Grup menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar yang tercatat.

e. Nilai Wajar Properti Investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi yang dilakukan oleh penilai independen profesional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan properti investasi yang akan dinilai. Setiap perubahan dalam asumsi penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal akan berdampak pada nilai tercatat properti investasi.

f. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Asumsi penting untuk penurunan nilai aset non keuangan sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Rencana strategis mencakup perkiraan dampak perubahan iklim bisnis di masa depan terhadap Grup sejauh ini dapat diperkirakan dengan andal.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

h. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

i. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Kas | | |
| Rupiah | 174.814.292 | 82.188.643 |
| Sub Jumlah | 174.814.292 | 82.188.643 |
| Bank | | |
| Pihak berelasi | | |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 41.496.366.991 | 21.788.501.811 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 449.474.715 | 646.423.054 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | 169.471.318 | 135.904.853 |
| PT Bank BJB | 15.232.475 | 15.324.221 |
| Jumlah Pihak Berelasi | 42.130.545.499 | 22.586.153.939 |
| Pihak Ketiga: | | |
| PT Bank Central Asia (Persero). Tbk | 123.857.882 | 124.217.882 |
| Jumlah Pihak Ketiga | 123.857.882 | 124.217.882 |
| Jumlah | 42.429.217.673 | 22.792.560.464 |

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perusahaan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/ pinjaman lainnya serta tidak ada yang dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Pihak Berelasi</u> | | |
| PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 52.450.405.336 | 58.558.199.393 |
| Sub Jumlah | 52.450.405.336 | 58.558.199.393 |
| <u>Pihak Ketiga</u> | | |
| PT Cakrawala Inti Persada | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
| PT PINDAD Internasional | 700.000.000 | 700.000.000 |
| PT Karya Retra | 683.981.360 | 683.981.360 |
| PT Kukuh Mandiri | 261.990.760 | 261.990.760 |
| PT Wahana Ria Cakrawala | 237.691.740 | 237.691.740 |
| PT Kasuang Semesta Mandiri | 164.298.240 | 164.298.240 |
| RS Pelayaran Nasional Indonesia | 920.458.738 | - |
| Travel PT PID | 571.143.500 | - |
| PT Artdeco Sejahtera Abadi | 247.252.500 | 64.490.000 |
| Jumlah Dipindahkan | 4.886.816.838 | 3.212.452.100 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jumlah Pindahan | 4.886.816.838 | 3.212.452.100 |
| PT Alif Jaya Group | 124.545.458 | 74.545.458 |
| Hotel Bahtera Cipayung | 108.392.397 | |
| Lainnya | 6.105.696.416 | 818.797.929 |
| Sub Jumlah | 11.225.451.109 | 4.105.795.487 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (3.974.467.876) | (4.071.023.332) |
| Jumlah Entitas Induk | 59.701.388.569 | 58.592.971.547 |
| <u>Entitas Anak</u> | | |
| Sinar Jaya Wijaya | 108.664.290 | 308.954.752 |
| PT Prima Sejahtera Line | 721.742.900 | 348.240.045 |
| Sari Ampenan | 102.851.212 | 159.636.579 |
| Eddy Barokah | 76.320.964 | 76.070.964 |
| PT Sumber Graha Sejahtera | 492.637.510 | 53.100.647 |
| Lainnya | 2.000.000 | 250.000 |
| Sub Jumlah | 1.504.216.876 | 946.252.987 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (116.024.984) | (301.852.878) |
| Jumlah Entitas Anak | 1.388.191.892 | 644.400.109 |
| Jumlah | 61.089.580.461 | 59.237.371.656 |

Rincian piutang usaha berdasarkan umurnya:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 - 30 hari | 7.014.028.237 | - |
| 31 - 60 hari | 609.427.287 | 1.490.118.461 |
| 61 - 90 hari | 32.640.000 | 146.755.613 |
| 91 - 120 hari | 72.080.001 | 158.096.800 |
| > 120 hari | 3.497.275.584 | 3.257.077.600 |
| Jumlah | 11.225.451.109 | 5.052.048.474 |

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Awal | 4.372.876.211 | 2.565.139.628 |
| Pembentukan | (282.383.351) | 1.807.736.583 |
| Saldo Akhir | 4.090.492.860 | 4.372.876.211 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Pihak Berelasi</u> | | |
| Piutang Pegawai | 1.288.996.293 | 623.833.387 |
| <u>Pihak Ketiga</u> | | |
| Koperasi | 2.113.660.118 | 2.111.660.118 |
| Lainnya | 3.152.158.264 | 921.579.370 |
| Sub Jumlah | 6.554.814.675 | 3.657.072.875 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (198.064.478) | (198.064.478) |
| Jumlah | 6.356.750.197 | 3.459.008.397 |

Piutang lainnya kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan pembayaran pinjaman modal kerja untuk Koperasi Karyawan PID dan piutang lelang kendaraan bermotor kepada karyawan serta piutang atas pelepasan PT PANI.

8. PERSEDIAAN

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Permakanan | 1.111.785.333 | 2.885.363.790 |
| Supplement Food | 2.950.630.997 | 2.727.467.600 |
| Bahan <i>Chemical</i> | 1.393.392.307 | 2.144.996.415 |
| Maintenance | 2.795.129.056 | 1.012.062.014 |
| Meal Box | 431.332.282 | 598.782.898 |
| AMDK | 280.333.677 | 439.742.185 |
| Cover dan Kasur | 913.304.507 | - |
| Lainnya | 373.466.060 | 72.026.713 |
| Jumlah | 10.249.374.219 | 9.880.441.615 |

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau pemulihan dan tidak terdapat persediaan usang.

Persediaan tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat risiko yang akan terjadi terhadap persediaan tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Uang Muka | 28.506.852.287 | 21.756.677.977 |
| b. Biaya Dibayar Dimuka | 331.503.669 | 476.697.781 |
| Jumlah | 28.838.355.956 | 22.233.375.758 |
| | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2022 |
| a. Uang Muka: | | |
| Permakanan | 3.802.534.581 | 8.926.641.346 |
| Jasa Pelayanan Lainnya | 7.690.230.007 | 6.596.572.886 |
| Administrasi dan umum | 7.300.951.387 | 3.359.223.362 |
| Jasa Pelayanan Kapal | 5.765.769.066 | 2.032.663.645 |
| Jasa Kebersihan di Kapal | 3.947.367.246 | 794.775.738 |
| Lainnya | - | 46.801.000 |
| Jumlah | 28.506.852.287 | 21.756.677.977 |
| b. Biaya Dibayar Dimuka: | | |
| Biaya Asuransi | 287.059.225 | 430.588.837 |
| Biaya Sewa | 44.444.444 | 44.444.444 |
| Administrasi dan Umum | - | 1.664.500 |
| Jumlah | 331.503.669 | 476.697.781 |

Uang muka permakanan merupakan uang muka yang dibayarkan divisi pengadaan untuk membeli bahan makanan yang akan dikirim ke kapal-kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka jasa pelayanan lainnya merupakan uang muka yang dibayarkan divisi komersial untuk membeli material dan suku cadang untuk pekerjaan pemeliharaan di atas kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka administrasi dan umum tahun 2023 merupakan uang muka biaya operasional dan angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tahun 2022 merupakan uang muka tunjangan hari raya karyawan dan biaya operasional kantor.

Uang muka jasa pelayanan kapal merupakan uang muka gaji pengamanan kapal dan tiket petugas di kapal.

Uang muka jasa kebersihan di kapal merupakan alat penunjang kebersihan di atas kapal-kapal PT Pelni (Persero).

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. ASET KONTRAK

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pihak Berelasi | | |
| PT PELNI: | | |
| Permakanan | 32.257.616.741 | 34.578.308.188 |
| Usaha Jasa | 32.813.917.186 | 16.719.760.689 |
| Usaha lainnya | 14.333.234.335 | 8.746.783.316 |
| Sub Jumlah | 79.404.768.262 | 60.044.852.194 |
| Pihak Ketiga | | |
| Usaha lainnya | 2.025.462.001 | 2.056.351.932 |
| Jumlah | 81.430.230.263 | 62.101.204.126 |

Aset kontrak permakanan merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengadaan bahan permakanan di atas kapal Pelni, jasa *outsourcing*, pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal.

Aset kontrak usaha jasa merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengamanan, CS kapal dan darat, janitor dan house keeping.

Aset kontrak usaha lain merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa perbaikan di atas kapal dan tenaga kerja bongkar muat.

11. PROPERTI INVESTASI

| | 2023 | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Tanah | 17.861.054.614 | 2.441.362.386 | - | - | 20.302.417.000 |
| Gedung | 2.080.475.001 | 834.107.999 | - | - | 2.914.583.000 |
| Jumlah | 19.941.529.615 | 3.275.470.385 | - | - | 23.217.000.000 |
| | 2022 | | | | |
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Tanah | 15.294.363.614 | 2.549.066.000 | - | - | 17.861.054.614 |
| Gedung | 1.748.000.001 | 350.100.000 | - | - | 2.080.475.001 |
| Jumlah | 17.042.363.615 | 2.899.166.000 | - | - | 19.941.529.615 |

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00151/2.0167-05/PI/05/0638/II/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Pergudangan 88, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, sebesar Rp4.416.000.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan Rp1.901.351.385 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya. (Lihat Catatan 31a)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Berdasarkan laporan penilai aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00152/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Wisma Bahtera Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan masing-masing sebesar Rp14.517.617.000 dan Rp664.383.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp695.910.000 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya dan laporan penilai independen nomor 00153/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Perak Timur No. 114, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sebesar Rp3.619.000.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp678.209.000 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya. (Lihat Catatan 31a)

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00148/2.0004-01/PI/09/0378/1/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Perak Timur No. 114, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sebesar Rp2.940.791.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp2.899.166.000 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya.

| 2023 | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Nilai Tercatat | Nilai Wajar | Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar |
| Tanah | 17.861.054.614 | 20.302.417.000 | 2.441.362.386 |
| Gedung | 2.080.475.001 | 2.914.583.000 | 834.107.999 |
| | 19.941.529.615 | 23.217.000.000 | 3.275.470.385 |
| 2022 | | | |
| | Nilai Tercatat | Nilai Wajar | Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar |
| Tanah | 15.294.363.614 | 17.861.054.614 | 2.566.691.000 |
| Gedung | 1.748.000.001 | 2.080.475.001 | 332.475.001 |
| | 17.042.363.615 | 19.941.529.615 | 2.899.166.000 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP

| | 2023 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Biaya Perolehan: | | | | | |
| <u>Perolehan Langsung</u> | | | | | |
| Tanah | 3.697.978.048 | - | - | - | 3.697.978.048 |
| Gedung | 16.632.640.067 | - | - | - | 16.632.640.067 |
| Kendaraan | 11.079.928.392 | 661.192.898 | 150.000.000 | - | 11.591.121.290 |
| Inventaris Kantor | 1.659.984.456 | 111.093.950 | 16.198.000 | - | 1.754.880.406 |
| Kontainer | 918.449.543 | - | - | - | 918.449.543 |
| Perl. Produksi | 2.128.503.000 | 395.000.000 | 25.124.898 | - | 2.498.378.102 |
| Sub Jumlah | 36.117.483.506 | 1.167.286.848 | 191.322.898 | - | 37.093.447.456 |
| <u>Aset Sewa Pembiayaan</u> | | | | | |
| Kendaraan | 46.803.495.615 | 2.746.999.668 | 10.225.494.927 | - | 39.325.000.356 |
| Jumlah | 82.920.979.121 | 3.914.286.516 | 10.416.817.825 | - | 76.418.447.813 |
| Akumulasi | | | | | |
| Penyusutan dan | | | | | |
| Penurunan Nilai: | | | | | |
| <u>Perolehan Langsung</u> | | | | | |
| Gedung | 1.773.351.616 | 390.427.374 | - | - | 2.163.778.990 |
| Kendaraan | 4.681.584.216 | 1.480.252.475 | 150.000.000 | - | 6.011.836.691 |
| Inventaris Kantor | 1.078.017.476 | 198.607.755 | 16.198.000 | - | 1.260.427.231 |
| Kontainer | 775.866.216 | 28.999.998 | - | - | 804.866.214 |
| Perl, produksi | 1.282.507.932 | 315.545.256 | 25.125.394 | - | 1.572.927.794 |
| Sub Jumlah | 9.591.327.456 | 2.413.832.859 | 191.323.395 | - | 11.813.836.920 |
| <u>Aset Sewa Pembiayaan</u> | | | | | |
| Kendaraan | 20.801.996.890 | 8.684.917.358 | 10.276.939.777 | - | 19.209.974.471 |
| Jumlah | 30.393.324.345 | 11.098.750.217 | 10.468.263.172 | - | 31.023.811.390 |
| Nilai Buku | 52.527.654.776 | | | | 45.394.636.422 |
| Aset Dalam Penyelesaian | 123.700.005 | 24.899.995 | - | - | 148.600.000 |
| Nilai Bersih | 52.651.354.781 | | | | 45.543.236.422 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

| | 2022 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Biaya Perolehan: | | | | | |
| <u>Perolehan Langsung</u> | | | | | |
| Tanah | 3.713.978.048 | - | 16.000.000 | - | 3.697.978.048 |
| Gedung | 16.632.640.067 | - | - | - | 16.632.640.067 |
| Kendaraan | 8.986.819.822 | 2.093.108.570 | - | - | 11.079.928.392 |
| Inventaris Kantor | 1.569.662.278 | 90.322.178 | - | - | 1.659.984.456 |
| Kontainer | 773.449.543 | 145.000.000 | - | - | 918.449.543 |
| Perl. Produksi | 1.640.523.713 | 487.979.287 | - | - | 2.128.503.000 |
| Sub Jumlah | 33.317.073.471 | 2.816.410.035 | 16.000.000 | - | 36.117.483.506 |
| <u>Aset Sewa Pembiayaan</u> | | | | | |
| Kendaraan | 33.651.645.507 | 17.039.574.168 | 3.887.724.060 | - | 46.803.495.615 |
| Jumlah | 66.968.718.978 | 19.855.984.203 | 3.903.724.060 | - | 82.920.979.121 |
| Akumulasi | | | | | |
| Penyusutan dan | | | | | |
| Penurunan Nilai: | | | | | |
| <u>Perolehan Langsung</u> | | | | | |
| Gedung | 1.544.347.486 | 229.004.130 | - | - | 1.773.351.616 |
| Kendaraan | 3.274.917.281 | 1.406.666.935 | - | - | 4.681.584.216 |
| Inventaris Kantor | 879.519.974 | 198.497.502 | - | - | 1.078.017.476 |
| Kontainer | 773.449.549 | 2.416.667 | - | - | 775.866.216 |
| Perl, produksi | 841.171.365 | 441.336.567 | - | - | 1.282.507.932 |
| Sub Jumlah | 7.313.405.654 | 2.277.921.801 | - | - | 9.591.327.456 |
| <u>Aset Sewa Pembiayaan</u> | | | | | |
| Kendaraan | 18.414.357.543 | 5.594.306.450 | (3.206.667.104) | - | 20.801.996.890 |
| Jumlah | 25.727.763.198 | 7.872.228.251 | (3.206.667.104) | - | 30.393.324.345 |
| Nilai Buku | 41.240.955.780 | | | | 52.527.654.776 |
| Aset Dalam Penyelesaian | 49.000.005 | 74.700.000 | - | - | 123.700.005 |
| Nilai Bersih | 41.289.955.785 | | | | 52.651.354.781 |

Seluruh aset tetap tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat risiko yang akan terjadi terhadap aset tetap tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan.

Berkurangnya Aset Kendaraan Sewa Pembiayaan pada tahun 2023 karena penjualan melalui lelang sesuai dengan persetujuan dari Pemegang Saham No.09.15/01/S-B/DK.PID/2023, tanggal 15 September 2023 dan No. 12.10/04/DK.PID/2023, tanggal 19 Desember 2023. Keuntungan penjualan sebesar Rp5.782.226.569 diakui sebesar pendapatan non usaha (Lihat Catatan 31).

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Beban Pokok Usaha (lihat catatan 29) | 7.637.453.894 | 5.889.308.012 |
| Beban Umum & Administrasi (lihat catatan 30) | 3.461.296.323 | 1.982.920.239 |
| Jumlah | 11.098.750.217 | 7.872.228.251 |

13. ASET TAKBERWUJUD

| | 2023 | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Biaya Perolehan: | | | | | |
| Perangkat Lunak | 3.404.159.935 | - | - | - | 3.404.159.935 |
| Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai: | | | | | |
| Perangkat Lunak | 1.398.281.314 | 502.432.009 | - | - | 1.900.713.323 |
| Nilai Buku | 2.005.878.621 | 502.432.009 | - | - | 1.503.446.612 |
| | 2022 | | | | |
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo Akhir |
| Biaya Perolehan: | | | | | |
| Perangkat Lunak | 3.404.159.935 | - | - | - | 3.404.159.935 |
| Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai: | | | | | |
| Perangkat Lunak | 894.459.821 | 503.821.493 | - | - | 1.398.281.314 |
| Nilai Buku | 4.298.619.756 | 503.821.493 | - | - | 2.005.878.621 |

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tidak berwujud pada tanggal laporan posisi keuangan.

Beban amortisasi aset tak berwujud dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Beban Pokok Usaha (catatan 29) | - | 49.694.649 |
| Beban Umum dan Administrasi (catatan 30) | 502.432.010 | 454.126.844 |
| Jumlah | 502.432.010 | 503.821.493 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. ASET HAK GUNA

| | 2022 | | | Saldo Akhir |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | |
| Biaya Perolehan: | | | | |
| Gedung | 719.065.881 | - | 719.065.881 | - |
| Alat Angkut | 2.168.348.762 | - | 2.168.348.762 | - |
| Jumlah | 2.887.414.643 | - | 2.887.414.643 | - |
| Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai: | | | | |
| Gedung | 523.366.782 | 99.661.573 | 623.028.355 | - |
| Alat Angkut | 1.694.045.444 | 102.485.155 | 1.796.530.599 | - |
| Jumlah | 2.217.412.226 | 202.146.728 | 2.419.558.954 | - |
| Nilai Buku | 670.002.417 | | | - |

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal neraca.

Beban amortisasi aset hak guna dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

| | 2023 | 2022 |
|--|----------|--------------------|
| Beban Umum dan Administrasi (catatan 30) | - | 202.146.728 |
| Jumlah | - | 202.146.728 |

Aset hak guna merupakan objek sewa kendaraan alat angkut selama 3 (tiga) tahun sejak Desember 2018 hingga Desember 2021 dan sewa Gedung di Sumur Batu dan Kemayoran Jakarta Pusat dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak November 2020 hingga Desember 2023.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Deposito Pihak berelasi | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 57.300.000 | 57.300.000 |
| Jumlah | 57.300.000 | 57.300.000 |

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 22.000.000.000 | - |
| Jumlah | 22.000.000.000 | - |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pinjaman jangka pendek merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp22.500.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0099/KMK/2021 dengan Tingkat suku bunga: 9,50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2024 (12 bulan). Tujuan penggunaan kredit yaitu pembiayaan kebutuhan produktif usaha food and beverages, outshourching service, car rent, wisata, informastion technology service management (ITSM), maintenance service, crewing dan usaha penunjang lainnya untuk pelayani PT Pelni (Persero). Penerima kredit menyerahkan agunan kepada Bank Sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen Suprpto, Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat.

Perjanjian kredit ini telah dilakukan addendum I (kesatu) dengan Nomor Akta 01, tanggal 01 April 2021 dengan jangka waktu 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, terakhir telah diubah dengan addendum II (kedua) tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023. Kemudian diubah yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JKB/0099/KMK/2021, Akta Nomor 02, tanggal 1 Nopember 2021, dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta.

Selanjutnya, dilakukan Addendum I, tanggal 31 Oktober 2022, tentang penurunan limit kredit semula Rp12.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000 dan perpanjangan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Agunan kredit dalam bentuk:

- a. Bukan Aset Tetap, berupa seluruh tagihan/piutang usaha kepada pihak ketiga, telah diikat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00606013.AH.05.01.Tahun 2021, tanggal 4 Nopember 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000;
- b. Aset Tetap, yaitu tanah dan bangunan ruko, terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q, Nomor 5, Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Sumur Batu, telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00622/2022, tanggal 12 April 2021, dengan nilai pengikatan sebesar Rp8.487.000.000.

Tanah dan bangunan villa yang terletak di Jalan Wilis (Taman Wisata) Nomor 19, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00804/Pecalukan, seluas 3.915 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00805/Pecalukan, seluas 3.766 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806/Pecalukan, seluas 4.488 M2;

Ketiga sertifikat tersebut telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02783/2021, tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp9.000.000.000.

Tidak ada pengingkaran kewajiban oleh Grup sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas.

Fasilitas pinjaman jangka pendek telah dilunasi oleh Perusahaan pada periode Desember 2022.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. UTANG USAHA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PT Tisindo Jaya | 4.995.152.350 | 4.042.074.484 |
| PT Amidis Tirta Mulia | 3.170.717.256 | 4.243.293.663 |
| PT Erdeha Multi Niaga | 1.556.235.200 | - |
| PT Pasific Prima Indah | 1.210.682.660 | 490.985.470 |
| PT Isat Telkom | 1.158.154.950 | 278.350.000 |
| PT Osami | 786.480.830 | 2.093.625.060 |
| PT Jaya Karya Makassar | 764.163.544 | - |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 571.093.969 | 2.306.372.386 |
| PT Anuta Karya Prima | 543.528.334 | - |
| PT Suksema Global Supply | 482.798.947 | - |
| PT Saka Amerta Nusantara | 463.023.204 | - |
| PT Gilang Perkasa Pangan | 431.755.872 | - |
| PT Udara Jadi Bersih | 419.025.002 | - |
| PT Ferindo Sakti | 415.479.273 | 1.906.094.611 |
| CV Dua Mutiara | 379.556.060 | - |
| Ciputri Prakarsa Utama | 396.850.600 | 1.194.075.100 |
| PT Sumber Hasil Laut | 296.727.500 | 468.098.500 |
| PT Cipta Karya Mandiri Insani | 277.221.227 | 807.458.061 |
| Kios Torah | 203.070.000 | 560.160.000 |
| CV Berkat Zaitun | 166.159.000 | 1.410.534.500 |
| PT Sukanda Djaya | 152.528.624 | 1.666.083.106 |
| PT Iti Marine & Oifield Utama | 63.745.000 | 201.454.023 |
| PT Metta Karuna Jaya | 19.554.545 | 19.554.545 |
| PT Hoka Karya Mandiri | 13.252.278 | 360.136.494 |
| PT Telenet | 11.405.472 | 1.530.015.925 |
| PT Sang Hyang Seri | - | 1.355.970.000 |
| CV Subandar | - | 1.277.891.050 |
| PT Tani Hub Indonesia | - | 1.092.537.640 |
| PT Sinar Niaga Sejahtera | - | 924.435.389 |
| CV Sedulur Papat Sejahtera | - | 501.950.000 |
| PT Sreeya Sewu Indonesia | - | 459.200.000 |
| PT Berkah Rezeki Bahari | - | 457.480.000 |
| PT Terra Makmurindo | - | 403.934.800 |
| CV Ilfa Raya | - | 379.271.001 |
| CV Dwi Putra Perkasa | - | 214.872.500 |
| PT Enseval Putera Megatrading Tbk | - | 1.292.579.162 |
| Lainnya (di bawah 300 juta) | 3.820.922.936 | 9.168.579.474 |
| Jumlah | 22.769.284.633 | 41.107.066.944 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. PERPAJAKAN

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Pajak Dibayar Dimuka | | |
| PPN Masukan | 24.023.367.790 | 68.283.788.450 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 491.977.025 | - |
| Pajak Penghasilan Pasal 28a | - | 8.242.956.734 |
| Jumlah | 24.515.344.815 | 76.526.745.184 |
| b. Utang Pajak | | |
| <u>Entitas Induk:</u> | | |
| PPH Pasal 21 | - | 725.204.533 |
| PPH Pasal 25 | 305.039.670 | 197.865.930 |
| PPH Pasal 23 | 7.057.789 | 5.451.757 |
| PPH Pasal 4 ayat 2 | 40.821.403 | 22.795.336 |
| PPH Pasal 29 | 1.474.623.098 | 558.901.025 |
| PPN Keluaran | 6.495.141.817 | 42.579.800.955 |
| Pajak Daerah | 30.599.955 | 46.051.405 |
| Sub Jumlah | 8.353.283.732 | 44.136.070.941 |
| <u>Entitas Anak:</u> | | |
| PPH Pasal 29 | 662.171 | 774.986 |
| Sub Jumlah | 662.171 | 774.986 |
| Jumlah | 8.353.945.903 | 44.136.845.927 |
| c. Beban (Manfaat) Pajak : | | |
| | 2023 | 2022 |
| Beban Pajak Kini: | | |
| Entitas Induk | 10.863.945.497 | 8.039.821.460 |
| Entitas Anak | 63.901.420 | 60.428.280 |
| Sub Jumlah | 10.927.846.917 | 8.100.249.740 |
| Manfaat Pajak Tangguhan | | |
| Entitas Induk | (420.825.460) | (396.638.562) |
| Entitas Anak | 942.952 | (8.157.904) |
| Sub Jumlah | (419.882.507) | (404.796.466) |
| Jumlah | 10.507.964.410 | 7.695.453.274 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Laba Sebelum Pajak - Entitas Induk | 38.625.969.355 | 33.568.339.426 |
| Absorb (Laba) Rugi Anak Perusahaan | (411.955.722) | (245.405.494) |
| Laba Sebelum Koreksi Fiskal | 38.214.013.632 | 33.322.933.932 |
| Koreksi Fiskal: | | |
| <u>Perbedaan Temporer:</u> | | |
| Beban Manfaat Karyawan | 330.164.331 | (1.048.106.689) |
| Beban Penyisihan Piutang | (96.555.457) | 1.770.655.200 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 1.679.234.124 | 1.863.005.460 |
| Jumlah | 1.912.842.998 | 2.585.553.971 |
| <u>Perbedaan Permanen:</u> | | |
| Sumbangan Duka | 125.100.000 | 62.521.100 |
| Rumah Tangga | 613.770.228 | 520.309.455 |
| Entertainment | 226.127.131 | 525.574.410 |
| Promosi Lainnya | 193.553.500 | 205.399.500 |
| Denda/Klaim | 6.248.676 | 64.622.481 |
| Beban Telekomunikasi | 795.483.363 | 345.433.065 |
| Beban Rapat Dinas | 359.364.456 | 167.919.040 |
| Beban Non Usaha Lainnya | 1.828.691.708 | 1.831.798.056 |
| Pendapatan Luar Usaha Lain-lain | (3.368.350.385) | (2.940.791.000) |
| Pendapatan Jasa Giro dan Deposito | (160.892.553) | (146.631.713) |
| Beban Pajak Tahun Lalu | 8.635.617.688 | |
| Jumlah | 9.254.713.811 | 636.154.394 |
| Laba (Rugi) Fiskal | 49.381.570.442 | 36.544.642.298 |
| Laba (Rugi) Fiskal - Pembulatan | 49.381.570.442 | 36.544.643.000 |
| Taksiran pajak penghasilan | 10.863.945.497 | 8.039.821.460 |
| <u>Kredit Pajak:</u> | | |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | 5.833.648.785 | 4.179.741.515 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 2.591.109.954 | 2.113.983.340 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 964.563.660 | 1.187.195.580 |
| Kurang (Lebih) Bayar Pajak | 1.474.623.098 | 558.901.025 |

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab III, pasal 17 ayat (2), bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

| 2023 | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---|----------------------|
| | Saldo Awal | Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi | Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif | Saldo Akhir |
| Penyisihan Piutang | 937.943.756 | (21.242.201) | | 916.701.555 |
| Penyusutan | 1.429.871.170 | 369.431.507 | | 1.799.302.678 |
| Imbalan Kerja | 369.118.215 | 72.636.153 | (94.995.186) | 346.759.181 |
| Sub Jumlah | 2.736.933.141 | 420.825.460 | (94.995.186) | 3.062.763.414 |
| Entitas Anak | 27.724.011 | (942.953) | - | 26.781.058 |
| Jumlah | 2.764.657.152 | 419.882.507 | (94.995.186) | 3.089.544.472 |
| 2022 | | | | |
| | Saldo Awal | Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi | Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif | Saldo Akhir |
| Penyisihan Piutang | 566.710.155 | 371.233.601 | - | 937.943.756 |
| Penyusutan | 1.020.009.969 | 409.861.201 | - | 1.429.871.170 |
| Imbalan Kerja | 1.319.007.959 | (384.456.240) | (565.433.504) | 369.118.215 |
| Sub Jumlah | 2.905.728.083 | 396.638.562 | (565.433.504) | 2.736.933.141 |
| Entitas Anak | 19.566.107 | 8.157.904 | - | 27.724.011 |
| Jumlah | 2.925.294.190 | 404.796.466 | (565.433.504) | 2.764.657.152 |

19. BEBAN AKRUAL

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Usaha Jasa Pelayanan Kapal Lainnya | 3.639.389.568 | 10.066.542.236 |
| Usaha Permakanaan | 4.678.978.586 | 1.804.380.450 |
| Usaha Jasa | 6.686.877.319 | 8.318.984.375 |
| Umum dan Administrasi | 18.343.231.367 | 7.547.250.987 |
| Pembelian Persediaan | 881.825.338 | 1.143.609.664 |
| Usaha Non Jasa Pelayanan Kapal | 1.923.724.809 | 448.447.811 |
| Jumlah | 36.154.026.988 | 29.329.215.523 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Utang Lain-lain | 6.291.839.793 | 13.251.347.091 |
| b. Liabilitas Kontrak | 3.118.141.480 | 1.353.275.726 |
| Jumlah | 9.409.981.274 | 14.604.622.816 |
| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
| a. Utang Lain-lain | | |
| Biaya Pegawai | 2.044.219.257 | 9.115.318.556 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 841.772.123 | 775.952.310 |
| Uang Titipan | 613.474.737 | 724.672.920 |
| Lainnya | 2.792.373.676 | 2.635.403.305 |
| Jumlah | 6.291.839.793 | 13.251.347.091 |
| b. Liabilitas Kontrak | | |
| Usaha Jasa Pelayanan Kapal | 850.072.588 | 250.163.638 |
| Usaha Non Jasa Pelayanan Kapal | 1.783.482.002 | 829.917.341 |
| Lainnya | 484.586.890 | 273.194.746 |
| Jumlah | 3.118.141.480 | 1.353.275.726 |

21. LIABILITAS JANGKA PANJANG

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Sewa Pembiayaan | 10.427.093.158 | 13.888.131.800 |
| Dikurangi: | | |
| Bagian Lancar Jatuh Tempo 1 Tahun : | 4.519.052.786 | 5.519.000.800 |
| Bagian Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun | 5.908.040.372 | 8.369.131.000 |

Utang sewa pembiayaan merupakan kewajiban yang timbul akibat pembelian kendaraan untuk operasional maupun yang akan disewakan dengan cara angsuran atau sewa pembiayaan. (lihat catatan 12).

22. UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.307.105.190 dan Rp2.113.426.587.

Utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut terkait dengan pembayaran iuran kesehatan YKPP, iuran dana pensiun dan iuran BPJS Kesehatan yang diberikan kepada karyawan PT PELNI (Persero) yang diperbantukan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawannya sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No.06/2023. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen sesuai laporannya No. 2834/PSAK-TBA.AN/XII-2023 tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan aktuarial menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jumlah karyawan (orang) | 76 | 69 |
| Usia Pensiun | 56 Tahun | 56 Tahun |
| Tingkat Kematian | TMI - III (2019) Avg. | TMI - III (2019) Avg. |
| Tingkat Cacat | 0,02% dari TMI IV (2019) | 0,02% dari TMI IV (2019) |
| Tingkat Bunga Aktuarial | 6,79% IGSYC | 7,08% IGSYC |
| Tingkat Kenaikan Gaji | 5,00% per tahun | 5,00% per tahun |
| Tingkat Pengunduran Diri: | | |
| ◦ Usia 18-30 Tahun | 5% per tahun | 5% per tahun |
| ◦ Usia 31-40 Tahun | 4% per tahun | 4% per tahun |
| ◦ Usia 41-44 Tahun | 3% per tahun | 3% per tahun |
| ◦ Usia 45 - 52 Tahun | 1% per tahun | 1% per tahun |
| ◦ Usia 53 - 55 Tahun | 0% per tahun | 0% per tahun |

Beban (pendapatan) yang diakui dalam laba rugi sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|------------------------|
| Biaya Jasa Kini | 208.783.162 | 237.753.199 |
| Biaya Bunga | 121.381.169 | 374.940.504 |
| Biaya Jasa Lalu -Vested | - | (531.984.299) |
| Perubahan Program Manfaat (dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja) | - | (1.117.307.341) |
| Jumlah | 330.164.331 | (1.036.597.937) |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Nilai Kini Kewajiban Pada Awal Periode | 1.677.810.068 | 5.296.069.050 |
| Biaya Bunga | 121.381.169 | 374.940.504 |
| Biaya Jasa Kini | 208.783.162 | 237.753.199 |
| Pembayaran Manfaat | (37.023.547) | (11.508.752) |
| Biaya Jasa Lalu - Vested (dampak IFRICH) | - | (531.984.299) |
| Perubahan Program Manfaat (dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja) (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial | (394.772.755) | (1.117.307.341) |
| Nilai Kini Kewajiban pada Akhir Periode | 1.576.178.097 | 1.677.810.068 |

24. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Akta No. 7, tanggal 10 Juni 2009, Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto S.H., yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU- 43800.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 4 September 2009, rincian pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar) | Kepemilikan Saham (%) | Jumlah Nilai Saham |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| PT Pelni (Persero) | 2.000 | 99,50% | 2.000.000.000 |
| YKPP | 10 | 0,50% | 10.000.000 |
| Jumlah | 2.010 | 100,00% | 2.010.000.000 |

25. SALDO LABA

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Ditentukan Penggunaannya : | | |
| Saldo awal | 157.660.308.343 | 154.442.902.454 |
| Penambahan Cadangan Umum | 25.925.156.528 | 3.217.405.889 |
| Jumlah | 183.585.464.871 | 157.660.308.343 |
| b. Belum Ditentukan Penggunaannya : | | |
| Saldo awal | 25.925.156.528 | 3.217.405.889 |
| Cadangan umum | (25.925.156.528) | (3.217.405.889) |
| Laba tahun berjalan | 28.164.273.317 | 25.925.156.528 |
| Jumlah | 28.164.273.317 | 25.925.156.528 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

25. SALDO LABA (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, No. 8, tanggal 27 Juni 2023, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih SH., bahwa laba bersih PT Pelita Indonesia Djaya tahun buku 2022 sebesar Rp25.925156.528 digunakan sepenuhnya untuk Dana Cadangan PT Pelita Indonesia Djaya.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, No. 14, tanggal 27 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih SH., bahwa laba bersih PT Pelita Indonesia Djaya tahun buku 2021 sebesar Rp3.217.405.889 digunakan sepenuhnya untuk Dana Cadangan PT Pelita Indonesia Djaya.

26. KOMPONEN EKUITAS LAIN

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Awal | 1.067.260.689 | (937.458.100) |
| Keuntungan Aktuaria - neto | 299.777.568 | 2.004.718.789 |
| Saldo Akhir | 1.367.038.257 | 1.067.260.689 |

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo awal | | |
| Modal disetor | 131.582.144 | 5.000.000 |
| Bagian laba tahun lalu | 55.000.000 | 121.573.869 |
| Bagian laba tahun berjalan | 8.407.260 | 5.008.275 |
| Jumlah | 194.989.404 | 131.582.144 |

28. PENDAPATAN USAHA

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Jasa Bahan Permakanan | 370.385.911.239 | 312.738.275.208 |
| Jasa <i>Cleaning Services</i> | 56.128.556.986 | 46.204.581.556 |
| Jasa <i>Maintenance</i> | 28.216.678.047 | 8.738.753.855 |
| Jasa Pelayanan Kapal Lainnya | 1.149.908.625 | 1.291.112.250 |
| Jasa Sistem Komunikasi Kapal | 9.200.607.374 | 12.745.433.646 |
| Jasa Pengamanan | 26.161.216.170 | 21.666.211.799 |
| Jasa <i>Frontliner & Manage Service</i> | 27.971.640.395 | 24.029.267.741 |
| Jasa Penyewaan Kendaraan | 8.690.154.041 | 9.970.770.360 |
| Saldo - dipindahkan | 527.904.672.876 | 437.384.406.414 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

28. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Saldo - pindahan | 527.904.672.876 | 437.384.406.414 |
| Jasa Hiburan Band | 9.807.517.617 | 1.354.911.362 |
| Jasa <i>House Keeping</i> | 8.782.601.889 | 6.915.928.170 |
| Jasa Janitor | 4.177.604.461 | 3.787.882.814 |
| Jasa Wisata Bahari | 1.474.196.428 | 1.361.236.579 |
| Jasa Penyediaan Cover dan Kasur | 6.346.987.684 | 2.227.504.030 |
| Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya | 2.852.187.395 | 638.927.355 |
| Jasa Bongkar Muat | 4.542.796.914 | 3.755.103.452 |
| Wisma Tretes | 97.139.250 | 103.460.950 |
| Jumlah | 565.985.704.513 | 457.529.361.127 |

29. BEBAN POKOK USAHA

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Bahan Permakanan | 316.140.618.001 | 253.732.506.331 |
| <i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung | 47.985.682.125 | 42.710.600.543 |
| <i>Frontliner & Manage Service</i> | 25.616.951.172 | 23.975.429.669 |
| Pengamanan/Denkawal | 23.603.177.853 | 20.843.915.556 |
| <i>Maintenance</i> | 17.198.342.769 | 6.923.187.808 |
| Hiburan Band | 8.614.015.352 | 861.747.425 |
| <i>House Keeping</i> | 7.800.306.677 | 6.259.686.731 |
| Beban Penyusutan (catatan 12) | 7.637.453.894 | 5.889.308.012 |
| Sistem Komunikasi Kapal | 6.151.607.495 | 7.484.043.652 |
| Penyediaan <i>Cover dan</i> Kasur | 4.574.259.827 | 1.849.124.813 |
| Janitor | 3.434.140.434 | 3.148.298.002 |
| Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya | 2.127.312.514 | 1.678.136.299 |
| Wisata Bahari | 753.217.403 | 1.555.774.866 |
| Penyewaan Kendaraan | 715.714.289 | 2.070.391.689 |
| Bongkar Muat | 210.408.440 | 125.479.840 |
| Wisma Tretes | 88.251.000 | 87.444.000 |
| <i>Outsourcing</i> Lainnya | 4.084.832 | 112.868.869 |
| Beban Amortisasi (catatan 13) | - | 49.694.649 |
| Usaha Sampingan Lainnya | 1.498.710.782 | 300.593.976 |
| Jumlah | 474.154.254.859 | 379.658.232.730 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gaji, Tunjangan dan Lembur | 33.010.369.620 | 29.344.702.936 |
| Pajak | 8.859.045.171 | 926.595.832 |
| Penyusutan dan amortisasi (catatan 12 & 13) | 3.963.728.332 | 2.639.193.810 |
| Jamsostek | 2.199.116.589 | 1.548.064.996 |
| Konsultan | 1.791.429.987 | 1.231.790.096 |
| Asuransi | 1.614.301.035 | 1.536.970.551 |
| Air, Listrik dan Telekomunikasi | 1.415.051.339 | 875.182.676 |
| Perjalanan Dinas | 1.017.302.422 | 403.208.204 |
| Rumah Tangga | 904.235.559 | 645.911.355 |
| Software/Piranti Lunak | 710.321.064 | 643.238.081 |
| Administrasi Kantor | 561.050.932 | 416.650.970 |
| Sewa | 541.037.738 | 1.446.870.026 |
| Pemeliharaan | 513.990.107 | 688.723.414 |
| Pemasaran | 513.874.951 | 324.756.759 |
| Jamuan dan Sumbangan | 468.784.636 | 652.438.010 |
| Rapat | 410.513.446 | 242.257.540 |
| Perayaan | 392.304.141 | 599.805.767 |
| BBM | 379.234.196 | 350.648.868 |
| Perlengkapan Kantor | 340.250.047 | 455.401.881 |
| Kesehatan | 230.974.706 | 957.125.706 |
| Pengiriman | 200.817.589 | 234.943.174 |
| Pakaian Kerja | 152.339.875 | 135.459.200 |
| Kepedulian Lingkungan | 144.080.444 | 167.465.505 |
| Pajak PPh Pasal 4 (2) | 9.288.000 | - |
| Lainnya | 686.254.348 | 91.538.938 |
| Jumlah | 61.029.696.273 | 46.558.944.295 |

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Pendapatan Non Usaha: | | |
| Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Lihat Catatan 12) | 5.888.696.569 | 1.357.229.695 |
| Kenaikan Nilai Wajar | | |
| Properti Investasi (Lihat Catatan 11) | 3.275.470.385 | 2.899.166.000 |
| Pendapatan Jasa Giro | 221.906.028 | 221.714.705 |
| Pemulihan Cadangan Kerugian | | |
| Penurunan Nilai Piutang | 96.555.457 | - |
| Pendapatan Bunga Deposito | 1.125.213 | 1.107.890 |
| Lainnya | 185.827.894 | 1.998.179.624 |
| Sub Jumlah - dipindahkan | 9.669.581.546 | 6.477.397.914 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (lanjutan)

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Sub Jumlah - pindahan | 9.669.581.546 | 6.477.397.914 |
| Beban Non Usaha: | | |
| Beban Administrasi Bank | 748.890.839 | 179.575.390 |
| Beban Bunga | 572.935.932 | 591.650.075 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang | - | 1.807.736.583 |
| Lainnya | 468.863.169 | 1.585.001.891 |
| Sub Jumlah | 1.790.689.940 | 4.163.963.939 |
| Jumlah Pendapatan Non Usaha, Bersih | 7.878.891.605 | 2.313.433.975 |

Pendapatan non usaha lainnya tahun 2022, termasuk keuntungan perubahan perhitungan program manfaat dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja sebesar Rp1.048.106.689.

Beban non usaha lainnya tahun 2023, termasuk biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp302.786.925

Beban non usaha lainnya tahun 2022, termasuk pengakuan kelebihan estimasi pendapatan CS Kapal tahun 2021 sebesar Rp896.290.584.

32. INFORMASI SEGMENT USAHA

| Operasi Yang Dilanjutkan | 2023 | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Pendapatan Usaha | Beban Pokok Usaha | Beban Umum dan Administrasi | Laba (Rugi) Usaha |
| Usaha Permakanan | 370.385.911.239 | 316.139.718.001 | 36.051.142.716 | 18.195.050.522 |
| Usaha CS Kapal & Gedung | 56.128.556.986 | 48.140.136.982 | 5.308.974.739 | 2.679.445.264 |
| Usaha Jasa ITSM | 9.200.607.374 | 6.151.607.495 | 2.026.316.009 | 1.022.683.870 |
| Usaha Pengawalan dan Pengamanan | 26.161.216.170 | 23.603.177.853 | 1.700.030.895 | 858.007.422 |
| Usaha Front Liner & Manager Service | 27.971.640.395 | 25.556.999.301 | 1.604.731.420 | 809.909.674 |
| Jasa Maintenance | 28.216.678.047 | 17.197.799.659 | 7.322.968.371 | 3.695.910.017 |
| Usaha Kendaraan Dinas | 8.690.154.041 | 7.133.422.864 | 1.034.578.363 | 522.152.813 |
| Usaha Jasa House Keeping | 8.782.601.889 | 7.794.996.396 | 656.346.638 | 331.258.854 |
| Usaha Janitor | 4.177.604.461 | 3.434.140.434 | 494.094.169 | 249.369.859 |
| Usaha Sampingan Lainnya | 10.349.083.704 | 6.307.473.706 | 2.685.988.640 | 1.355.621.357 |
| Usaha Kapal Pinisi | 1.474.196.428 | 1.635.485.317 | (107.189.987) | (54.098.902) |
| Usaha Tretes | 97.139.250 | 159.086.200 | (41.168.941) | (20.778.009) |
| Usaha Jasa Hiburand Band | 9.807.517.617 | 8.614.558.462 | 792.821.361 | 400.137.794 |
| Usaha Anak PT.PBN | 4.542.796.914 | 2.285.652.189 | 1.500.061.880 | 757.082.845 |
| TOTAL | 565.985.704.513 | 474.154.254.859 | 61.029.696.273 | 30.801.753.380 |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

| 2022 | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Operasi Yang Dilanjutkan | Pendapatan Usaha | Beban Pokok Usaha | Beban Umum dan Administrasi | Laba (Rugi) Usaha |
| Usaha Permakanan | 312.738.275.209 | 253.731.514.331 | 38.421.401.670 | 20.585.359.208 |
| Usaha CS Kapal & Gedung | 46.204.581.556 | 43.026.342.710 | 1.003.676.623 | 2.174.562.223 |
| Usaha Jasa ITSM | 12.790.508.396 | 7.597.226.301 | 2.354.210.929 | 2.839.071.166 |
| Usaha Pengawasan dan Pengamanan | 21.666.211.799 | 20.975.208.446 | 463.128.389 | 227.874.964 |
| Usaha Front Liner & Manager Service | 24.124.547.213 | 23.953.720.756 | 114.492.326 | 56.334.130 |
| Jasa Maintenance | 8.784.320.355 | 6.923.187.808 | 120.917.782 | 1.740.214.764 |
| Usaha Kendaraan Dinas | 9.970.770.360 | 7.518.363.134 | 517.205.424 | 1.935.201.801 |
| Usaha Jasa House Keeping | 6.915.928.170 | 6.259.686.731 | 439.830.052 | 216.411.387 |
| Usaha Janitor | 3.787.882.814 | 3.151.582.894 | 426.464.728 | 209.835.192 |
| Usaha Sampingan Lainnya | 3.971.622.914 | 2.430.380.261 | 1.032.980.844 | 508.261.809 |
| Usaha Kapal Pinisi | 1.361.236.579 | 1.555.774.866 | (130.384.611) | (64.153.676) |
| Usaha Tretes | 103.460.950 | 104.923.000 | (979.904) | (482.146) |
| Usaha Jasa Hiburand Band | 1.354.911.362 | 861.747.425 | 330.531.276 | 162.632.662 |
| Usaha Anak PT.PBN | 3.755.103.452 | 1.568.574.066 | 1.465.468.767 | 721.060.619 |
| TOTAL | 457.529.361.127 | 379.658.232.730 | 46.558.944.295 | 31.312.184.102 |

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK RERELASI

a. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi:

| No. | Pihak-Pihak Berelasi | Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi | Transaksi |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 1) | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Entitas Induk | Utang piutang, pendapatan dan beban |
| 2) | PT Rumah Sakit Pelni | Entitas Asosiasi | Uang muka kerja usaha pemasangan aplikasi rental mobil dan jasa antar jemput pasien |
| 3) | PT Pelita Bandar Nasional | Entitas Anak | Penyertaan, utang-piutang |
| 4) | PT PBM Sarana Bandar Nasional | Entitas Dalam 1 Grup | Sewa Mobil |
| 5) | PT Sarana Bandar Logistik | Entitas Dalam 1 Grup | Sewa Mobil |
| 6) | PT Sarana Bandar Indotrading | Entitas Dalam 1 Grup | Sewa Mobil |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT

| Keterangan 1 | 2023 2 | 2022 3 | Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Kas dan Setara Kas (KS) | 42.429.217.673 | 22.792.560.464 | 86,15 |
| Piutang Usaha (PU) | 61.089.580.461 | 59.237.371.656 | 3,13 |
| Persediaan | 10.249.374.219 | 9.880.441.615 | 3,73 |
| Aset Lancar (AL) | 254.908.853.584 | 256.230.707.200 | (0,52) |
| Penyusutan dan Amortisasi (PA) | 11.601.182.227 | 8.578.196.472 | 35,24 |
| Jumlah Aset (JA) | 328.319.381.090 | 333.651.427.369 | (1,60) |
| Liabilitas Jk Pendek (KL) | 103.206.291.583 | 134.696.752.010 | (23,38) |
| Liabilitas Jk Panjang (KJP) | 9.791.323.658 | 12.160.367.655 | (19,48) |
| Jumlah Liabilitas (JK) | 112.997.615.241 | 146.857.119.665 | (23,06) |
| Modal Kerja Bersih (MKB)=(AL-KL) | 151.702.562.001 | 121.533.955.190 | 24,82 |
| Akumulasi Saldo Laba (RE) | 211.749.738.188 | 183.585.464.871 | 15,34 |
| Ekuitas (EK) | 215.321.765.849 | 186.794.307.704 | 15,27 |
| Laba Tahun Berjalan (LRB) | 28.172.680.577 | 25.930.164.803 | 8,65 |
| Modal Sendiri (MS) = (EK - LRB) | 187.149.085.272 | 160.864.142.902 | 16,34 |
| Pajak Penghasilan (PJ) | 10.927.846.917 | 8.100.249.740 | 34,91 |
| Jumlah Pendapatan Usaha (JPU) | 565.985.704.513 | 457.529.361.127 | 23,70 |
| Laba Kotor (LK) | 91.831.449.653 | 77.871.128.397 | 17,93 |
| Bunga (BU) | 572.935.932 | 591.650.075 | (3,16) |
| EBIT=(LRB+BU+PJ) | 39.673.463.426 | 34.622.064.618 | 14,59 |
| EBITDA=(EBIT+PA) | 51.274.645.653 | 43.150.566.441 | 18,83 |

| Keterangan 1 | 2023 2 | 2022 3 | Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3 |
|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| Rasio Likuiditas | | | |
| Rasio Lancar (AL/KL), % | 246,99 | 190,23 | 29,84 |
| Rasio Cepat (KS+PU)/KL, % | 100,30 | 60,90 | 64,70 |
| Rasio Kas (KS/KL), % | 41,11 | 16,92 | 142,95 |
| Rasio Leverage | | | |
| Rasio Liabilitas atas Aset (JK/JA), % | 34,42 | 44,02 | (21,81) |
| Rasio Liabilitas atas Ekuitas (JK/EK), % | 52,48 | 78,62 | (33,25) |
| Rasio Liabilitas Jk.Pendek thd Ekuitas (KJP/EK), % | 47,93 | 72,11 | (33,53) |

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

| Keterangan 1 | 2023 2 | 2022 3 | Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3 |
|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| Rasio Aktivitas | | | |
| Rasio Perputaran Persediaan (JPU/SD), Kali | 55 | 46 | 19,25 |
| Rasio Perputaran Aset (JPU/JA), Kali | 2 | 1 | 25,71 |
| Rasio Penagihan Rata ² (PU/JPU x 365), Hari | 39 | 47 | (16,63) |
| Rasio Profitabilitas | | | |
| Rasio Imbalan Ekuitas (LRB/MS), % | 15,05 | 16,12 | (6,61) |
| Rasio Imbalan Investasi (EBIT+PA)/JA, % | 15,62 | 12,93 | 20,76 |
| Rasio Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK/JPU),% | 16,23 | 17,02 | (4,67) |
| Rasio Marjin Laba atas Penjl. (LRB/JPU),% | 4,98 | 5,67 | (12,17) |
| Rasio EBITDA atas Penjualan, % | 9,06 | 9,43 | (3,94) |
| Rasio Z-Score Model | | | |
| Z-Score Model | | | |
| $Z = (6,56 \times MKB)/JA + (3,26 \times RE)/JA + (6,72 \times EBIT)/JA + (1,05 \times EK)/JK$ | 7,99 | 7,14 | 0,12 |

- Jika hasilnya $Z < 1,1$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Pailit.
- Jika hasilnya $1,1 > Z < 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi *Gray Area*.
- Jika hasilnya $Z > 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

1) Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya secara umum mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022. Hal ini tercermin dari rasio cepat mengalami kenaikan sebesar 64,70% dari semula 60,90% menjadi 100,30%, rasio kas mengalami kenaikan 142,95% dari semula 16,92% menjadi 41,11%, dan rasio lancar mengalami kenaikan 29,84% dari semula 190,23% menjadi 246,99%.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

- 1) Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. (lanjutan)

Kenaikan rasio likuiditas tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 86,15% dari semula Rp22.792.560.464 menjadi Rp42.429.217.673, kenaikan piutang usaha sebesar 3,13% dari semula Rp59.237.371.656 menjadi Rp61.089.580.461, hal ini juga dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 23,38% dari semula Rp134.696.752.010 menjadi 103.206.291.583, meskipun aset lancar mengalami penurunan sebesar 0,52% dari semula Rp256.230.707.200 menjadi 254.908.853.581.

- 2) Rasio Leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan Perusahaan tahun 2023 dalam memenuhi seluruh kewajibannya apabila dilakukan likuidasi pada saat ini secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Hal ini tercermin dari hasil perhitungan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset mengalami penurunan 21,81% dari semula 44,02% menjadi 34,42%, rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan 33,25% dari semula 78,62% menjadi 52,48% serta rasio jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas meningkat 33,53% dari semula 72,11% menjadi 47,93%.

Peningkatan tingkat kemampuan Perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya dipengaruhi oleh kenaikan jumlah ekuitas sebesar 15,27% dari semula Rp186.794.307.704 menjadi Rp215.321.765.847 diikuti dengan penurunan jumlah liabilitas sebesar 23,06% dari semula Rp 146.857.119.665 menjadi Rp112.997.615.241 yang dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 23,38% dari semula 134.696.752.010 menjadi Rp103.206.291.583 dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 19,48% dari semula 12.160.367.655 menjadi Rp9.791.323.658, meskipun jumlah aset mengalami penurunan sebesar 1,61% dari semula 333.651.427.369 menjadi Rp328.292.600.029.

- 3) Rasio Aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Tingkat efektivitas perusahaan tahun 2023 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2022 dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada, hal ini tercermin dari kenaikan perputaran persediaan sebesar 19,25% dari semula 46 kali menjadi 55 kali, kenaikan perputaran aset 25,71% dari semula 1 kali menjadi 2 kali, dan kenaikan rasio penagihan rata-rata piutang sebesar 16,63% dari semula 47 hari menjadi 39 hari.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan persediaan sebesar 3,37% dari semula Rp9.880.441.615 menjadi Rp10.249.374.216, kenaikan piutang usaha sebesar 3,13% dari semula Rp59.237.371.656 menjadi Rp61.089.580.461 yang diikuti oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar 23,70% dari semula 457.529.361.127 menjadi Rp565.985.704.513 meskipun jumlah aset mengalami penurunan sebesar 1,60% dari semula Rp333.651.427.369 menjadi

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

- 4) Rasio Profitabilitas atau rasio kemampuan laba perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya mengalami penurunan, hal ini tercermin dari penurunan hasil imbalan (*return*) terhadap ekuitas sebesar 6,61% dari semula 16,12% menjadi 15,05%, kenaikan rasio imbalan terhadap investasi sebesar 18,77 dari semula 12,93% menjadi 15,36%, penurunan rasio margin laba kotor atas penjualan sebesar 4,67% dari semula 17,02% menjadi 16,23%, penurunan rasio margin laba bersih atas penjualan sebesar 12,17% dari semula 5,67% menjadi 4,98%, dan penurunan rasio EBITDA atas penjualan sebesar 5,53% dari semula 9,43 menjadi 8,91%.

Peningkatan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya pada tahun 2023 dipengaruhi peningkatan laba tahun berjalan sebesar 8,65% dari semula Rp25.930.164.803 menjadi Rp28.172.680.577, peningkatan EBITDA sebesar 18,83% dari semula Rp43.150.566.441 menjadi Rp51.274.645.653, dan pendapatan usaha meningkat 23,70% dari semula Rp457.529.361.127 menjadi Rp565.985.704.513 yang diikuti kenaikan beban usaha mengalami sebesar 24,89% dari semula Rp379.658.232.730 menjadi Rp474.154.254.859 dan beban umum dan administrasi meningkat sebesar 31,08% dari semula Rp46.558.944.295 menjadi Rp61.011.120.273.

- 5) Rasio Z Score

Dari hasil perhitungan Z-score model tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 7,99 dan 7,14 maka sesuai hipotesis dengan perolehan angka $Z > 2.6$, bahwa mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

Peningkatan Z Score pada tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar 8,65% dari Rp25.930.164.803 menjadi Rp28.172.680.577 sehingga mengakibatkan EBIT meningkat sebesar 14,59% dari Rp34.622.064.618 menjadi Rp39.673.463.426, modal kerja bersih meningkat 24,82% dari Rp121.533.955.190 menjadi Rp151.702.561.998, saldo laba (*retained earning*) meningkat sebesar 15,34% dari Rp183.585.464.871 menjadi Rp211.749.738.188, ekuitas meningkat sebesar 15,27% dari Rp186.794.307.704 menjadi Rp215.321.765.847, dan jumlah aset menurun sebesar 1,60% dari Rp333.651.427.369 menjadi Rp328.319.381.087.

35. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan yang berdampak material terhadap laporan keuangan PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

36. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2024.

INFORMASI TAMBAHAN

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 31 Des. 2023 | 31 Des. 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | 36.276.662.965 | 18.237.843.683 |
| Piutang Usaha | 59.701.388.569 | 58.592.971.547 |
| Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.071.023.332 dan Rp2.300.368.133 | | |
| Aset Keuangan Lancar Lainnya | 6.356.750.197 | 3.440.508.397 |
| Persediaan | 10.249.374.216 | 9.880.441.615 |
| Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka | 27.328.743.335 | 21.990.698.016 |
| Aset Kontrak | 81.323.760.263 | 61.844.852.194 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 24.515.344.815 | 76.526.745.184 |
| Jumlah Aset Lancar | 245.752.024.360 | 250.514.060.636 |
| ASET TIDAK LANCAR | | |
| Penyertaan Pada Entitas Asosiasi | 9.554.480.756 | 6.447.525.034 |
| Properti Investasi | 23.217.000.000 | 19.941.529.615 |
| Aset Tetap | 45.052.057.094 | 52.132.080.858 |
| Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp29.650.743.364 dan Rp25.120.881.790 | | |
| Aset Takberwujud, bersih | 1.503.446.612 | 2.005.878.621 |
| Aset Hak Guna, bersih | - | - |
| Aset Pajak Tangguhan | 3.062.763.414 | 2.736.933.141 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 82.389.747.876 | 83.263.947.268 |
| JUMLAH ASET | 328.141.772.236 | 333.778.007.904 |

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2023
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 31 Des. 2023 | 31 Des. 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | |
| Pinjaman Jangka Pendek | 22.000.000.000 | - |
| Utang Usaha | 22.769.284.633 | 41.107.066.944 |
| Utang Pajak | 8.353.283.732 | 44.136.070.941 |
| Beban Akrua | 35.915.049.972 | 29.233.322.381 |
| Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang | | |
| - Sewa Pembiayaan | 4.519.052.786 | 5.519.000.800 |
| - Liabilitas Kontrak Sewa | | - |
| Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya | 9.131.059.011 | 14.259.453.625 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 102.687.730.134 | 134.254.914.691 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | |
| Utang Pihak Berelasi | 2.843.047.189 | 2.813.426.585 |
| Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi: | | |
| - Sewa Pembiayaan | 5.908.040.372 | 8.369.131.000 |
| - Liabilitas Kontrak Sewa | | - |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 1.576.178.097 | 1.677.810.068 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 10.327.265.658 | 12.860.367.653 |
| JUMLAH LIABILITAS | 113.014.995.792 | 147.115.282.344 |
| EKUITAS | | |
| Modal Saham | 2.010.000.000 | 2.010.000.000 |
| Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2022 dan 2021. | | |
| Cadangan Umum | 183.585.464.869 | 157.660.308.343 |
| Saldo Laba | 28.164.273.317 | 25.925.156.528 |
| Komponen Ekuitas Lainnya | 1.367.038.257 | 1.067.260.689 |
| JUMLAH EKUITAS | 215.126.776.443 | 186.662.725.560 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 328.141.772.235 | 333.778.007.904 |

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan Usaha | 561.442.907.599 | 453.774.257.675 |
| Beban Usaha | (471.868.602.670) | (378.089.658.664) |
| LABA KOTOR | 89.574.304.928 | 75.684.599.011 |
| Beban Administrasi dan Umum | (58.904.668.820) | (44.638.562.555) |
| LABA USAHA | 30.669.636.109 | 31.046.036.456 |
| Pendapatan (Beban) Non Usaha | 7.937.757.246 | 2.522.302.970 |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 38.607.393.355 | 33.568.339.426 |
| Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan: | | |
| Kini | (10.863.945.497) | (8.039.821.460) |
| Tangguhan | 420.825.460 | 396.638.562 |
| Jumlah | (10.443.120.038) | (7.643.182.898) |
| LABA TAHUN BERJALAN | 28.164.273.317 | 25.925.156.528 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pengukuran Kembali Imbalan Kerja : | | |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial | 394.772.754 | 2.570.152.293 |
| Efek pajak keuntungan (kerugian) Terkait | (94.995.186) | (565.433.504) |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain | 299.777.568 | 2.004.718.789 |
| Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 28.464.050.885 | 27.929.875.316 |
| LABA BERSIH PER SAHAM DASAR | 14.161.219 | 13.895.460 |

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDIK SAJA

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Laba (Rugi) | | Komponen Ekuitas Lainnya | Jumlah Ekuitas |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Dicadangkan | Belum Dicadangkan | | |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 2.010.000.000 | 154.442.902.453 | 3.217.405.889 | (937.458.100) | 158.732.850.243 |
| Cadangan Umum | - | 3.217.405.889 | (3.217.405.889) | - | - |
| Laba Tahun Berjalan | - | - | 25.925.156.528 | - | 25.925.156.528 |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuaria | - | - | - | 2.004.718.789 | 2.004.718.789 |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 2.010.000.000 | 157.660.308.343 | 25.925.156.528 | 1.067.260.689 | 186.662.725.560 |
| Cadangan Umum | - | 25.925.156.528 | (25.925.156.528) | - | - |
| Laba Tahun Berjalan | - | - | 28.164.273.317 | - | 28.164.273.317 |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuaria | - | - | - | 299.777.568 | 299.777.568 |
| Saldo per 31 Desember 2023 | 2.010.000.000 | 183.585.464.871 | 28.164.273.317 | 1.367.038.257 | 215.126.776.445 |

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan Kas dari Pelanggan | 485.838.679.088 | 462.626.635.337 |
| Pembayaran Kas kepada Pemasok | (446.009.975.133) | (422.151.407.524) |
| Pembayaran Operasional | (34.889.354.547) | (10.509.602.895) |
| Pengeluaran Lain-lain | (4.923.960.095) | (8.013.503.325) |
| Pembayaran Pajak | (5.902.034.701) | (13.389.542.964) |
| Penerimaan Lain-lain | 1.136.054.221 | 146.631.713 |
| Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | (4.750.591.167) | 8.709.210.342 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penambahan Aset Tetap | (892.134.898) | (15.802.285.637) |
| Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap | 4.376.545.346 | 2.028.000.000 |
| Penyertaan Invertasi Pada Entitas Asosiasi | (2.695.000.000) | - |
| Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | 789.410.448 | (13.774.285.637) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan Pinjaman Bank | 126.500.000.000 | 8.947.819.716 |
| Pembayaran Utang Bank | (104.500.000.000) | (13.316.529.526) |
| Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 22.000.000.000 | (4.368.709.810) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 18.038.819.281 | (9.433.785.105) |
| KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL | 18.237.843.683 | 27.671.628.788 |
| KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR | 36.276.662.965 | 18.237.843.683 |

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PID)

Ruko Cempaka Mas Blok 0 No.5
Jl. Letjen Suprpto, Kemayoran

📞 021 42883720 - 42883740
📧 pelniservices

📌 PT. Pelita Indonesia Djaya
✉ corporate@pidc.co.id
pt.pidc@gmail.com